



AKUNTANSI INDUSTRI

untuk SMK JILID 2

Ali Irfan

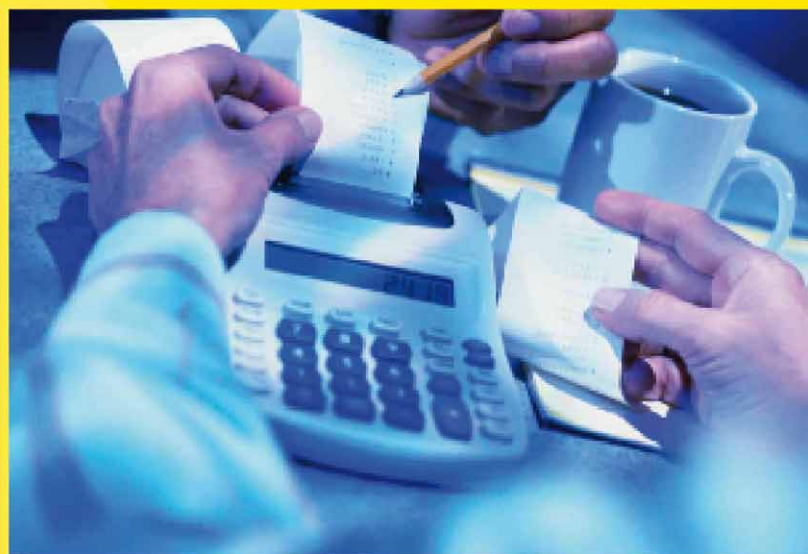


Ali Irfan

JILID 2

Akuntansi Industri

untuk
Sekolah Menengah Kejuruan



Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah

Departemen Pendidikan Nasional

Ali Irfan

AKUNTANSI INDUSTRI

JILID 2

SMK



Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan Nasional

Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional
Dilindungi Undang-undang

AKUNTANSI INDUSTRI

JILID 2

Untuk SMK

Penulis : Ali Irfan

Perancang Kulit : TIM

Ukuran Buku : 18,2 x 25,7 cm

IRF IRFAN, Ali

a Akuntansi Industri Jilid 2 untuk SMK oleh Ali Irfan ----
Jakarta : Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan,
Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah,
Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

x, 312 hlm

Daftar Pustaka : Lampiran. A

ISBN : 978-602-8320-08-5

ISBN : 978-602-8320-10-8

Diterbitkan oleh

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan Nasional

Tahun 2008

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2008, telah melaksanakan penulisan pembelian hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui *website* bagi siswa SMK.

Buku teks pelajaran ini telah melalui proses penilaian oleh Badan Standar Nasional Pendidikan sebagai buku teks pelajaran untuk SMK yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2008.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh penulis yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para pendidik dan peserta didik SMK di seluruh Indonesia.

Buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional tersebut, dapat diunduh (*download*), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dengan ditayangkannya *soft copy* ini akan lebih memudahkan bagi masyarakat untuk mengaksesnya sehingga peserta didik dan pendidik di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Selanjutnya, kepada para peserta didik kami ucapkan selamat belajar dan semoga dapat memanfaatkan buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta,
Direktur Pembinaan SMK

Pengantar Penulis

Akuntansi adalah sebuah disiplin yang terus berkembang. Baik dalam tataran akademis maupun praktis. Perkembangan dalam tataran praktis terutama dipicu oleh perkembangan dunia bisnis yang—dalam era kesejagadan yang didukung oleh perkembangan teknologi informasi—terus berubah dengan kecepatan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Kondisi seperti ini tentu saja berpengaruh pula terhadap praktik-praktik akuntansi.

Pada situasi seperti ini lulusan sekolah kejuruan—termasuk dari program studi akuntansi—dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai agar dapat bersaing dalam pasar kerja yang relevan. Oleh karena itulah diharapkan buku ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kompetensi yang dimaksud. Manfaat buku ini diharapkan tidak hanya akan diperoleh para siswa, namun juga bagi para guru dan staf pengajarnya, maupun bagi masyarakat yang berminat pada bidang akuntansi pada umumnya. Pengalaman Penulis sebagai praktisi pada DU/DI serta akademisi di bidang akuntansi dan pajak diharapkan pula akan dapat sedikit mewarnai buku ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya buku ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Dr. Joko Soetrisno, MM, Direktur Pembinaan SMK DEPDIKNAS.
2. Dr. Rosidi, MM., Ak, Rektor Universitas Gajayana Malang.
3. Drs. Agus Sambodo, SH, BKP, Konsultan Pajak dan Dosen Universitas Gajayana Malang.
4. Drs. Ahmad Dahlan, MSA., Ak., BKP., Konsultan Pajak dan Dosen Universitas Gajayana Malang.
5. Ima, serta semua staf dan karyawan Cipta Jasatama *Management & Tax Consultants* Malang.

Akhirnya, masukan berupa kritik dan saran amat diharapkan agar dapat terus menyempurnakan karya yang penuh kelemahan ini. Semoga Allah SWT meridhai amal kita semua.

Penulis

Daftar Isi

Pengantar Direktur Pembinaan SMK	i
Pengantar Penulis	ii
Lembar Pengesahan	iii
Daftar Isi	iv
Sinopsis	vii
Deskripsi Isi Penulisan	viii
Peta Kompetensi	ix
BAGIAN 1	Akuntansi untuk Perusahaan Manufaktur
Bab 1	Akuntansi untuk Perusahaan Manufaktur
	Karakteristik Perusahaan Manufaktur
	Masalah Khusus Perusahaan Manufaktur
	Akuntansi Perusahaan Manufaktur
	Membuat Laporan Beban pokok produksi (Cost of Goods <i>Manufactured Statement</i>)
	Istilah Baru (Glosari)
	Laporan Beban pokok produksi (Cost of Goods <i>Manu-factured Statement</i>): Laporan Beban pokok produksi Selama Satu Periode
	Menghitung Beban pokok produksi dan Beban pokok penjualan
	Prosedur Akuntansi Biaya (Cost Accounting Procedure)
	Istilah Baru (Glosari)
	Tugas
Bab 2	Beban pokok produksi Pesanan (<i>Job Order Costing</i>)
	Penentuan Biaya Berdasarkan Pesanan dan Penentuan Biaya Berdasarkan Proses
	Ilustrasi Sistem Akuntansi Biaya Perpetual
	Penerapan <i>Job Order Costing</i> di Departemen
	Istilah Baru (Glosari)

	Contoh Soal dan Penyelesaiannya	66
	Bahan untuk Tugas	73
Bab 3	Beban pokok produksi Proses (<i>Process Costing</i>)	87
	Penekanan Akuntansi Berdasarkan Proses	89
	Contoh Akuntansi Biaya Berdasarkan Proses	90
	Istilah Baru (Glosari)	96
	Bahan Untuk Tugas	96
	Laporan Beban pokok produksi Berdasarkan Proses	104
	Tujuan Laporan Beban pokok produksi	105
	Tahapan dalam Laporan Beban pokok produksi	105
	Istilah Baru (Glosari)	110
	Contoh Soal dan Penyelesaiannya	110
	Bahan Untuk Tugas	113
BAGIAN 2	Akuntansi untuk Industri Tertentu dan Masalah-Masalah Khusus	122
Bab 1	Akuntansi Untuk Sewa Guna Usaha (<i>Leasing</i>)	124
	Terminologi (Glosari)	126
	Pengertian Leasing	127
	Keuntungan Leasing	128
	Klasifikasi Leasing	129
	Perbedaan Antara Perjanjian Leasing dengan Perjanjian Lainnya	132
	Akuntansi Leasing	134
	Formula yang Digunakan untuk Menghitung Pembayaran <i>Leasing</i>	135
	Prosedur Mekanisme Leasing	136
	Perlakuan Akuntansi oleh Lessee Menurut PSAK No. 30	137
	Penyusutan Menurut Perpajakan Indonesia	138
	Aspek Perpajakan yang Berkaitan dengan Leasing	139
	Pokok Perjanjian Leasing	144
	Soal Latihan	165
Bab 2	Akuntansi Untuk Perusahaan Konstruksi	169
	Terminologi (Glosari)	169
	Metode Akuntansi	171
	Metode Persentase Penyelesaian	173
	Penyajian Laporan Keuangan pada Metode Persentase Penyelesaian	180
	Metode Kontrak Selesai	183
	Kerugian dalam Kontrak Jangka Panjang	185
	Kerugian dalam Tahun Berjalan	186
	Kerugian pada Kontrak yang Merugi	187
	Aspek Perpajakan	190
Bab 3	Akuntansi untuk Koperasi	194
	Gambaran Umum Usaha	195

	Karakteristik Badan Usaha Koperasi	195
	Usaha dan Jenis-Jenis Koperasi	196
	Terminologi (Glosari)	197
	Perlakuan Akuntansi	198
	Tahap Pencatatan Akuntansi Koperasi	212
Bab 4	Akuntansi untuk Perbankan	227
	Gambaran Umum Usaha	228
	Karakteristik Usaha Perbankan	228
	Jenis Jasa Perbankan	229
	Terminologi (Glosari) Khusus dalam Perbankan	233
	Perlakuan Akuntansi dalam Perbankan	235
	Akuntansi Aktiva	235
	Akuntansi Kewajiban	250
	Akuntansi Ekuitas	259
	Akuntansi Pendapatan & Beban	261
	Pelaporan Keuangan pada Bank	262
	Kerangka Laporan Keuangan Bank	264
Bab 5	Akuntansi Perbankan Syariah	276
	Akuntansi Perbankan Syariah	277
	Keunikan Perbankan Syariah	280
	Jenis Produk Bank Syariah	282
	Terminologi (Glosari) dalam Perbankan Syariah	293
	Perlakuan Akuntansi dalam Perbankan Syariah	300
	Akuntansi Aktiva	300
	Akuntansi Kewajiban	338
Bab 6	Akuntansi untuk Konsinyasi	343
	Pengertian Penjualan Konsinyasi	343
	Akuntansi Penjualan Konsinyasi	344
	Bagaimana Kalau Barang yang Dititipkan (Barang Konsinyasi) masih tersisa?	350
	Soal dan Penyelesaian	355
Bab 7	Akuntansi untuk Penjualan Angsuran	358
	Pengertian Penjualan Angsuran	358
	Perhitungan Bunga (<i>Interest</i>) pada Penjualan Angsuran dan Pencatatannya	359
	Perlakuan Akuntansi Lainnya	363
	Pembatalan Penjualan Angsuran	368
	Laporan Keuangan	370
	Penjualan Barang Tidak Bergerak	372
	Penjualan Barang Bergerak	375
	Laporan Keuangan Jika Perusahaan Melakukan Penjualan Reguler dan Penjualan Angsuran	378
	Soal dan Penyelesaian	380
Bab 8	Akuntansi untuk Kantor Pusat dan Kantor Cabang	383
	Akuntansi Kantor Agen	384
	Akuntansi Kantor Cabang	388
	Soal dan Penyelesaian	395
Bab 9	Masalah-Masalah Khusus Antara Kantor Pusat	400

	dan Kantor Cabang	
	Pengiriman Barang Dagangan ke Kantor Cabang dengan Nota di Atas Harga Pokok	400
	Pengiriman Uang atau Barang Dagangan Antar Kantor Cabang	403
	Soal dan Penyelesaian	406
Bab 10	Hubungan Kantor Pusat dan Kantor Cabang di Luar Negeri	409
	Pengertian	409
	Penjabaran ke Dalam Mata Uang yang Dipakai Kantor Pusat	410
	Tahap-Tahap dalam Penyusunan Laporan Keuangan Gabungan	410
	Aspek Perpajakan	416
	Soal dan Penyelesaian	418
Penutup		421
Daftar Pustaka		A1-A2

Sinopsis

Praktik akuntansi berkembang seiring dengan perkembangan dunia usaha yang amat cepat. Hal ini tidak dapat dihindari, karena salah satu fungsi akuntansi adalah sebagai penyampai informasi finansial bagi para pengambil keputusan yang berkepentingan. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sendiri, sebagai dasar dan acuan dalam penerapan akuntansi, juga terus berubah dan direvisi seiring dinamika dunia bisnis.

Buku ini akan mencoba memberikan pemahaman tentang akuntansi pada perusahaan manufaktur, perusahaan/industri tertentu yang makin banyak pelakunya dalam praktik, serta akuntansi untuk masalah-masalah tertentu. Penyusunan buku ini juga didorong oleh pengamatan Penulis berdasarkan pengalaman sekitar tujuh tahun sebagai asesor uji kompetensi bidang akuntansi SMK di Jawa Timur, yang memberikan kesan bahwa siswa belum diberikan materi terkini sesuai yang diterapkan oleh Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) berdasarkan SAK. Boleh jadi hal ini disebabkan oleh minimnya literatur yang dapat dijadikan rujukan oleh para guru di SMK.

Pembahasan buku ini meliputi “semua” jenis akuntansi yang dihadapi oleh DU/DI dengan memperhatikan praktiknya di Indonesia yang sesuai dengan SAK; yang terdiri dari:

- ☞ Akuntansi Untuk Perusahaan Manufaktur.
- ☞ Akuntansi Untuk Sewa Guna Usaha (Leasing).
- ☞ Akuntansi Untuk Perusahaan Konstruksi.
- ☞ Akuntansi Untuk Perbankan.
- ☞ Akuntansi Untuk Koperasi.
- ☞ Akuntansi Untuk Konsinyasi.
- ☞ Akuntansi Untuk Penjualan Angsuran
- ☞ Akuntansi Untuk Kantor Pusat dan Kantor Cabang.

Buku ini juga dilengkapi juga dengan contoh-contoh kasus agar dapat lebih memahami materi yang dibahas serta dapat dipakai oleh guru sebagai latihan untuk siswa.

Deskripsi Isi Penulisan

Buku ini ditulis dengan maksud mendekatkan siswa kepada dunia praktik akuntansi pada dunia kerja yang nantinya akan mereka masuki. Dari pengalaman penulis berinteraksi dengan SMK selama hampir sepuluh tahun—baik sebagai asesor uji kompetensi, pendamping praktik kerja industri, maupun sebagai instruktur bidang akuntansi dan perpajakan bagi guru-guru SMK—kesulitan yang paling banyak dikeluhkan oleh para guru dan siswa adalah kurangnya literatur dan bahan bacaan yang dapat dipakai sebagai acuan untuk memahami akuntansi dan pajak sesuai perkembangannya dalam dunia praktik pada DU/DI. Amat jarang—kalau tidak dapat dikatakan belum ada—buku pegangan pengajaran di SMK yang membahas secara komprehensif materi akuntansi yang dikaitkan langsung dengan aspek perpajakannya, seperti yang nantinya akan mereka temui ketika mereka bekerja, sehingga dengan buku dan bahan ajar yang ada para guru memberikan materi yang sebagian sudah tidak sesuai lagi dengan praktik pada DU/DI. Ironisnya, siswa SMK sebenarnya disiapkan dan ‘diproses’ agar nantinya mampu langsung bekerja pada bidang yang relevan dengan yang mereka pelajari di SMK. Oleh karena itu buku ini diharapkan dapat berkontribusi untuk sedikit menutup celah yang menganga tersebut.

Sistematika penyajian buku ini adalah sebagai berikut. Bagian 1 terdiri dari tiga bab yang membahas akuntansi untuk perusahaan manufaktur. Bagian 2 berisi sepuluh bab yang membahas akuntansi pada industri tertentu, misalnya akuntansi untuk perusahaan konstruksi, akuntansi untuk koperasi, maupun akuntansi untuk perbankan. Selain itu dibahas pula akuntansi untuk masalah-masalah khusus tertentu seperti akuntansi untuk *leasing*, penjualan angsuran, konsinyasi. Diharapkan materi yang dibahas dapat memberikan pemahaman yang cukup lengkap dan komprehensif, namun diusahakan pula agar materi yang diberikan tidak terlalu *advance*, sehingga masuk ke wilayah yang seharusnya diberikan untuk S1. Kendati sudah diusahakan sedemikian rupa, namun bisa jadi, secara tidak disadari pembahasan materi telah memasuki wilayah tersebut. Yang ingin dituju sebenarnya adalah, sebagaimana telah dinyatakan di depan, agar siswa memperoleh gambaran tentang praktik-praktik akuntansi pada berbagai bidang usaha yang saat ini makin banyak dan beragam serta berkembang pesat aplikasinya; dan nantinya “rimba” seperti itulah yang akan menjadi lahan kerja selepas siswa dari SMK.

Peta Kompetensi

1. Peta Kompetensi
 - K1. Mengelola Proses Kredit
 - K2. Mengelola Kartu Piutang
 - K3. Mengelola Kartu Persediaan Supplies
 - K4. Mengelola Kartu Persediaan Barang Jadi
 - K5. Mengelola Administrasi Gaji & Upah
 - K6. Mengelola Kartu Biaya Produksi
 - K7. Mengelola Kartu Persediaan Bahan Baku
 - K8. Mengelola Administrasi Kas Bank
 - K9. Mengelola Administrasi Dana Kas Kecil
 - K10. Mengelola Kartu Aktiva Tetap
 - K11. Mengelola Buku Jurnal
 - K12. Mengelola Buku Besar
 - K13. Mengelola Kartu Persediaan Barang Dagangan
2. Jenis Pekerjaan yang ada di DU/DI
 - P1. Pemegang Buku di Perusahaan Manufaktur
 - P2. Pemegang Buku di Perusahaan Konstruksi
 - P3. Pemegang Buku di Perusahaan Leasing
 - P4. Pemegang Buku di Perusahaan Dagang secara Angsuran
 - P5. Pemegang Buku di Perusahaan Dagang secara Konsinyasi
 - P6. Pemegang Buku di Perusahaan yang Memiliki Kantor Cabang
 - P7. Pemegang Buku di Perusahaan Perbankan
 - P8. Pemegang Buku di Perusahaan Koperasi

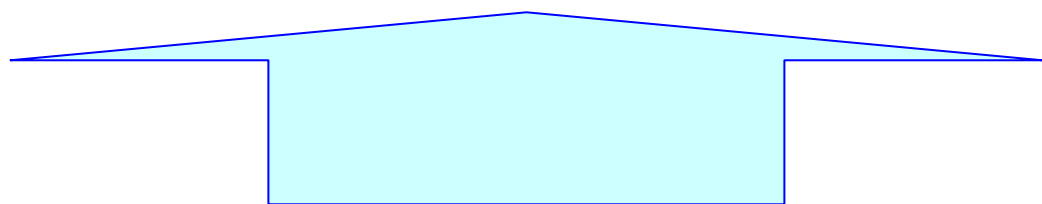
Analisis Relevansi Kompetensi Terhadap Jenis Pekerjaan

Pekerjaan \ Kompetensi	Skor Tingkat Relevansi Kompetensi								Σ
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	
K1	4	4	4	4	4	4	4	4	32
K2	4	4	4	4	4	4	4	4	32
K3	4	4	4	4	4	4	4	4	32
K4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
K5	4	4	4	4	4	4	4	4	32
K6	4	4	4	4	4	4	4	4	32
K7	4	4	4	4	4	4	4	4	32
K8	4	4	4	4	4	4	4	4	32
K9	4	4	4	4	4	4	4	4	32
K10	4	4	4	4	4	4	4	4	32
K11	4	4	4	4	4	4	4	4	32
K12	4	4	4	4	4	4	4	4	32
K13	4	4	4	4	4	4	4	4	32
	52	52	52	52	52	52	52	52	

Keterangan Skor:

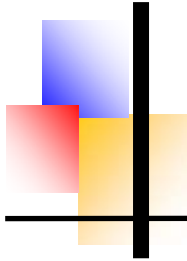
- Skor 4 = jika kompetensi tersebut sangat relevan
- Skor 3 = Jika kompetensi tersebut relevan
- Skor 2 = Jika kompetensi tersebut kurang relevan
- Skor 1 = Jika kompetensi tersebut tidak relevan

Manufaktur	Konstruksi	Leasing	Dagang	Perbankan	Koperasi
K3. Mengelola Kartu Persediaan Supplies	K3. Mengelola Kartu Persediaan Supplies	K3. Mengelola Kartu Persediaan Supplies	K3. Mengelola Kartu Persediaan Supplies	K3. Mengelola Kartu Persediaan Supplies	K3. Mengelola Kartu Persediaan Supplies
K5. Mengelola Administrasi Gaji & Upah	K5. Mengelola Administrasi Gaji & Upah	K5. Mengelola Administrasi Gaji & Upah	K4. Mengelola Kartu Persd. Barang Jadi	K5. Mengelola Administrasi Gaji & Upah	K5. Mengelola Administrasi Gaji & Upah
K6. Mengelola Kartu Biaya Produksi	K8. Mengelola Administrasi Kas Bank	K8. Mengelola Administrasi Kas Bank	K5. Mengelola Administrasi Gaji & Upah	K8. Mengelola Administrasi Kas Bank	K8. Mengelola Administrasi Kas Bank
K7. Mengelola Kartu Persediaan Bahan Baku	K9. Mengelola Administrasi Dana Kas Kecil	K9. Mengelola Administrasi Dana Kas Kecil	K9. Mengelola Administrasi Dana Kas Kecil	K9. Mengelola Administrasi Dana Kas Kecil	K9. Mengelola Administrasi Dana Kas Kecil
K8. Mengelola Administrasi Kas Bank	K10. Mengelola Kartu Aktiva Tetap	K10. Mengelola Kartu Aktiva Tetap	K10. Mengelola Kartu Aktiva Tetap	K10. Mengelola Kartu Aktiva Tetap	K10. Mengelola Kartu Aktiva Tetap
K9. Mengelola Administrasi Dana Kas Kecil			K13. Mengelola Kartu Persd. Barang Dagangan		
K10. Mengelola Kartu Aktiva Tetap					



K1. Mengelola Proses Kredit	K2. Mengelola Kartu Piutang	K11. Mengelola Buku Jurnal	K12. Mengelola Buku Besar
--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------

KLUSTERISASI KOMPETENSI PROGRAM KEAHLIAN AKUNTANSI



Bagian 2

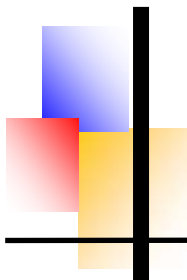
Seri Akuntansi Industri untuk
Sekolah Menengah Kejuruan



*Akuntansi untuk
Industri Tertentu dan
Masalah-Masalah Khusus*

Direktorat Pembinaan
Sekolah Menengah Kejuruan
Ditjen Manajemen Dikdasmen

Departemen Pendidikan Nasional



BAB 1



AKUNTANSI untuk SEWA GUNA USAHA (*LEASING*)

- ☺ Terminologi
 - ☺ Pengertian *Leasing*
 - ☺ Keuntungan *Leasing*
 - ☺ Klasifikasi *Leasing*
- ☺ Perbedaan perjanjian *Leasing* dengan Perjanjian Lainnya
 - ☺ Akuntansi *Leasing*
 - ☺ Aspek Perpajakan dalam *Leasing*

AKUNTANSI UNTUK SEWA-GUNA-USAHA (*LEASING*)



Leasing atau sewa-guna-usaha adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa uang yang telah disepakati bersama. Dengan melakukan *leasing* perusahaan dapat memperoleh barang modal dengan jalan sewa beli untuk dapat langsung digunakan berproduksi, yang dapat diangsur setiap bulan, triwulan atau enam bulan sekali kepada pihak *lessor*.

Melalui pembiayaan *leasing* perusahaan dapat memperoleh barang-barang modal untuk operasional dengan mudah dan cepat. Hal ini sungguh berbeda jika kita mengajukan kredit kepada bank yang memerlukan persyaratan serta jaminan yang besar. Bagi perusahaan yang modalnya kurang atau menengah, dengan melakukan perjanjian *leasing* akan dapat membantu perusahaan dalam menjalankan roda kegiatannya. Setelah jangka *leasing* selesai, perusahaan dapat membeli barang modal yang bersangkutan. Perusahaan yang memerlukan

sebagian barang modal tertentu dalam suatu proses produksi secara tiba-tiba, tetapi tidak mempunyai dana tunai yang cukup, dapat mengadakan perjanjian *leasing* untuk mengatasinya. Dengan melakukan *leasing* akan lebih menghemat biaya dalam hal pengeluaran dana dibanding dengan membeli secara tunai.

Di Indonesia *leasing* baru dikenal melalui surat keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia dengan No.KEP-122/MK/IV/2/1974, No.32/M/SK/2/1974, dan No.30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha *leasing*. Sejalan dengan perkembangan waktu dan perekonomian Indonesia permasalahan yang melibatkan *leasing* semakin banyak dan kompleks. Mulai dari jenis *leasing* yang paling sederhana sampai yang rumit. Perbedaan jenis *leasing* menyebabkan perbedaan dalam pengungkapan laporan keuangan, perlakuan pajak dan akibatnya pada pajak penghasilan badan akhir tahun. *Capital lease* dan *operating lease* sama-sama dikenakan pajak pertambahan nilai, sedangkan untuk *operating lease* disamping dikenakan pajak pertambahan nilai juga dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 23, hal ini karena diperlakukan sebagai sewa menyewa biasa. Biaya-biaya yang berkaitan dengan transaksi *lease* dianggap sebagai biaya usaha bagi pihak *lessee*.

Terminologi (Glosari)

Dalam transaksi leasing, terdapat istilah-istilah yang berbeda dengan istilah yang dipakai pada industri lainnya. Beberapa istilah itu—yang perlu dikenal untuk memahami transaksi *leasing*—adalah:

- Lease** : Suatu kontrak sewa atas penggunaan harta untuk suatu periode tertentu dengan sewa tertentu.
- Lessee** : Pemakai aktiva yang akan di *lease*. Perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari pihak perusahaan *leasing*.
- Lessor** : Pemilik dari aktiva yang akan di *lease*.
- Lease term**: Jangka waktu *lease* yang tetap dan tidak dapat dibatalkan, termasuk:
- Periode yang mencakup hak opsi untuk memperbarui kontrak *leasing*.
 - Periode yang mencakup digunakannya hak opsi untuk membeli aktiva yang di*lease*.
 - Periode dimana *lessor* mempunyai hak untuk memperbarui atau memperpanjang masa *lease*.

- d. Periode dimana denda dikenakan bagi *lessee* atas kegagalannya untuk memperbarui *lease* dan jumlah denda tersebut dijamin pada permulaan *lease*.
- e. Periode yang mencakup hak opsi pembaruan yang biasa yaitu diberikan jaminan oleh *lessee* atas utang *lessor* yang mungkin terjadi.

Residual Value: Nilai *leased asset* yang diperkirakan dapat direalisasi pada akhir periode sewa.

Security Deposit (SD): Jaminan kas yang diminta *lessor* dari sewa *lessee* untuk menjamin pembayaran sewa atau kewajiban sewa lainnya.

Pengertian *Leasing*

Secara umum *leasing* artinya *Equipment funding*, yaitu pembiayaan peralatan/barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian *leasing* menurut surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia No. KEP-122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974, dan Nomor 30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 adalah: "Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa uang telah disepakati bersama".

Equipment Leasing Association di London memberikan definisi *leasing* sebagai berikut: "*Leasing* adalah perjanjian antara *lessor* dan *lessee* untuk menyewa sesuatu atas barang modal tertentu yang dipilih/ditentukan oleh *lessee*. Hak pemilikan barang modal tersebut ada pada *lessor* sedangkan *lessee* hanya menggunakan barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu".

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka pada prinsipnya pengertian *leasing* terdiri dari beberapa elemen di bawah ini:

1. Pembiayaan perusahaan
2. Penyediaan barang-barang modal
3. Jangka waktu tertentu

4. Pembayaran secara berkala
5. Adanya hak pilih (*option right*)
6. Adanya nilai sisa yang disepakati bersama
7. Adanya pihak *lessor*
8. Adanya pihak *lessee*

Keuntungan *Leasing*

Pembiayaan melalui *leasing* merupakan pembiayaan yang sangat sederhana dalam prosedur dan pelaksanaannya dan oleh karena itu *leasing* yang digunakan sebagai pembayaran alternatif tampak lebih menarik. Sebagai suatu alternatif sumber pembiayaan modal bagi perusahaan-perusahaan, maka *leasing* didukung oleh keuntungan-keuntungan sebagai berikut:

1. Fleksibel, artinya struktur kontrak dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yaitu besarnya pembayaran atau periode *lease* dapat diatur sedemikian rupa sesuai dengan kondisi perusahaan.
2. Tidak diperlukan jaminan, karena hak kepemilikan sah atas aktiva yang di *lease* serta pengaturan pembayaran *lease* sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan oleh aktiva yang di *lease* sudah merupakan jaminan bagi *lease* itu sendiri.
3. *Capital saving*, yaitu tidak menyediakan dana yang besar, maksimum hanya menyediakan *down payment* yang jumlahnya dalam kebiasaan *lease* tidak terlalu besar, jadi dalam hal ini bisa dikatakan menjadi suatu penghematan modal bagi *lessee*, yaitu *lessee* dapat menggunakan modal yang tersedia untuk keperluan lain. Karena *leasing* umumnya membiayai 100% barang modal yang dibutuhkan.
4. Cepat dalam pelayanan, artinya secara prosedur *leasing* lebih sederhana dan relatif lebih cepat dalam realisasi pembiayaan bila dibandingkan dengan kredit investasi bank, jadi tanpa prosedur yang rumit dan hal itu memberikan kemudahan bagi para pengusaha untuk memperoleh mesin-mesin dan peralatan yang mutakhir untuk memungkinkan dibukanya suatu bidang usaha produksi yang baru atau untuk memodernisasi perusahaan.
5. Pembayaran angsuran *lease* diperlakukan sebagai biaya operasional, artinya pembayaran *lease* langsung dihitung sebagai biaya dalam penentuan laba rugi perusahaan, jadi

pembayarannya dihitung dari pendapatan sebelum pajak, bukan dari laba yang terkena pajak.

6. Sebagai pelindung terhadap *inflasi*, artinya terhindar dari resiko penurunan nilai uang yang disebabkan oleh *inflasi*, yaitu *lessee* sampai kapan pun tetap membayar dengan satuan moneter yang lalu terhadap sisa kewajibannya.
7. Adanya hak opsi bagi *lessee* pada akhir masa *lease*.
8. Adanya kepastian hukum, artinya suatu perjanjian *leasing* tidak dapat dibatalkan dalam keadaan keuangan umum yang sangat sulit, sehingga dalam keadaan keuangan atau moneter yang sesulit apapun perjanjian *leasing* tetap berlaku.
9. Terkadang *leasing* merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan aktiva bagi suatu perusahaan, terutama perusahaan ekonomi lemah, untuk dapat memodernisasi pabriknya.

Klasifikasi *Leasing*

Secara umum jenis-jenis *leasing* bisa dibedakan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut.

1. *Capital Lease*

Perusahaan *leasing* pada jenis ini berlaku sebagai suatu lembaga keuangan. *Lessee* yang akan membutuhkan suatu barang modal menentukan sendiri jenis serta spesifikasi dari barang yang dibutuhkan. *Lessee* juga mengadakan negoisasi langsung dengan *supplier* mengenai harga, syarat-syarat perawatan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengoperasian barang tersebut.

Lessor akan mengeluarkan dananya untuk membayar barang tersebut kepada *supplier* dan kemudian barang tersebut diserahkan kepada *lessee*. Sebagai imbalan atas jasa penggunaan barang tersebut *lessee* akan membayar secara berkala kepada *lessor* sejumlah uang yang berupa rental untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.

Jumlah *rental* ini secara keseluruhan akan meliputi harga barang yang dibayar oleh *lessor* ditambah faktor bunga serta keuntungan

pihak *lessor*. Selanjutnya *capital* atau *finance lease* masih bisa dibedakan menjadi dua yaitu:

a. *Direct finance lease*

Transaksi ini terjadi jika *lessee* sebelumnya belum pernah memiliki barang yang dijadikan objek *lease*. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa *lessor* membeli suatu barang atas permintaan *lessee* dan akan dipergunakan oleh *lessee*.

b. *Sale and lease back*

Sesuai dengan namanya, dalam transaksi ini *lessee* menjual barang yang telah dimilikinya kepada *lessor*. Atas barang yang sama ini kemudian dilakukan suatu kontrak *leasing* antara *lessee* dengan *lessor*. Dengan memperhatikan mekanisme ini, maka perjanjian ini memiliki tujuan yang berbeda dibandingkan dengan *direct finance lease*. Di sini *lessee* memerlukan *cash* yang bisa dipergunakan untuk tambahan modal kerja atau untuk kepentingan lainnya. Bisa dikatakan bahwa dengan sistem *sale and lease back* memungkinkan *lessor* memberikan dana untuk keperluan apa saja kepada kliennya dan tentu saja dana yang dibutuhkan sesuai dengan nilai objek barang *lease*.

2. *Operating Lease*

Pada *operating lease*, *lessor* membeli barang dan kemudian menyewakan kepada *lessee* untuk jangka waktu tertentu. Dalam praktik *lessee* membayar rental yang besarnya secara keseluruhan tidak meliputi harga barang serta biaya yang telah dikeluarkan oleh *lessor*.

Di dalam menentukan besarnya pembayaran *lease*, *lessor* tidak memperhitungkan biaya-biaya tersebut karena setelah masa *lease* berakhir diharapkan harga barang tersebut masih cukup tinggi. Di sini jelas tidak ditentukan adanya nilai sisa serta hak opsi bagi *lessee*.

3. *Sales type lease (Lease Penjualan)*

Lease penjualan biasanya dilakukan oleh perusahaan industri yang menjual *lease* barang hasil produksinya. Dalam kontrak penjualan *lease* diakui dua macam pendapatan yaitu pendapatan

penjualan barang dan pendapatan bunga atas jasa pembelanjaan selama jangka waktu *lease*.

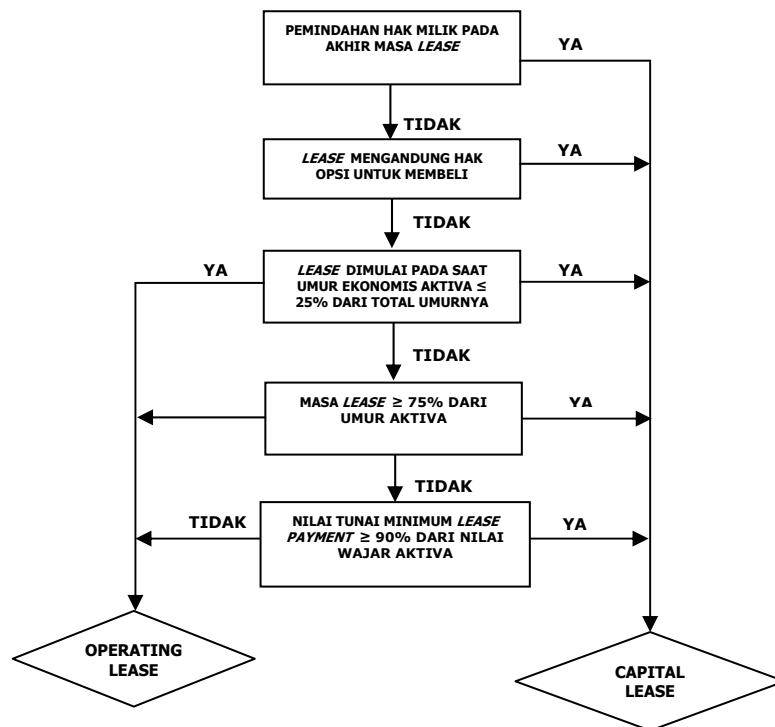
4. Leverage Lease

Pada *leasing* ini dilibatkan pihak ketiga yang disebut *credit provider*. *Lessor* tidak membiayai objek *leasing* hingga sebesar 100% dari harga barang melainkan hanya antara 20% hingga 40%. Kemudian sisa dari harga barang tersebut akan dibiayai oleh *credit provider*.

5. Cross Border Lease

Transaksi pada jenis ini merupakan suatu transaksi *leasing* yang dilakukan dengan melewati batas suatu negara. Dengan demikian antara *lessor* dan *lessee* terletak pada dua negara yang berbeda. Barang-barang atau peralatan yang ditransaksikan dalam *cross border lease* meliputi nilai jutaan dollar Amerika Serikat. Seperti Pesawat terbang bermesin jet dari Pabrikan Boeing dan Airbus.

Berikut ini adalah klasifikasi *leasing* oleh *lessee*.



(Tunggal, 1994: 27)

Perbedaan Antara Perjanjian *Leasing* dengan Perjanjian lainnya

1. Perjanjian Sewa Menyewa

Perjanjian sewa-menyewa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (pasal 1548 sampai dengan 1600). Menurut pasal 1548 pada pokoknya perjanjian sewa menyewa adalah:

- a. Pihak yang menyewakan wajib menyediakan barang bagi pihak yang menyewa untuk dapat dinikmati kegunaannya oleh penyewa.
- b. Penyewa membayar imbalan jasa kepada pihak yang menyewakan.

Sepintas lalu perjanjian sewa menyewa mirip dengan unsur-unsur dalam perjanjian *lease*, tetapi apabila ditelaah dan diteliti lebih lanjut maka kedua perjanjian ini tidak sama, khususnya mengenai *capital lease*. Pokok perbedaannya adalah sebagai berikut:

Perbedaan *Leasing* dengan Sewa Menyewa

No	<i>Capital Lease</i>	Sewa Menyewa
1.	Merupakan suatu metode pembiayaan.	Bukan merupakan suatu metode pembiayaan
2.	<i>Lessor</i> adalah badan penyedia dana dan <i>lessor</i> pemilik barang yang di <i>lease</i> .	Yang menyewakan barang dapat menjadi pemilik, tetapi dapat juga bukan.
3.	Objek <i>leasing</i> berupa barang modal.	Objek sewa menyewa tidak selalu barang modal.
4.	Resiko yang terjadi seluruhnya ditanggung <i>lessee</i>	Resiko yang terjadi pada sewa menyewa ditanggung pihak pemberi sewa.
5.	Imbalan jasa yang diterima <i>lessor</i> adalah berupa tebusan berkala harga perolehan barang	Imbalan jasa yang diterima oleh yang menyewakan barang berupa uang sewa.

6.	Jangka waktu <i>leasing</i> ditentukan dalam perjanjian leasing selama waktu tertentu.	Jangka waktu sewa-menyewa tidak ditentukan. Tergantung kesanggupan penyewa untuk membayar uang sewa.
7.	Kewajiban <i>lessee</i> untuk membayar imbalan jasa tidak berhenti walaupun barang yang menjadi objek <i>lease</i> musnah.	Kewajiban penyewa hanya ada bila si penyewa dapat menikmati barang yang disewa.

(Achmad Anwari, 1997: 16)

2. Perjanjian Sewa Beli dan Jual Beli dengan Angsuran

Menurut keputusan menteri perdagangan dan industri nomor 343/KP/II/80, sewa beli adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli yang dengan pelunasan atas barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harga yang dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.

Sedangkan definisi jual beli dengan angsuran, diberikan definisi sebagai berikut: "Jual beli dengan angsuran adalah jual beli dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara menerima pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam beberapa kali angsuran atas barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli pada saat barangnya diserahkan oleh penjual kepada pembeli."

Perbedaan *leasing* dengan sewa beli dan jual beli dengan angsuran adalah sebagai berikut:

No	<i>Leasing</i>	Sewa beli dan jual beli angsuran
1.	<i>Lessor</i> adalah pihak yang menyediakan dana dan membiayai seluruh pembelian barang tersebut	Harga pembelian barang sebagian dibayar oleh pembeli.

2.	Masa <i>leasing</i> biasanya ditetapkan sesuai dengan perkiraan umum kegunaan barang.	Jangka waktu dalam perjanjian sewa beli dan jual beli angsuran tidak memperhatikan baik pada perkiraan umur kegunaan barang maupun kemampuan pembeli mengangsur harga barang.
3.	Pada akhir masa <i>leasing</i> , <i>lessee</i> dapat menggunakan hak opsinya.	Pada akhir masa perjanjian, hak milik barang dengan sendirinya beralih kepada pembeli.

(Achmad Anwari 1997: 18)

Akuntansi *Leasing*

Dalam akuntansi, pencatatan *leasing* dilakukan berdasarkan jenis *leasing*; yaitu:

1. Jurnal akuntansi *capital lease*.

a. Pada saat pengakuan *leasing*.

Aktiva/Peralatan/Mesin	xxx
Kewajiban <i>leasing</i>	xxx

b. Pada saat pembayaran pertama.

Beban pajak	xxx
Kewajiban <i>leasing</i>	xxx
Kas	xxx

c. Pada penyesuaian akhir tahun.

Beban bunga	xxx
Hutang bunga	xxx

d. Pada pengakuan penyusutan.

Beban penyusutan	xxx
Akumulasi penyusutan	xxx

e. Pada saat pembayaran kedua.

Beban pajak	xxx
Kewajiban <i>leasing</i>	xxx
Beban bunga	xxx
Kas	xxx

f. Pada saat *lessee* menggunakan hak opsi.

Aktiva/Peralatan/Mesin	xxx
Akm. Peny. Aktiva <i>leasing</i>	xxx
Hutang hak opsi	xxx
Kewajiban <i>leasing</i>	xxx
<i>Security deposit</i>	xxx

2. Jurnal akuntansi *operating lease*.

Pada *operating lease* hanya terdapat satu jurnal yaitu.

Beban <i>lease/sewa</i>	xxx
Kas	xxx

Formula yang Digunakan untuk Menghitung Pembayaran *Leasing*

Sewaktu perjanjian *lease* diadakan antara pihak *lessee* dan pihak *lessor*, maka pada saat itu telah ditentukan bagaimana cara pembayaran yang akan dilakukan, apakah pembayaran *leasing* dilakukan di muka atau pembayaran sewa dilakukan di belakang. Untuk kedua cara pembayaran tersebut ada dua rumus yang dapat dipergunakan (Soekadi, 1990: 105) yaitu:

1. Rumus untuk pembayaran di muka:

$$Pmt = \frac{(C - RV)(1 + i)^{n-1} \cdot i}{(1 + i)^n - 1}$$

2. Rumus untuk pembayaran di belakang:

$$Pmt = \frac{(C - RV)(1 + i)^n \cdot i}{(1 + i)^n - 1}$$

Keterangan:

Pmt : Pembayaran *lease*

C : *Cost of leased asset* setelah diperhitungkan dengan *security deposit*

RV : nilai residu

i : tingkat suku bunga

n : periode sewa

Dari kedua rumus di atas, akan memberikan hasil perhitungan pembayaran sewa yang sama. Pada praktiknya selama ini, perusahaan *leasing* kebanyakan mempergunakan rumus di atas untuk menghitung pembayaran sewa dikarenakan mudah dalam menghitung bunga dan nilai *present value*.

Prosedur Mekanisme *Leasing*

Dalam melakukan perjanjian *leasing* terdapat prosedur dan mekanisme yang harus dijalankan yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Lessee* bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan, mengadakan penawaran harga dan menunjuk *supplier* peralatan yang dimaksudkan.
2. Setelah *lessee* mengisi formulir permohonan *lease*, maka dikirimkan kepada *lessor* disertai dokumen lengkap.
3. *Lessor* mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk memberikan fasilitas *lease* dengan syarat dan kondisi yang disetujui *lessee* (lama kontrak pembayaran sewa *lease*), setelah ini maka kontrak *lease* dapat ditandatangani.
4. Pada saat yang sama, *lessee* dapat menandatangani kontrak asuransi untuk peralatan yang di*lease* dengan perusahaan asuransi yang disetujui *lessor*, seperti yang tercantum dalam kontrak *lease*. Antara *lessor* dan perusahaan asuransi terjalin perjanjian kontrak utama.

5. Kontrak pembelian peralatan akan ditandatangani *lessor* dengan *supplier* peralatan tersebut.
6. *Supplier* dapat mengirimkan peralatan yang *dilease* ke lokasi *lessee*. Untuk mempertahankan dan memelihara kondisi peralatan tersebut, *supplier* akan menandatangani perjanjian purna jual.
7. *Lessee* menandatangani tanda terima peralatan dan menyerahkan kepada *supplier*.
8. *Supplier* menyerahkan tanda terima (yang diterima dari *lessee*), bukti kepemilikan dan pemindahan kepemilikan kepada *lessor*.
9. *Lessor* membayar harga peralatan yang *dilease* kepada *supplier*.
10. *Lessee* membayar sewa *lease* secara periodik sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dalam kontrak *lease*.

Perlakuan Akuntansi oleh Lessee Menurut PSAK No. 30

1. Capital Lease

Transaksi sewa guna usaha diperlakukan dan dicatat sebagai aktiva tetap dan kewajiban pada awal masa sewa *leasing* sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran *leasing* ditambah nilai sisa yang harus dibayar oleh penyewa guna usaha pada akhir masa *leasing*. Selama masa *leasing* setiap pembayaran *leasing* dialokasikan dan dicatat sebagai angsuran pokok kewajiban *leasing* dan beban bunga berdasarkan tingkat bunga yang diperhitungkan terhadap sisa kewajiban *lessee*.

Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai tunai dari pembayaran *leasing* adalah tingkat bunga yang berlaku pada awal masa *lease*.

Aktiva yang *dileasing* harus diamortisasi dalam jumlah yang wajar berdasarkan masa manfaatnya.

Kewajiban *leasing* harus disajikan sebagai kewajiban lancar dan jangka panjang sesuai dengan praktik yang lazim untuk jenis usaha *lessee*.

2. Operating Lease

Pembayaran *leasing* selama tahun berjalan merupakan biaya sewa yang diakui dan dicatat berdasarkan metode garis

lurus selama masa *leasing*, meskipun pembayaran *leasing* dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periodenya.

Penyusutan Menurut Perpajakan Indonesia

Berbeda dengan standar akuntansi yang membebaskan sebuah entitas atau perusahaan untuk menentukan taksiran dan kebijakan-kebijakan berkenaan dengan penyusutan atas aktiva/hartanya, maka pemerintah telah mengeluarkan beberapa undang-undang serta peraturan yang mengatur tentang cara dan pelaksanaan penyusutan.

Ketentuan-ketentuan mengenai beban penyusutan yang diatur dalam undang-undang perpajakan nomor 17 tahun 2000 yang terdapat dalam pasal 11 ayat 1,2 dan 3 adalah:

1. Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai umur manfaat lebih dari satu tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besarnya selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

Tarif Penyusutan Menurut Undang-undang Pajak Indonesia

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 tahun	10%	-

Keterangan ayat (1) : Menggunakan metode garis lurus.

ayat (2) : Menggunakan metode saldo menurun

2. Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada hari masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat taat asas.
3. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutan dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.

Untuk menghitung penyusutan dan besarnya tarif menurut undang-undang perpajakan nomor 17 tahun 2000 diatur dalam pasal 11 ayat 6. Tabel penyusutan di atas memperlihatkan pengelompokan aktiva berdasarkan pasal tersebut.

Aspek perpajakan yang berkaitan dengan *leasing*.

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Berdasarkan Undang-undang no 17 tahun 2000 dan surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1169/KMK.01/1991 Pasal 16 ayat 2 menyatakan: "*Lessee* tidak memotong pajak penghasilan pasal 23 atas pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang berdasarkan perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi". Dalam pasal tersebut dengan jelas menyatakan bahwa angsuran-angsuran atau pembayaran yang diterima *lessor* dari *lessee* untuk jenis transaksi *finance lease* tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan.

Pasal 17 ayat 2 menyatakan:

- a. Pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang dibayar atau terutang oleh *lessee* adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
- b. *Lessee* wajib memotong pajak penghasilan pasal 23 atas pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang dibayarkan atau terutang kepada *lessor*.

Pasal 17 ayat 2a mengatur tentang perlakuan pembayaran *leasing* oleh *lessee*. Di sini dijelaskan bahwa pembayaran *leasing* dari *lessee* kepada *lessor* untuk transaksi *operational lease* diperlukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 karena menurut pajak diperlakukan sebagai sewa-menyewa biasa.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Perlakuan PPN atas transaksi *capital lease*:

- 1) Berdasarkan ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 1994 huruf d dan e, Pengumuman Direktur Jenderal Pajak No. Peng- 139/PJ.63/1989 dan Pasal 1 angka 4 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep05/PJ/1994, penyerahan jasa dalam transaksi *capital lease* dari *lessor* kepada *lessee* adalah penyerahan jasa yang terutang PPN, karena *lessor* sebagai perusahaan jasa persewaan barang dengan demikian adalah pengusaha kena pajak.
 - 2) Pengalihan barang dalam transaksi *operating lease* bukan merupakan penyerahan barang kena pajak karena pengalihan barang tersebut adalah dalam rangka persewaan biasa.
 - 3) Besarnya PPN yang terutang adalah 10% dari Nilai Penggantian.
 - 4) PPN sebagaimana dimaksud dalam angka 3) merupakan PPN Keluaran bagi *lessor* dan merupakan PPN Masukan bagi *lessee* dalam hal *lessee* adalah Pengusaha Kena Pajak. PPN yang dibayar atas perolehan barang kena pajak (BKP) yang di/*lease* merupakan PPN Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan PPN Pajak Keluaran *lessor*.
- b. Dalam hal transaksi *sale and lease back* tanpa hak opsi, PPN masukan atas perolehan barang tidak boleh dikreditkan oleh *lessee*. Dalam hal *lessee* kemudian me/*lease* kembali barang tersebut, maka *lessor* harus mengenakan PPN yang terutang atas jasa persewaan barang yang dilakukan.

Untuk memberikan gambaran tentang *leasing*, dari sudut pandang *lessee*, pada halaman-halaman berikut ini diberikan ilustrasi dengan data-data dari PT SUKASEWA.

Data Laporan Keuangan Komersial

Laporan Laba Rugi Tahun 2007

PT SUKASEWA			
LAPORAN LABA RUGI			
Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2007			
Penjualan		Rp	1.709.879.200
Harga Pokok Penjualan		Rp	(951.994.328)
Laba Kotor		Rp	757.884.872
Beban Pemasaran			
Beban Gaji	Rp	66.740.800	
Beban angkut penjualan	Rp	32.456.765	
Beban Penyusutan Kendaraan	Rp	14.473.000	
Beban Pemeliharaan Kendaraan	Rp	13.255.000	
Beban Bahan Bakar	Rp	33.342.000	
Beban Telepon	Rp	12.376.000	
Beban <i>Lease</i>	Rp	20.721.750	
Jumlah Beban Pemasaran	Rp	193.365.315	
Beban Adm & Umum			
Beban Gaji	Rp	165.765.000	
Beban Penyusutan Bangunan	Rp	1.622.530	
Beban Penyusutan Peralatan Kantor	Rp	1.878.000	
Beban Perlengkapan	Rp	4.150.000	
Beban Listrik	Rp	9.152.400	
Beban Air	Rp	1.380.000	
Beban Lain-lain	Rp	620.000	
Jumlah Beban Adm & Umum	Rp	184.567.930	
Total Beban		Rp	(377.933.245)
Pendapatan & Beban Lain-lain			
Beban Bunga	Rp	65.987.000	
Jumlah Pendapatan & Beban Lain-lain		Rp	(65.987.000)
Laba Sebelum Pajak		Rp	313.964.627
Beban Pajak		Rp	(75.734.526)
Laba Setelah Pajak		Rp	238.230.101

Neraca Tahun 2007

PT SUKASEWA			
NERACA			
PER 31 DESEMBER 2007			
Aktiva		Kewajiban & Modal	
Aktiva Lancar		Hutang Lancar	
Kas	Rp 432.890.000	Hutang Usaha	Rp 105.656.300
Piutang Dagang	Rp 886.448.464	Hutang Gaji	Rp 30.454.309
Persediaan		Hutang Bank	Rp 327.085.000
Bahan	Rp 110.998.047	Hutang Pajak	Rp 64.478.423
Barang Dalam Proses	Rp 108.131.138	Jumlah Hutang Lancar	Rp 527.674.032
Barang Jadi	Rp 113.386.806		
Biaya <i>lease</i> dibayar dimuka	Rp 6.907.250	Hutang Jangka Panjang	
Perlengkapan	Rp 14.750.000		
<i>Security Deposit</i>	Rp 4.500.000	Hutang Bank	Rp 275.600.700
Jumlah Aktiva Lancar	Rp 1.678.011.705	Hutang Lain-lain	Rp 176.565.400
		Jumlah Hutang Jangka Panjang	Rp 452.166.100
Aktiva Tetap			
Tanah	Rp 210.750.000	Modal	
Bangunan	Rp 324.506.000	Modal Saham	Rp 650.000.000
Akm. Peny. Bangunan	Rp (190.647.275)	Laba ditahan	Rp 508.764.423
Mesin & Peralatan	Rp 163.805.000		
Akm. Peny. Mesin & Peralatan	Rp (118.758.625)	Jumlah Modal	Rp 1.158.764.423
Kendaraan	Rp 144.730.000		
Akm. Peny. Kendaraan	Rp (75.983.250)		
Peralatan Kantor	Rp 9.390.000		
Akm. Peny. Kantor	Rp (7.199.000)		
Jumlah Aktiva Tetap	Rp 460.592.850		
Total Aktiva	Rp 2.138.604.555	Total Kewajiban & Modal	Rp 2.138.604.555

Laporan Laba Rugi Tahun 2008

PT SUKASEWA			
LAPORAN LABA RUGI			
Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2008			
Penjualan		Rp	1.869.320.000
Harga Pokok Penjualan		Rp	(977.221.851)
<i>Laba Kotor</i>		<i>Rp</i>	<i>892.098.149</i>
Beban Pemasaran			
Beban Gaji	Rp	67.775.600	
Beban angkut penjualan	Rp	35.657.900	
Beban Penyusutan Kendaraan	Rp	14.473.000	
Beban Penyusutan Kendaraan Leasing	Rp	5.658.750	
Beban Pemeliharaan Kendaraan	Rp	15.650.000	
Beban Bahan Bakar	Rp	45.034.200	
Beban Telepon	Rp	14.132.410	
Beban <i>lease</i>	Rp	6.907.250	
Jumlah Beban Pemasaran	Rp	205.289.110	
Beban Adm & Umum			
Beban Gaji	Rp	170.230.900	
Beban Penyusutan Bangunan	Rp	1.622.530	
Beban Penyusutan Peralatan Kantor	Rp	1.878.000	
Beban Perlengkapan	Rp	3.950.000	
Beban Listrik	Rp	10.440.500	
Beban Air	Rp	732.000	
Jumlah Beban Adm & Umum	Rp	188.853.930	
Total Beban		Rp	(394.143.040)
Pendapatan & Beban Lain-lain			
Beban Bunga	Rp	75.080.980	
Beban Bunga <i>Lease</i>	Rp	6.097.210	
Jumlah Pendapatan & Beban Lain-lain		Rp	(81.178.190)
Laba Sebelum Pajak		Rp	416.776.919
Beban Pajak		Rp	(104.354.798)
Laba Setelah Pajak		Rp	312.422.121

Neraca Tahun 2008

PT SUKASEWA			
NERACA			
PER 31 DESEMBER 2008			
Aktiva		Kewajiban & Modal	
Aktiva Lancar		Hutang Lancar	
Kas	Rp 509.906.988	Hutang Usaha	Rp 175.737.330
Piutang Dagang	Rp 940.233.517	Hutang Gaji	Rp 32.211.286
Persediaan		Hutang Bank	Rp 250.560.000
Bahan	Rp 127.898.543	Hutang Pajak	Rp 60.478.423
Barang Dalam Proses	Rp 123.168.778	Hutang Hak Opsi	Rp 12.575.000
Barang Jadi	Rp 110.908.700	Jumlah Hutang Lancar	Rp 531.562.039
Uang Muka Pajak	Rp 27.541.050		
Perlengkapan	Rp 22.350.000	Hutang Jangka Panjang	
Security Deposit	Rp 12.575.000	Hutang Lease	Rp 93.029.710
Jumlah Aktiva Lancar	Rp 1.874.582.576	Hutang Bank	Rp 250.500.000
		Hutang Lain-lain	Rp 120.500.400
		Jumlah Hutang Jangka Panjang	Rp 464.030.110
Aktiva Tetap		Modal	
Tanah	Rp 210.750.000	Modal Saham	Rp 650.000.000
Bangunan	Rp 324.506.000	Laba ditahan	Rp 760.717.797
Akm. Peny. Bangunan	Rp (206.872.505)		
Mesin & Peralatan	Rp 163.805.000		
Akm. Peny. Mesin & Peralatan	Rp (135.139.125)		
Kendaraan	Rp 144.730.000		
Akm. Peny. Kendaraan	Rp (90.456.250)	Jumlah Modal	Rp 1.410.717.797
Peralatan Kantor	Rp 9.390.000		
Akm. Peny. Kantor	Rp (9.077.000)		
Kendaraan Lease	Rp 125.750.000		
Akm. Peny. Kendaraan Lease	Rp (5.658.750)		
Jumlah Aktiva Tetap	Rp 531.727.370		
Total Aktiva	Rp 2.406.309.946	Total Kewajiban & Modal	Rp 2.406.309.946

Pokok Perjanjian *Leasing*

Perjanjian *leasing* yang telah dilakukan oleh PT SUKASEWA adalah perjanjian *capital lease* dan *operating lease*. Pokok-pokok perjanjian mengenai kedua jenis *lease* itu adalah sebagai berikut:

Capital Lease

PT SUKASEWA melakukan *capital leasing* pada tahun 2008 dengan objek *leasing* sebuah mobil truk *box* merek Mitsubishi tipe Colt

Diesel 100PS 4 roda yang akan dipergunakan untuk memperlancar kegiatan perusahaan dalam bidang pengiriman barang pesanan. Adapun pokok-pokok perjanjian yang dibuat PT SUKASEWA dengan pihak *lessor* adalah sebagai berikut:

1. Jangka waktu *leasing* adalah 4 tahun terhitung mulai tanggal 28 Juni 2008 hingga 28 Maret 2012 dengan syarat perjanjian *lease* tidak bisa dibatalkan. Pembayaran *lease* sebesar Rp.8.747.500,00 per triwulan.
2. Harga pasar truk pada tanggal dimulainya *lease* adalah sebesar Rp.138.325.000,00 termasuk PPN sebesar 10%.
3. Taksiran umur ekonomis mobil adalah sepuluh tahun dengan nilai sisa sebesar Rp.12.575.000,00. Dimana PT SUKASEWA memiliki hak opsi diakhir masa *leasing* dengan harga sebesar nilai sisa.
4. Tarif bunga *leasing* sebesar 12% pertahun atau 3% pertriwulan.
5. PT SUKASEWA Menggunakan metode garis lurus dalam perhitungan penyusutan aktiva tetap.
6. PT SUKASEWA membayar *security deposit* sebesar Rp.12.575.000,00 atau sebesar nilai sisa sebagai jaminan, dan di akhir masa *leasing* akan dikembalikan jika PT SUKASEWA tidak menggunakan hak opsinya.
7. Pada waktu pihak PT SUKASEWA melakukan perjanjian dengan *lessor* tidak ada biaya yang timbul.

Operating Lease

PT SUKASEWA merupakan perusahaan manufaktur yang telah melakukan *operating lease* pada tahun 2007. Dimana barang yang *dilease* adalah Sebuah mobil truk *box* dengan merek Mitsubishi tipe *Colt Diesel* 100PS 4 roda. Mobil ini digunakan oleh PT SUKASEWA untuk mengirimkan barang hasil produksi di pulau Sumatera. Pokok-pokok perjanjian *operating lease* yang dilakukan oleh PT SUKASEWA sebagai berikut:

1. Jangka waktu *lease* selama satu tahun dengan pembayaran dimuka sebesar Rp.26.800.000,00 bersih (neto). Tidak termasuk PPN 10 %. Transaksi dilakukan pada tanggal 4 April 2007.

2. *Lessee* diwajibkan memberi uang jaminan (*security deposit*) sebesar Rp.4.500.000,00 dan uang ini akan dikembalikan pada saat perjanjian *lease* berakhir.
3. Pada saat melakukan perjanjian *operating lease* timbul biaya sebesar Rp.620.000,00. Biaya ini ditanggung oleh PT SUKASEWA.
4. Perjanjian ini tidak bisa dibatalkan.

Implikasi

Munculnya lembaga *leasing* merupakan alternatif yang menarik bagi para pengusaha karena saat ini mereka cenderung menggunakan dana rupiah tunai untuk kegiatan operasional perusahaan. Melalui *leasing* mereka bisa memperoleh dana untuk membiayai pembelian barang-barang modal dengan jangka waktu pengembalian antara tiga tahun hingga lima tahun atau lebih. Disamping hal tersebut di atas para pengusaha juga memperoleh keuntungan-keuntungan lainnya seperti kemudahan dalam pengurusan, dan adanya hak opsi.

Suatu keuntungan lain jika ditinjau dari laporan keuangan fiskal adalah transaksi *capital lease* diperhitungkan sebagai *operational lease* pembayaran *lease* dianggap sebagai biaya mengurangi pendapatan kena pajak. Tetapi tidak begitu halnya jika ditinjau dari segi komersial. Berikut ini akan dibahas perbedaan yang terjadi atas transaksi *leasing* ditinjau dari segi komersial dan fiskal.

Capital lease

Berdasarkan data-data pokok perjanjian *capital lease* dapat dihitung pembayaran *lease* per triwulan sebagai berikut:

Langkah I:

Mengeluarkan unsur PPN sebesar 10% dari harga pasar truk yaitu:

$$C = \text{Rp.}138.325.000,00 \times \frac{100}{110}$$

$$C = \text{Rp.}125.750.000,00$$

Jadi harga pasar truk tanpa PPN adalah sebesar Rp.125.750.000,00. Sedangkan untuk PPN masukannya sendiri dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{PPN} &= \text{Rp.138.325.000,00} - \text{Rp.125.750.000,00} \\ &= \text{Rp.12.575.000,00}\end{aligned}$$

Jadi PPN masukan atas transaksi *lease* ini adalah sebesar Rp.12.575.000,00

Pada akhir masa (bulan), PPN ini akan dapat dikreditkan sebagai pajak masukan bagi PT SUKASEWA, karena objek PPN ini digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan.

Langkah II:

Menghitung besarnya *lease* per triwulan.

$$Pmt = \frac{(C - RV)(1 + i)^{n-1} \cdot i}{(1 + i)^n - 1}$$

$$Pmt = \frac{(125.750.000 - 12.575.000)(1 + 0,03)^{16-1} \times 0,03}{(1 + 0,03)^{16} - 1}$$

$$Pmt = \frac{113.175.000 \times 1,557967 \times 0,03}{0,60470644}$$

$$Pmt = \frac{5.289.687,46}{0,60470644}$$

$$Pmt = \text{Rp.8.747.500,00 (pembulatan)}$$

Jadi besarnya pembayaran *lease* per triwulan adalah Rp.8.747.500,00. Menurut hasil perhitungan dari rumus di atas dapat dibuatkan daftar pembayaran *lease* untuk *capital lease* selama empat tahun seperti nampak pada halaman berikut.

Melihat pada data-data pokok perjanjian *lease* dan daftar pembayaran *lease* di atas dapat ditentukan jenis perjanjian *leasing* yang dilakukan oleh PT SUKASEWA:

1. Dilihat dari hak kepemilikan. Pada akhir masa *lease* akan terjadi pemindahan hak kepemilikan truk dari *lessor* ke *lessee*.

2. Pada akhir masa *lease* terdapat hak opsi bagi *lessee* untuk membeli truk dengan "*bargain price*" artinya pada perjanjian *lease* disebutkan bahwa *lessee* mempunyai hak untuk membeli truk dengan harga yang menguntungkan, dalam hal ini sebesar Rp.12.575.000,00. Dimana harga ini lebih rendah dari taksiran nilai wajarnya.
3. *Lease* dimulai pada saat truk masih baru. Artinya nilai truk masih 100% belum pernah disusutkan.
4. Jangka waktu permulaan nilai tunai (*present value*) *lease* dari pada pembayaran *lease* minimum harus sama atau lebih dari 90% dari nilai pasar wajar. Pada perjanjian ini pembayaran *lease* minimum yakni sebesar Rp.139.960.000,00 lebih besar dari 90% nilai wajar truk sebesar Rp.125.750.000,00.
5. Masa *lease* selama empat tahun telah melebihi ketentuan perpajakan yakni sekurang-kurangnya tiga tahun untuk barang modal golongan II dan III.

Daftar Pembayaran *Lease*
PT SUKASEWA

Tanggal	Pembayaran Ke	Jumlah Pembayaran	Angsuran Pokok	Pembayaran Bunga	Saldo Pokok
Pembayaran Tahun 2008					
28/06/2008					Rp 125.750.000
28/06/2008	1	Rp 8.747.500	Rp 8.747.500		Rp 117.002.500
28/09/2008	2	Rp 8.747.500	Rp 5.614.675	Rp 3.132.825	Rp 111.387.825
28/12/2008	3	Rp 8.747.500	Rp 5.783.115	Rp 2.964.385	Rp 105.604.710
Jumlah		Rp 26.242.500	Rp 20.145.290	Rp 6.097.210	
Pembayaran Tahun 2009					
28/03/2009	4	Rp 8.747.500	Rp 5.956.609	Rp 2.790.891	Rp 99.648.101
28/06/2009	5	Rp 8.747.500	Rp 6.135.307	Rp 2.612.193	Rp 93.512.794
28/09/2009	6	Rp 8.747.500	Rp 6.319.366	Rp 2.428.134	Rp 87.193.428
28/12/2009	7	Rp 8.747.500	Rp 6.508.947	Rp 2.238.553	Rp 80.684.481
Jumlah		Rp 34.990.000	Rp 24.920.229	Rp 10.069.771	
Pembayaran Tahun 2010					
28/03/2010	8	Rp 8.747.500	Rp 6.704.216	Rp 2.043.284	Rp 73.980.265
28/06/2010	9	Rp 8.747.500	Rp 6.905.342	Rp 1.842.158	Rp 67.074.923
28/09/2010	10	Rp 8.747.500	Rp 7.112.502	Rp 1.634.998	Rp 59.962.421
28/12/2010	11	Rp 8.747.500	Rp 7.325.877	Rp 1.421.623	Rp 52.636.543
Jumlah		Rp 34.990.000	Rp 28.047.937	Rp 6.942.063	
Pembayaran Tahun 2011					
28/03/2011	12	Rp 8.747.500	Rp 7.545.654	Rp 1.201.846	Rp 45.090.890
28/06/2011	13	Rp 8.747.500	Rp 7.772.023	Rp 975.477	Rp 37.318.866
28/09/2011	14	Rp 8.747.500	Rp 8.005.184	Rp 742.316	Rp 29.313.682
28/12/2011	15	Rp 8.747.500	Rp 8.245.340	Rp 502.160	Rp 21.068.343
Jumlah		Rp 34.990.000	Rp 31.568.201	Rp 3.421.799	
Pembayaran Tahun 2012					
28/03/2012	16	Rp 8.747.500	Rp 8.492.700	Rp 254.800	Rp 12.575.643
Jumlah		Rp 8.747.500	Rp 8.492.700	Rp 254.800	
Total		Rp 139.960.000	Rp 113.174.357	Rp 26.785.643	

Berdasarkan kriteria-kriteria di atas maka perjanjian *leasing* yang dilakukan PT SUKASEWA merupakan perjanjian *capital lease*.

Operating Lease

Pada *operating lease*, *lessor* membeli barang dan kemudian menyewakan kepada *lessee* untuk jangka waktu tertentu. Dalam praktik *lessee* membayar *rental* yang besarnya secara keseluruhan tidak meliputi harga barang serta biaya yang telah dikeluarkan *lessor*. Di dalam menentukan besarnya *rental*, *lessor* tidak memperhitungkan biaya-biaya tersebut karena setelah masa *lease* berakhir diharapkan harga barang

tersebut masih cukup tinggi, di sini secara jelas tidak ditentukan adanya nilai sisa serta hak opsi bagi *lessee*. Setelah masa *lease* berakhir *lessor* merundingkan kemungkinan dilakukannya kontrak *lease* yang baru dengan *lessee* yang sama atau mencari *lessee* yang baru. Pada *operating lease* ini biasanya *lessee* bertanggung jawab mengenai perawatan barang yang di*lease*. Barang-barang yang sering dijadikan objek *lease* dalam *operating lease* biasanya barang-barang yang mempunyai nilai tinggi seperti alat-alat berat, traktor, truk, mesin-mesin dan lain sebagainya.

Merujuk pada pokok perjanjian *lease* yang terjadi pada tanggal 4 April 2007, dapat dihitung besarnya total pembayaran yang harus dikeluarkan PT SUKASEWA. Perhitungan ini dilakukan karena pihak *lessor* menginginkan pembayaran sebesar Rp.26.800.000,00 bersih (*netto*) masuk ke kas *lessor* tanpa adanya potongan.

Langkah I:

Menghitung penghasilan bruto dan besarnya PPh Pasal 23 yang harus dipungut PT SUKASEWA selaku pengusaha kena pajak (PKP):

1. 15% dari perkiraan penghasilan *netto*.
2. Perkiraan penghasilan *netto* = 20% x penghasilan *bruto*.

Penghasilan *bruto*:

$$\frac{100}{97} \times \text{Rp.}26.800.000,00 = \text{Rp.}27.629.000,00 \text{ (pembulatan)}$$

Perkiraan penghasilan *netto*:

$$20\% \times \text{Rp.}27.629.000,00 = \text{Rp.}5.525.800,00$$

PPh Pasal 23:

$$15\% \times \text{Rp.}5.525.800,00 = \text{Rp.}829.000,00$$

Langkah II:

Menghitung besarnya PPN 10% dari Rp.27.629.000,00

$$10\% \times \text{Rp.}27.629.000,00 = \text{Rp.}2.762.900,00$$

Jadi uang kas yang harus dikeluarkan oleh PT SUKASEWA terkait dengan perjanjian *lease* ini sebesar:

Penghasilan netto	Rp.26.800.000,00
PPH Pasal 23 dipotong	<u>Rp. 829.000,00</u>
Penghasilan bruto (tanpa PPN)	Rp.27.629.000,00
PPN 10 %	<u>Rp. 2.762.900,00</u>
Jumlah	Rp.30.391.900,00

Sedangkan uang kas yang diserahkan kepada pihak *lessor* adalah sebesar:

Penghasilan netto	Rp.26.800.000,00
PPN (Masukan bagi <i>lessee</i>)	<u>Rp. 2.762.900,00</u>
Jumlah	Rp.29.562.900,00

Transaksi *leasing* yang telah dilakukan oleh PT SUKASEWA ini dapat digolongkan ke dalam *operating lease*. Hal ini didasarkan pada pasal 4 keputusan menteri keuangan nomor 1169/KMK.01/1991 yakni kegiatan *leasing* digolongkan sebagai *operating lease* jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Jumlah pembayaran *leasing* selama masa *lease* pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang di*lease* ditambah dengan keuntungan *lessor*.
2. Perjanjian *leasing* tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi *lessee*.

Pembayaran *leasing* oleh PT SUKASEWA kepada *lessor* sebesar Rp.30.391.900,00 tidak bisa menutupi harga mobil truk box dengan merek Mitsubishi tipe Colt *Diesel* 100PS 4 roda yang harganya melebihi Rp.100.000.000,00, Selain itu di dalam perjanjian di atas tidak ada hak opsi bagi PT SUKASEWA.

Capital Lease

Berdasarkan tabel analisa hasil data-data di atas maka perlakuan akuntansi dan perpajakan atas *capital lease* pada PT SUKASEWA adalah sebagai berikut:

Jurnal yang dibuat oleh PT SUKASEWA sebagai *lessee* pada tanggal 28 Juni 2008 adalah:

Kendaraan <i>leasing</i>	Rp. 125.750.000,00
Hutang <i>leasing</i>	Rp. 113.175.000,00
Hutang Hak Opsi	Rp. 12.575.000,00
(mencatat pengakuan <i>leasing</i>)	

<i>Security deposit</i>	Rp. 12.575.000,00
Kas	Rp. 12.575.000,00
(mencatat pembayaran <i>security deposit</i>)	

Hutang <i>leasing</i>	Rp. 8.747.500,00
PPN (Masukan)	Rp. 12.575.000,00
Kas	Rp. 21.322.500
(mencatat pembayaran <i>lease</i> I ditambah dengan PPN)	

Penyerahan barang kena pajak dalam hal ini adalah truk dari *supplier* kepada PT SUKASEWA, terutang PPN. Oleh karena truk ini digunakan PT SUKASEWA untuk proses produksi maka *lessor* tidak berhak mengkreditkan PPN Masukan atas penyerahan truk kepada *lessee*. Sedangkan yang berhak mengkreditkan PPN masukan adalah PT SUKASEWA. Dengan demikian, faktur pajak truk yang dibuat *supplier* adalah atas nama dan NPWP PT SUKASEWA. Pada akhir masa pajak pertambahan nilai, PPN masukan ini dapat dikreditkan dengan PPN keluaran.

Di dalam jurnal yang dibuat oleh PT SUKASEWA tidak dijumpai adanya hutang PPh pasal 23. Hal ini dikarenakan menurut Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169/KMK.01/1991 pasal 16 ayat 2 *lessee* dalam hal ini PT SUKASEWA tidak memotong pajak penghasilan pasal 23 atas pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang berdasarkan perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi. Adapun jurnal pembayaran *lease* untuk triwulan kedua adalah:

Hutang <i>leasing</i>	Rp. 5.614.675,00
Beban bunga	Rp. 3.132.825,00
Kas	Rp. 8.747.500,00
(mencatat pembayaran <i>lease</i> ke II dan seterusnya)	

Jurnal yang dibuat oleh PT SUKASEWA untuk triwulan ketiga sampai triwulan keenambelas adalah sama tetapi jumlah angkanya disesuaikan menurut tabel pembayaran *lease*. Pada akhir tahun perusahaan akan mencatat adanya penyusutan kendaraan *leasing*. Sesuai dengan pokok perjanjian *lease* bahwa PT SUKASEWA menggunakan metode garis lurus dalam penyusutan kendaraan *leasing* dan umur ekonomis truk ditaksir selama sepuluh tahun, maka besarnya penyusutan truk adalah:

$$\begin{aligned} & \text{Besar penyusutan per tahun} \\ &= \frac{Rp.125.750.000,00 - Rp.12.575.000,00}{10 \text{ tahun}} \\ &= \frac{Rp.113.175.000,00}{10 \text{ tahun}} = Rp. 11.317.500,00/\text{tahun} \end{aligned}$$

Karena pada tahun 2008 PT SUKASEWA hanya menggunakan truk selama enam bulan, maka besarnya penyusutan adalah:

$$\left(\frac{6}{12} \right) \times Rp.11.317.500 = Rp.5.658.750,00$$

Penyusutan untuk tahun-tahun ke depan yaitu tahun 2007, 2008 dan 2009 sebesar Rp.11.317.500,00. Sedangkan besarnya penyusutan untuk tahun 2010 selama enam bulan yaitu tanggal 1 Januari sampai 30 Juni 2010 adalah:

$$\left(\frac{6}{12} \right) \times Rp.11.317.500 = Rp.5.658.750,00$$

Jurnal penyesuaian penyusutan kendaraan pada tanggal 31 Desember 2008 adalah:

Penyusutan kendaraan <i>leasing</i>	Rp.5.658.750,00
Akumulasi penyusutan Kend. <i>leasing</i>	Rp.5.658.750,00
(mencatat penyesuaian penyusutan kendaraan <i>leasing</i>)	

Dari beberapa penjelasan di atas akan tampak rekening kendaraan *leasing* dan hutang *leasing* pada laporan neraca akhir tahun 2008 sebagaimana diperlihatkan di bawah ini.

Neraca Tahun 2008

PT SUKASEWA			
NERACA			
PER 31 DESEMBER 2008			
Aktiva		Kewajiban & Modal	
Aktiva Lancar		Hutang Lancar	
Kas	Rp 509.906.988	Hutang Usaha	Rp 175.737.330
Piutang Dagang	Rp 940.233.517	Hutang Gaji	Rp 32.211.286
Persediaan		Hutang Bank	Rp 250.560.000
Bahan	Rp 127.898.543	Hutang Pajak	Rp 60.478.423
Barang Dalam Proses	Rp 123.168.778	Hutang Hak Opsi	Rp 12.575.000
Barang Jadi	Rp 110.908.700	Jumlah Hutang Lancar	Rp 531.562.039
Uang Muka Pajak	Rp 27.541.050		
Perlengkapan	Rp 22.350.000	Hutang Jangka Panjang	
Security Deposit	Rp 12.575.000	Hutang Lease	Rp 93.029.710
Jumlah Aktiva Lancar	Rp 1.874.582.576	Hutang Bank	Rp 250.500.000
		Hutang Lain-lain	Rp 120.500.400
		Jumlah Hutang Jangka Panjang	Rp 464.030.110
Aktiva Tetap		Modal	
Tanah	Rp 210.750.000	Modal Saham	Rp 650.000.000
Bangunan	Rp 324.506.000	Laba ditahan	Rp 760.717.797
Akm. Peny. Bangunan	Rp (206.872.505)		
Mesin & Peralatan	Rp 163.805.000		
Akm. Peny. Mesin & Peralatan	Rp (135.139.125)		
Kendaraan	Rp 144.730.000		
Akm. Peny. Kendaraan	Rp (90.456.250)	Jumlah Modal	Rp 1.410.717.797
Peralatan Kantor	Rp 9.390.000		
Akm. Peny. Kantor	Rp (9.077.000)		
Kendaraan Lease	Rp 125.750.000		
Akm. Peny. Kendaraan Lease	Rp (5.658.750)		
Jumlah Aktiva Tetap	Rp 531.727.370		
Total Aktiva	Rp 2.406.309.946	Total Kewajiban & Modal	Rp 2.406.309.946

Ada beberapa perbedaan antara peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan sehubungan dengan penyajian transaksi *leasing* dalam laporan keuangan di akhir tahun. Di dalam Standar Akuntansi Keuangan disebutkan bahwa transaksi *leasing* diperlakukan dan dicatat sebagai aktiva tetap dan kewajiban pada awal masa *leasing* setiap pembayaran ditambah nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar oleh *lessee* pada akhir masa *leasing*. Selama masa *leasing* setiap pembayaran *leasing* dialokasikan dan dicatat sebagai angsuran pokok kewajiban *leasing* dan beban bunga, dari pernyataan di atas jelas bahwa pembayaran *rental* dialokasikan sebagai angsuran pokok kewajiban yang

akan dicatat di sisi debet dan akhirnya akan mengurangi besarnya kewajiban *leasing* yang tercantum dalam neraca.

Besarnya angsuran pokok kewajiban PT SUKASEWA untuk tahun 2008 sebesar Rp.20.145.290,00. Adapun sebagian lainnya akan dialokasikan sebagai beban bunga yang akan dicatat di sisi debet dan akan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi sebagai pengurangan pendapatan. Untuk tahun 2008 besarnya beban bunga *leasing* yang ditanggung oleh PT SUKASEWA adalah Rp.6.097.210,00.

Berbeda dengan peraturan perpajakan Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 pasal 16 ayat 1 (c), pembayaran *leasing* yang dibayar atau terutang oleh *lessee* kecuali pembebanan atas tanah merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto *lessee* sepanjang transaksi *leasing* tersebut memenuhi ketentuan pasal 3 keputusan ini. Sedangkan pasal 3 berbunyi:

Kegiatan *leasing* digolongkan sebagai *leasing* dengan hak opsi apabila memenuhi semua kriteria berikut:

1. Jumlah pembayaran *leasing* selama masa *leasing* pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan *lessor*.
2. Masa *leasing* ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk barang modal golongan I, 3 (tiga) tahun untuk barang modal golongan II dan III, dan 7 (tujuh) tahun untuk golongan bangunan.
3. Perjanjian *leasing* memuat ketentuan mengenai hak opsi bagi *lessee*.

Berdasarkan kriteria pasal 3 bahwa perjanjian *leasing* yang dilakukan oleh PT SUKASEWA telah memenuhi persyaratan untuk digolongkan sebagai *capital lease*. Sehingga pembayaran *lease* diakui sebagai beban yang akan masuk di dalam laporan laba rugi sebagai pengurangan pendapatan. Di mana menurut perpajakan angsuran pokok dan biaya bunga dialokasikan sebagai pengurangan pendapatan. Pada tahun 2008 besarnya beban *lease* yang telah dibayar oleh PT SUKASEWA adalah Rp.26.242.500,00. Jadi beban bunga *lease* pada laporan laba rugi juga harus dikoreksi dan dijadikan satu dalam pembayaran beban *lease*.

Laporan Laba Rugi Komersial Tahun 2008

PT SUKASEWA			
LAPORAN LABA RUGI			
Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2008			
Penjualan		Rp	1.869.320.000
Harga Pokok Penjualan		Rp	(977.221.851)
Laba Kotor		Rp	892.098.149
Beban Pemasaran			
Beban Gaji	Rp	67.775.600	
Beban angkut penjualan	Rp	35.657.900	
Beban Penyusutan Kendaraan	Rp	14.473.000	
Beban Penyusutan Kendaraan Leasing	Rp	5.658.750	
Beban Pemeliharaan Kendaraan	Rp	15.650.000	
Beban Bahan Bakar	Rp	45.034.200	
Beban Telepon	Rp	14.132.410	
Beban <i>lease</i>	Rp	6.907.250	
Jumlah Beban Pemasaran	Rp	205.289.110	
Beban Adm & Umum			
Beban Gaji	Rp	170.230.900	
Beban Penyusutan Bangunan	Rp	1.622.530	
Beban Penyusutan Peralatan Kantor	Rp	1.878.000	
Beban Perlengkapan	Rp	3.950.000	
Beban Listrik	Rp	10.440.500	
Beban Air	Rp	732.000	
Jumlah Beban Adm & Umum	Rp	188.853.930	
Total Beban		Rp	(394.143.040)
Pendapatan & Beban Lain-lain			
Beban Bunga	Rp	75.080.980	
Beban Bunga <i>Lease</i>	Rp	6.097.210	
Jumlah Pendapatan & Beban Lain-lain		Rp	(81.178.190)
Laba Sebelum Pajak		Rp	416.776.919
Beban Pajak		Rp	(104.354.798)
Laba Setelah Pajak		Rp	312.422.121

Perbedaan lain adalah menurut Standar Akuntansi Keuangan. Aktiva yang *di/lease* harus didepresiasi dalam jumlah yang wajar berdasarkan taksiran masa manfaatnya. Besar penyusutan yang dilakukan PT SUKASEWA terhadap truk yang *di/lease* pada tahun 2008 adalah sebesar Rp.5.658.750,00. Sedangkan menurut peraturan perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169/KMK.01/1991 pasal 16 ayat 1 (a) selama masa *leasing*, *lessee* tidak boleh melakukan

penyusutan atas barang modal yang *di/lease*, sampai saat *lessee* menggunakan hak opsi untuk membeli. Jadi menurut perpajakan penyusutan yang dilakukan terhadap truk yang *di/lease* tidak berlaku selama hak opsi belum dipergunakan. Sehingga dalam penyusunan laporan keuangan fiskal biaya penyusutan aktiva yang *di/lease* harus dikoreksi. Untuk memperjelas pengaruh dari pemaparan di atas dapat dilihat perbandingan antara laporan laba rugi komersial dan laba rugi fiskal tahun 2008 berikut.

Laporan Laba rugi Fiskal Tahun 2008

PT SUKASEWA			
LAPORAN LABA RUGI FISKAL			
Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2008			
Penjualan		Rp	1.869.320.000
Harga Pokok Penjualan		Rp	(976.198.070)
<i>Laba Kotor</i>		<i>Rp</i>	<i>893.121.930</i>
Beban Pemasaran			
Beban Gaji	Rp	67.775.600	
Beban angkut penjualan	Rp	35.657.900	
Beban Penyusutan Kendaraan	Rp	18.091.250	
Beban Pemeliharaan Kendaraan	Rp	15.650.000	
Beban Bahan Bakar	Rp	45.034.200	
Beban Telepon	Rp	14.132.410	
Beban <i>lease</i>	Rp	33.149.750	
Jumlah Beban Pemasaran	Rp	229.491.110	
Beban Adm & Umum			
Beban Gaji	Rp	170.230.900	
Beban Penyusutan Bangunan	Rp	1.622.530	
Beban Penyusutan Peralatan Kantor	Rp	391.250	
Beban Perlengkapan	Rp	3.950.000	
Beban Listrik	Rp	10.440.500	
Beban Air	Rp	732.000	
Jumlah Beban Adm & Umum	Rp	187.367.180	
Total Beban		Rp	(416.858.290)
Pendapatan & Beban Lain-lain			
Beban Bunga	Rp	70.080.980	
Jumlah Pendapatan & Beban Lain-lain		Rp	(70.080.980)
Penghasilan Kena Pajak		Rp	406.182.660

Jumlah beban pajak penghasilan badan akhir tahun pada laporan laba rugi komersial di atas diperoleh dari perhitungan laba sebelum pajak laporan keuangan fiskal dengan perhitungan sebagai berikut:

10%	X	Rp. 50.000.000	=	Rp. 5.000.000,00
15%	X	Rp. 50.000.000	=	Rp. 7.500.000,00
30%	X	<u>Rp. 306.182.660</u>	=	<u>Rp. 91.354.798,00</u>
		Rp. 406.182.660		Rp.104.354.798,00

Bila pada tanggal 31 Agustus 2010 PT SUKASEWA memutuskan untuk menggunakan hak opsi untuk membeli truk yang di/lease dengan menggunakan *security deposit*. Pencatatan yang dibuat oleh PT SUKASEWA atas transaksi ini adalah:

Kendaraan	Rp. 69.162.500,00
Akm Peny Kendaraan <i>Leasing</i>	Rp. 56.587.500,00
Hutang Hak opsi	Rp. 12.575.000,00
Kendaraan <i>Leasing</i>	Rp. 125.750.000,00
<i>Security deposit</i>	Rp. 12.575.000,00
(mencatat penggunaan hak opsi)	

Nilai buku pada akhir masa *leasing* inilah yang akan menjadi dasar bagi PT SUKASEWA untuk melakukan penyusutan truk yang akan dibeli. Sedangkan jangka waktu yang dipergunakan adalah sisa umur ekonomis truk tersebut, dalam hal ini adalah enam tahun. Mulai tanggal 1 Juli 2010 perpajakan telah mengakui beban penyusutan yang dilakukan oleh PT SUKASEWA sebagai pengurang pendapatan pada laporan laba rugi.

Terdapat perbedaan antara akuntansi komersial dengan perpajakan dalam penentuan nilai yang digunakan sebagai dasar dalam penyusutan truk yang dibeli. Seperti yang telah disebut di atas bahwa akuntansi komersial menggunakan nilai buku pada saat akhir masa *leasing* sebagai dasar untuk melakukan penyusutan terhadap truk yang dibeli. Berbeda dengan peraturan perpajakan Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169/KMK.01/1991 pasal 16 ayat 1 (b) yang menyantumkan bahwa setelah *lessee* menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut *lessee* melakukan penyusutan dengan dasar penyusutan adalah nilai sisa (*Residual Value*) barang modal bersangkutan. Jadi menurut perpajakan yang menjadi dasar adalah nilai

sisanya yakni sebesar Rp.12.575.000,00. Sedangkan akuntansi komersial menggunakan nilai buku pada saat akhir masa *leasing* sebesar Rp.69.162.500,00 sebagai dasar penyusutan. Perbedaan ini sifatnya tetap, oleh sebab itu PT SUKASEWA harus melakukan penyesuaian pada saat membuat laporan keuangan fiskal. Perbedaan ini nantinya akan menyebabkan perbedaan perhitungan pajak penghasilan antara akuntansi komersial dengan akuntansi perpajakan.

Operating Lease

Merujuk pada analisa hasil data-data di atas dapat dibuat pembahasan sebagai berikut. Jurnal yang dibuat oleh PT SUKASEWA berkaitan dengan transaksi *operating lease* di atas adalah:

Beban Lain-lain (adm & umum)	Rp.620.000,00
Kas	Rp.620.000,00
(mencatat biaya yang timbul karena transaksi <i>operating lease</i>)	

Beban <i>lease</i> Dibayar di Muka	Rp.27.629.000,00
PPN (Masukan)	Rp. 2.762.900,00
Kas	Rp.29.562.900,00
Hutang PPh ps1 23	Rp. 829.000,00
(mencatat pembayaran <i>rental operating lease</i>)	

Security deposit	Rp.4.500.000,00
Kas	Rp.4.500.000,00
(mencatat pembayaran <i>security deposit</i>)	

Di dalam melakukan transaksi *operating lease* PT SUKASEWA memberikan uang sebesar Rp 4.500.000,00 kepada *lessor* yang dipergunakan sebagai *security deposit*. *Security deposit* ini telah dikembalikan pada saat transaksi *leasing* berakhir.

Jurnal yang dibuat pada tanggal 4 April 2008 yaitu pada saat transaksi *leasing* berakhir adalah sebagai berikut:

Kas	Rp.4.500.000,00
Security deposit	Rp. 4.500.000,00
(mencatat pengembalian <i>security deposit</i>)	

Berdasarkan pasal 17 ayat 2 (a) Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169/KMK.01/1991 bahwa pembayaran *leasing* tanpa hak opsi atau *operating lease* yang dibayar atau terutang oleh *lessee* adalah biaya yang dapat dikurangkan dan penghasilan bruto. Jadi berdasarkan pasal 17 ayat 2 (a) Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169/KMK.01/1991 ini beban sewa yang dibayar oleh PT SUKASEWA kepada *lessor* sebesar Rp.27.629.000,00 dianggap sebagai biaya operasional perusahaan sehingga bisa menjadi pengurang pendapatan kotor di dalam perhitungan laporan laba rugi.

PT SUKASEWA memotong pajak penghasilan pasal 23 atas penghasilan *lease* yang diterima oleh *lessor*. Besarnya pemotongan yang dilakukan oleh PT SUKASEWA sebesar 15% dari perkiraan penghasilan bersih. Karena penerima *rental/lessor* disini merupakan suatu badan usaha maka perkiraan penghasilan bersih sebesar 20% dari jumlah penghasilan kotor. Sehingga dengan ketentuan di atas besarnya PPh pasal 23 yang dipotong oleh *lessee* adalah:

$$\begin{aligned}\text{PPh pasal 23} &= 15\% \times (20\% \times \text{Rp.27.629.000,00}) \\ &= 15\% \times \text{Rp.5.525.800,00} \\ &= \text{Rp.829.000,00}\end{aligned}$$

Pemotongan PPh pasal 23 yang dilakukan oleh PT SUKASEWA atas pembayaran sewa didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169/KMK.01/1991 pasal 17 ayat 1 (a) "seluruh pembayaran *leasing* tanpa hak opsi yang diterima atau diperoleh *lessor* merupakan objek pajak penghasilan pasal 23". PT SUKASEWA harus menyetorkan pajak penghasilan pasal 23 yang telah dipotong kepada kantor pos atau bank persepsi paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Dan wajib melaporkan kepada kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dalam hal ini PT SUKASEWA wajib menyetorkan pajak selambat-lambatnya tanggal 10 Mei 2007 dan melaporkannya paling lambat tanggal 20 Mei 2007.

Selain itu, seperti halnya transaksi *capital lease*, di dalam melakukan *operating lease*, *lessee* dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% dari *lease* yang dibayarkan. Pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi *operational lease* didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169/KMK.01/1991 pasal 18 yaitu atas penyerahan jasa dalam transaksi *leasing* tanpa hak opsi dari

lessor kepada *lessee* terutang pajak pertambahan nilai. Pada akhir masa pajak PT SUKASEWA dapat mengkreditkan PPN masukan dengan PPN keluaran.

Di dalam melakukan penjurnalan berkaitan dengan transaksi *operating lease* yang dilakukan oleh PT SUKASEWA tidak dijumpai adanya penyusutan, dikarenakan yang berhak melakukan penyusutan terhadap barang yang *dilease* adalah *lessor*. Di samping itu karena PT SUKASEWA menggunakan metode *accrual* dalam pencatatan akuntansinya, maka Beban *operating lease* tidak dibebankan sekaligus melainkan dibebankan secara bertahap sesuai dengan waktu atau bulan penggunaan kendaraan yang *dilease*.

Maka pada akhir tahun 2007 beban *lease* yang diakui PT SUKASEWA adalah sebesar:

$$\left(\frac{9}{12}\right) \times Rp.27.629.000,00 = Rp.20.721.750,00$$

PT SUKASEWA membuat jurnal penyesuaian pada akhir tahun 2007 sebagai berikut:

Beban <i>lease</i>	Rp. 20.721.750,00
Biaya <i>lease</i> dibayar dimuka	Rp. 20.721.750,00
(mencatat penyesuaian biaya <i>lease</i>)	

Untuk lebih memperjelas dampak dari perlakuan akuntansi di atas dapat dilihat pada neraca tahun 2007 berikut ini.

Neraca Tahun 2007

PT SUKASEWA			
NERACA			
PER 31 DESEMBER 2007			
Aktiva		Kewajiban & Modal	
Aktiva Lancar		Hutang Lancar	
Kas	Rp 432.890.000	Hutang Usaha	Rp 105.656.300
Hutang Dagang	Rp 886.448.464	Hutang Gaji	Rp 30.454.309
Persediaan		Hutang Bank	Rp 327.085.000
Bahan	Rp 110.998.047	Hutang Pajak	Rp 64.478.423
Barang Dalam Proses	Rp 108.131.138	Jumlah Hutang Lancar	Rp 527.674.032
Barang Jadi	Rp 113.386.806		
Biaya/lease dibayar dimuka	Rp 6.907.250	Hutang Jangka Panjang	
Perlengkapan	Rp 14.750.000		
Security Deposit	Rp 4.500.000	Hutang Bank	Rp 275.600.700
Jumlah Aktiva Lancar	Rp 1.678.011.705	Hutang Lain-lain	Rp 176.565.400
		Jumlah Hutang Jangka Panjang	Rp 452.166.100
Aktiva Tetap			
Tanah	Rp 210.750.000	Modal	
Bangunan	Rp 324.506.000	Modal Saham	Rp 650.000.000
Akm Peny. Bangunan	Rp (190.647.275)	Laba ditahan	Rp 508.764.423
Mesin & Peralatan	Rp 163.805.000		
Akm Peny. Mesin & Peralatan	Rp (118.758.625)	Jumlah Modal	Rp 1.158.764.423
Kendaraan	Rp 144.730.000		
Akm Peny. Kendaraan	Rp (75.983.250)		
Peralatan Kantor	Rp 9.390.000		
Akm Peny. Kantor	Rp (7.199.000)		
Jumlah Aktiva Tetap	Rp 460.592.850		
Total Aktiva	Rp 2.138.604.555	Total Kewajiban & Modal	Rp 2.138.604.555

Sedangkan untuk melihat perbedaan perlakuan perpajakan dengan perlakuan akuntansi umum dapat dilihat pada laporan laba rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal pada halaman-halaman berikut.

Laporan Laba Rugi Tahun 2007

PT SUKASEWA			
LAPORAN LABA RUGI			
Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2007			
Penjualan		Rp	1.709.879.200
Harga Pokok Penjualan		Rp	(951.994.328)
<i>Laba Kotor</i>		<i>Rp</i>	<i>757.884.872</i>
Beban Pemasaran			
Beban Gaji	Rp	66.740.800	
Beban angkut penjualan	Rp	32.456.765	
Beban Penyusutan Kendaraan	Rp	14.473.000	
Beban Pemeliharaan Kendaraan	Rp	13.255.000	
Beban Bahan Bakar	Rp	33.342.000	
Beban Telepon	Rp	12.376.000	
Beban <i>Lease</i>	Rp	20.721.750	
Jumlah Beban Pemasaran	Rp	193.365.315	
Beban Adm & Umum			
Beban Gaji	Rp	165.765.000	
Beban Penyusutan Bangunan	Rp	1.622.530	
Beban Penyusutan Peralatan Kantor	Rp	1.878.000	
Beban Perlengkapan	Rp	4.150.000	
Beban Listrik	Rp	9.152.400	
Beban Air	Rp	1.380.000	
Beban Lain-lain	Rp	620.000	
Jumlah Beban Adm & Umum	Rp	184.567.930	
Total Beban		Rp	(377.933.245)
Pendapatan & Beban Lain-lain			
Beban Bunga	Rp	65.987.000	
Jumlah Pendapatan & Beban Lain-lain		Rp	(65.987.000)
Laba Sebelum Pajak		Rp	313.964.627
Beban Pajak		Rp	(75.734.526)
Laba Setelah Pajak		Rp	238.230.101

Laporan Laba Rugi Fiskal Tahun 2007

PT SUKASEWA			
LAPORAN LABA RUGI FISKAL			
Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2007			
Penjualan		Rp	1.709.879.200
Harga Pokok Penjualan		Rp	(956.089.453)
<i>Laba Kotor</i>		<i>Rp</i>	<i>753.789.747</i>
Beban Pemasaran			
Beban Gaji	Rp	66.740.800	
Beban angkut penjualan	Rp	32.456.765	
Beban Penyusutan Kendaraan	Rp	18.091.250	
Beban Pemeliharaan Kendaraan	Rp	13.255.000	
Beban Bahan Bakar	Rp	33.342.000	
Beban Telepon	Rp	12.376.000	
Beban <i>Lease</i>	Rp	20.721.750	
Jumlah Beban Pemasaran	Rp	196.983.565	
Beban Adm & Umum			
Beban Gaji	Rp	165.765.000	
Beban Penyusutan Bangunan	Rp	1.622.530	
Beban Penyusutan Peralatan Kantor	Rp	2.347.500	
Beban Perlengkapan	Rp	4.150.000	
Beban Listrik	Rp	9.152.400	
Beban Air	Rp	1.380.000	
Beban Lain-lain	Rp	620.000	
Jumlah Beban Adm & Umum	Rp	185.037.430	
Total Beban		Rp	(382.020.995)
Pendapatan & Beban Lain-lain			
Beban Bunga	Rp	60.987.000	
Jumlah Pendapatan & Beban Lain-lain		Rp	(60.987.000)
Penghasilan Kena Pajak		Rp	310.781.752

Pajak penghasilan badan PT SUKASEWA dihitung dari laba sebelum pajak laporan laba rugi fiskal tahun 2007. Perhitungannya yaitu:

10%	X	Rp. 50.000.000	=	Rp. 5.000.000,00
15%	X	Rp. 50.000.000	=	Rp. 7.500.000,00
30%	X	<u>Rp. 210.781.752</u>	=	<u>Rp. 63.234.526,00</u>
		Rp. 310.781.752		Rp. 75.734.526,00

SOAL LATIHAN

1. Pada tanggal 11 Agustus 2008 PT DEMENSEWA me-*lease* sebuah mobil yang memiliki harga wajar Rp 87.250.000,00 dari pihak *lessor* PT SEGALASEWA MOTOR dengan perjanjian sebagai berikut:
 - (1) Jangka waktu *leasing* adalah 50 bulan dengan syarat perjanjian *lease* tidak bisa dibatalkan.
 - (2) Pembayaran *lease* sebesar Rp 2.000.000,00 per bulan (dibayar setiap akhir bulan). (Nilai sekarang/*Present value* untuk 1% per bulan adalah sebesar Rp 78.400.000,00.)
 - (3) Taksiran nilai sisa mobil pada akhir bulan ke-50 adalah sebesar Rp.11.800.000,00. PT SEGALASEWA MOTOR menjamin nilai sisa sebesar Rp.11.800.000,00 tersebut. (Nilai sekarang/*Present value* untuk 1% per bulan adalah sebesar Rp 7.150.000,00.)
 - (4) Taksiran umur ekonomis mobil adalah enampuluh bulan. Di mana PT DEMENSEWA memiliki hak opsi di akhir masa *leasing* dengan harga sebesar nilai sisa.
 - (5) PT DEMENSEWA membayar *security deposit* sebesar Rp.11.800.000,00 atau sebesar nilai sisa sebagai jaminan, dan di akhir masa *leasing* akan dikembalikan jika PT DEMENSEWA tidak menggunakan hak opsinya.
 - (6) Tarif bunga *leasing* sebesar 12% per tahun atau 1% per bulan.

DIMINTA:

- a. Apakah jenis perjanjian leasing yang dilakukan oleh PT DEMENSEWA?
 - b. Buatlah jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi perolehan aktiva tetap *leasing* oleh PT DEMENSEWA.
 - c. Hitung penyusutan pada tahun 2008 dan 2009 yang harus diakui oleh PT DEMENSEWA (metode yang digunakan oleh PT DEMENSEWA adalah garis lurus).
 - d. Buatlah jurnal untuk mencatat pembayaran *leasing* pada bulan pertama oleh PT DEMENSEWA. Angka-angka yang disebutkan di atas belum termasuk (*excluded*) PPN.
2. Pada tanggal 1 Januari 2008 PT NIDJI melakukan *leasing* sebuah bangunan kepada PT LETTO. Berikut ini adalah semua informasi

yang berkaitan dengan kegiatan *leasing* tersebut (harga-harga belum termasuk PPN 10%):

- (1) Jangka waktu *leasing* adalah sepuluh tahun.
- (2) Harga perolehan bangunan adalah Rp 4.500.000.000,00 dan dibeli secara tunai oleh PT LETTO pada tanggal 1 Januari 2008.
- (3) Bangunan disusutkan dengan metode garis lurus. Taksiran umur ekonomisnya adalah 25 tahun.
- (4) Pembayaran lease adalah sebesar Rp 275.000.000,00 yang dilakukan pada setiap akhir tahun.
- (5) PBB bangunan tersebut sebesar Rp 8.500.000,00 dan asuransinya sebesar Rp 10.000.000,00 diakui oleh PT NIDJI pada tahun pertama. Pembayaran PBB dibebankan kepada PT NIDJI sedangkan asuransi dibebankan kepada PT LETTO; pembayaran kedua beban tersebut dilakukan pada akhir tahun.

DIMINTA:

- a. Apakah jenis perjanjian *leasing* yang dilakukan oleh PT NIDJI?
- b. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi pada tahun 2008 di PT NIDJI.
- c. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi pada tahun 2008 di PT LETTO.
- d. Jika PT LETTO membayar Rp 300.000.000,00 kepada pialang (*broker*) pada tanggal 1 Januari 2008 sebagai *fee* karena telah menemukan *lessee*, buatlah pula jurnal untuk mencatat transaksi ini.

Petunjuk: PPh pasal 23 yang dipungut atas jasa adalah sebesar 4,5% dari bruto, sedangkan PPh pasal 4 (2) yang dipungut adalah sebesar 10% dari bruto.

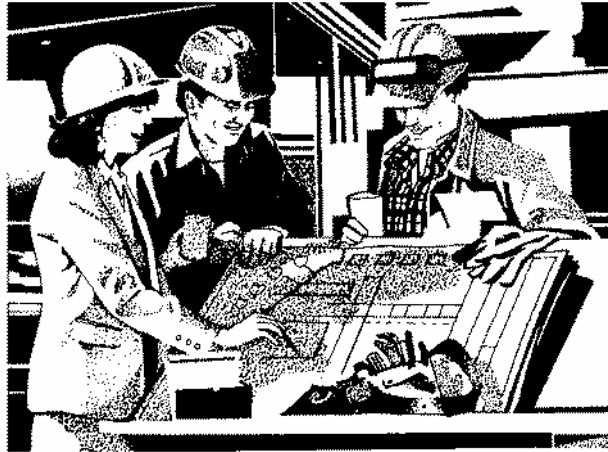
3. Pada tanggal 1 Januari 2008 PT AREMA memiliki sebuah kontrak dengan PT DELTRAS untuk *leasing* sebuah mesin dengan jangka waktu 5 tahun. Kesepakatan pembayaran sebesar Rp 94.732.000,00 (termasuk biaya pengurusan sebesar Rp 6.000.000,00; belum termasuk PPN 10%) dilakukan pada setiap awal tahun dimulai pada tanggal 1 Januari 2008. Beban asuransi dan pemeliharaan sebesar kira-kira Rp 4.000.000,00 per tahun serta pajak-pajak terkait yang harus dibayar merupakan kewajiban pihak *lessee*. Mesin ini dikapitalisasikan sebesar Rp 370.000.000,00 dan disusutkan menggunakan metode garis lurus. Tarif bunga *leasing* sebesar 12%

per tahun. Pada akhir masa kontrak mesin tersebut akan menjadi milik PT AREMA. Aset tersebut memiliki taksiran umur kegunaan selama 5 tahun, tanpa nilai sisa.

DIMINTA:

- a. Apakah jenis perjanjian *leasing* yang dilakukan oleh PT AREMA?
- b. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi pada tanggal 1 Januari 2008 di PT AREMA.
- c. Hitung penyusutan pada tahun 2008 dan buat jurnal yang harus dicatat oleh PT AREMA (metode yang digunakan oleh PT AREMA adalah saldo menurun berganda).
- d. Hitung beban bunga pada tahun 2008 dan buat jurnal yang harus dicatat oleh PT AREMA.
- e. Hitung pembayaran *lease* pada tanggal 31 Desember 2009 dan buat jurnal yang harus dicatat oleh PT AREMA, jika pemegang buku tidak membuat jurnal pembalik.
- f. Berapakah jumlah yang harus muncul dalam neraca PT AREMA tanggal 31 Desember 2008

BAB 2



AKUNTANSI untuk PERUSAHAAN KONSTRUKSI

- ☺ Metode Persentase-Penyelesaian
 - ☺ Metode Kontrak-Selesai
- ☺ Kerugian dalam Kontrak Jangka Panjang
 - ☺ Kerugian dalam Tahun Berjalan
- ☺ Kerugian pada Kontrak yang Merugi
 - ☺ Aspek Perpajakan

AKUNTANSI UNTUK PERUSAHAAN KONSTRUKSI



Perusahaan konstruksi biasanya terspesialisasi ke dalam beberapa tipe konstruksi tertentu. Dengan demikian ada (1) perusahaan konstruksi/kontraktor untuk perumahan publik dan privat, (2) kontraktor jalan dan jembatan, serta (3) kontraktor gedung-gedung perkantoran, hotel dan industri. Para kontraktor ini dapat berposisi sebagai kontraktor umum maupun subkontraktor. Kontraktor umum adalah pihak yang memenangkan sebuah penawaran lelang atau tender atas keseluruhan proyek dan kemudian membagikan sebagian pekerjaannya kepada para subkontraktor yang biasanya merupakan spesialis di bidang saluran, kelistrikan, pekerjaan-pekerjaan logam, serta jenis-jenis pekerjaan konstruksi lainnya.

TERMINOLOGI (Glosari)

Berikut ini adalah istilah-istilah yang sering dipakai dan ditemui berkaitan dengan kontrak konstruksi. Istilah-istilah ini terutama digunakan

dalam PSAK No. 34, standar akuntansi tentang Akuntansi Kontrak Konstruksi.

Kontrak konstruksi: suatu kontrak yang dinegosiasikan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi aset yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi dan fungsi atau tujuan atau penggunaan pokok.

Kontrak Harga Tetap: adalah kontrak konstruksi dengan syarat bahwa kontraktor telah menyetujui nilai kontrak yang telah ditentukan, atau tarif tetap yang telah ditentukan per unit output, yang dalam beberapa hal tunduk pada ketentuan-ketentuan kenaikan biaya.

Kontrak Biaya-Plus: kontrak konstruksi di mana kontraktor mendapatkan penggantian untuk biaya-biaya yang telah diizinkan atau telah ditentukan, ditambah imbalan dengan persentase terhadap biaya atau imbalan tetap.

Klaim : jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja atau pihak lain sebagai penggantian untuk biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak. Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan, dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.

Retensi : jumlah termin (*progress billings*) yang tidak dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut atau hingga telah diperbaiki.

Termin (*Progress Billing*): jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

Uang Muka : jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan.

Metode Akuntansi

Pada dasarnya akuntansi di perusahaan konstruksi tidak berbeda dengan akuntansi pada jenis perusahaan lain pada umumnya. Namun, salah satu masalah khusus pada perusahaan konstruksi yang mungkin tidak terdapat pada jenis perusahaan lainnya adalah yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan. Kebanyakan, pendapatan diakui pada saat penjualan (penyerahan) barang/jasa terjadi, karena hal-hal yang tidak pasti berkaitan dengan proses perolehan pendapatan tersebut, relatif tidak ada dan harganya pun telah diketahui. Namun dalam situasi tertentu, mungkin saja pendapatan diakui sebelum penyelesaian atau penyerahan terjadi. Salah satu situasi seperti itu kita temui pada akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang pada perusahaan konstruksi yang menerapkan metode persentase-penyelesaian (*percentage-of-completion method*).

Kontrak jangka panjang yang sejenis dengan kontrak konstruksi/pembangunan gedung atau jembatan, seperti kontrak pengembangan pesawat terbang komersial dan militer, sistem pengiriman senjata, dan perangkat penjelajahan ruang angkasa sekalipun, misalnya, seringkali mengharuskan penjual (pembuat) melakukan penagihan kepada pembeli beberapa kali sepanjang proses pembuatan atau penyelesaian pekerjaannya ketika tahapan-tahapan tertentu dalam pekerjaan tersebut telah terselesaikan. Ketika pekerjaan itu terdiri dari beberapa bagian yang dapat dipisahkan, seperti sebuah gedung yang terdiri dari beberapa lantai, atau proyek jalan raya, maka penagihan mungkin dilakukan pada tahapan penyelesaian tertentu, misalnya pada saat penyelesaian setiap satu lantai gedung atau setiap penyelesaian 10 kilometer jalan. Kontrak-kontrak semacam itu memungkinkan penyerahan pekerjaan secara bertahap dan akuntansi juga harus melaporkannya dengan mencatat dan mengakui penjualan pada setiap tahapan penyerahan.

Ada dua metode akuntansi yang amat berbeda untuk pengakuan dalam pekerjaan dengan kontrak jangka panjang ini, yaitu:

1. **METODE PERSENTASE-PENYELESAIAN (*PERCENTAGE-OF-COMPLETION METHOD*)**. Pendapatan dan laba kotor dalam metode ini diakui pada setiap periode/tahun buku dengan didasarkan pada perkembangan pekerjaan—atau persentase-penyelesaiannya. Biaya Konstruksi **ditambah laba kotor yang diperoleh sampai dengan tanggal laporan** diakumulasikan dalam sebuah perkiraan persediaan (Konstruksi/Bangunan dalam Penyelesaian), dan perkembangan penagihannya terakumulasi dalam

perkiraan kontra persediaan (Tagihan Konstruksi/Bangunan dalam Penyelesaian).

2. **METODE KONTRAK-SELESAI (*COMPLETED-CONTRACT METHOD*)**. Pendapatan dan laba kotor hanya akan diakui apabila pekerjaannya telah selesai. Biaya Konstruksi diakumulasikan dalam sebuah perkiraan persediaan (Konstruksi/Bangunan dalam Penyelesaian), dan perkembangan penagihannya terakumulasi dalam perkiraan kontra persediaan (Tagihan Konstruksi/Bangunan dalam Penyelesaian).

Alasan untuk menggunakan akuntansi persentase-penyelesaian ini adalah bahwa dalam sebagian besar kontraknya pihak pembeli dan penjual telah memiliki hak yang sama-sama kuat. Pembeli memperoleh hak secara hukum untuk meminta kinerja tertentu sesuai yang tercantum dalam kontrak, sedangkan pihak penjual memiliki hak untuk memperoleh penambahan pembayaran yang membuktikan kepentingan kepemilikan pihak pembeli atas proyek yang sedang dikerjakan. Sebagai hasilnya, terjadi penjualan yang berkesinambungan sejalan dengan perkembangan pekerjaan, dan karenanya pendapatan harus diakui pada saat-saat tersebut.

Metode persentase-penyelesaian harus digunakan ketika estimasi atas perkembangan penyelesaian pekerjaannya, pendapatan, dan biaya-biaya telah dapat diketahui dengan layak, dan ketika **semua kondisi berikut ini** tercapai.

1. Kontraknya dengan jelas menyebutkan hak-hak yang terkait dengan barang dan jasa yang harus tersedia dan diterima oleh masing-masing pihak, hal-hal yang berkaitan dengan tingkat penyelesaian dan pembayaran, serta pengaturan cara dan syarat-syaratnya yang harus dipatuhi.
2. Pihak pembeli dapat diharapkan untuk memenuhi semua kewajiban yang tertera dalam kontrak.
3. Pihak kontraktor dapat diharapkan untuk memberikan kinerja sesuai yang dinyatakan dalam kontrak.

Metode kontrak-selesai **hanya** diterapkan ketika kondisi-kondisi berikut ini ditemui: (1) ketika sebuah entitas (perusahaan konstruksi) kebanyakan kontraknya berjangka pendek (kurang dari satu tahun), atau (2) ketika kondisi untuk menerapkan metode persentase-penyelesaian

tidak terpenuhi, atau (3) ketika ada risiko lebih besar yang melekat pada kontrak tersebut dibanding situasi normalnya. Namun yang perlu dicamkan adalah: **persentase-penyelesaian adalah metode yang lebih baik dan metode kontrak-selesai hanya digunakan ketika metode persentase-penyelesaian tidak mungkin diterapkan.** Itulah sebabnya PSAK No. 34 tentang Akuntansi Kontrak Konstruksi hanya mengatur standar akuntansi untuk metode persentase-penyelesaian saja, dan tidak menyiratkan bahwa metode kontrak-selesai dapat digunakan. Namun dibawah ini tetap dibahas akuntansi konstruksi dengan metode kontrak-selesai, karena mungkin saja ini ditemukan dalam praktik (misalnya diterapkan untuk kontrak konstruksi yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu satu periode akuntansi atau kurang).

METODE PERSENTASE-PENYELESAIAN

Metode persentase-penyelesaian mengakui pendapatan, biaya, dan laba kotor bersamaan dengan tahapan-tahapan penyelesaian dalam sebuah kontrak jangka panjang. Jika pengakuan pos-pos tersebut ditunda sampai seluruh kontrak terselesaikan maka akan terjadi salah saji dalam laporan keuangan berkaitan dengan upaya (biaya) dan penyelesaian (pendapatan) sepanjang periode akuntansi yang sedang berjalan (*interim period*). Untuk menerapkan metode persentase-penyelesaian, kita harus memiliki beberapa dasar atau standar untuk mengukur kemajuan penyelesaian pada suatu titik waktu tertentu.

Mengukur Kemajuan Penyelesaian

Banyak metode yang digunakan dalam praktik untuk menentukan **tingkat kemajuan penyelesaian**. Yang paling banyak dipakai adalah metode '*cost-to-cost* (biaya-ke-biaya),' metode '*efforts-expended* (upaya-yang-telah-dilakukan),' dan metode '*units of work performed* (unit-pekerjaan-yang-telah-dilaksanakan)'

Tujuan dari semua metode tersebut adalah untuk mengukur kemajuan tahapan dari pekerjaan yang tergambarkan melalui biaya, unit, atau nilai tambah. Berbagai macam pengukuran (semisal, biaya yang terjadi, jumlah jam kerja tenaga kerja, kuantitas yang diproduksi, jumlah lantai gedung yang selesai dibangun, dan seterusnya) diidentifikasi dan diklasifikasikan berdasarkan ukuran-ukuran masukan (*input*) dan keluaran (*output*). **Pengukuran masukan** (biaya yang terjadi, jumlah jam kerja tenaga kerja) dinyatakan dalam bentuk upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kontrak. **Pengukuran keluaran** (seperti kuantitas yang

dihasilkan, jumlah lantai gedung yang selesai dibangun, jumlah kilometer jalan tol yang terselesaikan) dinyatakan dalam bentuk hasil yang diperoleh. Tidak ada di antara kedua metode tersebut di atas yang bersifat pasti atau berlaku universal untuk setiap kontrak jangka panjang. Penggunaannya amat membutuhkan penyesuaian yang hati-hati dan kebijaksanaan dalam menerapkannya sesuai situasi.

Baik pengukuran masukan maupun keluaran memiliki ketidakuntungan tertentu. Pengukuran masukan didasarkan pada hubungan yang kuat antara suatu unit masukan dengan produktivitas. Jika ada ketidakefisienan yang mengakibatkan hubungan produktivitasnya berubah, maka hasil pengukurannya akan menjadi tidak akurat. Masalah lain yang dapat terjadi adalah yang disebut "pemuatan ujung-pangkal (*front-end loading*)," yang dapat membuat estimasi penyelesaian menjadi terlalu tinggi karena terjadinya biaya yang signifikan di awal pengerjaan kontrak. Beberapa biaya konstruksi pada tahap awal kadang harus diabaikan ketika biaya tersebut tidak berhubungan dengan pengerjaan kontrak—misalnya, biaya bahan yang belum digunakan atau biaya subkontrak yang belum dilaksanakan.

Pengukuran keluaran dapat menghasilkan perhitungan yang tidak akurat jika unit yang digunakan tidak dapat diperbandingkan dalam waktu, upaya, ataupun biaya untuk menyelesaikan kontrak. Sebagai contoh, menggunakan jumlah lantai gedung yang dapat diselesaikan bisa jadi akan dapat menyesatkan. Menyelesaikan lantai pertama dari sebuah gedung 8 lantai mungkin membutuhkan lebih dari sekedar seperdelapan dari total biaya karena besarnya biaya konstruksi untuk mengerjakan pondasi dan struktur bagian bawah lebih dari biaya yang dibutuhkan untuk mengerjakan tiap lantai berikutnya.

Salah satu pengukuran masukan yang lebih populer untuk menentukan kemajuan penyelesaian pekerjaan adalah **basis biaya-ke-biaya**. Dengan basis biaya-ke-biaya ini, persentase penyelesaian diukur dengan membandingkan biaya yang terjadi sampai dengan tanggal laporan dengan estimasi total biaya yang paling mutakhir untuk menyelesaikan kontrak, sebagaimana ditunjukkan dalam persamaan berikut ini.

Persentase Penyelesaian = $\frac{\text{Biaya yang terjadi s/d tanggal laporan}}{\text{Estimasi total biaya terkini}}$

Persentase biaya yang terjadi yang dibebankan dari estimasi total biaya dikaitkan kepada total pendapatan atau total estimasi laba kotor dari kontrak yang bersangkutan. Jumlah yang harus ditentukan adalah pendapatan atau laba kotor yang harus diakui pada tanggal laporan.

Pendapatan (atau laba kotor) yang diakui pada tanggal laporan	=	Estimasi total pendapatan (atau laba kotor)	X	Persentase penyelesaian
---	---	---	---	-------------------------

Untuk menentukan besarnya pendapatan dan laba kotor yang diakui pada setiap periode maka kita mengurangi total pendapatan atau laba kotor yang telah diakui pada periode sebelumnya. Agar lebih jelas, contoh penerapan metode ini diilustrasikan seperti berikut. Misalnya, PT Konstruksi Tahan Banting memenangkan sebuah tender dari pemerintah Kabupaten A dan memperoleh kontrak yang dimulai pada bulan April 2008 untuk membangun sebuah jembatan senilai Rp 5.500.000.000,00 yang diharapkan akan selesai pada bulan Juli 2010 dengan biaya pengerjaan diestimasikan Rp 5.000.000.000,00. (Perhatikanlah bahwa dalam contoh ilustrasi ini, pada akhir tahun 2009 taksiran total biaya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut meningkat dari Rp 5.000.000.000,00 menjadi Rp 5.050.000.000,00). Berikut ini adalah informasi dan perhitungan-perhitungannya.

	2008	2009	2010
Total biaya s/d tgl Neraca	2.000.000.000	3.920.000.000	5.050.000.000
Estimasi biaya untuk menyelesaikan	3.000.000.000	1.130.000.000	---
Perkembangan penagihan dalam tahun berjalan	1.800.000.000	2.500.000.000	1.200.000.000
Perkembangan penerimaan kas dalam tahun berjalan	1.600.000.000	2.000.000.000	1.900.000.000

Persentase penyelesaian untuk kontrak tersebut dapat dihitung sebagaimana nampak di halaman berikut. Berdasarkan data-data tersebut kita dapat membuat jurnal untuk mencatat (1) biaya pengerjaan konstruksi, (2) perkembangan penagihan, (3) kas yang berhasil ditagih. Jurnal yang akan disajikan di bawahnya, sebenarnya merupakan ikhtisar/akumulasi dari banyak transaksi yang dibuat jurnalnya masing-masing pada saat terjadinya sepanjang tahun yang berjalan.

	2008	2009	2010
Nilai Kontrak	<u>5.500.000.000</u>	<u>5.500.000.000</u>	<u>5.500.000.000</u>
Dikurangi estimasi biaya:			
Biaya s/d tgl Neraca	2.000.000.000	3.920.000.000	5.050.000.000
Estimasi biy. Penyelesaian	<u>3.000.000.000</u>	<u>1.130.000.000</u>	<u>---</u>
Estimasi total biaya	<u>5.000.000.000</u>	<u>5.050.000.000</u>	<u>5.050.000.000</u>
Estimasi total laba kotor	<u>500.000.000</u>	<u>450.000.000</u>	<u>450.000.000</u>
Persentase penyelesaian	40%	77,6%	100%
	$\left(\frac{2.000.000.000}{5.000.000.000} \right)$	$\left(\frac{3.920.000.000}{5.050.000.000} \right)$	$\left(\frac{5.050.000.000}{5.050.000.000} \right)$

	Mencatat biaya konstruksi	
	Debit	Kredit
Tahun 2008:		
Konstruksi dalam Penyelesaian	2.000.000.000	---
Persediaan Bhn. Bangunan,		
Kas, Utang, dll.	---	2.000.000.000
Tahun 2009:		
Konstruksi dalam Penyelesaian	1.920.000.000	---
Persediaan Bhn. Bangunan,		
Kas, Utang, dll.	---	1.920.000.000
Tahun 2010:		
Konstruksi dalam Penyelesaian	1.130.000.000	---
Persediaan Bhn. Bangunan,		
Kas, Utang, dll.	---	1.130.000.000
	Mencatat perkembangan penagihan	
	Debit	Kredit
Tahun 2008:		
Piutang Usaha	1.800.000.000	---
Tagihan Konstruksi dalam		
Penyelesaian	---	1.800.000.000

Tahun 2009:		
Piutang Usaha	2.500.000.000	---
Tagihan Konstruksi dalam Penyelesaian	---	2.500.000.000
Tahun 2010:		
Piutang Usaha	1.200.000.000	---
Tagihan Konstruksi dalam Penyelesaian	---	1.200.000.000
<hr/>		
Mencatat kas yang berhasil ditagih		
<hr/>		
Tahun 2008:	<u>Debit</u>	<u>Kredit</u>
Kas	1.600.000.000	---
Piutang Usaha	---	1.600.000.000
Tahun 2009:		
Kas	2.000.000.000	---
Piutang Usaha	---	2.000.000.000
Tahun 2010:		
Kas	1.900.000.000	---
Piutang Usaha	---	1.900.000.000

Dalam ilustrasi ini, biaya yang terjadi sampai dengan tanggal neraca merupakan bagian dari estimasi total biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proyek yang dihitung berdasarkan kemajuan penyelesaian pekerjaannya. Taksiran pendapatan dan laba kotor yang harus diakui setiap tahun dapat dicari dengan perhitungan seperti di bawah ini.

	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
<u>Pendapatan yang diakui:</u>			
2008			
5.500.000.000 X 40%	<u>2.200.000.000</u>		
2009			
5.500.000.000 X 77,6%		4.268.000.000	
Pendapatan diakui 2008		<u>(2.200.000.000)</u>	
Pendapatan 2009		<u>2.068.000.000</u>	

2010		
5.500.000.000 X 100%		5.500.000.000
Pendapatan diakui 2008 dan 2009		(4.268.000.000)
		<u>1.232.000.000</u>
Pendapatan 2010		<u><u>1.232.000.000</u></u>
<hr/>		
<u>Laba Kotor yang diakui:</u>		
2008		
500.000.000 X 40%	<u>200.000.000</u>	
2009		
450.000.000 X 77,6%	349.200.000	
Pendapatan diakui 2008	(200.000.000)	
	<u>149.200.000</u>	
Pendapatan 2009		<u><u>149.200.000</u></u>
2010		
450.000.000 X 100%		450.000.000
Pendapatan diakui 2008 dan 2009		(349.200.000)
		<u>110.800.000</u>
Pendapatan 2010		<u><u>110.800.000</u></u>

Ayat jurnal untuk mengakui pendapatan dan laba kotor pada setiap tahun serta penyelesaian dan persetujuan final atas kontrak yang telah dikerjakan dibuat sebagai berikut:

	Pengakuan Pendapatan dan Laba Kotor	
	Debit	Kredit
Tahun 2008:		
Konstruksi dalam Penyelesaian (laba kotor)	200.000.000	---
Beban konstruksi	2.000.000.000	---
Pendapatan Kontrak Jangka Panjang	---	2.200.000.000

Tahun 2009:		
Konstruksi dalam Penyelesaian (laba kotor)	149.200.000	---
Beban Konstruksi	1.920.000.000	---
Pendapatan Kontrak Jangka Panjang	---	2.069.200.000
Tahun 2010:		
Konstruksi dalam Penyelesaian (laba kotor)	110.800.000	---
Beban Konstruksi	1.130.000.000	---
Pendapatan Kontrak Jangka Panjang	---	1.230.800.000
<hr/>		
Mencatat penyelesaian kontrak		
<hr/>		
Tahun 2010:	<u>Debit</u>	<u>Kredit</u>
Tagihan Konstruksi dalam Penyelesaian	5.500.000.000	---
Konstruksi dlm Penyelesaian	---	5.500.000.000

Perhatikanlah di sini bahwa laba kotor yang telah dihitung sebelumnya **didebitkan** ke dalam perkiraan **Konstruksi dalam Penyelesaian**. Begitu pula, **Pendapatan Kontrak Jangka Panjang** **dikreditkan** sebesar jumlah yang telah dihitung sebelumnya dalam ilustrasi di atas. Selisih dari jumlah yang diakui setiap tahun untuk pendapatan dan laba kotor ini didebitkan ke dalam sebuah perkiraan nominal yaitu **Beban Konstruksi** (serupa dengan beban pokok penjualan pada sebuah perusahaan manufaktur), yang akan dilaporkan dalam laporan laba rugi. Jumlah tersebut merupakan biaya konstruksi yang sesungguhnya terjadi pada periode berjalan. Misalnya, pada PT Konstruksi Tahan Banting dalam ilustrasi di atas biaya sesungguhnya sebesar Rp 2.000.000.000,00 yang terjadi pada tahun 2008 digunakan untuk menghitung laba kotor sebesar Rp 200.000.000,00 maupun untuk menghitung persentase yang telah terselesaikan yakni sebesar 40%.

Biaya-biaya harus terus diakumulasikan dalam perkiraan Konstruksi dalam Penyelesaian dengan tujuan untuk mencatat total biaya yang terjadi (ditambah laba yang harus diakui) sampai dengan tanggal neraca. Buku besar perkiraan Konstruksi dalam Penyelesaian selama jangka waktu penyelesaian proyek konstruksi tersebut akan menunjukkan posisi seperti di bawah ini.

Konstruksi dalam Penyelesaian				
2008	biaya konstruksi	Rp 2.000.000.000	31/12/2010	menutup
2008	pengakuan laba kotor	200.000.000		projek
2009	biaya konstruksi	1.920.000.000		yang
2009	pengakuan laba kotor	149.200.000		telah
2010	biaya konstruksi	1.130.000.000		selesai
2010	pengakuan laba kotor	110.800.000		Rp 5.500.000.000
Total		<u>Rp 5.500.000.000</u>	Total	<u>Rp 5.500.000.000</u>

Ilustrasi PT Konstruksi Tahan Banting di atas menunjukkan juga suatu **perubahan estimasi** pada tahun kedua, 2009, yang mengalami kenaikan biaya dari Rp 5.000.000.000,00 menjadi Rp 5.050.000.000,00. Perubahan estimasi ini dicatat menggunakan **metode pemulihan kumulatif (*cumulative catch-up manner*)**. Ini dilakukan dengan menyesuaikan persentase yang terselesaikan berdasarkan total biaya kemudian mengurangi jumlah pendapatan dan laba kotor yang telah diakui pada periode sebelumnya menjadi pendapatan dan laba kotor yang dihitung pada tahun berjalan. Dengan demikian perubahan estimasi yang dilakukan pada periode perubahan ini akan membuat neraca pada akhir periode perubahan estimasi serta akuntansinya pada periode-periode setelahnya akan nampak seperti yang seharusnya seolah-olah estimasi tersebut adalah estimasi yang dilakukan sejak awal.

Penyajian Laporan Keuangan pada Metode Persentase Penyelesaian

Biasanya, ketika piutang yang berasal dari sebuah penjualan dicatat, perkiraan persediaan akan dikurangi. Namun, dalam penerapan metode persentase penyelesaian ini, baik perkiraan piutang maupun persediaannya terus terbawa ke periode-periode berikutnya. Dengan mengurangi saldo **akun penagihan** terhadap Konstruksi dalam Penyelesaian akan menghindarkan terjadinya penghitungan dua kali dalam perkiraan persediaan. Selama masa kontrak, selisih antara perkiraan Konstruksi dalam Penyelesaian dengan perkiraan Tagihan Konstruksi dalam Penyelesaian dilaporkan di neraca sebagai **aktiva lancar jika selisihnya bersaldo debit, dan sebaliknya, pada kelompok kewajiban lancar jika saldonya kredit**.

Ketika biaya yang terjadi ditambah dengan laba kotor yang diakui sampai dengan tanggal neraca (saldo perkiraan Konstruksi dalam Penyelesaian) lebih besar dari saldo tagihannya, maka selisihnya harus dilaporkan sebagai aktiva lancar di neraca dengan nama "**Selisih Lebih**

Biaya dan Pengakuan Laba terhadap Penagihan.” Bagian yang belum ditagih dari pendapatan yang diakui pada tanggal neraca dapat dihitung setiap saat dengan mengurangkan tagihan pada tanggal neraca dari pendapatan yang diakui pada tanggal neraca. Pada contoh di PT Konstruksi Tahan Banting, misalnya, perhitungan pada tahun 2008 akan nampak seperti berikut:

- Pendapatan kontrak yang diakui sampai dengan tanggal neraca:		
	Rp 2.000.000.000,00	
Rp 5.500.000.000,00 X	<hr/>	Rp 2.200.000.000,00
	Rp 5.000.000.000,00	
- Penagihan sampai dengan tanggal neraca		<hr/> 1.800.000.000,00
- Pendapatan yang belum ditagih		<hr/> <hr/> Rp 400.000.000,00

Ketika jumlah penagihan lebih besar daripada jumlah biaya yang terjadi dan laba kotor pada tanggal neraca, maka selisihnya dilaporkan sebagai suatu kewajiban lancar yang diberi nama perkiraan **"Selisih Lebih Penagihan terhadap Biaya dan Pengakuan Laba."**

Ketika sebuah perusahaan konstruksi memiliki sejumlah proyek, dan besar biayanya melebihi jumlah tagihan pada beberapa kontrak sementara ada beberapa kontrak lain yang jumlah tagihannya lebih besar ketimbang biayanya, maka kontrak-kontrak tersebut harus dipisahkan. Sisi aktiva di neraca hanya menyajikan kontrak-kontrak yang jumlah biaya dan pengakuan pendapatannya lebih besar daripada jumlah tagihan, sedangkan sisi kewajiban hanya menyajikan kontrak-kontrak yang jumlah penagihan-nya lebih besar ketimbang jumlah biaya dan laba yang diakui. Hal ini sebaiknya diungkapkan (*disclosed*) secara terpisah dalam catatan atas laporan keuangan, dan bukannya sekedar ikhtisar yang menyajikan selisih bersih dari kedua jumlah tersebut.

Dari angka-angka yang telah kita bahas di atas, maka penyajian dalam laporan keuangan milik PT Konstruksi Tahan Banting, yang menerapkan metode persentase-penyelesaian untuk kegiatan kontrak jangka panjangnya, akan nampak sebagai berikut.

PT KONSTRUKSI TAHAN BANTING			
	2008	2009	2010
<u>Laporan Laba Rugi</u>			
Pendapatan dari Kontrak			
Jangka Panjang	2.200.000.000	2.068.000.000	1.232.000.000
Beban Konstruksi	<u>2.000.000.000</u>	<u>1.920.000.000</u>	<u>1.130.000.000</u>
Laba Kotor	<u>200.000.000</u>	<u>148.000.000</u>	<u>102.000.000</u>

	2008	2009	2010
<u>Neraca (31 Desember)</u>			
Aktiva Lancar			
Piutang Usaha	200.000.000	500.000.000	
Persediaan:			
Konstruksi dalam			
Penyelesaian	2.200.000.000		
Penagihan	<u>1.800.000.000</u>		
Selisih lebih biaya			
dan pengakuan			
pendapatan di-			
banding penagihan	400.000.000		
Kewajiban Lancar			
Selisih lebih penagihan			
dibanding total biaya			
kontrak			
(4.300.000.000 - 4.268.000.000)		32.000.000	
Catatan atas Laporan Keuangan			
Catatan No.1 Ikhtisar kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting.			
Kontrak Konstruksi Jangka Panjang. Perusahaan mengakui pendapatan dan melaporkan laba dari kontrak konstruksi jangka panjang, yang merupakan bisnis utamanya, atas dasar metode akuntansi persentase-penyelesaian. Kontrak-kontrak ini biasanya mencakup jangka waktu lebih dari satu tahun. Jumlah pendapatan dan laba yang diakui setiap tahun didasarkan pada perbandingan antara biaya yang terjadi dengan estimasi total biaya. Biaya-biaya yang dimasukkan ke dalam perkiraan Konstruksi dalam Penyelesaian meliputi bahan-bahan langsung, tenaga kerja langsung, serta biaya <i>overhead</i> yang terkait dengan proyek. Beban-beban administrasi dan umum perusahaan dibebankan pada periode terjadinya dan tidak dialokasikan terhadap kontrak konstruksi.			

METODE KONTRAK-SELESAI

Dengan **metode kontrak-selesai** pengakuan pendapatan dan laba kotor dilakukan pada saat penjualan terjadi—yaitu pada saat kontrak telah diselesaikan. Biaya-biaya atas kontrak jangka panjang yang masih sedang dalam proses serta penagihan-pebagihan pada periode berjalan diakumulasikan, namun **tidak ada pengakuan dalam periode berjalan (*interim*) di laporan laba rugi untuk pendapatan, beban, dan laba kotor.**

Keuntungan utama dari metode kontrak-selesai ini adalah bahwa pelaporan pendapatan didasarkan pada hasil akhir yang sesungguhnya, dan bukannya atas dasar estimasi dari pekerjaan yang belum dilaksanakan. Sebaliknya, ke-tidakuntung-an yang utama dari metode ini adalah bahwa ia tidak dapat menggambarkan kinerja sesungguhnya pada periode yang berjalan ketika masa kontraknya melampaui jangka waktu satu periode akuntansi. Ketika misalnya kinerja atau kegiatan operasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan konstruksi sebetulnya sama dan merata pada setiap tahun sepanjang masa kontrak, namun karena ia menerapkan metode kontrak selesai maka pengakuan pendapatan dilakukan seluruhnya pada saat pekerjaan telah selesai dan diserahkan seluruhnya. Dengan demikian akan terjadi ketidaktepatan dalam penyajian pendapatan sepanjang periode akuntansi ketika masa kontrak belum selesai dan pekerjaannya belum diserahkan.

Jurnal-jurnal yang setiap tahun harus dibuat untuk mengakui biaya konstruksi, perkembangan penagihan, maupun kas yang diterima dari pelanggan, sama dengan yang diilustrasikan dengan metode persentase-penyelesaian di atas. Perbedaan yang utama pada metode kontrak-selesai ini adalah tidak dibuatnya jurnal-jurnal untuk mengakui pendapatan dan laba kotor. Dari contoh proyek pembangunan jembatan oleh PT Konstruksi Tahan Banting di atas, maka jurnal yang harus dibuat ketika ia menerapkan metode kontrak-selesai untuk mengakui pendapatan dan biaya serta perkiraan persediaan dan penagihan yang harus ditutup pada tahun 2010 adalah seperti berikut.

Tagihan Konstruksi dalam		
Penyelesaian	5.500.000.000	---
Pendapatan Kontrak Jangka Panjang	---	5.500.000.000
Biaya Konstruksi	5.050.000.000	---
Konstruksi dlm Penyelesaian	---	5.050.000.000

Jika kita membandingkan kedua metode pengakuan pendapatan ketika diterapkan dalam proyek pembuatan jembatan pada ilustrasi di atas, maka PT Konstruksi Tahan Banting akan mengakui laba kotor seperti ditampakkan di bawah ini.

	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
Persentase-Penyelesaian	Rp 200.000.000	Rp 148.000.000	Rp 102.000.000
Kontrak-Selesai	---	---	Rp 450.000.000

Laporan keuangan dengan metode kontrak-selesai akan disajikan:

PT KONSTRUKSI TAHAN BANTING			
	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
<u>Laporan Laba Rugi</u>			
Pendapatan dari Kontrak			
Jangka Panjang	---	---	5.500.000.000
Beban Konstruksi	---	---	5.050.000.000
Laba Kotor	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>450.000.000</u>

	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
<u>Neraca (31 Desember)</u>			
Aktiva Lancar			
Piutang Usaha	200.000.000	500.000.000	
	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
Persediaan:			
Konstruksi dalam			
Penyelesaian	2.000.000.000		
Penagihan	<u>1.800.000.000</u>		
Biaya kontrak yang			
belum ditagih	200.000.000		
Kewajiban Lancar			
Selisih lebih penagihan			
dibanding total biaya			
(4.300.000.000 - 3.920.000.000)		380.000.000	

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan No.1 Ikhtisar kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting.

Kontrak Konstruksi Jangka Panjang. Perusahaan mengakui pendapatan dan melaporkan laba dari kontrak konstruksi jangka panjang, yang merupakan bisnis utamanya, atas dasar metode akuntansi kontrak-selesai. Kontrak-kontrak ini biasanya mencakup jangka waktu lebih dari satu tahun. Biaya-biaya kontrak dan penagihannya diakumulasikan sepanjang periode konstruksi, namun pendapatan dan laba diakui setelah seluruh kontrak selesai dikerjakan dan diserahkan. Biaya-biaya yang dimasukkan ke dalam perkiraan Konstruksi dalam Penyelesaian meliputi bahan-bahan langsung, tenaga kerja langsung, serta biaya *overhead* yang terkait dengan proyek. Beban-beban administrasi dan umum perusahaan dibebankan pada periode terjadinya dan tidak dialokasikan terhadap kontrak konstruksi.

KERUGIAN DALAM KONTRAK JANGKA-PANJANG

Ada dua macam kerugian yang mungkin terjadi pada kontrak-kontrak berjangka panjang:

1. **KERUGIAN DALAM TAHUN BERJALAN PADA SUATU KONTRAK YANG MENGUNTUNGKAN.** Kondisi ini terjadi ketika dalam suatu periode pada masa konstruksi ada kenaikan estimasi total biaya yang cukup signifikan, namun kenaikan biaya ini tidak sampai membuat pendapatan dari kontrak tersebut secara keseluruhan menjadi rugi. Secara total kontrak ini masih memberikan laba, sehingga dalam kondisi seperti ini hanya jika kita menerapkan metode persentase-penyelesaian maka kenaikan estimasi biaya tersebut harus dibuatkan penyesuaian dalam tahun berjalan untuk selisih laba kotor yang telah diakui pada periode sebelumnya. Penyesuaian ini dicatat dengan mengakui kerugian dalam tahun berjalan yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam estimasi akuntansi ini.
2. **KERUGIAN PADA SUATU KONTRAK YANG MERUGI.** Biaya yang diestimasi pada akhir suatu periode berjalan mungkin menunjukkan bahwa kontrak ini akan menghasilkan kerugian pada akhir masa kontraknya nanti. Jika terjadi demikian, maka baik penerapan metode persentase-penyelesaian maupun metode kontrak-selesai mengharuskan kita mengakui seluruh kerugian kontrak yang telah diperkirakan tersebut ke dalam periode berjalan.

Perlakuan akuntansi untuk kontrak-kontrak yang merugi ini konsisten dengan kebiasaan dalam akuntansi berkaitan dengan antisipasi atas suatu kerugian potensial (kerugian yang belum terjadi) untuk menghindari

lebih saji dalam laba tahun berjalan dan di masa yang akan datang. Prinsip semacam ini di akuntansi dikenal sebagai konsep **konservatif** (konservatisme dalam akuntansi).

Kerugian dalam Tahun Berjalan

Untuk memberikan gambaran tentang kerugian dalam tahun berjalan pada sebuah kontrak yang menguntungkan, marilah kita ilustrasikan dengan menganggap bahwa pada tanggal 31 Desember 2009 PT Konstruksi Tahan Banting mengestimasi bahwa biaya untuk menyelesaikan seluruh kontrak pembangunan jembatannya adalah sebesar Rp 1.400.000.000,00 dan bukannya Rp 1.130.000.000,00 (lihat ilustrasi sebelumnya di atas). Dengan asumsi bahwa data-data lainnya tetap, PT Konstruksi Tahan Banting akan menampakkan perhitungan persentase penyelesaiannya seperti di bawah ini. (Ada penurunan persentase-penyelesaian dari 77,6% menjadi 73,7% akibat kenaikan estimasi biaya di masa datang untuk menyelesaikan kontrak.)

- Biaya konstruksi sampai dengan tanggal neraca (31 Desember 2009)	Rp 3.920.000.000,00
- Estimasi biaya untuk penyelesaian (revisian)	1.400.000.000,00
Estimasi total biaya	<u>Rp 5.320.000.000,00</u>
Persentase yang telah diselesaikan (3.920.000.000 ÷ 5.320.000.000)	73,7%
- Pendapatan kontrak yang diakui pada tahun 2009: (5.500.000.000,00 X 73,7%) - 2.200.000.000,00	Rp 1.853.500.000,00
- Biaya yang terjadi pada tahun 2009	(1.920.000.000,00)
- Rugi yang diakui pada tahun 2009	<u>(Rp 66.500.000,00)</u>

Kerugian sebesar Rp 66.500.000,00 yang diakui pada tahun 2009 adalah penyesuaian kumulatif atas “kelebihan” laba kotor kontrak yang diakui pada tahun 2008. **Ketimbang mengoreksi periode sebelumnya, dilakukan “penyerapan” seluruh salah saji periode sebelumnya tersebut ke dalam periode sekarang yang berjalan.** Dalam ilustrasi ini penyesuaian yang dilakukan sedemikian besar sehingga mengakibatkan pengakuan kerugian pada tahun 2009. Jurnal yang harus dibuat untuk mengakui kerugian pada tahun 2009 ini adalah seperti berikut.

Beban-beban Konstruksi	1.920.000.000	---
Konstruksi dalam Penyelesaian (Rugi)	---	66.500.000
Pendapatan dari Kontrak Jangka Panjang	---	1.853.500.000

Kerugian sebesar Rp 66.500.000,00 akan dilaporkan dalam laporan laba rugi tahun 2009 sebagai selisih antara pendapatan yang dilaporkan sebesar Rp 1.853.500.000,00 dengan biayanya yang sebesar Rp 1.920.000.000,00. **Jika menggunakan metode kontrak-selesai, tidak ada rugi yang diakui pada tahun 2009 karena kontrak tersebut diharapkan masih dapat menghasilkan laba** yang akan diakui pada tahun penyelesaian dan penyerahan seluruh pekerjaannya.

Kerugian pada Kontrak yang Merugi

Sebagai ilustrasi akuntansi untuk sebuah kontrak jangka panjang yang secara keseluruhan merugi, marilah kita asumsikan bahwa pada tanggal 31 Desember 2009, PT Konstruksi Tahan Banting mengestimasi bahwa biaya untuk menyelesaikan kontrak pembangunan jembatan di atas adalah sebesar Rp 1.650.000.000,00 dan bukannya sebesar Rp 1.134.000.000,00. Pembalikan estimasi relatif terhadap kontrak pembangunan jembatan ini akan ditunjukkan sebagai berikut.

	2008	2009
	Estimasi Semula	Estimasi Revisian
Nilai Kontrak	Rp 5.500.000.000	Rp 5.500.000.000
Estimasi Total Biaya	5.000.000.000	5.570.000.000*
Estimasi laba kotor	<u>Rp 500.000.000</u>	
Estimasi Kerugian		<u>Rp 70.000.000</u>
* (3.920.000.000 + 1.650.000.000)		

Dengan metode persentase-penyelesaian, laba kotor sebesar Rp 200.000.000,00 diakui pada tahun 2008 (lihat perhitungan pada ilustrasi di awal pembahasan metode ini). Laba kotor Rp 200.000.000,00 ini harus di-*offset* (dihapus) pada tahun 2009 karena ia tidak dapat diharapkan lagi untuk bisa direalisasikan. Sebaliknya, kerugian sebesar Rp 70.000.000,00 harus segera diakui pada tahun 2009 karena prinsip

konservatisme mengharuskan kita sesegera mungkin mengakui kerugian begitu besarnya telah dapat diestimasikan. Karena itu, total kerugian sebesar Rp 270.000.000,00 (Rp 200.000.000,00 + Rp 70.000.000,00) harus diakui pada tahun 2009 agar dapat memunculkan nilai bersih rugi sebesar Rp 70.000.000,00.

Pengakuan pendapatan pada tahun 2009 dapat dihitung sebagaimana nampak pada perhitungan berikut ini.

- Pendapatan yang diakui pada tahun 2009	
Nilai Kontrak	Rp 5.500.000.000,00
Persentase penyelesaian	X 70,3% *
	<hr/>
Pengakuan pendapatan s/d tanggal neraca	Rp 3.866.500.000,00
Dikurangi:	
Pengakuan pendapatan sebelum 2009	<hr/> 2.200.000.000,00
	<hr/>
Pendapatan yang diakui tahun 2009	1.666.500.000,00
	<hr/> <hr/>
- Biaya sampai dengan tanggal neraca:	
(31 Desember 2009)	Rp 3.920.000.000,00
Estimasi biaya s/d penyelesaian	<hr/> Rp 1.650.000.000,00
	<hr/>
Estimasi total biaya	<u>Rp 5.570.000.000,00</u>
* Persentase penyelesaian: $\text{Rp } 3.920.000.000,00 \div \text{Rp } 5.570.000.000,00$	
= 70,3%	

Perhitungan biaya konstruksi yang harus dibebankan pada tahun 2009, dilakukan dengan menambahkan total kerugian yang harus diakui pada tahun 2009 (Rp 200.000.000,00 + Rp 70.000.000,00), terhadap pendapatan yang harus diakui pada tahun 2009. Lihat perhitungan di bawah ini.

Pendapatan yang diakui pada tahun 2009 (dari perhitungan di atas)		Rp 1.666.500.000
Total kerugian yang diakui pada tahun 2009:		
Pembalikan laba kotor tahun 2008	Rp 200.000.000	
Total estimasi rugi atas kontrak yang dikerjakan	<hr/> 70.000.000	<hr/> 270.000.000
		<hr/>
Biaya konstruksi yang dibebankan dalam tahun 2009		<u>Rp 1.936.500.000</u>

Jurnal yang harus dibuat oleh PT Konstruksi Tahan Banting untuk mencatat pendapatan, beban, dan kerugian dari kontrak jangka panjang pada tahun 2009 adalah sebagai berikut.

Beban-beban Konstruksi	1.936.500.000	---
Konstruksi dalam Penyelesaian (Rugi)	---	70.000.000
Pendapatan dari Kontrak Jangka Panjang	---	1.666.500.000

Pada akhir tahun 2009, buku besar Konstruksi dalam Penyelesaian memiliki saldo sebesar Rp 3.850.000.000,00.

Konstruksi dalam Penyelesaian					
2008	biaya konstruksi	Rp 2.000.000.000	31/12/2009	pengakuan rugi	270.000.000
2008	pengakuan laba kotor	200.000.000			
2009	biaya konstruksi	1.920.000.000			
Total		Rp 4.120.000.000	Total		Rp 270.000.000
Saldo		3.850.000.000			

Dengan metode persentase-penyelesaian, kerugian dari kontrak jangka panjang sebesar Rp 70.000.000,00 juga harus diakui, pada tahun di mana kerugian tersebut pertama kali terjadi, sehingga jurnal yang harus dibuat pada tahun 2009 adalah:

Rugi dari Kontrak Jangka Panjang	70.000.000	---
Konstruksi dalam Penyelesaian (Rugi)	--	70.000.000

Ketika saldo perkiraan Tagihan lebih kecil dibandingkan dengan nilai kontrak, maka saldo perkiraan Konstruksi dalam Penyelesaian pun akan lebih kecil pula dibandingkan dengan nilai kontraknya. Pada kondisi di mana perkiraan Konstruksi dalam Penyelesaian lebih besar dibanding perkiraan Tagihannya, maka kerugian yang diakui dapat dikurangkan ke neraca melalui pos akumulasi biaya. Dengan demikian—apakah menggunakan metode kontrak-selesai ataukah menggunakan metode persentase-penyelesaian—cadangan kerugian (pos pengurang) dapat digabungkan dengan perkiraan Konstruksi dalam Penyelesaian, sehingga saldo persediaan pun akan menjadi berkurang. Dari ilustrasi pada tahun 2009 di atas, ketika jumlah tagihannya melebihi besarnya akumulasi biaya, maka jumlah estimasi kerugian harus dilaporkan terpisah pada

kelompok kewajiban lancar di neraca. Jadi—apakah menggunakan metode kontrak-selesai ataukah menggunakan metode persentase-penyelesaian—jumlah kerugian sebesar Rp 70.000.000,00 yang diestimasi pada tahun 2009 harus dikurangkan dari perkiraan Konstruksi dalam Penyelesaian dan dilaporkan secara terpisah sebagai kewajiban lancar dengan nama “Kewajiban Estimasi dari Kontrak Jangka Panjang.”

ASPEK PERPAJAKAN

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Berdasarkan Undang-undang No. 17 tahun 2000 dan Peraturan Menteri Keuangan RI No. Per-70/PJ/2007, maka atas jasa konstruksi dikenakan PPh pasal 23 yang bersifat tidak final dengan tarif 15% dari perkiraan penghasilan nettonya. Penghasilan netto ini telah ditetapkan oleh pemerintah dengan besaran sebagai berikut:

➡ PERKIRAAN PENGHASILAN NETO $13 \frac{1}{3} \% \times$ bruto
Jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk jasa perawatan/jasa pemeliharaan/perbaikan bangunan, jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/telepon/gas/AC/TV kabel, sepanjang jasa tersebut dilakukan WP yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai ijin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
➡ PERKIRAAN PENGHASILAN NETO $26 \frac{2}{3} \% \times$ bruto
a. Jasa perencanaan konstruksi b. Jasa pengawasan konstruksi

Yang dimaksud dengan Jumlah imbalan bruto untuk jasa konstruksi adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material dan barangnya. Dengan demikian tarif efektif yang dikenakan terhadap pelaksana jasa konstruksi adalah sebesar 2%; yaitu ($15\% \times 13 \frac{1}{3}\%$) dari bruto, sedangkan jasa perencanaan dan

pengawasan konstruksi dengan tarif efektif sebesar 4%; atau (15% X 26 2/3%) dari bruto.

Atas penyerahan jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh PKP Rekanan juga merupakan objek pengenaan PPN.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Aspek PPN yang terkait dengan jasa konstruksi adalah sebagai berikut:

- 1) Besarnya PPN yang terutang adalah 10% dari Nilai Penggantian.
- 2) PPN terutang pada saat penyerahan JKP, sedangkan tahap-tahap (termin) pembayaran diperlakukan sebagai pembayaran diterima sebelum dilakukan penyerahan.

contoh :

📌 . **01-01-2005 perjanjian pekerjaan konstruksi ditandatangani dengan kontrak senilai Rp1.000.000.000,00 belum termasuk PPN sebesar 10%**
diterima uang muka sebesar 20 % dari kontrak

Jurnal:

Kas	220.000.000	
Pendapatan Diterima di Muka ^a		200.000.000
PPN Keluaran		20.000.000

📌 . **02-02-2005 tahap penyelesaian pekerjaan 20 %, diterima pembayaran tahap ke-1, s/d 30% dari nilai kontrak**

Jurnal:

Pendapatan Diterima di Muka ^a	200.000.000	
Pendapatan Konstruksi		200.000.000

Kas	110.000.000	
Pendapatan Diterima di Muka ^b		100.000.000
PPN Keluaran		10.000.000

🎧 . **02-03-2005 tahap penyelesaian pekerjaan 50 %, diterima pembayaran tahap ke-2, s/d 40 % dari nilai kontrak**

Jurnal:

Kas	120.000.000	
Piutang Usaha ^a	100.000.000	
Pendapatan Diterima di Muka ^b	100.000.000	
Pendapatan Konstruksi		300.000.000
PPN Keluaran		20.000.000

🎧 . **02-05-2005 tahap penyelesaian pekerjaan 80 %, diterima pembayaran tahap ke-3, s/d 75% dari nilai kontrak**

Jurnal:

Kas	380.000.000	
Piutang Usaha ^b	50.000.000	
Piutang Usaha ^a		100.000.000
Pendapatan Konstruksi		300.000.000
PPN Keluaran		30.000.000

🎧 . **02-07-2005 tahap penyelesaian pekerjaan 100 %, dilaksanakan penyerahan bangunan**

Jurnal:

Piutang Usaha ^c	220.000.000	
Pendapatan Konstruksi		200.000.000
PPN Keluaran		20.000.000

👂 . **02-09-2005 diterima pembayaran tahap ke-4**
sebesar 95 % dari kontrak

Jurnal:

Kas	220.000.000	
Piutang Usaha ^{b dan c}		220.000.000

👂 . **01-01-2006 diterima pelunasan seluruh jasa pemborongan**

Jurnal:

Kas	50.000.000	
Piutang Usaha ^c		50.000.000

Dari ilustrasi di atas nampak bahwa saat terutangnya PPN adalah sebagai berikut:

🌐 **01-01-2005 s/d 02-05-2005 :**
(pembayaran uang muka s/d pembayaran tahap ke-3)
PPN terutang pada saat diterima pembayaran

🌐 **02-07-2005 s/d 01-2006 :**
PPN terutang pada saat dilaksanakan penyerahan bangunan,
yaitu 02-07-2005

Jika jurnal-jurnal yang telah dibuat tersebut di atas di-*posting* ke dalam masing-masing buku besar atau kita jumlahkan, maka kita akan dapatkan bahwa total Pendapatan Konstruksi akan sebesar kontraknya, yaitu Rp 1.000.000.000,00; total PPN Keluaran sebesar Rp100.000.000,00 dan total kas yang diterima adalah sebesar Rp1.100.000.000,00 atau sebesar nilai kontrak ditambah PPN 10%.

BAB 3



AKUNTANSI untuk KOPERASI

- ☺ Karakteristik Badan Usaha Koperasi
- ☺ Usaha dan Jenis-Jenis Koperasi
 - ☺ Terminologi
 - ☺ Perlakuan Akuntansi
- ☺ Tahap Pencatatan Akuntansi Koperasi
 - ☺ Contoh Transaksi dan Formulir

AKUNTANSI untuk KOPERASI



Gambaran Umum Usaha

1. Karakteristik Badan Usaha Koperasi

Koperasi merupakan suatu bentuk perusahaan yang “unik”, karena berbeda dengan bentuk badan usaha/perusahaan yang lain . Koperasi merupakan kumpulan orang-orang tetapi berbeda dengan perusahaan yang dimiliki sekumpulan orang-orang (Firma, PT).

Koperasi dibentuk dan dikelola secara demokratis untuk memenuhi kebutuhan anggota tanpa menjadikan keuntungan/laba sebagai tujuan utamanya karena koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya.

Sama seperti di negara-negara yang sedang berkembang, koperasi di Indonesia sulit berkembang dan perkembangannya sangat

tertinggal jauh baik oleh badan usaha milik swasta maupun badan usaha pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memberikan berbagai kemudahan dan peluang seperti kemudahan dalam memperoleh bantuan permodalan, manajemen, pemasaran, pendidikan dll. Bila koperasi ingin maju, maka harus menawarkan keunggulan khusus atau keunggulan tambahan yang tidak diberikan organisasi-organisasi pesaingnya. Hal ini dapat terwujud bila anggota koperasi secara bersamaan menjadi pemilik maupun pengguna jasa koperasi yang didirikan.

2. Usaha dan jenis-jenis koperasi:

Seperti badan usaha yang lain, koperasi dapat berusaha di semua sektor, apakah sektor perdagangan, manufaktur, jasa keuangan dan pembiayaan (*financing*), asuransi, transportasi dll.

Jenis-jenis Koperasi

Berdasarkan kepentingan anggota dan usaha utamanya , koperasi dapat digolongkan menjadi :

1. Koperasi Konsumen

adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang/jasa. Kegiatan atau jasa utama dari koperasi jenis ini adalah melakukan pembelian bersama . Contoh : Waserda (warung serba ada), minimarket dll

2. Koperasi Produsen

adalah koperasi yang anggotanya tidak memiliki perusahaan sendiri tetapi bekerjasama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. Contoh: koperasi karoseri, koperasi jasa konsultasi dll

3. Koperasi Simpan-Pinjam

adalah koperasi yang kegiatan atau jasa utamanya menyediakan dan menyimpan uang para anggotanya

4. Koperasi Pemasaran

adalah koperasi yang anggotanya para pemilik barang atau jasa dan bersama-sama memasarkan barang atau jasa tersebut.

3. Terminologi (Glosari)

Karena perbedaan karakteristik koperasi dibandingkan usaha lainnya, maka terdapat istilah-istilah yang berbeda dengan istilah yang dipakai pada industri lainnya. Beberapa istilah perlu diketahui untuk memahami koperasi.

Koperasi merupakan kumpulan dari orang-orang, maka istilah-istilah khusus pada koperasi sebagian besar adalah istilah berhubungan dengan modal koperasi yaitu:

- Modal anggota adalah simpanan pokok dan simpanan wajib yang harus dibayar anggota koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam koperasi tersebut.
- Modal Sumbangan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Modal sumbangan tidak dapat dibagikan kepada anggota selama koperasi masih beroperasi.
- Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan usaha koperasi.
- Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang besarnya sama yang wajib dibayarkan oleh para anggota koperasi pada saat pertama kali masuk sebagai anggota. Simpanan jenis ini hanya dapat diambil bila anggota tersebut mengundurkan diri.
- Simpanan wajib adalah sejumlah uang yang besarnya bervariasi yang wajib dibayar anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan ini hanya dapat diambil bila anggota tersebut mengundurkan diri.
- Cadangan adalah bagian dari sisa hasil usaha yang disisihkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota.
- Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah gabungan dari hasil partisipasi neto dan laba/rugi kotor dengan non-anggota, ditambah/dikurangi dengan pendapatan dan beban lain serta beban perkoperasian dan pajak penghasilan badan koperasi.

Disamping itu beberapa istilah yang digunakan dalam pembuatan Laporan Laba-Rugi berbeda dengan istilah perusahaan lainnya, yaitu:

- Partisipasi Bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan barang dan jasa kepada anggota yang mencakup harga pokok dan partisipasi neto.
- Partisipasi neto adalah kontribusi anggota terhadap hasil usaha koperasi koperasi yang merupakan selisih antara partisipasi bruto dengan beban pokok.
- Pendapatan dari Non Anggota adalah penjualan barang/jasa kepada non anggota.
- Beban Perkoperasian adalah beban sehubungan dengan gerakan perkoperasian dan tidak berhubungan dengan kegiatan usaha.

Istilah lainnya

- Promosi Ekonomi Anggota adalah peningkatan pelayanan koperasi kepada anggotanya dalam bentuk manfaat ekonomi yang diperoleh sebagai anggota koperasi.
- Badan Usaha Otonom adalah bagian organisasi mandiri yang mempunyai kegiatan dan anggota khusus dalam sebuah koperasi sehingga unit usaha ini setara dengan sebuah entitas akuntansi.

Contoh: Sebuah koperasi mempunyai unit usaha simpan pinjam, waserda dll

Perlakuan Akuntansi

Koperasi harus dikelola secara profesional. Seperti pada Badan Usaha lain, peranan akuntansi sangat penting untuk mengelola keuangan koperasi. Pada prinsipnya akuntansi koperasi tidak jauh berbeda dengan akuntansi perusahaan lainnya. Beberapa perbedaan mendasar diatur dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) untuk koperasi yaitu PSAK no. 27.

Berikut ini disajikan perbedaan perlakuan akuntansi untuk:

1. Aktiva
2. Kewajiban

3. Modal
4. Pendapatan dan
5. Beban

1. Aktiva

Pencatatan Aktiva koperasi sama dengan perusahaan yang lain kecuali yang dijelaskan dalam PSAK no 27 paragraf 63 dan 65.

- a. Pada paragraf 63 menjelaskan perlakuan akuntansi untuk aktiva yang diperoleh dari sumbangan dan
- b. Pada paragraf 65 menjelaskan perlakuan akuntansi untuk aktiva yang dibatasi penggunaannya.

Koperasi merupakan kumpulan orang-orang dan merupakan badan usaha yang diharapkan menjadi soko guru ekonomi di Indonesia maka pemerintah secara berkala mengadakan pembinaan ataupun pemberian bantuan. Perlakuan akuntansinya diatur sebagai berikut:

63 Aktiva yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutup kerugian koperasi diakui sebagai aktiva lain-lain. Sifat keterikatan penggunaan tersebut dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan

Aktiva yang dicadangkan untuk kepentingan bersama para anggota merupakan aktiva yang bukan milik koperasi. Oleh karena itu pengurus harus mempertanggung jawabkan penggunaan aktiva ini dan dalam pencatatannya tidak boleh diakui sebagai aktiva koperasi. Hal ini diatur dalam paragraf 65

65 Aktiva-aktiva yang dikelola oleh koperasi, tetapi bukan milik koperasi, tidak diakui sebagai aktiva, dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan

2. Kewajiban

Untuk kewajiban yang ada di koperasi sama dengan kewajiban di Badan Usaha lain kecuali yang diatur dalam PSAK. Kewajiban yang diatur PSAK no 27 paragraf 61 adalah simpanan Sukarela.

Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib merupakan modal koperasi karena simpanan ini tidak dapat diambil sewaktu-waktu. Simpanan anggota yang sifatnya sukarela (simpanan sukarela) tidak dapat

dianggap sebagai modal karena simpanan ini dapat diambil sewaktu-waktu. Oleh karena itu simpanan sukarela dianggap sebagai hutang sebagaimana dijelaskan dalam PSAK no. 27 paragraf 61 .

61 *Simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh temponya dan dicatat sebesar nilai nominalnya*

3. Ekuitas

Koperasi merupakan kumpulan dari orang-orang yang memenuhi syarat sebagai anggota. Oleh karena itu ekuitas koperasi merupakan kumpulan dari setoran para anggota baik berupa simpanan pokok maupun simpanan wajib yang tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih tercatat sebagai anggota. Selain itu ekuitas koperasi berasal dari modal sumbangan, modal penyertaan, cadangan dan SHU (Sisa Hasil Usaha) yang belum dibagi.

4. Pendapatan

Pendapatan diatur dalam PSAK No 27 paragraf 67 dan 69

67 *Pendapatan yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota diakui sebesar pendapatan bruto*

Sedangkan di paragraf 69 dinyatakan

69 *Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non-anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) yang dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non-anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non-anggota.*

5. Beban

Beban diatur dalam PSAK No 27 paragraf 72

a. *Beban Usaha dan beban-beban perkoperasian harus disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha.*

Laporan Keuangan

Hasil akhir dari akuntansi koperasi adalah laporan keuangan. Laporan keuangan koperasi terdiri dari:

- a. neraca,
- b. perhitungan hasil usaha ,
- c. laporan arus kas,
- d. laporan promosi ekonomi anggota, dan
- e. Catatan atas laporan Keuangan.

Neraca menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu. Modal koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan koperasi, dan hibah/donasi. Simpanan sukarela dimasukkan dalam utang lancar. Hal ini disebabkan Simpanan Sukarela merupakan simpanan yang dapat diambil setiap saat. Aktiva disajikan menurut tingkat likuiditas dan hutang disusun berdasarkan jatuh temponya.

Laporan perhitungan hasil usaha atau laporan sisa hasil usaha (SHU) memuat hasil usaha dengan anggota dan laba/rugi kotor dengan non-anggota. Pada dasarnya, harus diadakan pemisahan antara penggunaan pendapatan yang diperoleh dari pelayanan terhadap anggota sendiri dan terhadap pihak ketiga atau non anggota. Demikian pula harus dibedakan penjualan kepada anggota dan bukan anggota. Jadi bagian sisa hasil usaha yang diperoleh dari pelayanan terhadap pihak ketiga, termasuk bukan anggota, tidak boleh dibagikan pada anggota karena bagian pendapatan ini bukan diperoleh dari jasa anggota sehingga lebih baik digunakan untuk biaya cadangan.

Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi perubahan kas pada periode tertentu yang terdiri dari saldo awal, sumber penerimaan, pengeluaran kas pada periode tertentu.

Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang mengikhtisarkan manfaat ekonomi yang didapat anggota selama periode tertentu. Laporan ini mengikhtisarkan:

1. manfaat ekonomi dari pembelian atau pengadaan barang.
2. manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama.
3. manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi.
4. manfaat ekonomi dari pembagian sisa hasil usaha (SHU).

Catatan atas laporan Keuangan menyajikan pengungkapan (*disclosure*) yang memuat :

1. yang berhubungan dengan perlakuan akuntansi antara lain mengenai:
 - a. Pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi koperasi baik dengan anggota maupun dengan non anggota.
 - b. Kebijakan akuntansi tentang aktiva tetap, penilaian persediaan, piutang dll.
 - c. Dasar penetapan harga pelayanan baik kepada anggota maupun kepada non anggota.
2. pengungkapan informasi yang lain, di antaranya:
 - a. Kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota baik yang tercantum di AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) maupun dalam praktik yang dilakukan koperasi
 - b. Aktivitas koperasi dalam pengembangan sumber daya dan mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha, manajemen yang diselenggarakan untuk anggota dan penciptaan lapangan usaha baru untuk anggota
 - c. Ikatan atau kewajiban bersyarat yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota
 - d. Pengklasifikasian piutang dan hutang yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota
 - e. Pembatasan penggunaan dan resiko atas aktiva tetap yang diperoleh dari hibah atau sumbangan
 - f. Aktiva yang dioperasikan oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi
 - g. Aktiva yang diperoleh dari hibah dalam bentuk pengalihan saham dari perusahaan swasta
 - h. Pembagian Sisa hasil Usaha dan penggunaan cadangan
 - i. Hak dan tanggungan pemodal yang modalnya berupa modal penyertaan
 - j. Penyelenggaraan Rapat Anggota dan keputusan- keputusan penting yang berpengaruh pada perlakuan akuntansi dan penyajian laporan Keuangan

Di bagian berikut disajikan ilustrasi bentuk/format Laporan Keuangan

Neraca

KOPERASI "MAJU BERSAMA"						
NERACA						
31 Desember 2007 dan 2008						
AKTIVA	2007	2008	KEWAJIBAN DAN	2007	2008	
	(Rp)	(Rp)	EKUITAS	(Rp)	(Rp)	
Aktiva Lancar	xxx	xxx	Kewajiban Jangka Pendek	xxx	xxx	
Kas dan bank	xxx	xxx	Utang usaha	xxx	xxx	
Investasi jangka pendek	xxx	xxx	Utang bank	xxx	xxx	
Piutang usaha	xxx	xxx	Utang pajak	xxx	xxx	
Piutang pinjaman anggota	xxx	xxx	Utang simpanan anggota	xxx	xxx	
Piutang pinjaman non-anggota	xxx	xxx	Utang dana bagian SHU	xxx	xxx	
Piutang lain-lain	xxx	xxx	Utang jangka panjang akan jatuh tempo	xxx	xxx	
Penyisihan piutang tak tertagih	xxx	xxx				
Persediaan	xxx	xxx	Biaya harus dibayar	xxx	xxx	
Pendapatan akan diterima	xxx	xxx	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	xxx	xxx	
Jumlah Aktiva Lancar	xxx	xxx				
			Kewajiban Jangka Panjang			
Investasi Jangka Panjang			Hutang bank	xxx	xxx	
Penyertaan pada koperasi	xxx	xxx	Hutang jangka panjang lainnya	xxx	xxx	
Penyertaan pada non-koperasi	xxx	xxx	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	
Jumlah Investasi Jangka Panjang	xxx	xxx				
			Ekuitas			
Aktiva Tetap			Simpanan wajib	xxx	xxx	
Tanah/hak atas tanah	xxx	xxx	Simpanan pokok	xxx	xxx	
Bangunan	xxx	xxx	Modal penyetaraan partisipasi anggota	xxx	xxx	
Mesin	xxx	xxx	Modal penyertaan	xxx	xxx	
Inventaris	xxx	xxx	Modal sumbangan	xxx	xxx	
Akumulasi penyusutan	xxx	xxx	Cadangan	xxx	xxx	
Jumlah Aktiva Tetap	xxx	xxx	SHU belum dibagi	xxx	xxx	
			Jumlah ekuitas	xxx	xxx	
Aktiva Lain-Lain						
Aktiva tetap dalam konstruksi	xxx	xxx				
Beban ditangguhkan	xxx	xxx				
Jumlah Aktiva Lain-Lain	xxx	xxx				
JUMLAH AKTIVA	xxx	xxx	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	xxx	xxx	

Laporan perhitungan sisa hasil usaha (SHU)

KOPERASI "MAJU BERSAMA"		
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA		
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007 dan 2008		
(dalam ribuan rupiah)		
	2007	2008
PARTISIPASI ANGGOTA	Rp xxx	Rp xxx
Partisipasi bruto anggota	xxx	xxx
Beban pokok	xxx	xxx
Partisipasi neto anggota	<u>Rp xxx</u>	<u>Rp xxx</u>
PENDAPATAN DARI NON-ANGGOTA	Rp xxx	Rp xxx
Penjualan	xxx	xxx
Harga pokok	xxx	xxx
Laba(rugi) kotor dengan non-anggota	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Sisa hasil usaha kotor	<u>Rp xxx</u>	<u>Rp xxx</u>
BEBAN OPERASI		
Beban usaha	<u>Rp xxx</u>	<u>Rp xxx</u>
Sisa hasil usaha koperasi	Rp xxx	Rp xxx
Beban perkoperasian	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Sisa hasil usaha setelah beban perkoperasian	Rp xxx	Rp xxx
Pendapatan dan beban lain-lain	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Sisa hasil usaha sebelum pos-pos luar biasa	Rp xxx	Rp xxx
Pendapatan dan beban luar biasa	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Sisa hasil usaha sebelum pajak	Rp xxx	Rp xxx
Pajak penghasilan	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Sisa hasil usaha setelah pajak	<u>Rp xxx</u>	<u>Rp xxx</u>

Laporan promosi ekonomi anggota (koperasi konsumsi)

KOPERASI “MAJU BERSAMA” LAPORAN PROMOSI EKONOMI ANGGOTA Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007 dan 2008 (dalam ribuan rupiah)		
	2007	2008
PROMOSI EKONOMI SELAMA TAHUN BERJALAN		
Manfaat Ekonomi dari Pemasaran Produk Anggota		
Pemasaran produk anggota atas dasar harga koperasi	Rp xxx	Rp xxx
Pemasaran produk anggota atas dasar harga pasar	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Jumlah promosi ekonomi dan transaksi pemasaran produk anggota	<u>Rp xxx</u>	<u>Rp xxx</u>
Manfaat Ekonomi dari Pengadaan barang untuk Anggota		
Pemasaran produk anggota atas dasar harga koperasi	Rp xxx	Rp xxx
Pemasaran produk anggota atas dasar harga pasar	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Jumlah promosi ekonomi dan transaksi pengadaan barang untuk anggota	<u>Rp xxx</u>	<u>Rp xxx</u>
Manfaat Ekonomi dari Simpan Pinjam Lewat Koperasi		
Penghematan beban pinjaman anggota	Rp xxx	Rp xxx
Kelebihan balas jasa simpanan anggota	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Jumlah promosi ekonomi dari transaksi penyediaan jasa untuk anggota	<u>Rp xxx</u>	<u>Rp xxx</u>
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota Selama Tahun Berjalan	Rp xxx	Rp xxx
Promosi Ekonomi pada Akhir Tahun		
Pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan untuk anggota	<u>Rp xxx</u>	<u>Rp xxx</u>
JUMLAH PROMOSI EKONOMI ANGGOTA	<u>Rp xxx</u>	<u>Rp xxx</u>

Untuk memperjelas bahasan akuntansi koperasi, maka di bagian berikutnya diuraikan pencatatan yang dilakukan dalam satu siklus akuntansi.

Siklus Akuntansi Koperasi sama seperti Badan Usaha yang lain yang dimulai dari bukti transaksi dan berakhir pada penyajian Laporan Keuangan. Uraian masing-masing tahapan dalam siklus tersebut diberikan di bahasan berikut .

Bukti-bukti transaksi koperasi

Bukti transaksi merupakan dokumen dasar untuk membuat jurnal dan merupakan bukti bahwa telah terjadi transaksi di koperasi.. Semua bukti transaksi dari bagian pembelian, bagian penjualan, dan bagian lain-lain datang ke bagian akuntansi. Bukti-bukti tersebut harus dianalisis kebenarannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyelewengan-penyelewengan. Masing-masing koperasi mempunyai bukti-bukti transaksi yang berbeda dan akan tergantung pada jenis koperasinya. Berikut ini diberikan contoh bukti-bukti transaksi yang ada di unit toko koperasi “Maju Bersama”.

Bukti transaksi yang ada di unit toko koperasi “Maju Bersama” sama seperti bukti transaksi yang terjadi di perusahaan dagang lainnya, yang dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Bukti penerimaan kas
- b. Bukti pengeluaran kas
- c. Bukti penjualan
- d. Bukti pembelian dan
- e. Bukti umum

a. Bukti penerimaan kas

adalah bukti transaksi yang membuktikan bahwa koperasi telah menerima sejumlah uang tunai atau alat pembayaran yang sama dengan uang tunai (cek). Bukti penerimaan kas digunakan sebagai tempat mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan penerimaan uang tunai . Sumber penerimaan uang tunai antara lain dari:

- 1. penerimaan simpanan dari anggota koperasi
- 2. penerimaan dari penjualan tunai
- 3. penerimaan tagihan dari debitur
- 4. penerimaan uang dari pihak lain yang merupakan realisasi hak koperasi

5. penerimaan bunga
6. penerimaan berupa uang jasa seperti komisi
7. penerimaan kembali utang karyawan koperasi
8. penerimaan lainnya yang dapat menambah uang tunai koperasi.

Untuk tujuan pengendalian, bukti penerimaan kas dibuat minimal rangkap dua dan masing-masing dibuat dengan warna yang berbeda agar tidak terjadi penyelewengan. Jika bukti dibuat rangkap tiga, maka yang asli untuk pembayar, yang kedua untuk bagian keuangan, dan yang ketiga untuk arsip kasir. Bentuk dari Bukti Penerimaan Kas tergantung pada kebutuhan masing-masing koperasi dengan memperhatikan prinsip pengendalian dan mengarah pada pengelolaan yang profesional.

Contoh: Pada tanggal 12 Januari 2007, koperasi simpan pinjam “Berkah”, menerima selemba cek dari Andra senilai Rp 400.000,00 dan uang tunai sejumlah Rp 20.000,00. Pembayaran tersebut terdiri dari angsuran pinjaman Rp 225.000- bunga pinjaman Rp 15.000,00 dan tabungan suka rela Rp 180.000,00. Koperasi simpan pinjam “Berkah” mencatat transaksi di atas ke dalam bukti penerimaan kas sebagai berikut:

KOPERASI SIMPAN PINJAM "BERKAH"		Malang, 12 Januari 2007	
Jl. Bandung no. 003, Malang Tlp: (0341) 567899		BPK no: 005/BPK/07	
BUKTI PENERIMAAN KAS			
Telah diterima dari: Andra (anggota/ bukan anggota)			
Terdiri dari:			
Uang tunai	: Rp	20.000,00	
Cek	: Rp	400.000,00	
Jumlah	: <u>Rp 420.000,00</u>	(empat ratus dua puluh ribu rupiah)	
Untuk	:	Penerimaan pokok pinjaman	Rp 225.000,00
		Bunga pinjaman	Rp 15.000,00
		Tabungan	Rp 180.000,00
Disetujui oleh	Dibukukan oleh	Diterima oleh	
Ariel	Dhani	Nia	
Manajer	Bag. pembukuan	Kasir	
Untuk pembukuan	Ref	Debet	Kredit
Hal buku harian/ Jurnal : 34	111 114 411 213	Rp 420.000,00	Rp 225.000,00 Rp 15.000,00 Rp 180.000,00
Putih: untuk pembayar Merah: Pembukuan Biru: Bagian keuangan Kuning : arsip			
111: akun kas 114: akun pinjaman yang diberikan 411: akun bunga atas volume pinjaman yang diberikan 213: akun tabungan Idul Fitri			

b. Bukti pengeluaran kas

adalah bukti transaksi yang membuktikan bahwa koperasi telah membayar sejumlah uang tunai atau alat pembayaran lainnya yang disamakan dengan uang tunai. Bukti pengeluaran merupakan alat untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang kas atau tunai, Pengeluaran uang tunai antara lain digunakan untuk:

1. pembayaran kembali simpanan sukarela
2. pengembalian simpanan pokok dan wajib kepada anggota koperasi yang keluar
3. pembelian barang secara tunai
4. pemberian pinjaman kepada anggota koperasi
5. pembayaran gaji karyawan dan manajer
6. pengeluaran-pengeluaran lainnya

Contoh:

1. Pada tanggal 21 Januari 2007 Koperasi mengeluarkan uang untuk pencairan pinjaman anggota no 107 atas nama Arjuna sebesar Rp 275.000,00. Dari pinjaman ini biaya administrasi yang dikenakan ke pinjaman tersebut sebesar Rp 25.000,00 yang langsung dipotong pada saat pencairan. Transaksi ini dapat disamping dicatat di bukti penerimaan kas juga dicatat di jurnal.

Contoh formulir bukti pengeluaran kas

KOPERASI "MAJU BERSAMA"		Malang,.....	
Jl. Anggrek no. 003, Malang			
Tlp: (0341) 456789		BKK no:	
BUKTI PENGELUARAN KAS			
Telah dibayarkan kepada: ...Tuan Arjuna (anggota/bukan anggota)			
Terdiri dari:			
Uang tunai :Rp 275.000,00			
Cek :Rp-			
Jumlah :Rp 275.000			
(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)			
Untuk :pencairan pinjaman senilai Rp 300.000,00 dan biaya administrasi Rp 25.000,00			
Dibuat oleh		Disetujui oleh	
Diterima oleh			
_____ (Kasir)		_____ (Manajer Koperasi)	
_____ (Nama)			
Untuk pembukuan	Ref	Debet	Kredit
Hal buku harian :.....			
Jurnal :.....			
Putih: <i>Penerima</i> Merah muda: <i>Pembukuan</i> Biru: <i>Bag. keuangan</i> Kuning: <i>Arsip</i>			

Jurnalnya:

Piutang Arjuna	Rp 300.000,00
Pendapatan administrasi	Rp 25.000,00
Kas	Rp 275.000,00

2. Pada tanggal 5 Januari 2007, koperasi Makmur Sejahtera membayar hutang kepada PT Mandiri Perkasa sebesar Rp 32.000.000,00 (Faktur pembelian no. 310/FP/01). Bukti pengeluaran kas yang dibuat oleh koperasi adalah sebagai berikut:

KOPERASI SIMPAN PINJAM		Malang, 5 Januari 2007	
"MAKMUR SEJAHTERA"			
Jl. Titan no. 57, Malang			
Tlp: (0341) 758347		BKK no: 001/BKK/07	
BUKTI PENGELUARAN KAS			
Telah dibayarkan kepada: PT Mandiri Perkasa (anggota /bukan anggota)			
Terdiri dari:			
Uang tunai	:Rp		
Cek	:Rp 32.000.000,00		
Jumlah	: <u>Rp 32.000.000,00</u>		
(Tiga puluh dua juta rupiah)			
Untuk	: Pembayaran Hutang kepada PT Mandiri Perkasa Faktur pembelian no. 310/FP/01).		
Dibuat oleh		Disetujui oleh	Diterima oleh
Rizki	Andien	Rama	
_____ (Kasir)	_____ (Manajer Koperasi)	_____ (Nama)	
Untuk pembukuan	Ref	Debet	Kredit
Hal buku harian	211	Rp 32.000.000,00	
Jurnal : 01	111		Rp 32.000.000,00
Putih: untuk pembayar Merah: Pembukuan Biru: Bagian keuangan Kuning : arsip			

Bukti penjualan/ faktur penjualan

adalah bukti pembukuan yang membuktikan koperasi melakukan transaksi penjualan barang secara kredit. Penjualan secara tunai dicatat pada bukti penerimaan kas.

Ilustrasi pencatatan bukti penjualan

Pada 12 Januari 2007, Koperasi Sejahtera Mandiri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim no. 23 Malang, Telp (0341) 563738 menjual barang kepada Tuan Adnan (anggota) secara kredit. Barang-barang yang dijual adalah sebagai berikut:

- ❖ 25 boks air mineral gelas merk "Oase" Rp 175.000,00
- ❖ 30 buah notes merk "Cahaya" Rp 210.000,00
- ❖ 5 boks mi instan merk "Supermi" Rp 175.000,00

KOPERASI "Sejahtera Mandiri"		Malang, 12 Januari 2007		
Jl. Arif Rahman Hakim no. 23, Malang		FJ No.: 013/FJ/07		
Telp (0341) 563738				
FAKTUR PENJUALAN				
Akun Tuan: Adnan (anggota/ bukan anggota)				
Didebet uang Rp 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah)				
Untuk penyerahan barang-barang:				
No.	Nama barang	Banyak	Harga satuan	Jumlah
1.	Air mineral merk 'Oase'	25 boks	Rp 7.000,00	Rp 175.000,00
2.	Notes merk 'Cahaya'	30 buah	Rp 7.000,00	Rp 210.000,00
3.	Mi instan merk 'Supermi'	5 boks	Rp 35.000,00	Rp 175.000,00
Manajer		Kabag. Penjualan		
(Adrian)		(Bayu)		
Untuk pembukuan		Ref	Debet	Kredit
Hal buku harian :.....		112	Rp 560.000,00	
Jurnal :023		411		Rp 560.000,00
Putih: Pembeli Merah: Pembukuan Biru: Bagian keuangan Kuning : Arsip				
112: akun piutang dagang		411: akun penjualan		

Bukti pembelian/ faktur pembelian

adalah bukti pembukuan yang membuktikan koperasi telah membeli barang secara kredit. Pembelian secara tunai dicatat pada bukti pengeluaran kas.

Ilustrasi pencatatan bukti pembelian

Pada tanggal 14 Februari 2007, Koperasi "Setaman Jaya" yang beralamat di Jl. Mertojoyo 235 Malang, Telp (0341) 490677 membeli barang secara kredit berupa 5 buah lemari ukuran sedang dari Toko Abadi yang beralamat di Jl. Arwana 32 seharga Rp 900.000,00.

KOPERASI "SETAMAN JAYA" Jl. Mertojoyo 235, Malang Tlp: (0341) 490677		Malang, 14 Februari 2007 FB No.: 043/FB/07		
FAKTUR PEMBELIAN Dibeli dari:..... (anggota/bukan anggota)				
No.	Nama barang	banyak	Harga satuan	Jumlah
1.	Lemari ukuran sedang	5 buah	Rp 180.000,00	Rp 900.000,00
				Pegawai Gudang
				_____ (Zaki)
Kepala Bagian Pembelian		Telah diperiksa kebenarannya		Manajer
_____ (Diaz)				_____ (Thalita)
Untuk pembukuan		Ref	Debet	Kredit
Hal buku harian :.....		511	Rp 900.000,00	
Jurnal : 67		211		Rp 900.000,00
Putih: Penjual Kuning: Pembukuan Biru: Bagian keuangan Jingga: Arsip				
511: akun pembelian 211: akun utang dagang				

Bukti umum/bukti serba-serbi

adalah bukti pembukuan yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat dalam bukti penerimaan kas, bukti pengeluaran kas, faktur penjualan, faktur pembelian. Transaksi yang dicatat pada bukti ini adalah:

1. retur pembelian
2. retur penjualan
3. penghapusan piutang
4. penghapusan aktiva tetap
5. pembagian SHU

Ilustrasi pencatatan bukti umum atau serba-serbi

Pada tanggal 20 Februari 2007 Unit toko Koperasi Setaman Jaya mengembalikan 2 buah lemari ukuran sedang yang dibeli dari Toko Abadi

KOPERASI "SETAMAN JAYA" UNIT TOKO Jl. Mertojoyo 235, Malang Tlp: (0341) 490677		Malang, 20 Februari 2007	
BUKTI UMUM No: 07/BU/07			
Lemari ukuran sedang yang dibeli dari Toko Abadi sebanyak 2 buah @ Rp 150.000,00 dikembalikan karena rusak			
Dibukukan oleh _____ (Alif)	Telah diperiksa kebenarannya Manajer Unit Toko _____ (Annisa)	Kepala Bagian Akuntansi _____ (Yudha)	
Untuk pembukuan	Ref	Debet	Kredit
Hal buku harian :.....	211	Rp 300.000,00	
Jurnal :.....	513		Rp 300.000,00
Putih: Penerima Biru: Bagian keuangan Jingga: Arsip			
211: akun utang dagang 513: akun retur pembelian dan potongan harga			

Tahap Pencatatan Akuntansi Koperasi

Dari bukti transaksi yang telah diuraikan sebelumnya, tahap berikutnya adalah membuat jurnal.

A. Jurnal

Jurnal adalah daftar atau buku tempat mencatat transaksi secara kronologis (berurutan) sesuai tanggal terjadinya transaksi dengan mencantumkan akun yang didebit dan akun yang dikredit serta jumlah nominal masing-masing.

Contoh:

Berikut adalah transaksi-transaksi yang terjadi di Koperasi Sumber Makmur selama bulan Mei 2007

- Mei 1 Dibeli perlengkapan toko koperasi secara kredit Rp 321.000,00
- 4 Dijual barang dagangan secara kredit kepada Toko Ali Rp 6.350.000,00
- 6 Diterima simpanan pokok dan wajib dari 8 anggota baru koperasi. Simpanan pokok Rp 125.000,00 simpanan wajib Rp 75.000,00

Jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi-transaksi di atas adalah:

Tanggal	No. Bukti	Nama akun	Ref	Debet	Kredit
Mei	1	FB 031	Perlengkapan toko	321.000	
			Utang dagang		321.000
			Membeli perlengkapan toko secara kredit		
	4	FJ 023	Piutang dagang	6.350.000	
			Penjualan		6.350.000
			Menjual barang dagangan secara kredit		
	6	BKM 012	Kas	1.600.000	
			Simpanan pokok		1.000.000
			Simpanan wajib		600.000
			Menerima setoran simpanan pokok dan simpanan wajib dari anggota baru		

B. Buku Besar

Setelah transaksi-transaksi selesai dicatat dalam jurnal, berikutnya harus dipindahkan atau *posting* transaksi-transaksi tersebut ke buku besar.

Buku besar (Ledger) adalah kumpulan akun-akun suatu perusahaan. Pencatatan atas bertambah atau berkurangnya suatu akun dalam buku besar akan mempengaruhi satu atau lebih akun lainnya. Hal ini merupakan akibat dari sistem pencatatan berpasangan (double entry system). Pengaruh dari kenaikan atau penurunan suatu akun adalah bertambahnya atau berkurangnya akun lain. Dalam pencatatan akun-akun di buku besar membutuhkan akun-akun yang tersusun dengan baik. Untuk membantu penyusunan akun-akun tersebut, dibutuhkan Kode akun. Kode akun yaitu simbol berupa angka, huruf, atau gabungan keduanya yang menunjukkan akun tertentu. Bagan atau daftar yang menunjukkan kode akun dan akun yang dikodekannya disebut bagan akun. Dalam pembuatan kode akun harus diingat bahwa perusahaan (koperasi) akan berdiri/beroperasi selamanya (prinsip *going concern*). Dengan demikian kode yang dibuat harus dirancang untuk kepentingan jangka panjang.

Contoh bagan akun koperasi simpan pinjam

I. AKTIVA
1.1. AKTIVA LANCAR
1.1.01 Kas
1.1.01.01 Kas
1.1.02 Bank
1.1.02.01 Bank BNI
1.1.02.02 Bank BRI
1.1.02.03 Bank Mandiri
1.1.03 Piutang
1.1.03.01 Piutang
1.1.04 Penyisihan piutang tak tertagih
1.1.04.01 Penyisihan piutang tak tertagih
1.1.05 Pendapatan Jasa yang akan ditagih
1.1.05.01 Pendapatan Jasa yang akan ditagih
1.2. AKTIVA TETAP
1.2.01 Tanah
1.2.01.01 Tanah
1.2.02 Gedung kantor
1.2.01.02 Gedung kantor
1.2.03 Peralatan kantor
1.2.03.01 Peralatan kantor
1.2.04 Akumulasi Penyusutan
1.2.04.01 Akumulasi Penyusutan Gedung
1.2.04.02 Akumulasi Penyusutan Peralatan
II. KEWAJIBAN
2.1. KEWAJIBAN LANCAR
2.1.01 Dana sosial
2.1.01.01 Dana sosial
2.1.02 Dana Pendidikan
2.1.02.01 Dana Pendidikan
2.1.03 Dana pembangunan kerja daerah
2.1.03.01 Dana pembangunan kerja daerah
2.1.04 Dana kesejahteraan pegawai
2.1.04.01 Dana kesejahteraan pegawai
2.1.05 Tabungan Idul Fitri
2.1.05.01 Tabungan Idul Fitri
2.2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
2.2.01 Utang Bank
2.2.01.01 Utang Bank Mandiri
2.2.01.02 Utang Bank Muamalat
2.2.01.03 Utang Bank BNI
III. Modal
3.1. Simpanan pokok
3.1.01 Simpanan pokok
3.1.01.01 Simpanan pokok
3.2. Simpanan wajib
3.2.01 Simpanan wajib
3.2.01.01 Simpanan wajib

3.3. Sisa Hasil Usaha
3.3. 01 Sisa Hasil Usaha
3.3. 01.01 Sisa Hasil Usaha
3.4. Cadangan
3.4.01. Cadangan
3.4. 01.01.Cadangan
IV. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Operasional
4.1.01. Pendapatan jasa
4.1.01.01 Pendapatan jasa
4.2. Pendapatan komisi
4.2.01 Pendapatan komisi
4.2.01.01 Pendapatan komisi
4.3. Pendapatan lain-lain
4.3.01 Pendapatan lain-lain
4.3.01.01 Pendapatan lain-lain
V. BEBAN-BEBAN
5.1. Beban bunga bank
5.1.01 Beban bunga bank
5.1.01.01 Beban bunga bank Mandiri
5.1.01.02 Beban bunga bank Muamalat
5.1.01.03 Beban bunga bank BNI
5.2. Beban gaji/upah
5.2.01 Beban gaji/upah
5.2.01.01 Beban gaji/upah karyawan tetap
5.2.01.02 Beban gaji/upah karyawan kontrak
5.3. Beban RAT Tahun Buku
5.3.01 Beban RAT Tahun Buku
5.3.01.01 Beban RAT Tahun Buku
5.4. Beban administrasi dan umum
5.4.01 Beban administrasi dan umum
5.4.01.01 Biaya listrik, air, dan telepon
5.4.01.02 Beban transportasi
5.4.01.03 Beban rapat
5.4.01.04 Beban penghapusan piutang
5.4.01.05 Beban penyusutan gedung kantor
5.4.01.06 Beban penyusutan peralatan kantor
5.4.01.07 Tunjangan hari raya
5.4.01.08 Beban pembinaan
5.4.01.09 Pajak Penghasilan (PPh)

Jika diperhatikan dengan lebih teliti, kode dan nama akun di atas memiliki kesamaan dengan kode dan nama akun untuk perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Perbedaan yang nampak untuk bagan akun koperasi adalah pada akun-akun modal koperasi. Jika pada perusahaan jasa atau dagang modal berupa setoran pemilik (perusahaan

perseorangan), modal koperasi terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib.

Contoh B-3

Dengan menggunakan data jurnal pada contoh di atas, posting ke buku besar adalah sebagai berikut:

Kas

no: 111

Tanggal	keterangan	Ref	Debet	kredit	Saldo	
Mei 6	Menerima setoran simpanan pokok dan simpanan wajib		1.600.000		1.600.000	D

Piutang dagang

no: 112

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
Mei 4	Menjual barang dagangan secara kredit		6.350.000		6.350.000	D

Perlengkapan toko

no:114

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
Mei 1	Membeli perlengkapan toko		321.000		321.000	D

Utang dagang

no: 211

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
Mei 1	Membeli perlengkapan toko			321.000	321.000	K

Simpanan pokok

no: 311

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
Mei 6				1.000.000	1.000.000	K

Simpanan wajib

no: 312

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
Mei 6				600.000	600.000	K

Penjualan

no:411

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	kredit	Saldo	
Mei 4	Menjual barang dagangan secara kredit			6.350.000	6.350.000	K

C. Buku Besar Pembantu (Subsidiary Ledger)

Buku besar pembantu (*subsidiary ledger*) adalah buku besar yang digunakan untuk merinci lebih lanjut informasi yang terdapat dalam salah satu akun di dalamnya. Akun yang memiliki buku besar pembantu disebut akun pengendali (*controlling account*). Buku besar pembantu yang dimiliki oleh koperasi adalah:

1. buku piutang kepada anggota
2. buku utang pada anggota
3. buku utang
4. buku piutang
5. buku simpanan anggota
6. buku aktiva tetap

Contoh :

Dengan menggunakan data jurnal A-1 dan buku besar B-3, contoh buku besar pembantu adalah sebagai berikut:

Buku simpanan anggota (untuk satu orang)

KOPERASI SUMBER MAKMUR Jl. Mawar Jembe 83, Malang Telp: (0341) 485769									
Nama anggota : Firman Alamat : Jl. Tenaga Dalam No. 32 Tlp. (0341) 489729 Pekerjaan : Arsitek					No. anggota : 07-039 Tanggal masuk : 6 Mei 2007 Tanggal keluar : Tanda tangan :				
(dalam ribuan rupiah)									
Tanggal	Keterangan	Debet			Kredit				
		Simpanan			Simpanan				
		Wajib	Pokok	Sukarela	Wajib	Pokok	Sukarela	Saldo simpanan	Paraf
Mei	6								
		125	75					200	

Setelah dilakukan posting ke buku besar, maka tahapan selanjutnya adalah mengumpulkan saldo-saldo di akhir periode. Kumpulan saldo-saldo buku besar di akhir periode dinamakan **Neraca Saldo**.

Seperti perusahaan yang lain, pencatatan yang dilakukan koperasi juga menggunakan dasar akrual (*accrual basis*). Oleh karena itu pada akhir periode memerlukan **jurnal penyesuaian** (*adjusting entries*). Pada prinsipnya pemakaian metode akrual ini adalah mengakui pendapatan yang sudah menjadi haknya walaupun belum diterima dan membebankan biaya bila sudah menjadi kewajibannya.

Untuk memudahkan penyusunan Laporan Keuangan, sebaiknya disusun Kertas Kerja (*worksheet*). Cara penyusunannya sama dengan yang dilakukan perusahaan pada umumnya. Dari hasil Kertas Kerja yang disusun sebelumnya, koperasi dapat dengan mudah menyusun Laporan Keuangan.

Contoh soal dan penyelesaiannya:

Sekelompok pengrajin kulit yang banyak memproduksi jaket, sabuk, dompet dll di desa Jamberejo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang akan mendirikan Koperasi untuk memperlancar usaha mereka . Koperasi tersebut diberi nama Koperasi Serba Usaha“ Makmur Sentosa”. Transaksi selama bulan April 2007 adalah sebagai berikut:

April	2	Menerima setoran dari anggota dengan rincian: simpanan pokok Rp 200.000.000,00, simpanan wajib Rp 100.000.000,00 dan simpanan sukarela Rp 30.000.000,00
	3	Untuk mengurangi resiko, dibuka rekening tabungan atas nama Sdr Sofyan selaku ketua dan Ibu Agustin selaku bendahara, di bank BRI kota Malang sebesar Rp 250.000.000,00
	3	Bapak Muhammad sebagai penggagas awal pendirian koperasi ini menghibahkan tanah beserta bangunannya yang digunakan untuk kantor koperasi dimana ditaksir nilai pasarnya Rp 75.000.000,00 dan bangunan Rp 50.000.000,00
	4	Dibeli peralatan dan mebelair untuk kantor senilai Rp 1.500.000,00
	4	Dikeluarkan dana sebesar Rp 200.000,00 untuk konsumsi rapat pembentukan koperasi
	5	Dikeluarkan uang tunai sebesar Rp 3.500.000,00 untuk pengurusan Akte pendirian dan pengurusan NPWP
	7	Dibeli ATK (alat tulis kantor) senilai Rp 250.000,00
	13	Atas pengajuan kredit untuk koperasi, pada tgl tersebut diterima transfer pencairan kredit lunak untuk modal kerja dari Bank Bukopin senilai Rp 300.000.000,00 tingkat bunga 9 % flat jangka waktu 3 tahun. Biaya administrasi 1 % dan Biaya provisi 1,25 %
	15	Diserahkan pencairan pinjaman sebesar Rp 125.000.000,00 kepada 25 orang anggota dengan bunga 15 % per tahun dipotong biaya administrasi 1 % via Bank yang diterima oleh koordinator

	17	Diterima uang tunai dari 10 anggota baru dengan menyetor simpanan pokok masing-masing Rp 1.000.000,00 simpanan wajib Rp 500.000,00 dan simpanan sukarela yang totalnya berjumlah Rp 4.000.000,00
	19	Diterima simpanan sukarela sejumlah Rp 45.000.000,00
	21	Dikeluarkan pencairan pinjaman modal kerja dengan bunga 1 % per bulan, tanpa biaya administrasi kepada 30 anggota masing-masing sebesar Rp 3.000.000,00
	25	Dikeluarkan biaya pelatihan Manajemen Koperasi selama 3 hari yang diadakan Disperindagkop kabupaten Malang untuk 2 orang pengurus sebesar Rp 1.500.000,00
	30	Dikeluarkan honorarium pegawai administrasi senilai Rp 2.000.000
	30	Biaya administrasi dan jasa giro Bank bulan ini masing-masing sebesar Rp 75.000,00 dan Rp 250.000,00

Jurnal transaksi di atas adalah:

		Rekening	Ref.	Debet (Rp000,00)	Kredit (Rp 000,00)
April	2	Kas		330.000	
		Simpanan Pokok			200.000
		Simpanan Wajib			100.000
		Simpanan Sukarela			30.000
		(mencatat setoran simpanan)			
	3	Kas di bank (Bank)		250.000	
		Kas			250.000
		(membuka rek. Tabungan Bank)			
	3	Tanah		75.000	
		Bangunan		50.000	
		Modal sumbangan			125.000
		(mencatat modal sumbangan)			
	4	Peralatan		1.500	
		Kas			1.500
		(membeli peralatan secara tunai)			
	4	Biaya administrasi & umum		200	
		Kas			200
		(membebaskan biaya konsumsi rapat)			
	5	Aktiva Lain-lain		3.500	
		Kas			3.500
		(mencatat biaya pengurusan akte pendirian & NPWP)			
	7	Perlengkapan		250	
		Kas			250
		(mencatat pembelian ATK)			
	13	Kas di Bank		293.250	
		Biaya administrasi Bank		3.000	
		Biaya provisi		3.750	
		Hutang Bank			300.000
		(mencatat pencairan pinjaman dari BUKOPIN)			

	15	Piutang pinjaman anggota		125.000	
		Pendapatan jasa			1.250
		Kas di Bank			123.750
		(mencatat pencairan pinjaman anggota)			
	17	Kas		19.000	
		Simpanan Pokok			10.000
		Simpanan Wajib			5.000
		Simpanan sukarela			4.000
		(mencatat setoran anggotan baru)			
	19	Kas		25.000	
		Simpanan sukarela			25.000
		(mencatat simpanan sukarela)			
	21	Piutang pinjaman anggota		90.000	
		Kas			90.000
		(pencairan pinjaman modal kerja)			
	25	Beban perkoperasian		1.500	
		Kas			1.500
		(mencatat biaya pelatihan)			
	30	Beban pokok		2.000	
		Kas			2.000
		(mencatat biaya gaji karyawan adm.)			
	30	Kas di Bank		175	
		Beban bunga simpanan		75	
		Jasa giro			250
		(mencatat pendapatan dari jasa giro dan pembebanan biaya adm. Bank)			

Dari jurnal tersebut, langkah selanjutnya adalah melakukan posting ke buku besar masing-masing rekening

Kas

Tanggal		Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
April	2	mencatat setoran simpanan		330.000		330.000	
	3	membuka rek. Tabungan Bank BRI			250.000	80.000	
	4	membeli peralatan secara tunai			1.500	78.500	
	4	membebankan biaya konsumsi rapat			200	78.300	
	5	mencatat biaya pengurusan akte pendirian & NPWP			3.500	74.800	
	7	mencatat pembelian ATK			250	74.550	
	15	mencatat setoran anggota		19.000		93.550	

		baru					
	17	mencatat simpanan sukarela		25.000		118.550	
		pencairan pinjaman modal kerja			90.000	28.550	
	25	mencatat biaya pelatihan			1.500	27.050	
	30	mencatat biaya gaji karyawan adm.			2.000	25.050	

Kas di Bank

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
3	membuka rek. Tabungan Bank		250.000		250.000	
13	mencatat pencairan pinjaman dari BUKOPIN		293.250		543.250	
15	mencatat pencairan pinjaman anggota			123.750	419.500	
30	mencatat pendapatan dari jasa giro		175		419.675	

Piutang Pinjaman anggota

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
15	mencatat pencairan pinjaman anggota		125.000		125.000	
21	pencairan pinjaman modal kerja		90.000		215.000	

Perlengkapan (ATK)

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
7	mencatat pembelian ATK		250		250	

Tanah

Tanggal		Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
	3	mencatat tanah sebagai modal sumbangan		75.000		75.00	

Bangunan

Tanggal		Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
	3	mencatat bangunan sebagai modal sumbangan		50.000		50.000	

Peralatan

Tanggal		Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
	4	membeli peralatan secara tunai		1.500		1.500	

Aktiva Lain-lain

Tanggal		Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
	5	mencatat biaya pengurusan akte pendirian & NPWP		3.500		3.500	

Hutang Bank

Tanggal		Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
	13	mencatat pencairan pinjaman dari BUKOPIN			300.000		300.000

Simpanan Sukarela

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
2	setoran simpanan			30.000		30.000
17	mencatat setoran anggota baru			4.000		34.000
19	mencatat simpanan sukarela			2.500		36.500

Simpanan Pokok

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
2	setoran simpanan			200.000		200.000
17	mencatat setoran anggota baru			10.000		210.000

Simpanan Wajib

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
2	setoran simpanan			100.000		100.000
17	mencatat setoran anggota baru			5.000		105.000

Modal Sumbangan

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
2	mencatat modal sumbangan			125.000		125.000

Pendapatan Jasa

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
	Mencatat pendpt jasa dari pencairan pinjaman anggota			1.250		1.250

Jasa Giro

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
	30	mencatat pendapatan dari jasa giro Bank		250		250

Beban Perkoperasian

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
	25	mencatat biaya pelatihan	1.500		1.500	

Beban Bunga Bank

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
	30	mencatat pembebanan biaya bunga Bank	75		75	

Beban Usaha

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
	4	membebankan biaya konsumsi rapat	200		200	
	30	mencatat biaya gaji karyawan adm.	2.000		2.200	

Beban Administrasi Bank

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
	13	Mencatat biaya adm. pinjaman dari BUKOPIN	3.000		3.000	

Biaya Provisi

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
13	mencatat biaya provisi pinjaman dari BUKOPIN		3.750		3.750	

Soal

Pada tanggal 24 Juli 2007, para karyawan di Instansi pendidikan “X” di Malang berinisiatif mendirikan Koperasi Serba Usaha dan diberi nama Koperasi “Usaha Makmur” yang beralamat di Jalan Merjosari Blok L Malang. Koperasi ini beranggotakan 200 orang dan bergerak di bidang penyediaan kebutuhan sehari-hari dan segala jenis perabot Rumah tangga. Transaksi di bulan Agustus 2007 adalah sebagai berikut:

Agustus	1	didirikan koperasi dengan simpanan pokok Rp 100.000,00 simpanan wajib Rp 50.000,00
	2	Dikeluarkan biaya-biaya rapat pembentukan koperasi yang dihadiri 112 anggota sebesar Rp 500.000,00
	4	Dibayar biaya notaris untuk mengurus akte pendirian, surat izin usaha dan NPWP sebesar Rp 2.500.000,00
	6	Diterima pinjaman lunak dari Bank Syariah Mandiri dengan bunga menurun sebesar 17,5 % sebesar Rp 300.000.000,00 dipotong biaya administrasi 1 % dan biaya provisi 1,25 % jangka waktu 3 tahun
	7	Diterima hibah dari Bapak Muhammad berupa 1 unit komputer lengkap dengan printernya senilai Rp 7.000.000,00 dan almari kaca untuk <i>display</i> barang seharga Rp 2.000.000,00
	8	Perlengkapan toko dan ATK (alat tulis kantor) yang dibeli pada bulan ini Rp 500.000,00
	9	Petugas toko membeli barang untuk mengisi persediaan berupa: 2 ton beras Mentari @ Rp 5000,00/kg 1 ton gula pasir di Pabrik Gula Kebon Agung @ Rp 6.200,00/kg 50 % dibayar tunai, sisanya dibayar bulan depan .
	11	Dibeli secara tunai 2 buah <i>tape compo</i> @ Rp 2.000.000,-, 2 buah kipas angin @ Rp 700.000,00 dan 5 buah <i>magic jar</i> seharga Rp 500.000,00 sebagai persediaan.
	13	Penjualan secara kredit barang pada hari ini terdiri dari: 5 kwintal beras @ Rp 5.500,00/kg 50 kg gula pasir @ Rp 7.500,00
	13	Dibeli secara kredit kepada pedagang pasar besar makanan dan minuman ringan untuk dijual kembali senilai Rp 3.000.000,00
	14	Dicatat simpanan pokok dan wajib anggota baru sebanyak 5 orang
	14	Koperasi membeli mi instan sebanyak 20 dos a Rp 37.500,00/dos
	15	Seorang pedagang eceran membeli 1 kwintal beras Mentari @ Rp 5.300,00

	15	Anggota dengan no keanggotaan 007 membeli <i>tape compo</i> , seharga Rp 2.500.000,00 dicicil 5x dan dikenakan biaya administrasi 1,5 % per bulan
	19	Koperasi membeli sebuah sepeda motor bekas secara tunai senilai Rp 7.800.000,00 untuk inventaris
	20	Dicatat penjualan tunai pada tanggal 20 yang terdiri dari: 1 ton beras Mentari @ Rp 5.300,00/kg 1 kwintal gula pasir @ Rp 7.400,00/kg 1 dos mi instan Rp 40.000,00
	25	Dicatat penjualan yang terjadi antara tgl 20-25 yang terdiri dari: 2 kwintal beras Mentari @ Rp 5.300,00/kg 1 kwintal gula pasir @ Rp 7.400,00/kg 2 dos mi instan Rp 40.000,00 makanan dan minuman ringan Rp 2.000.000,00
	27	Untuk mengisi stok barang, pegawai toko membeli secara kredit: 1 ton beras Mentari @ Rp 5.500,00 1 ton gula pasir @ Rp 7.500,00/kg makanan dan minuman ringan senilai Rp 2.500.000,00
	30	Dibayar gaji 2 orang pegawai toko masing-masing Rp 750.000,00

Diminta:

- Jurnallah transaksi di atas
- Posting*-lah jurnalnya ke Buku Besar

BAB 4



AKUNTANSI untuk PERBANKAN

- ☺ Karakteristik Usaha Perbankan
 - ☺ Jenis Jas Perbankan
 - ☺ Terminologi
 - ☺ Perlakuan Akuntansi
 - ☺ Contoh Transaksi
- ☺ Pelaporan Keuangan pada Bank

AKUNTANSI untuk PERBANKAN



Gambaran Umum Usaha

1. Karakteristik usaha perbankan

Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana. Sebagai perantara keuangan, bank menghimpun dana dari masyarakat yang surplus dana dalam bentuk simpanan dan sebagai imbalannya Bank akan memberikan bunga kepada nasabah penyimpan. Dari hasil menghimpun dana tersebut bank akan menyalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana (defisit dana) dan sebagai imbalannya Bank akan memperoleh pendapatan bunga yang nilainya lebih besar daripada bunga yang dibayarkan kepada penyimpan dana. Jadi aktivitas pokok perbankan adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana.

Selain itu, Bank merupakan lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Bank memainkan peran penting dalam memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sistem moneter. Oleh karena itu pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) banyak mengeluarkan peraturan di bidang perbankan.

Menurut pasal 5 UU no 7 tahun 1992, Bank dibagi menjadi:

- a. **BANK UMUM**; merupakan Bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan melakukan kegiatan khusus dalam kegiatan antara lain: menyalurkan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk pengembangan koperasi, pengembangan pengusaha dibidang UKM, pengembangan ekspor non-migas dan pengembangan pembangunan perumahan
- b. **BANK PERKREDITAN RAKYAT**; merupakan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan bentuk simpanan lain yang setara dengan itu.

2. Jenis jasa perbankan

Jenis Produk perbankan

1. Kredit/Pinjaman
 - a. Kredit rekening koran, yaitu pinjaman dengan jumlah tertentu dari bank yang dapat ditarik sesuai keinginan peminjam dengan menjaminkan barang atau surat berharga.
 - b. Letter of Credit (L/C), yaitu instrumen yang memberi hak kepada seseorang atau perusahaan penerima L/C untuk meminta pembayaran kepada bank penerbit melalui bank korespondensinya berdasarkan persyaratan yang tercantum dalam L/C tersebut.
 - c. Kredit aksep, yaitu pinjaman yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk wesel yang dapat diperjualbelikan
 - d. Kredit dengan jaminan surat-surat berharga, yaitu pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah untuk keperluan pembelian surat berharga yang nantinya juga akan menjadi jaminan pinjaman tersebut.
 - e. Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang berdasarkan suatu perjanjian hanya dapat dilunasi apabila bank telah memenuhi kewajiban tertentu dan dalam hal terjadinya likuidasi hak tagihnya berlaku paling akhir dari semua simpanan dan pinjaman diterima.
2. Simpanan
 - a. Tabungan, yaitu simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu

yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

- b. Giro, yaitu simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.
- c. Deposito, simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.
- d. Sertifikat deposito, simpanan pihak lain pada bank dalam bentuk deposito yang sertifikat penyimpanannya dapat dipindahtangankan.
- e. Bentuk lain yang dipersamakan dengan bentuk simpanan di atas

Jenis Jasa Perbankan

1. **Transfer**, yaitu perpindahan dana antar rekening dari suatu bank ke kantor cabangnya atau bank lain baik untuk kepentingan nasabah maupun bank itu sendiri. Jasa transfer banyak ditawarkan oleh Bank untuk memperoleh *fee base income*. Selain untuk memperoleh *fee base income*, jasa transfer dapat dijadikan sebagai sarana promosi kepada nasabah tertentu (nasabah tabungan, kredit dll) melalui pembebasan biaya transfer.

Jenis-jenis transfer:

- a. Berdasarkan mekanisme pelaksanaannya:
 - transfer melalui Bank Indonesia
 - transfer melalui Bank Lain
 - transfer melalui cabang Bank sendiri
- b. Berdasarkan kepentingan pihak pemakai jasa:
 - transfer untuk kepentingan debitur
 - transfer untuk kepentingan non debitur
 - transfer untuk kepentingan bagian-bagian dalam Bank itu sendiri
- c. Berdasarkan setoran dananya:
 - Debet rekening Giro/Tabungan/Deposito
 - Kas/tunai

- Setoran Kliring
 - Hasil Inkaso
- d. Berdasarkan media pelaksanaan transfer:
- Dibawa sendiri/setor langsung
 - Melalui teleks/faksimile
 - Melalui ATM
- e. Berdasarkan lalu-lintas dana:
- Transfer keluar (*Outgoing transfer*)
 - Transfer masuk (*Incoming transfer*)

Dalam mekanisme transfer ada 4 pihak yang terlibat, yaitu:

- a. Nasabah
adalah sebagai pihak pemilik/pengirim yang memberi amanah kepada Bank untuk memindahkan dananya ke pihak penerima.
- b. Bank Penarik (*Drawer Bank*)
adalah bank pelaku transfer yang menerima dana dan amanat dari nasabah untuk ditransfer ke pihak Bank Tertarik (*Drawee*) yang pada akhirnya Bank Tertarik akan menyerahkan kepada penerima dana akhir.
- c. Bank Tertarik (*Drawee Bank*)
adalah Bank yang menerima transfer masuk dari Bank Penarik untuk diteruskan kepada penerima dana akhir.
- d. Penerima Dana (*Beneficiary*)
adalah pihak akhir yang menerima dana transfer dari Bank Tertarik.

2. **Inkaso**, yaitu jasa perbankan yang melibatkan pihak ketiga dalam rangka penyelesaian tagihan berupa warkat/surat berharga yang tidak dapat diambil alih atau dibayarkan segera kepada pemberi amanat untuk keuntungannya.

Bank yang terlibat dalam Inkaso adalah:

- a. Bank pemrakarsa
adalah Bank penerima warkat dari pihak ketiga untuk ditagihkan dan hasilnya untuk kepentingan pihak ketiga tersebut

- b. Bank Pelaksana
adalah Bank yang melakukan penagihan kepada pihak ketiga (nasabah di Bank Pelaksana) atas amanah dari Bank Pemrakarsa dan hasilnya untuk kepentingan pihak ketiga (nasabah Bank Pemrakarsa)

Warkat Inkaso dapat dibedakan menjadi:

- a. Warkat Inkaso tanpa lampiran yaitu warkat Inkaso yang tidak dilampiri dengan dokumen apapun seperti cek, giro bilyet atau surat berharga lainnya.
- b. Warkat Inkaso dengan lampiran yaitu warkat Inkaso yang harus dilampiri dokumen- dokumen seperti kuitansi, faktur, polis asuransi atau surat lain yang disetujui Bank

Dilihat dari lalu lintas dananya, Inkaso dibedakan menjadi:

- a. Inkaso Keluar yaitu kegiatan Inkaso atas Instruksi nasabah untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga di cabang Bank sendiri atau Bank lain diluar kota.
- b. Inkaso Masuk yaitu tagihan masuk atas beban rekening bank sendiri dan hasilnya dikirim ke cabang Bank Pemrakarsa untuk keuntungan pihak ketiga.

Dilihat dari mekanisme pelaksanaannya, inkaso dibedakan menjadi:

- a. Inkaso melalui bank lain yaitu inkaso yang dilaksanakan terhadap pihak ketiga yang merupakan nasabah dari Bank lain.
- b. Inkaso melalui cabang sendiri yaitu Inkaso yang dilakukan melalui cabang Bank sendiri untuk pihak ketiga diluar kota pada kantor cabang Bank sendiri.

3. **Kartu kredit (*credit card*)**, yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli barang atau jasa, kemudian pelunasan atas penggunaannya dapat dilakukan sekaligus atau dengan cicilan dengan jumlah minimum tertentu.

4. **Safe deposit box**, yaitu jasa penyediaan tempat penyimpanan barang berharga dengan jaminan keamanan penuh dari bank penyedia jasa dengan dikenakan biaya sesuai kesepakatan nasabah dengan bank.

5. **Rupiah Traveler's cheque (cek perjalanan)** yaitu surat berharga yang diterbitkan bank dari dana nasabah dengan masa berlaku tidak terbatas yang berlaku dimana saja dan dapat diuangkan sewaktu-waktu.

6. **Payment Point (Rekening titipan)** yaitu rekening yang menampung pembayaran dari masyarakat untuk keuntungan pihak tertentu, umumnya perusahaan publik. Rekening titipan biasa dimanfaatkan untuk membayar tagihan-tagihan rutin yang jumlahnya tidak terlalu besar.

7. **Bank garansi**, yaitu jasa pembayaran kewajiban suatu pihak kepada pihak lain yang terikat dalam suatu kontrak atau perjanjian untuk mendukung kelancaran pembayaran kontrak atau perjanjian tersebut

Terminologi (Glosari) Khusus dalam Perbankan

Berikut ini adalah definisi dari istilah-istilah khusus dalam perbankan sesuai PSAK No. 31 (diurutkan secara alfabetis):

Aktiva produktif adalah penanaman modal bank, baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, efek (surat berharga), efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo), tagihan derivatif, tagihan akseptasi, penempatan dana pada bank lain, penyertaan, dan lain-lain.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Efek adalah surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka, dan setiap derivatif dari efek

Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi adalah taksiran kerugian akibat tidak dipenuhinya komitmen dan kontinjensi oleh nasabah.

Kas adalah mata uang kertas dan logam, baik rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

Kewajiban segera adalah kewajiban bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat atau perjanjian yang ditetapkan sebelumnya.

Komitmen adalah ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan (irrevocable) secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi.

Kontinjensi adalah kondisi atau situasi dengan hasil akhir berupa keuntungan atau kerugian yang baru dapat dikonfirmasi setelah terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa yang akan datang.

Kredit adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Hal yang termasuk dalam pengertian kredit yang diberikan adalah kredit dalam rangka pembiayaan bersama, kredit dalam restrukturisasi, dan pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan *Note Purchase Agreement* (NPA).

Penempatan pada bank lain adalah penanaman dana bank pada bank lain baik dalam negeri maupun di luar negeri, dalam bentuk *interbank call money*, tabungan, deposito berjangka, dan lain-lain yang sejenis, yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan.

Penyertaan saham adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham perusahaan lain untuk tujuan investasi jangka panjang, baik dalam pendirian maupun ikut serta dalam operasi lembaga keuangan lainnya, termasuk penyertaan sementara dalam rangka restrukturisasi kredit atau lainnya.

Penyisihan kerugian aktiva produktif adalah penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana ke dalam aktiva produktif, baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing.

Pinjaman diterima adalah dana yang diterima dari bank lain, Bank Indonesia, atau pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman. Pinjaman subordinasi dan simpanan masyarakat tidak termasuk dalam pengertian ini.

Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang berdasarkan suatu perjanjian hanya dapat dilunasi apabila bank telah memenuhi kewajiban tertentu dan dalam hal terjadinya likuidasi hak tagihnya berlaku paling akhir dari semua simpanan dan pinjaman diterima

Posisi devisa neto adalah:

- a. selisih bersih aktiva dan kewajiban moneter dan valuta asing
- b. selisih bersih tagihan dan kewajiban komitmen dan kontinjensi dalam valuta asing

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat (di luar bank) kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.

Simpanan dari bank lain adalah kewajiban bank kepada bank lain, baik dalam negeri maupun di luar negeri dalam bentuk giro, tabungan, *interbank call money*, deposito berjangka, dan lain-lain yang sejenis.

Perlakuan Akuntansi dalam Perbankan

Di samping diatur dalam PSAK no. 31 tentang Akuntansi Perbankan, secara rinci Akuntansi Perbankan diatur dalam PAPI (Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia) bagi Bank Konvensional dan PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia) untuk bank Syariah. Beberapa rekening tidak dibahas secara detil, karena pembahasannya membutuhkan pengetahuan di bidang lain untuk melengkapi bahasan.

Contohnya: akuntansi derivatif, transaksi akseptasi dll

Akuntansi Aktiva

Aktiva disusun berdasarkan urutan likuiditasnya. Rekening-rekening Aktiva Bank terdiri dari:

- | | |
|--------------------------|---|
| a. Kas | b. Giro pada Bank Indonesia |
| c. Giro pada Bank Lain | d. Penempatan pada Bank Lain |
| e. Efek (surat berharga) | f. Efek yg dibeli dg janji dijual kembali |
| g. Tagihan derivative | h. Kredit Yg Diberikan |
| i. Tagihan Akseptasi | j. Penyertaan Saham |
| k. Aktiva Tetap | l. Aktiva Lain-lain |

Perlakuan akuntansi untuk masing-masing akun aktiva adalah sebagai berikut:

a. Kas

Kas adalah mata uang kertas dan logam baik rupiah maupun mata uang asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Transaksi kas diakui sebesar nilai nominal.

Perubahan- perubahan kas di Bank pada umumnya disebabkan oleh:

1. Penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah
2. Penyetoran dan penarikan dari rekening Bank yang bersangkutan di BI (Bank Indonesia)
3. Penggunaan transaksi intern bank

Pencatatan/jurnal-jurnal yang diperlukan:

- Penerimaan setoran:

Contoh:

Diterima setoran Tuan Aris pada rekening tabungannya sebesar Rp 25.000.000,00

Kas	Rp 25.000.000,00
Tabungan Tuan Aris	Rp 25.000.000,00

- Penarikan setoran:

Contoh:

Tuan Aris menarik Rp 1.000.000,00 dari rekeningnya

Tabungan Tuan Aris	Rp 1.000.000,00
Kas	Rp 1.000.000,00

Seperti perusahaan lain pada umumnya, Bank menggunakan *Petty Cash* (Kas Kecil) untuk membayar pengeluaran- pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil

Sistem pencatatan *Petty Cash* ada 2:

- a. Sistem Impres (*Imprest Fund System*) dan
- b. Sistem Fluktuasi (*Fluctuating System*)

Dari kedua sistem di atas sistem Impres yang lebih sering digunakan.

Contoh:

Transaksi yang berhubungan dengan kas selama pada bulan Nopember 2006 di Bank Amerta adalah sebagai berikut:

Tanggal	Transaksi	
1 - 11- 06	Dibentuk Dana Kas kecil	Rp 500.000,00
4 - 11- 06	Pembelian konsumsi rapat bulanan	Rp 75.000,00
19 -11- 06	Pembayaran biaya perjalanan	Rp 50.000,00
20 -11- 06	Pembayaran BBM	Rp 125.000,00
30 -11- 06	Pembayaran langganan koran	Rp 50.000,00
30 -11- 06	Pembayaran makan siang pegawai	Rp 250.000,00
30 -11- 06	Pengisian kembali kas kecil	Rp 450.000,00

Saat pembentukan

1-11-2006 : Dana kas kecil	Rp 500.000,00
Kas	Rp 500.000,00

Transaksi tanggal 4 sampai 30 2006 tidak dicatat, tetapi hanya dibuat memo dan bukti-bukti pengeluaran kas dikumpulkan.
Jurnal pada saat pengisian kembali Dana Kas Kecil

Beban konsumsi rapat	Rp 75.000,00
Beban transportasi	Rp 50.000,00
Beban BBM	Rp 125.000,00
Beban koran	Rp 50.000,00
Beban konsumsi pegawai	Rp 250.000,00
Kas	Rp 400.000,00

- b. Transaksi **giro pada Bank Indonesia** diakui sebesar nilai nominal.

Jurnalnya:

Setoran pada Bank Indonesia:

Contoh:

Bank Artha menyetorkan Rp 2.500.000.000,00 tunai pada rekening gironya di Bank Indonesia

Giro pada Bank Indonesia	Rp 2.500.000.000,00
Kas	Rp 2.500.000.000,00

Penarikan setoran:

Contoh:

Bank Makmur menarik Rp 3.000.000.000,00 tunai dari rekening gironya di Bank Indonesia

Kas	Rp 3.000.000.000,00
Giro pada Bank Indonesia	Rp 3.000.000.000,00

c. **Giro pada bank lain**

Adalah rekening giro bank pada bank lain di dalam dan di luar negeri baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing dengan tujuan untuk menunjang transaksi antar bank. Transaksi giro pada Bank Indonesia diakui sebesar nilai nominal.

Jurnalnya:

Setoran ke bank lain:

Contoh:

Bank Mulia menempatkan giro pada Bank Artha sebesar Rp 100.000.000,00.

Giro pada Bank Artha	Rp 100.000.000,00
Kas/rekening..../kliring	Rp 100.000.000,00

Penarikan dari bank lain:

Contoh:

Bank Mulia menarik Rp 20.000.000,00 dari rekening gironya di Bank Kita.

Kas/rekening.../kliring	Rp 20.000.000,00
Giro pada Bank Kita	Rp 20.000.000,00

Bila bank memiliki giro di bank lain, maka bank akan mendapatkan jasa berupa bunga. Perlakuan akuntansinya:

Pengakuan pendapatan:

Contoh:

Bank Sejahtera memiliki rekening giro di Bank Mulia sebesar Rp60.000.000,00. Bank Mulia memberikan bunga tahunan sebesar 10%.

Pendapatan bunga giro yang akan diterima	Rp 6.000.000,00
Pendapatan bunga giro	Rp 6.000.000,00

Penerimaan pendapatan bunga:

Giro pada bank lain	Rp 6.000.000,00
Pendapatan bunga giro yang akan diterima	Rp 6.000.000,00

d. Penempatan pada bank lain

Penempatan pada bank lain adalah penempatan dana bank pada bank lain baik dalam negeri maupun luar negeri sebagai *secondary reserve* dengan tujuan memperoleh penghasilan. Penempatan pada bank lain dapat berbentuk giro, depotiso, *call money*, dll. Penempatan pada bank lain diakui pada saat dilakukan penyerahan sebesar nilai nominal penyetoran atau nilai yang dijanjikan sesuai jenis penempatan.

Contoh:

Bank Mulia menempatkan dana dalam bentuk sertifikat deposito pada Bank Sejahtera sebanyak 100 lembar dengan nominal masing-masing Rp 1.000.000,00. Tingkat bunga yang diberikan Bank Sejahtera sebesar 15%, jangka waktu 90 hari.

Saat penempatan:

Penempatan pada bank Sejahtera	Rp 100.000.000,00
Kas	Rp 100.000.000,00

Saat pengakuan pendapatan bunga:

Pdptn bunga penempatan yg akan diterima	Rp 3.750.000,00
Pendapatan bunga penempatan	Rp 3.750.000,00

Saat jatuh tempo:

Kas/rekening/kliring	Rp103.750.000,00
Pdptn bunga penempatan yg akan diterima	Rp 3.750.000,00
Penempatan pada bank lain	Rp100.000.000,00

e. Efek/Surat Berharga

Adalah surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, derivatif dari efek. Untuk menghindari dana yang menganggur/ kelebihan dana, bank dapat menempatkan pada investasi sementara dan dapat diuangkan sewaktu-waktu bila dibutuhkan. Pembelian efek ini dapat dilakukan secara tunai, melibatkan giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain atau penempatan pada Bank lain

Contoh:

Pada tanggal 5 Mei 2007 Bank Unggul membeli 1000 lembar saham PT A dengan nilai nominal Rp 20.000,00 kurs 110 dan komisi pialang 5%.

❖ Pembelian investasi sementara secara tunai

Investasi sementara – saham PT A	Rp 23.100.000,00
Kas	Rp 23.100.000,00

Pembl. investasi smntara mell. beban giro BI

Investasi sementara – saham PT A	Rp 23.100.000,00
Giro BI	Rp 23.100.000,00

❖ Pembelian obligasi melalui beban giro bank lain

Contoh:

Bank Singgasana membeli obligasi PT B pada tanggal 31 Mei 2007 sebanyak 500 lembar nominal Rp 100.000,00 dengan kurs 95%

Bunga obligasi 18% pertahun dibayar tiap tanggal 1 Maret dan 1 September. Biaya pembelian 5%. Pembelian melalui Giro pada bank lain.

Perhitungan:

Harga beli obligasi	500 x Rp 100.000,00 x 95 %	Rp 47.500.000,00
Biaya pembelian 5 %	x Rp 47.500.000,00	<u>Rp 2.375.000,00</u>
Harga Perolehan		Rp 49.875.000,00
Bunga berjalan 1 Maret – 31 Mei :		
3/12 x 18 % x Rp 50.000.000		<u>Rp 2.250.000,00</u>
Pembayaran yg dilakukan		Rp 52.125.000,00

Jurnalnya:

31 Mei 2007 (saat pembelian)

Investasi sementara – obligasi PT B	Rp 49.875.000,00
Pendapatan bunga	Rp 2.250.000,00
Giro Bank lain	Rp 52.125.000,00

1 September 2007 (saat penerimaan bunga)

Kas	Rp 4.500.000,00
Pendapatan Bunga	Rp 4.500.000,00

Perhitungannya:

$$\text{Bunga } 6/12 \times 18 \% \times \text{Rp } 50.000.000,00 = \text{Rp } 4.500.000,00$$

f. Efek yg dibeli dg janji dijual kembali

Adalah penanaman dana dalam bentuk pembelian efek dimana si penjual berjanji akan membeli kembali dengan harga yang telah disepakati. Penyajian di neraca sebesar tagihan bruto dikurangi dengan (*dioffset*) dengan pendapatan bunga yang ditangguhkan.

Perlakuan Akuntansi yang dibutuhkan yaitu:

1. Pada saat pembelian efek

Efek yg dibeli dg janji dijual kembali	xxx
Kas/rekening.../kliring	xxx
Pendpt bunga yg ditangguhkan	xxx

2. Amortisasi pendpt bunga yg ditangguhkan

Pendapatan bunga yg ditangguhkan	xxx
Pendapatan bunga	xxx

3. Pada saat penjualan kembali

Kas/rekening.../kliring	xxx
Pendpt bunga yg ditangguhkan	xxx
Efek yg dibeli dg janji dijual kembali	xxx
Pendapatan Bunga	xxx

g. Tagihan derivatif

Adalah tagihan karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian/kontrak transaksi derivatif (terdapat selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan)

h. Kredit yang diberikan

Kelompok Aktiva setelah kas dan Investasi sementara pada surat berharga adalah Piutang. Dalam industri perbankan Piutang berbentuk Kredit yang diberikan kepada nasabah dan merupakan usaha utama Bank.

Contoh:

Pada tanggal 5 Maret 2007, Bayu Perkasa mengajukan permohonan kredit kepada bank Andalas Cabang Malang sebesar Rp 150.000.000,00. Kredit tersebut hanya disetujui sebesar Rp 100. 000.000,00 pada tanggal 1 April 2007. Biaya yang dibebankan kepada Tuan Bayu terdiri dari:

- Biaya provisi dan komisi	0,25%
- Bea materai	Rp 30.000,00
- Biaya administrasi	Rp 125.000,00
- Biaya Notaris	Rp 300.000,00
- Biaya Asuransi	Rp 500.000,00

Jangka waktu kredit 5 tahun dengan bunga yang dibebankan 21% per tahun. Pada saat realisasi, Tuan bayu meminta kredit yang cair tersebut

ditransfer ke tabungannya sebesar Rp 90.000.000,00 dan sisanya diterima dalam bentuk tunai.

Bank akan mencatat transaksi tersebut sebagai berikut:

Kredit yang diberikan	Rp 100.000.000,00
Tabungan Bayu Perkasa	Rp 90.000.000,00
Provisi dan komisi	Rp 2.500.000,00
Bea materai	Rp 30.000,00
Biaya administrasi	Rp 125.000,00
Biaya Notaris	Rp 300.000,00
Biaya Asuransi	Rp 500.000,00
Kas	Rp 4.500.000,00

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

Aktiva Produktif Bank meliputi:

1. penempatan pada bank lain baik dalam maupun luar negeri kecuali dalam bentuk giro
2. surat berharga/efek
3. kredit yang diberikan
4. penyertaan

Aktiva produktif di atas adalah yang paling besar memberikan sumbangan pendapatan bagi Bank, tetapi juga merupakan aset yang paling berisiko. Risiko dari kredit yang disalurkan dapat dilihat dari posisi tingkatan kolektibilitasnya yang terbagi menjadi:

1. Kolektibilitas Lancar
2. Kolektibilitas kurang Lancar
3. Diragukan dan
4. Macet

Pergeseran posisi kolektibilitas dapat dilihat dari seberapa lama nasabah tidak mengangsur pinjamannya. Masing-masing tingkatan pergeserannya selama 3 bulan. Jadi bila seorang nasabah tidak mengangsur selama 3 bulan posisi kolektibilitasnya akan bergeser dari Lancar ke posisi Kurang Lancar, bila tidak mengangsur selama 6 bulan kolektibilitas akan bergeser ke posisi macet. Demikian seterusnya.

Untuk mengantisipasi resiko, maka Bank diwajibkan membentuk cadangan/penyisihan terhadap aktiva produktif sesuai dengan klasifikasinya. Pada akhir periode, Bank akan membuat jurnal penyesuaian untuk tiap-tiap jenis aktiva produktif.

1. Penempatan pada Bank Lain

Biaya Cad. Penempatan pada Bank Lain	Rp.....,00
Cad.Penghapusan Penempatan pd Bank Lain	Rp,00

2. Surat Berharga

Biaya Penyisihan/Penurunan Nilai SB	Rp,00
Cad.Penurunan Nilai Surat Berharga	Rp.....,00

3. Kredit yang diberikan

Bila Cadangan Penghapusan Kredit pada suatu periode sebesar Rp2.500.000,00 maka jurnalnya adalah:

Biaya Penghapusan Kredit yang Diberikan	Rp 2.500.000,00
Cad.Penghapusan Kredit yang Diberikan	Rp 2.500.000,00

Untuk memperbaiki Kualitas Aktiva Produktif, maka Bank dapat menghapus kredit yang kolektibilitasnya tergolong Macet. Hal ini dilakukan agar kinerja bank tidak menjadi buruk, walaupun dalam kenyataan kredit tersebut masih tetap ditagih hingga lunas.

Prosedur penghapusan yang benar diberikan pada contoh di bawah ini:

Bank akan menghapusbukukan kredit macet pada suatu periode sebesar Rp 200.000.000,00 dimana diperkirakan bunga yang masih akan diterima sebesar Rp 20.000.000,00. Total agunan berupa tanah dan bangunannya dari kredit ini ditaksir mempunyai harga pasar senilai Rp 175.000.000,00.

Jurnal yang harus dibuat:

Aktiva Tetap-Agunan dlm Penyelesaian	Rp 175.000.000,00
Cadangan Penghapusan Kredit	Rp 45.000.000,00
Kredit yang diberikan	Rp 200.000.000,00
Pendapatan Bunga yg msh akan diterima	Rp 20.000.000,00

i. Tagihan Akseptasi

adalah tagihan yang timbul dari transaksi Eksport-Import yang dilakukan nasabah Bank

j. Penyertaan Saham

adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham perusahaan lain untuk tujuan investasi jangka panjang baik dalam rangka pendirian maupun ikut serta dalam operasi lembaga keuangan/perusahaan lain serta dalam rangka restrukturisasi kredit atau lainnya.

Metode Akuntansi untuk mencatat penyertaan adalah:

- Metode Biaya digunakan bila jumlah penyertaan kurang dari 20 %
- Metode Ekuitas digunakan bila jumlah penyertaan sama atau lebih dari 20 %.

Pencatatan yang dibutuhkan:

saat melakukan penyertaan

Bank “Harmoni” membeli 20 % saham berhak suara (100.000 lembar) PT”Berdikari” seharga Rp 2.000.000.000,00

Penyertaan Saham	Rp 2.000.000.000,00
Kas	Rp 2.000.000.000,00

saat perusahaan/investee mengumumkan laba/rugi

Pencatatan yang dilakukan tergantung metode yang dipakai.

Contoh:

PT Berdikari mengumumkan laba tahun 2007 sebesar Rp300.000.000,00.

Metode Biaya

Tidak ada jurnal

Metode Ekuitas

Penyertaan Saham	Rp 60.000.000,00
Pendapatan dari penyertaan saham	Rp 60.000.000,00

Bila perusahaan rugi Rp 50.000.000,00

Kerugian dari penyertaan saham	Rp 10.000.000,00
Penyertaan saham	Rp 10.000.000,00

saat penerimaan dividen

Dividen yang dibagikan dari laba periode 2007 sebesar Rp 400,00 perlembar

Metode Biaya

Kas	Rp 40.000.000,00
Pendapatan Dividen	Rp 40.000.000,00

Metode Ekuitas

Kas	Rp 40.000.000,00
Penyertaan saham	Rp 40.000.000,00

saat terjadi penurunan nilai secara permanen

Kerugian Penurunan nilai penyertaan	xxx
Penyertaan saham	xxx

saat pelepasan sebagian/seluruh saham

Bank menjual 20.000 lembar saham PT Berdikari pada nilai nominal

Kas	Rp 400.000.000,00
Penyertaan saham	Rp 400.000.000,00

Bila penyertaan Bank dalam rangka restrukturisasi kredit maka penyertaannya bersifat sementara.

Dalam rangka restrukturisasi kredit PT "Berdikari" di bank "Harmoni" maka Bank membeli 50.000 lembar saham pada nilai nominal PT tersebut. Setelah usaha PT "Berdikari" lancar maka saham yang dibeli bank ditebus pada nilai nominal.

Jurnal yang dibutuhkan saat pennebusan

Kas	Rp 200.000.000,00
Penyertaan sementara Bank	Rp 200.000.000,00

k. Aktiva Tetap

Pengertian Aktiva Tetap Bank sama dengan pengertian aktiva tetap pada perusahaan yang lain yaitu aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi dan tidak akan dijual dalam jangka pendek. Aktiva Tetap dicatat sebesar Harga Perolehan. Dalam industri Perbankan kelompok Aktiva Tetap dijadikan satu dengan Inventaris (ATI) yang menurut aturan Bank Indonesia maksimum sebesar 5 % dari Total Asset.

Cara perolehan Aktiva Tetap bermacam-macam

- *Pembelian Tunai*

Contoh:

Bank Merdeka Cabang Malang membeli tanah seluas 500 meter seharga Rp 1.500.000,00 /m². Biaya yang dikeluarkan agar tanah siap dibangun sebesar Rp 2.500.000,00, komisi makelar 5 % dari harga tanah, sedangkan biaya notaris untuk pengurusan surat-surat tanah Rp 10.000.000,00

Harga Perolehan Tanah yang harus dicatat terdiri dari:

Harga Tanah	Rp 750.000.000,00
Komisi makelar (5%)	Rp 37.500.000,00
Biaya perataan tanah	Rp 2.500.000,00
Biaya notaris	<u>Rp 10.000.000,00</u>
	Rp 800.000.000,00

Jurnalnya:

Aktiva Tetap & Inventaris- Tanah	Rp 800.000.000,00
Kas	Rp 800.000.000,00

- Pembelian secara Kredit

Bila tanah tersebut dibeli secara kredit dengan ketentuan uang muka sebesar Rp 200.000.000,00 dan bunga 6%/tahun, jangka waktu kredit 5 tahun, maka jurnal yang diperlukan

Pembayaran uang muka

Uang muka	Rp 200.000.000,00
Kas	Rp 200.000.000,00

Saat perolehan aktiva tetap

Aktiva tetap	Rp 800.000.000,00
Beban bunga ditangguhkan	Rp 180.000.000,00
Utang angsuran pembelian	Rp 760.000.000,00
Uang muka	Rp 200.000.000,00

Perhitungan bunga yang ditangguhkan:

$$6 \% \times 5 \times \text{Rp } 600.000.000,00 = \text{Rp } 180.000.000,00$$

Pembayaran angsuran dan bunga:

$$\begin{aligned} \text{Angsuran pokok} &: \text{Rp } 600.000.000,00/60 &= \text{Rp } 10.000.000,00 \\ \text{Bunga} &= 1/12 \times 6 \% \times \text{Rp } 600.000.000,00 &= \text{Rp } 3.000.000,00 \\ &&\text{Rp } 13.000.000,00 \end{aligned}$$

Utang angsuran	Rp 13.000.000,00
Kas	Rp 13.000.000,00

Beban bunga	Rp 3.000.000,00
Beban bunga ditangguhkan	Rp 3.000.000,00

Kedua jurnal di atas dapat digabung menjadi:

Utang angsuran	Rp 13.000.000,00
Beban bunga	Rp 3.000.000,00
Beban bunga ditangguhkan	Rp 3.000.000,00
Kas	Rp 13.000.000,00

I. Aktiva Lain-lain

adalah aktiva yang tidak dapat digolongkan dalam pos-pos sebelumnya dan tidak cukup material disajikan sebagai pos tersendiri.

Komponen Aktiva lain-lain antara lain:

1. Aktiva tetap yang tidak digunakan
2. Beban dibayar dimuka
3. Beban yang ditangguhkan
4. emas batangan
5. *commemorative coin*
6. uang muka pajak
7. pendapatan yang masih harus diterima

Contoh perlakuan Akuntansi dari Aktiva tetap yang tidak digunakan.

Sebuah kendaraan milik Bank “Karabat” Kijang sudah tidak digunakan lagi karena dianggap boros bahan bakar. Harga perolehan mobil ini Rp 100.000.000,00 dan sudah disusutkan sebesar Rp 55.000.000,00. Harga pasar mobil ini hanya Rp 35.000.000,00.

Jurnalnya:

Aktiva lain-lain	Rp 35.000.000,00
Akumulasi penyusutan	Rp 55.000.000,00
Beban penurunan nilai aktiva	Rp 10.000.000,00
Aktiva Tetap (kendaraan)	Rp 100.000.000,00

Satu bulan kemudian bank memutuskan untuk menjual mobil tersebut dan ternyata laku senilai Rp 30.000.000,00

Kas	Rp 30.000.000,00
Rugi penjualan aktiva	Rp 5.000.000,00
Aktiva lain-lain	Rp 35.000.000,00

Akuntansi Kewajiban

Kewajiban Bank terdiri dari:

a. Kewajiban segera	b. Simpanan
c. Simpanan dari bank lain	d. Efek yg dijual dg janji dibeli kembali
e. Kewajiban derivatif	f. Kewajiban akseptasi
g. Surat berharga yg diterbitkan	h. Pinjaman yg diterima
i. Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	j. Kewajiban lain-lain
k. Pinjaman subordinasi	

a. Kewajiban segera

Adalah kewajiban bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat atau perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Kewajiban segera disajikan sebesar jumlah kewajiban Bank

Contohnya :

- a. kiriman uang,
- b. penerimaan pajak melalui Bank yg masih harus disetor,
- c. deposito yang sudah jatuh tempo tetapi belum diambil,
- d. bunga yang sudah jatuh tempo tetapi belum diambil oleh nasabah.

Transfer uang

Contoh:

Tuan Amat mentransfer uang via Bank Baru ke saudaranya yang mempunyai rekening di bank Lama sebesar Rp 5.000.000,00

- Pada saat menerima dana untuk transfer uang

Kas/ rekening/kliring	Rp 5.000.000,00
Kewajiban segera-kiriman uang	Rp 5.000.000,00

- Pada saat dilakukan pembayaran kiriman uang

Kewajiban segera-kiriman uang	Rp 5.000.000,00
Kas/ rekening/kliring	Rp 5.000.000,00

Titipan Pajak Nasabah

CV Dinar menyetorkan uang senilai Rp 30.000.000,00 untuk membayar pajak tahun 2006 melalui Bank Gajayana.

Pada saat diterima dana untuk penyetoran pajak:

Kas/ rekening/kliring	Rp 30.000.000,00
Kewajiban segera-pajak nasabah	Rp 30.000.000,00

Pada saat kewajiban pajak disetor

Kewajiban segera- pajak nasabah	Rp 30.000.000,00
Kas/ rekening/kliring	Rp 30.000.000,00

Bunga yang sudah jatuh tempo dari deposito

Deposito Tuan Santosa senilai Rp 50.000.000,00 jangka waktu 3 bulan bunga 9% per tahun belum diambil.

Jurnalnya:

Pada saat pengakuan beban bunga:

Beban bunga deposito	Rp 1.125.000,00
Beban bunga deposito yg masih hrs dibayar	Rp 1.125.000,00

Pada saat bunga sudah jatuh tempo tetapi belum diambil nasabah

Beban bunga deposito ymh dibayar	Rp 1.125.000,00
Kewajiban segera-bunga deposito jatuh tempo	Rp 1.125.000,00

Pada saat bunga deposito jatuh tempo dan diambil nasabah

Kewajiban segera-bunga deposito jatuh tempo	Rp 1.125.000,00
Kas/ rekening/kliring	Rp 900.000,00
Kewajiban segera-pajak nasabah (20%)	Rp 225.000,00

Penutupan Rekening giro/tabungan

Tuan Naruto menutup tabungannya yang bernilai Rp 15.000.000,00. Saat penutupan rekening giro/tabungan oleh nasabah atau Bank lain

Tabungan Naruto	Rp 15.000.000,00
Kewajiban segera-penutupan rekening	Rp 15.000.000,00

Saat penyelesaian rekening yang ditutup

Kewajiban segera-penutupan rekening	Rp 15.000.000,00
Kas/ rekening/kliring	Rp 15.000.000,00

b. Simpanan

Adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Bentuk simpanan dapat berupa giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito atau yang disamakan dengan itu.

Contoh:

Bapak Wijaya membuka tabungan di bank pada tanggal 5 April 2008 senilai Rp 3.000.000,00. Setelah 1 tahun tabungan tersebut ditutup

Jurnal-jurnalnya:

Saat penerimaan setoran

Kas/ rekening/kliring	Rp 3.000.000,00
Tabungan	Rp 3.000.000,00

Bila penyetoran tersebut berbentuk giro/deposito, maka jurnalnya:

Kas/ rekening/kliring	Rp 3.000.000,00
Giro/deposito	Rp 3.000.000,00

Saat penarikan giro/tabungan

Tabungan/giro	Rp 3.000.000,00
Kas/ rekening/kliring	Rp 3.000.000,00

Saat penarikan deposito jatuh tempo

Deposito	Rp 3.000.000,00
Kas/ rekening/kliring	Rp 3.000.000,00

Pengakuan beban bunga/giro/deposito

Untuk pengakuan beban simpanan/giro/deposito perlakuannya/jurnalnya sama seperti perlakuan pada kewajiban segera

Beban bunga deposito Rp 1.125.000,00
Beban bunga deposito yg masih hrs dibayar Rp 1.125.000,00

Pembayaran bunga giro/tabungan

Perlakuannya sama dengan Kewajiban segera

Beban bunga deposito ymh dibayar Rp 1.125.000,00
Kwjbns segera-bunga deposito jatuh tempo Rp 1.125.000,00

Penerbitan sertifikat Deposito

Sertifikat Deposito yang diterbitkan Bank Majapahit dibeli Nona Aline yang total nilai nominalnya Rp 25.000.000,00 Bunga 12% per tahun jatuh tempo 1 bulan.

Perhitungannya:

Nilai nominal sertifikat Deposito Rp 25.000.000,00

Nilai Tunai = $\frac{25.000.000 \times 360}{360 + (12\% \times 30)}$ Rp 24.752.475,00

Bunga dibayar dimuka Rp 247.525,00

Pajak penghasilan atas bunga (20%) Rp 49.505,00

Bunga bersih yang dibayar Bank Rp 198.020,00

Jurnalnya:

Kas Rp 24.801.980,00

Bunga Sertifikat Dep. Di byr di muka Rp 247.525,00

Sertifikat Deposito Rp 25.000.000,00

Kewajiban segera-pajak nasabah Rp 49.505,00

c. Simpanan dari Bank Lain

Adalah kewajiban Bank kepada Bank lain baik di dalam maupun di luar negeri dalam bentuk giro, tabungan, *interbank call money*,

deposito berjangka dll. Perlakuan akuntansinya sama dengan simpanan di atas, tetapi yang menyimpan adalah lembaga Bank.

d. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

Adalah surat berharga/efek yang dijual untuk memperoleh dana dengan janji akan dibeli kembali pada harga yang telah disepakati. Jurnal yang diperlukan sama dengan sertifikat deposito, hanya saja pinjaman ini dalam bentuk menjual efek/surat berharga untuk sementara waktu.

Contoh:

Surat Berharga PT Citra yang dimiliki Bank Akbar sebanyak 1000 lembar @ Rp 25.000,00 dijual kepada Tuan Anggoro hanya seharga Rp 24.000.000,00 dan akan dibeli kembali 5 bulan yang akan datang. Harga beli yang disepakati sebesar Rp 26.000.000,00

Pada saat penjualan surat berharga

Kas/ rekening/kliring	Rp 24.000.000,00
Beban bunga dibayar dimuka	Rp 2.500.000,00
Efek yg dijual dg janji dibeli kembali	Rp 25.000.000,00
Beban bunga	Rp 1.500.000,00

Amortisasi beban bunga dibayar dimuka (dijurnal tiap bulan selama 5 bulan)

Beban bunga	Rp 500.000,00	
Beban bunga dibayar dimuka		Rp 500.000,00

Saat pembelian kembali surat berharga yang dijual

Efek yg dijual dg janji dibeli kembali	Rp 25.000.000,00
Beban bunga	Rp 2.500.000,00
Kas/ rekening/kliring	Rp 26.000.000,00
Beban bunga dibayar dimuka	Rp 1.500.000,00

e. Kewajiban derivatif

Kewajiban derivatif terjadi karena kerugian dari suatu perjanjian/kontrak transaksi derivatif

f. Kewajiban Akseptasi

adalah kewajiban yang timbul dari transaksi Eksport-Import yang dilakukan nasabah Bank

g. Surat berharga yg diterbitkan

adalah surat pengakuan hutang yang diterbitkan oleh Bank seperti wesel, obligasi, atau surat berharga lain yang diperdagangkan baik di pasar uang (Surat Berharga Pasar Uang/SBPU) maupun pasar modal (efek hutang).

Perlakuan akuntansi yang diperlukan:

- a. saat penerbitan
- b. saat amortisasi bunga ditangguhkan/diskonto/premium
- c. saat jatuh tempo

Untuk surat berharga yang berbentuk obligasi, maka jurnal tambahannya adalah pada saat:

- i. pengakuan beban bunga, dan
- ii. pembayaran bunga secara periodik

Contoh:

Obligasi bernilai nominal Rp 100.000,00 diterbitkan pada tanggal 1 April 2007 sebanyak 500 lembar terjual dengan harga Rp 110.000,00/lembar berjangka waktu 3 bulan, tingkat bunga 9 % p.a./per annual/pertahun.

Jurnal-jurnalnya:

saat penerbitan

Kas	Rp 55.000.000,00
Premium obligasi yang ditangguhkan	Rp 5.000.000,00
Obligasi yg diterbitkan	Rp50.000.000,00

saat amortisasi premium

Premium obligasi yang ditangguhkan	Rp 1.666.666,67
Pendapatan premium obligasi	Rp 1.666.666,67

Jurnal ini dibuat selama 3 bulan

saat pengakuan beban bunga

Beban bunga obligasi	Rp 1.125.000,00
Beban bunga obligasi yg msh hrs dibayar	Rp 1.125.000,00

Saat pembayaran bunga

Beban bunga obligasi yg msh hrs dibayar	Rp 1.125.000,00
Kas	Rp 1.125.000,00

Pada saat obligasi jatuh tempo

Obligasi yg diterbitkan	Rp 50.000.000,00
Premium obligasi yang ditangguhkan	Rp 5.000.000,00
Pendapatan premium obligasi	Rp 5.000.000,00
Kas	Rp 50.000.000,00

h. Pinjaman yg diterima

Selain berasal dari giro, tabungan dan deposito sumber dana bank dapat berasal dari pinjaman dari pihak lain. Pinjaman ini sebagian besar merupakan sumber pendanaan jangka panjang.

Jenis pinjaman yang diterima bank biasanya berbentuk:

- Pinjaman dari Bank Lain
- Pinjaman dari Luar Negeri
- Pinjaman Obligasi
- KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia)
- Pinjaman sindikasi (pembiayaan bersama)

Pinjaman yg Diterima disajikan sebesar saldo pinjaman yang belum dilunasi pada tanggal laporan

Contoh di bawah ini adalah pinjaman yang diterima dari bank lain.

BPR “ Sugih Artha” mendapat pinjaman dari Bank Sakura senilai Rp500.000.000,00 dengan tingkat bunga 7,5% per tahun. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pinjaman terdiri dari biaya provisi 0,25 %, biaya notaris Rp 500.000,00, biaya asuransi Rp 1.750.000,00 dan biaya penilai agunan (*appraisal*) sebesar Rp750.000,00 .

Jurnal yang diperlukan

Saat persetujuan pinjaman ditanda tangani

Tagihan komitmen-pinjaman diterima blm ditarik	Rp500.000.000
Tagihan komitmen	Rp500.000.000

Saat realisasi pinjaman diterima

Tagihan komitmen	Rp500.000.000
Tagihan komitmen-pinjaman diterima blm ditarik	Rp500.000.000
Kas	Rp500.000.000
Pinjaman yg diterima	Rp500.000.000

Saat pembayaran biaya-biaya

Biaya provisi	Rp 1.250.000,00
Biaya notaris	Rp 750.000,00,
Biaya premi asuransi	Rp 1.600.000,00
Biaya penilaian agunan	Rp 400.000,00
Kas	Rp 4.000.000,00

Saat pengakuan beban bunga

Beban bunga	Rp 37.500.000,00
Beban bunga yang harus dibayar	Rp 37.500.000,00

Pembayaran bunga yg jatuh tempo

Beban bunga yang harus dibayar	Rp 37.500.000,00
Kas	Rp 37.500.000,00

Saat pinjaman dilunasi

Pinjaman yg Diterima	Rp 500.000.000,00
Kas	Rp 500.000.000,00

i. Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi

Adalah taksiran kerugian akibat tidak dipenuhinya komitmen dan kontinjensi oleh nasabah. Di PSAK no 31 paragraf 78 dinyatakan Bank membentuk taksiran kerugian komitmen dan kontinjensi berdasarkan kualitas komitmen dan kontinjensi setelah dikurangi estimasi nilai realisasi bersih jaminan. Kualitasnya dinilai dari prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan membayar nasabah

j. Kewajiban lain-lain

Kewajiban Bank yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari pos kewajiban yang ada dan nilainya tidak material (tidak terlalu besar) digolongkan pada Kewajiban lain-lain.

Kewajiban lain-lain terdiri dari:

- Setoran jaminan/*margin deposit* untuk L/C (*letter of credit*)
- Pendapatan provisi/komisi diterima di muka
- Kewajiban pajak tangguhan
- Bunga yang masih harus dibayar
- Pendapatan sewa diterima di muka

Contoh:

Tuan Brotoseno memproduksi dan mengeksport patung antik yang bahannya berasal dari limbah tanaman (bonggol bambu, akar kayu, dahan kayu jati kecil dll). Untuk memperlancar transaksinya, Tuan Brotoseno menyetorkan jaminan sebesar Rp 240.000.000,00 sebagai syarat penerbitan bank garansi.

Jurnal yang dibutuhkan:

Saat penerimaan setoran jaminan

Kas	Rp 240.000.000,00
Setoran jaminan	Rp 240.000.000,00

Pada saat bank garansi jatuh tempo

Setoran jaminan	Rp 240.000.000,00
Kas	Rp 240.000.000,00

k. Pinjaman subordinasi

Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang berdasarkan perjanjian hanya dapat dilunasi apabila bank telah memenuhi kewajiban tertentu. Jika bank dilikuidasi, hak tagih pinjaman subordinasi berlaku paling akhir dibandingkan pinjaman yang lain. Sumber pinjaman subordinasi adalah utang kepada Bank Dunia, ADB (Asian Development Bank), atau lembaga keuangan internasional serupa lainnya.

Akuntansi Ekuitas

Ekuitas Bank terdiri dari:

a. Modal Disetor

Modal disetor adalah modal yang telah efektif diterima bank sebesar nilai nominal saham. Modal ini merupakan bagian dari modal yang ditempatkan dan telah disetor penuh oleh pemegang saham. Bentuk-bentuk modal disetor antara lain:

- setoran saham dalam bentuk setoran tunai maupun barang
- hutang yang dikonversi menjadi modal
- setoran saham dalam bentuk dividen saham, dan
- aktiva nonkas

Contoh:

Tuan Rudi, sebagai pemegang saham Bank Artha Graha, menyetorkan uang sebesar Rp 300.000.000,00 dan mobil dengan nilai pasar Rp 150.000.000,00

Jurnal yang dibutuhkan:

Kas	Rp 300.000.000,00
Mobil	Rp 150.000.000,00
Modal disetor	Rp 450.000.000,00

b. Tambahan Modal Disetor

Tambahan modal disetor terdiri dari:

- agio saham
- selisih pembelian kembali saham yang telah terjual (*treasury stock*) dengan harga yang lebih rendah daripada harga jualnya
- keuntungan dari penjualan *treasury stock*/TS

contoh:

Tuan Rafli membeli saham Bank Artha Graha sebanyak 100.000 lembar seharga Rp 5.500,00 per lembar saham. Nilai nominal saham adalah Rp 5.000,00 per lembar saham.

Jurnal yang diperlukan:

Kas	Rp 550.000.000,00
Modal disetor	Rp 500.000.000,00
Agio saham	Rp 50.000.000,00

Karena membutuhkan dana, Tuan Rafi menjual sebagian saham yang dibelinya dan menawarkan ke Bank Artha Graha. Jumlah saham yang dibeli Bank sebesar 30.000 lembar dan dibeli dengan harga Rp 4.750,00 per lembar.

Modal Saham yg diperoleh kembali (TS)	Rp 150.000.000,00
Kas	Rp 142.500.000,00
Tambahan modal dari perolehan kembali saham	Rp 7.500.000,00

Satu bulan kemudian Tuan Rafi membeli kembali saham tersebut dengan harga Rp 5.100,00 perlembar

Kas	Rp 153.000.000,00
<i>Treasury Stock</i>	Rp 150.000.000,00
Tambahan agio modal dari pembelian kembali TS	Rp 3.000.000,00

c. Saldo Laba (Rugi)

Saldo laba (rugi) adalah akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba/rugi periode sebelumnya.

Saldo laba dikelompokkan menjadi:

1. Cadangan tujuan, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba bersih setelah pajak yang tujuannya penggunaannya telah ditetapkan
2. Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba bersih setelah pajak yang tujuannya memperkuat modal
3. Sisa laba belum dicadangkan, terdiri dari laba (rugi) periode lalu yang belum ditetapkan penggunaannya dan laba (rugi) periode berjalan

Contoh:

Bank Sejahtera memindahkan laba tahun berjalan sebesar Rp560.000.000,00 ke saldo laba.

Jurnal yang dibutuhkan:

Ikhtisar laba (rugi)	Rp 560.000.000,00
Saldo laba	Rp 560.000.000,00

Akuntansi Pendapatan & Beban

Pendapatan dan Beban Bank antara lain terdiri dari:

- a. Pendapatan dan beban bunga
Pendapatan bunga adalah pendapatan yang diperoleh dari penanaman dana bank pada aktiva produktif, sedangkan beban bunga adalah beban yang dibayarkan kepada nasabah atau pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana. Pendapatan dan beban bunga diakui secara akrual.
- b. Provisi dan komisi
Provisi adalah imbalan yang diterima atau dibayar sehubungan dengan fasilitas yang diberikan atau diterima, contohnya penerimaan atau pembayaran provisi untuk plafon kredit, provisi bank garansi, iuran tahunan kartu kredit, dan biaya komitmen.

Komisi adalah imbalan atau jasa perantara yang diterima atau dibayar atas suatu transaksi atau aktivitas. Komisi terdiri dari komisi kiriman uang, komisi transaksi kartu kredit, komisi atas penyaluran kredit program dengan sistem *channeling*.

- c. Keuntungan atau kerugian transaksi mata uang asing
Transaksi mata uang asing adalah segala jenis transaksi yang dilakukan dalam mata uang asing. Keuntungan dan kerugian transaksi mata uang asing timbul akibat selisih kurs. Keuntungan dan kerugian transaksi mata uang asing disajikan pada laporan laba rugi tahun berjalan dalam pos Keuntungan dan Kerugian Transaksi Mata Uang Asing
- d. Beban Administrasi Umum/*Overhead*
Adalah berbagai beban yang timbul untuk mendukung kegiatan operasional Bank.

Ciri-ciri Beban Administrasi Umum:

- 1. tidak dapat dikaitkan langsung dengan jasa yang dihasilkan
- 2. tidak memberikan manfaat di masa yang akan datang
- 3. diakui pada saat terjadi

Macam-macam beban administrasi umum:

- 1. Beban sewa
- 2. Beban promosi
- 3. Biaya tenaga kerja
- 4. Biaya pendidikan dan latihan
- 5. Biaya penyusutan Aktiva Tetap
- 6. Amortisasi Aktiva Tetap tak berwujud

Pengakuan Beban Administrasi Umum ada 2 cara, yaitu:

- i. Diakui seluruhnya pada periode terjadinya
- ii. Dialokasikan secara proporsional selama beberapa periode untuk beban administrasi umum yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode

Pelaporan Keuangan pada Bank

Laporan Keuangan Bank terdiri atas:

1. Neraca

- ❖ Aktiva dan kewajiban disajikan dalam neraca berdasarkan karakteristiknya dan disusun berdasarkan urutan likuiditasnya
- ❖ Dalam kaitan pengungkapan hubungan bank dengan pihak lain, perlu dilakukan pemisahan pengungkapan:
 - Saldo pada BI
 - Penempatan pada bank lain
 - Penempatan pada pasar uang
 - Simpanan dari bank
 - Simpanan lain
- ❖ Pos-pos dengan nilai material yang tidak dapat digolongkan ke dalam pos-pos aktiva dan kewajiban disajikan tersendiri. Contohnya: selisih kurs, setoran jaminan listrik, dll
- ❖ Jumlah aktiva dan kewajiban yang disajikan pada neraca tidak boleh disalinghapuskan dengan kewajiban atau aktiva lain kecuali secara hukum dibenarkan dan saling hapus tersebut mencerminkan perkiraan realisasi atau penyelesaian aktiva atau kewajiban
- ❖ Pengungkapan kredit, deposito, pinjaman yang diterima, pinjaman subordinasi, dan modal pinjaman disajikan secara terpisah antara pihak terkait dengan bank dan pihak yang tidak terkait untuk keperluan pengawasan bank

2. Laporan laba rugi

- ❖ Laporan laba rugi disajikan dengan mengelompokkan pendapatan dan beban menurut karakteristiknya dan disusun dalam bentuk bertahap (*multiple-step*) secara terperinci dan dibedakan antara yang berasal dari kegiatan operasional dan non-operasional.
- ❖ Setiap jenis pendapatan dan beban utama dari operasi suatu bank harus diungkapkan secara terpisah untuk kepentingan penilaian kinerja bank.
- ❖ Keuntungan dan kerugian yang timbul dari hal-hal berikut dapat dilaporkan secara neto, yaitu penjualan dan perubahan nilai tercatat efek, penjualan penyertaan efek investasi, transaksi dalam valuta asing.

- ❖ Pendapatan bunga dan beban bunga diungkapkan secara terpisah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai komposisi nilai bersih bunga

3. Laporan arus kas

- ❖ Laporan arus kas terdiri untuk kas dan setara kas terdiri atas kas, giro BI, dan Giro pada bank lain
- ❖ Laporan disajikan berdasarkan penggunaan dan perolehan kas untuk aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan

4. Laporan perubahan ekuitas

5. Catatan atas laporan keuangan

- ❖ Analisis jatuh tempo aktiva dan kewajiban diungkapkan menurut kelompok jatuh tempo berdasarkan periode yang tersisa.
- ❖ Konsentrasi distribusi aktiva, kewajiban, dan unsur lain diluar neraca harus diungkapkan untuk kepentingan perkiraan resiko yang timbul saat realisasi.
- ❖ Pengungkapan resiko yang berkaitan dengan valuta asing memberikan petunjuk yang bermanfaat atas resiko kerugian karena perubahan nilai tukar
- ❖ Bank harus mengungkapkan jenis kredit dan jumlahnya, jumlah kredit untuk pihak dengan hubungan istimewa, kedudukan bank dalam pembiayaan bersama, jumlah kredit yang direstrukturisasi, klasifikasi kredit berdasar jangka waktu, ketertagihan, dan tingkat bunga.

Kerangka Laporan Keuangan Bank

Berikut ini diberikan Kerangka pembuatan Laporan keuangan bank yang utama yaitu: Neraca dan Laporan Laba/Rugi

Bank "Aneka Warna"
Neraca
Per 31 Desember 20xx

No	R E K E N I N G	JUMLAH	No	R E K E N I N G	JUMLAH
A	AKTIVA			Pasiva	
1	Kas	Rp xxx	1	Giro	Rp xxx
2	Penempatan pada B I:	Rp xxx		a. Rupiah	
	a. Giro Bank Indonesia			b. Valuta asing	
	b. Sertifikat BI		2	Kwbn segera lainnya	Rp xxx
	c. Lainnya		3	Komisi Diterima Dimuka	Rp xxx
3	Giro pada Bank Lain	Rp xxx	4	Hutang PPh	Rp xxx
	a. Rupiah		5	Tabungan	Rp xxx
	b. Valuta Asing		6	Simpanan Berjangka	Rp xxx
4	Penempatan pd Bank Lain	Rp xxx		a. Rupiah	
	a. Rupiah			i. pihak terkait	
	b. Valuta Asing			ii. pihak tidak terkait	
5	PPAP-Penempatan pd bank Lain	Rp xxx		b. Valuta Asing	
6	Kredit yang Diberikan	Rp xxx		i. pihak terkait	
	a. Rupiah			ii. pihak tidak terkait	
	b. Valuta Asing		7	Sertifikat Deposito	Rp xxx
7	PPAP – Kredit yg Diberikan	Rp xxx		a. Rupiah	
8	Pendapatan yang Masih akan Diterima	Rp xxx		b. Valuta Asing	
9	Biaya dibayar dimuka	Rp xxx	8	Simpanan dr Bank Lain	Rp xxx
10	Uang muka pajak	Rp xxx	9	Kewajiban Akseptasi	Rp xxx
11	Aktiva Tetap	Rp xxx	10	Kewajiban Sewa Guna Usaha	Rp xxx
12	Ak. Penyusutan Aktiva tetap	Rp xxx	11	Setoran jaminan	Rp xxx
13	Agunan yang diambil alih	Rp xxx	12	Hutang pajak	Rp xxx
14	Aktiva Lain-lain	Rp xxx	13	Pinjaman yg Diterima	Rp xxx
15	RAK antar kantor cbg	Rp xxx		i. pihak terkait	
				ii. pihak tdk terkait	
			14	Pinjaman Subordinasi	Rp xxx
				i. pihak terkait	
				ii. pihak tdk terkait	
			15	Cadangan Umum	Rp xxx
			16	Modal Disetor	Rp xxx
			17	Laba tahun Berjalan	Rp xxx
	Total Aktiva	Rp xxx		Total Pasiva	Rp xxx

Bank "Aneka Warna"
Laporan Laba-Rugi
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20xx

No	R E K E N I N G	JUMLAH
	Pendapatan dan Beban Operasional	
1.	Pendapatan Bunga	Rp xxx
	1.1. Hasil Bunga	
	a. Rupiah	
	b. Valuta Asing	
	1.2. Provisi dan Komisi	
	a. Rupiah	
	b. Valuta Asing	
	Jumlah Pendapatan Bunga	
2.	Beban Bunga	(Rp xxx)
	2.1. Beban Bunga	
	a. Rupiah	
	b. Valuta Asing	
	2.2. Komisi dan Provisi	
	Jumlah Beban Bunga	
3.	Pendapatan bunga bersih	Rp xxx
	3.1. Pendapatan Operasional lainnya	
	3.2. Pendapatan Provisi, Komisi , <i>fee</i>	
	3.3. Pendapatan transaksi mata uang asing	
	3.4. Pendapatan kenaikan nilai surat berharga	
	3.5. Pendapatan lainnya	
	Pendapatan Lainnya	
	Jumlah pendapatan Operasional lainnya	
4.	Beban (Pendapatan) Penghapusan Aktiva Produktif	(Rp xxx)
5.	Beban Estimasi kerugian Kontinjensi	(Rp xxx)
6.	Beban Operasional Lainnya	(Rp xxx)
	6.1. Beban Administrasi dan Umum	
	6.2. Beban Personalia	
	6.3. Beban penurunan nilai surat berharga	
	Beban transaksi valas	
	6.5. Beban lainnya	
	Jumlah beban operasional lainnya	
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	
	PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL	Rp xxx
7.	Pendapatan non Operasional	Rp xxx
8.	Beban non Operasional	Rp xxx
	Pendapatan (Beban) non Operasional	
9.	Pendapatan/Beban Luar Biasa	Rp xxx
	LABA / RUGI TAHUN BERJALAN	

Siklus Akuntansi Bank sama dengan siklus Akuntansi Perusahaan lainnya. Perbedaannya disebabkan operasi dari masing-masing berbeda sehingga menimbulkan pencatatan/rekening yang berbeda.

Dibawah ini diberikan contoh transaksi yang terjadi selama bulan Juli 2007 di Bank “Artha Lumintu” yang baru 1 bulan mendapat izin untuk membuka Kantor Cabang Malang (beberapa rekening sudah mempunyai saldo di bulan lalu):

Juli	1	Diterima setoran giro dari Astuti sebesar Rp 500.000.000,00. Giro ini berupa uang tunai dan cek yang efektif hari ini dari sdr Wahyu yang merupakan nasabah giro Cabang Surabaya sebesar Rp 150.000.000,00.
	2	Bank menempatkan dananya pada Bank “Artha Lancar” sebesar Rp 250.000.000,00 lewat rekening giro Bank Indonesia. Penempatan berbentuk deposito berjangka 3 bulan dengan suku bunga 15 %
	3	Nasabah bernama Dewi pada tanggal ini menyerahkan warkat berupa : b. 2 lembar cek Bank BNI masing-masing Rp 35.000.000 dan Rp 40.000.000 ditandatangani tanggal 30 Juni 2007 c. 3 lembar cek Bank BCA, BRI dan Mandiri, masing-masing sebesar Rp 50.000.000,00, Rp 15.000.000,00 dan Rp 10.000.000,00 ditandatangani tanggal 28 Juni 2007
	3	Rony H. membuka deposito berjangka 3 bulan bunga 9 % nominal Rp 200.000.000 dalam bentuk tunai Rp 50.000.000 dan cek dari Bank Hasta. Kliring dinyatakan berhasil
	4	Ibu Dwi Ningsih menyerahkan cek yang ditarik oleh M.Suaeb nasabah Bank ini untuk membeli sertifikat Deposito jangka waktu 6 bulan , bunga 15 % pa (<i>per annual</i>) sejumlah Rp 150.000.000,00
	5	Tuan Imam membeli sertifikat
	8	Disetujui permohonan kredit Sdri Hadiati sebesar Rp 100.000.000,00 , bunga 13,2 % jangka waktu 5 tahun. Jaminan berupa sertifikat tanah ditaksir mempunyai nilai Rp 300.000.000,00. Kredit akan dicairkan satu minggu lagi
	10	Diterima setoran ONH Plus atas nama Wiwin sebesar Rp 40.000.000,00, berupa uang tunai Rp 15.000.000,00 dan transfer dari Wulan nasabah bank cabang Bojonegoro
	12	Disetujui permohonan kredit Sdri Danti sebesar Rp 200.000.000,00 , bunga 15 % jangka waktu 5 tahun. Jaminan berupa sertifikat tanah ditaksir mempunyai nilai Rp 700.000.000,00.
	15	Dilakukan pencairan kredit sdr Hadiati dengan membebaskan biaya provisi 1 %, biaya administrasi Rp 150.000, yang dipotong langsung saat pencairan dan dibayar via tabungan yang baru dibuka
	20	Nasabah giro yang bernama Imam S menerima transfer masuk dari Bank Jatim Cabang Yogyakarta sebesar Rp 200.000.000,00. Atas transfer ini nasabah meminta Bank agar memasukkan Rp 85.000.000,00 ke rekening gironya, Rp 15.000.000,00 untuk melunasi tunggakan bunga, Rp 50.000.000,00 untuk membeli deposito 3 bulan bunga 15 % pa dan Rp 35.000.000,00 dimasukkan tabungan dan sisanya diambil tunai
	25	Bank menerima tagihan dari Hypermarket atas penggunaan kartu kredit dari nasabah Martha sebesar Rp 500.000,00. Komisi 3 %
	25	Kredit yang disetujui bulan lalu atas nama Sumarno yang merupakan suami salah satu pemegang saham besar, senilai Rp 500.000.000,00

		bunga 15 % jk wakt 3 thn ditarik semua. Atas penarikan ini debitor dikenakan biaya provisi 0,5 % dan biaya administrasi Rp 600.000,00 Debitur meminta berupa uang tunai Rp 10.000.000,00 dan sisanya ditransfer ke tabungan.
	26	Sdr Zaenal nasabah giro hari ini menyerahkan bilyet giro yang ditarik oleh sdr Arif nasabah bank ini juga sebesar Rp 600.000.000,00

Dari transaksi tersebut, dibuat jurnal sebagai berikut:

		(dlm Rp 000,00)			
		R E K E N I N G	Ref.	Debet	Kredit
Juli	1	Kas		500.000	
		Giro Wahyu		150.000	
		Giro Astuti			650.000
	2	Penempatan pada Bank Lain-DB		250.000	
		Giro BI			250.000
	3	RAR Warkat Kliring 1 (kliring 1)		150.000	
		Giro Bank Indonesia		150.000	
		Giro Dewi			150.000
		RAR Warkat Kliring 2 (kliring 2)			150.000
	3	RAR Warkat Kliring 1 (kliring 1)		150.000	
		Giro BI		150.000	
		Kas		50.000	
		Simpanan berjangka-Rony H			200.000
		RAR Warkat Kliring 2 (kliring 2)			150.000
	4	Giro Dwi Ningsih		150.000	
		Bunga Sertifikat Deposito Dibayar Dimuka		8.241,8566	
		Hutang PPh			1.071,4285
		Giro M. Suaeb			7.142,8571
		Sertifikat Deposito			150.000
	9	Cr RAR Fasilitas kredit kpd nasabah yang belum ditarik			100.000
	10	Kas		15.000	
		RAK Cabang Bojonegoro		25.000	
		Tabungan ONH			40.000
	12	Cr RAR Fasilitas kredit kpd nasabah yang belum ditarik			200.000

	15	Dr RAR Fasilitas kredit kpd nasabah yang belum ditarik	100.000	
		Kredit yang diberikan	100.000	
		Tabungan		99.750
		Pendapatan Provisi dan komisi		250
	20	RAK cabang Yogyakarta	200.000	
		Giro Imam S		85.000
		Pendapatan bunga		15.000
		Deposito berjangka		50.000
		Tabungan		35.000
		Kas		15.000
		Cr. RAR. Bunga dalam Penyelesaian		10.000
	25	Dr RAR Kredit Yg Diberikan belum Ditarik	500	
		Kredit yang Diberikan	500	
		Giro Hypermarket "X"		485
		Pendapatan Komisi Kartu kredit		15
	25	Dr RAR Kredit Yg Diberikan belum Ditarik	500.000	
		Kredit yang diberikan	500.000	
		Kas		10.000
		Pendapatan Provisi dan Komisi		3.100
		Tabungan		487.900
	26	Giro Zaenal	600.000	
		Giro Arif		600.000

Perhitungan transaksi tanggal 4

Nominal sertifikat deposito	Rp 150.000.000,00
Nilai tunai = $\frac{150.000.000 \times 360}{360 + (0,15 \times 120)}$	Rp 142.857.142,90
Bunga dibayar di muka	Rp 7.142.857,10
Pajak atas bunga deposito(20%)	Rp 1.071.428,50
Bunga bersih yang dibayar Bank	Rp 8.214.856,60

Dari jurnal yang dibuat di bagian sebelumnya, langkah selanjutnya adalah melakukan posting ke Buku Besar

Kas

(dlm Rp 000,00)

Tanggal		Keterangan	Ref.	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
Juli	1	Setoran giro		500.000		500.000	
	3	Pembukaan DB		50.000		550.000	
	10	Setoran ONH		15.000		565.000	
	20	transfer			15.000		550.000
	25	Realisasi Kredit			10.000		540.000

Penempatan pada Bank Indonesia-Giro BI

(dlm Rp 000,00)

Tanggal		Keterangan	Ref.	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
Juli	1	Saldo		3.000.000			
	2	Penempatan DB			250.000	2.750.000	
	3	Setoran kliring		150.000		2.900.000	

Giro pada Bank Lain

(dlm Rp 000,00)

Tanggal		Keterangan	Ref.	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
Juli	1	Saldo		400.000		400.000	

Penempatan Pada Bank lain

(dlm Rp 000,00)

Tanggal		Keterangan	Ref.	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
Juli	1	Penempatan pd DB		250.000		250.000	

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)-**Penempatan pada Bank Lain**

(dlm Rp 000,00)

Tanggal		Keterangan	Ref.	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
Juli	1	Saldo					700.000

Kredit yang Diberikan- Pihak Terkait

(dlm Rp 000,00)

Tanggal		Keterangan	Ref.	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
Juli	25	Penarikan kredit		500.000			

Kredit yang Diberikan- Pihak Tidak Terkait

(dlm Rp 000,00)

Tanggal		Keterangan	Ref.	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
Juli	15	Penarikan kredit		100.000			
	25	Karu kredit		500			

PPAP- Kredit yang Diberikan

(dlm Rp 000,00)

Tanggal		Keterangan	Ref.	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
Juli	1	Saldo			1.000.000		1.000.000

Pendapatan Yang Masih Akan Diterima

(dlm Rp 000,00)

Tanggal		Keterangan	Ref.	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
Juli	1	Saldo		1.200.000			

Biaya Dibayar Dimuka

(dlm Rp 000,00)

Tanggal		Keterangan	Ref.	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
Juli	13	Bunga SD		8.241,8566		8.241,8566	

Aktiva Tetap

(dlm Rp 000,00)

Tanggal		Keterangan	Ref.	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
Juli	1	Saldo		1.400.000		1.400.000	

Akumulasi Penyusutan- Aktiva Tetap

(dlm Rp 000,00)

Tanggal		Keterangan	Ref.	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
Juli	1	Saldo			200.000		

Agunan yang Diambil Alih

(dlm Rp 000,00)

Tanggal		Keterangan	Ref.	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
Juli	1	Saldo		1.500.000			

Aktiva Lain-lain

(dlm Rp 000,00)

Tanggal		Keterangan	Ref.	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
Juli	1	Saldo		500.000			

Giro Nasabah

(dlm Rp 000,00)

Tanggal		Keterangan	Ref.	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
Juli	1	pemindahbukuan		150.000		150.000	
	3	setoran			500.000		350.000
	4	pembebanan		150.000			200.000
	13	pelimpahan			7.142,8571		207.142,8571
	20	pembebanan			85.000		
	25	Kartu kredit			485		207.627,8571
	26	pembebanan		600.000			807.627,8571
	26	pemindahbukuan			600.000		207.627,8571

Kewajiban Segera Lainnya

(dlm Rp 000,00)

Tanggal		Keterangan	Ref.	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
Juli	1	Saldo			1.000.000		1.000.000

Hutang PPh

(dlm Rp 000,00)

Tanggal		Keterangan	Ref.	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
Juli	13	Pajak bunga SD			1.071,4285		1.071,4285

Tabungan

(dlm Rp 000,00)

Tanggal		Keterangan	Ref.	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
Juli	15	Realisasi kredit			97.750		97.750
	20	transfer			15.000		112.750
	25	Realisasi kredit			487.900		600.650

Simpanan Berjangka – Pihak Terkait

(dlm Rp 000,00)

Tanggal		Keterangan	Ref.	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
Juli	1	Saldo		3.000.000		3.000.000	

Simpanan Berjangka – Pihak Tidak Terkait

(dlm Rp 000,00)

Tanggal		Keterangan	Ref.	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
Juli	20	Deposito Berjangka			50.000		

Sertifikat Deposito

(dlm Rp 000,00)

Tanggal		Keterangan	Ref.	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
Juli	13	Penerbitan			150.000		150.000

RAK Pasiva (Antar Kantor Cabang)

(dlm Rp 000,00)

Tanggal		Keterangan	Ref.	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
Juli	10	RAK Cab. Bojonegoro			25.000		25.000
	20	RAK Cabang Yogyakarta		200.000			

Hasil Bunga

(dlm Rp 000,00)

Tanggal		Keterangan	Ref.	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
Juli	20	Pendapatan bunga			15.000		15.000

Provisi dan Komisi Kredit

(dlm Rp 000,00)

Tanggal		Keterangan	Ref.	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
Juli	15	Pendapatan dr pencairan kredit			250		250
	25	Pendapatan Kartu Kredit			15		285
	25	Pendapatan dr pencairan kredit			3100		3385

Fasilitas kredit kepada Nasabah yang Belum Ditarik

(dlm Rp 000,00)

Tanggal		Keterangan	Ref.	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
Juli	1	Saldo			500.000		500.000
	8	Kredit perorangan			100.000		600.000
	12	Kredit perorangan			200.000		800.000
	15	Penarikan kredit		100.000			600.000
	25	Penarikan kredit		500.000			100.000

RAR Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian

(dlm Rp 000,00)

Tanggal	Keterangan	Ref.	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
Juli 20	Pelunasan tunggakan			15.000		15.000

RAR Garansi yang Diberikan

(dlm Rp 000,00)

Tanggal	Keterangan	Ref.	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit

Warkat Dikliringkan

(dlm Rp 000,00)

Tgl	Keterangan	Debet	Tgl	Keterangan	Debet
Juli 2	Kliring 1	150.000		Kliring 2	150.000
3	Kliring 1	150.000		Kliring 2	150.000

Latihan

Dibawah ini transaksi di Bank “Anugerah” pada bulan Mei 2007:

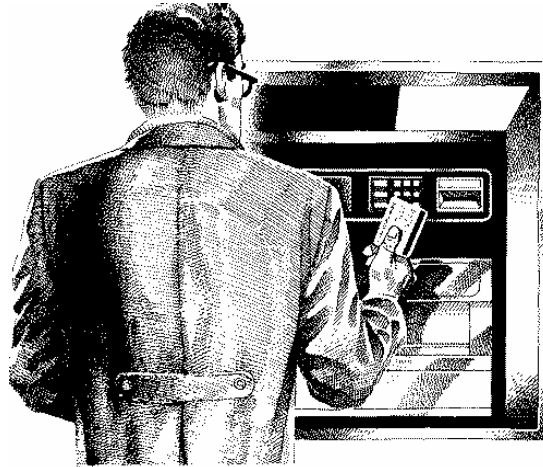
Mei	1	Diterima setoran giro dari Hartini sebesar Rp1. 500.000.000,00. Giro ini berupa uang tunai dan cek yang efektif hari ini dari sdri Hastanti yang merupakan nasabah giro Cabang Kediri sebesar Rp 150.000.000,00.
	2	Bank menempatkan dananya pada Bank “Artha Lancar” sebesar Rp 2.500.000.000,00 lewat rekening giro Bank Indonesia. Penempatan berbentuk deposito berjangka 6 bulan dengan suku bunga 12%
	3	Nasabah bernama Edi pada tanggal ini menyerahkan warkat berupa : d. 3 lembar cek Bank Niaga masing-masing Rp 35.000.000 dan Rp 40.000.000 dan 20.000.000,00 ditandatangani tanggal 20 April 2007 e. 3 lembar cek Bank Jatim, Megadan Mandiri, masing-masing sebesar Rp 50.000.000,00, Rp 25.000.000,00 dan Rp 20.000.000,00 ditandatangani tanggal 28 Mei 2007
	4	Ibu Endang menyerahkan cek yang ditarik oleh Suwandi nasabah Bank ini untuk membeli sertifikat Deposito jangka waktu 3 bulan , bunga 18% pa (<i>per annual</i>) sejumlah Rp 100.000.000,00
	5	Prasetyo membuka deposito berjangka 6 bulan bunga 12% nominal Rp 300.000.000 dalam bentuk tunai Rp 75.000.000 dan cek dari Bank Anoman. Kliring dinyatakan berhasil
	7	Disetujui permohonan kredit Sdr Mulyonosebesar Rp 500.000.000,00 , bunga 13,2% jangka waktu 5 tahun. Jaminan berupa sertifikat tanah ditaksir mempunyai nilai Rp 1.000.000.000,00. Kredit akan dicairkan sepuluh hari lagi.

	10	Diterima setoran ONH atas nama Nastiti sebesar Rp 25.000.000,00, berupa uang tunai Rp 5.000.000,00 dan transfer dari Rahma nasabah bank cabang Bojonegoro
	12	Disetujui permohonan kredit Sdri Ayu sebesar Rp 100.000.000,00 , bunga 15% jangka waktu 5 tahun. Jaminan berupa sertifikat tanah ditaksir mempunyai nilai Rp 500.000.000,00.
	17	Dilakukan pencairan kredit sdri Mulyono dengan membebaskan biaya provisi 1%, biaya administrasi Rp 350.000, yang dipotong langsung saat pencairan dan dibayar via tabungan yang baru dibuka dan uang tunai yang dibawa Rp 10.000.000,00
	20	Nasabah giro yang bernama Imam S menerima transfer masuk dari Bank Jatim Cabang Yogyakarta sebesar Rp 200.000.000,00. Atas transfer ini nasabah meminta Bank agar memasukkan Rp 85.000.000,00 ke rekening gironya, Rp 15.000.000,00 untuk melunasi tunggakan bunga, Rp 50.000.000,00 untuk membeli deposito 3 bulan bunga 15% pa dan Rp 35.000.000,00 dimasukkan tabungan dan sisanya diambil tunai
	23	Sdr Waluyo nasabah giro hari ini menyerahkan bilyet giro yang ditarik oleh sdr Agus nasabah bank ini juga sebesar Rp 300.000.000,00
	24	Dibeli kendaraan Panther seharga Rp 200.000.000,00. Biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan aktiva ini termasuk pengurusan surat-surat sebesar Rp 3.500.000,00. Aktiva disusutkan 5 tahun
	24	Ditarik agunan berupa kendaraan mobil BMW dari nasabah bernama Arifin yang sudah tidak sanggup melunasi hutangnya dengan pokok angsuran total Rp 200.000.000,00 dan tunggakan bunga Rp 50.000.000,00. Arifin setuju mobil ini dibeli dinilai Rp 300.000.000,00
	25	Bank menerima tagihan dari Hero Swalayan atas penggunaan kartu kredit dari nasabah Halim sebesar Rp 1.000.000,00. Komisi 3%
	25	Kredit yang disetujui bulan lalu atas nama Puspita, istri Abimanyu yang merupakan salah satu pemegang saham besar, senilai Rp 500.000.000,00 bunga 15% jk wakt 3 thn ditarik semua. Atas penarikan ini debitur dikenakan biaya provisi 0,5% dan biaya administrasi Rp 300.000,00 Debitur meminta berupa uang tunai Rp 10.000.000,00 dan sisanya ditransfer ke tabungan.

Diminta:

Jurnallah transaksi di atas dan lakukan *posting* ke Buku besar!

BAB 5



AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH

- ☺ Keunikan Perbankan Syariah
- ☺ Jenis Produk Bank Syariah
 - ☺ Terminologi
 - ☺ Akuntansi Aktiva
- ☺ Akuntansi Kewajiban
- ☺ Contoh Transaksi

AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH



Selain Perbankan Konvensional, di Indonesia juga ada Bank Syariah mulai tahun 1992 . Bank Syariah pertama di Indonesia adalah BMI (Bank Muamalat Indonesia) yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Bank syariah ada karena adanya keinginan umat muslim untuk *kaffah* yaitu menjalankan aktivitas perbankan sesuai dengan syariah yang diyakini, terutama masalah larangan riba, serta hal-hal yang berkaitan dengan norma ekonomi dalam Islam seperti larangan *maisyr* (judi dan spekulatif), *gharar* (unsur ketidak jelasan), *jahala* dan keharusan memperhatikan kehalalan cara dan objek investasi

Sebenarnya menurut agama lain pun ditemui larangan riba. Berikut disajikan beberapa uraian tentang bunga dan riba menurut sejarah dan beberapa agama.

I. Yunani

A. Plato: (427-347 SM)

- Bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat

- Bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin

B. Aristoteles (384-322 SM)

- Fungsi uang adalah sebagai alat tukar bukan alat menghasilkan tambahan melalui bunga
- “istilah riba yang berarti lahirnya uang dari uang, diterapkan kepada pengembangbiakan uang karena analogi keturunan dan orang tua. Dibanding dengan semua cara mendapatkan uang, cara seperti ini adalah yang paling tidak alami” (Politics, 1258)

II. Yahudi

Kitab Eksodus (Keluaran 22-25):

“Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang umatku, orang yang miskin diantaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia, janganlah engkau bebankan bunga terhadapnya.”

III. Kristen

1. Lukas 6 : 34-35

“Dan janganlah kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasmu? dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan.....“

2. Pandangan para pendeta dan sarjana kristen berbeda dengan Lukas 6: 34-35 dan pendapat mereka terbagi menjadi 3 periode, yaitu:

a. Pandangan Pendeta Awal (abad I-XII)

- Bunga adalah semua bentuk yang diminta sebagai imbalan yang melebihi jumlah barang yang dipinjamkan di awal.
- Mengambil bunga adalah suatu dosa yang dilarang baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru.
- Keinginan atau niat untuk mendapat imbalan melebihi apa yang dipinjamkan adalah suatu dosa.
- Bunga harus dikembalikan kepada pemiliknya.

b. Pandangan Para Sarjana Kristen (abad XII-XV)

- Bunga dibedakan menjadi *interest* dan *usury*.
 - Niat atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan dengan memberikan pinjaman adalah suatu dosa yang bertentangan dengan konsep keadilan.
 - Mengambil bunga dari pinjaman diperbolehkan, namun haram atau tidaknya tergantung niat si pemberi utang.
- c. Pandangan Para Reformis Kristen (abad XVI- tahun 1836)
- Dosa apabila bunga memberatkan.
 - Uang dapat membiak (bertentangan dengan Aristoteles).
 - Tidak menjadikan pengambil bunga sebagai profesi.
 - Jangan mengambil bunga dari orang miskin.

IV. Islam

Kitab Al-Qur'an melarang riba, antara lain:

- a. *Al-baqarah* : 278-279
 “Hai orang-orang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut)Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya.”
- b. *Ali- Imran* : 130
 “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan.”
- c. *An-nisaa* : 130
 “.....dan disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil.....”
- d. *Ar-ruum* : 39
 “Dan sesuatu riba (tambahan) agar ia bertambah pada harta manusia, maka pada sisi Allah itu tidak bertambah.....”

Selain dalam Al-Qur'an, larangan riba juga terdapat pada dalam hadits Rasulullah SAW. Dalam pandangan Islam, uang tidak menghasilkan bunga atau laba dan uang tidak dipandang sebagai komoditi.

Berkembangnya Bank-bank Syariah di negara-negara Islam (Mesir: Mit Ghamar Bank, Islamic Development Bank, Faisal Islamic Bank, Kuwait Finance House, Dubai Islamic Bank dll) berpengaruh ke

Indonesia. Diskusi ataupun Lokakarya diselenggarakan sampai akhirnya Tim Perbankan MUI menanda tangani Akte Pendirian PT Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991.

Perkembangan Bank syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya UU no 10 tahun 1998. Dalam UU tsb diatur dengan rinci landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank syariah. UU tsb memberi arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah/ unit usaha syariah (UUS) atau mengkonversi menjadi bank syariah

KEUNIKAN PERBANKAN SYARIAH

Fungsi dasar bank syariah secara umum sama dengan bank konvensional, sehingga prinsip umum pengaturan dan pengawasan bank berlaku pula pada bank syariah. Namun adanya sejumlah perbedaan cukup mendasar dalam operasional bank syariah menuntut adanya perbedaan pengaturan dan pengawasan bagi Bank syariah

Perbedaan mendasar tersebut terutama:

- b. Perlunya jaminan pemenuhan ketaatan pada prinsip syariah dalam seluruh aktivitas bank.
- c. Perbedaan karakteristik operasional khususnya akibat dari pelarangan bunga yang digantikan dengan skema PLS dengan instrumen nisbah bagi hasil.

Langkah penting untuk mengatasi masalah unik dari sistem bagi hasil misalnya : *moral hazard* (tindakan yang dilakukan oleh penerima amanat yang bertentangan dengan kesepakatan awal dalam menjalankan amanat yang diterimanya), *asymmetric information* (ketidakseimbangan informasi antara pemberi amanat dan yang diberi amanat, di mana pihak yang diberi amanat memiliki informasi yang lebih banyak ketimbang pihak yang memberi amanat), dll adalah dengan cara:

- a. penerapan *good governance* (tata kelola yang baik)
- b. ketentuan *disclosure* dan transparansi keuangan
- c. pengembangan skema insentif yang optimal dll

Untuk menunjang langkah ini khususnya langkah b (ketentuan *disclosure* dan transparansi keuangan) maka:

- Ikatan Akuntan Indonesia (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) pada tahun 2003 sudah mengeluarkan PSAK No. 59 tentang Perbankan Syariah yang sudah direvisi pada September 2007 dan disempurnakan dengan PSAK No. 101, 102, 103, 104, 105, dan 106.
- Biro perbankan Syariah Bank Indonesia menerbitkan PAPS (Pedoman Akuntansi Perbankan) tahun 2003

Bila ditinjau dari fungsinya, bank syariah memiliki fungsi yang sama dengan bank konvensional yaitu sebagai lembaga *intermediary* yang menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Hal utama yang membedakan Bank syariah dengan Bank konvensional adalah dalam cara menghimpun dan menyalurkan dana harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah .

Cara operasi bank Syariah pada hakikatnya sama saja dengan Bank Konvensional, yang membedakan hanya dalam masalah bunga dan praktik lainnya yang menurut syariat Islam tidak dibenarkan. Bank syariah tidak menggunakan konsep bunga seperti bank konvensional. Namun bukan berarti bank syariah tidak mengenakan beban kepada mereka yang menikmati jasanya. Beban masih tetap ada, namun konsep dan cara penghitungannya tidak seperti perhitungan bunga pada Bank Konvensional.

Kedudukan Bank Syariah dalam hubungannya dengan para nasabah adalah sebagai mitra investor. Sedangkan dalam Bank Umum, hubungan antara Bank dan nasabah adalah sebagai debitur dan kreditur saja.

Sebagaimana bank-bank pada umumnya, bank syariah juga memiliki produk yang dapat digunakan untuk berbagai lapisan anggota masyarakat dari berbagai suku bangsa dan agama. Sebelum menguraikan jenis produk bank Syariah, maka perlu diketahui dahulu sumber dana bank syariah. Dana yang digunakan baik bank Syariah maupun Bank Konvensional dalam rangka menunjang kegiatan operasinya terdiri dari:

1. Dana Bisnis
adalah dana yang dapat ditarik kembali oleh pemilik
2. Dana Ibadah
adalah dana yang tidak dapat ditarik kembali oleh yang beramal, kecuali dana tersebut memang ditujukan untuk pinjaman.

Jenis Produk Bank Syariah

Jenis produk Bank Syariah akan tergantung pada fungsi pokok bank syariah. Fungsi pokok bank syariah dalam kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat terdiri dari:

1. Fungsi Pengumpulan Dana (*Funding*)
2. Fungsi Penyaluran Dana (*Financing*)
3. Pelayanan Jasa (*Service*)

Dalam bank syariah produk-produk penghimpunan dana dapat diterapkan berdasarkan prinsip masing-masing, yaitu:

- a. *Wadiah* yaitu akad titipan dimana barang yang dititipkan dapat diambil sewaktu-waktu. Pihak yang menerima titipan dapat meminta jasa untuk keamanan dan pemeliharaan.
- b. *Mudharabah* yaitu akad usaha dimana salah satu pihak memberikan modal (*Sahibul Mal*), sedangkan pihak lainnya memberikan keahlian (*Mudharib*) dengan nisbah yang disepakati dan apabila terjadi kerugian , maka pemilik modal menanggung kerugian tersebut.

Mudharabah dibagi menjadi 2 yaitu:

- a) *Mudharabah mutlaqah* (investasinya tidak terikat).
- b) *Mudharabah muqayyadah*: investasinya terikat (tertentu).

Selanjutnya di PSAK no 59 paragraf 8 dan 9 secara rinci dijelaskan pengertian dari kedua jenis *Mudharabah* ini.

08 *Mudharabah mutlaqah* adalah *mudharabah* di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya

09 *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan objek investasi.

Contoh batasan tersebut, misalnya:

- a) tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya
- b) tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa jaminan

- c) mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga

Jenis Produk Bank Syariah bila dilihat dari fungsi penghimpunan dana (*funding*) terdiri dari:

1. Giro adalah

- simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu atau berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan cek atau kartu ATM sebagai media/alat penarikan.
- dapat dibuka oleh perorangan atau perusahaan.
- Cek dapat berbentuk tunai atau melalui rekening (*account payable*).

Sesuai dengan penjelasan tentang 2 akad diatas, maka giro menggunakan akad Wadiah.

2. Simpanan/tabungan:

- simpanan yang dapat diambil berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan buku/kartu tabungan atau kartu ATM sebagai alat penarikan.
- Buku tabungan merupakan bukti kepemilikan dari pemegang rekening.
- Terdapat aturan tentang setoran pertama dan saldo minimal.

Kedua jenis akad di atas dapat dipakai dalam simpanan. Jadi jenis simpanan menurut akadnya dibagi menjadi:

- Simpanan *Wadiah* dan
- Simpanan *Mudharabah*

3. Deposito

- simpanan untuk jangka waktu tertentu yang dapat diambil setelah jangka waktu tertentu.
- menggunakan bilyet sebagai tanda bukti simpanan.
- mendapatkan bagi hasil yang dibayarkan tiap akhir bulan.

Akad yang dapat dipakai dalam Deposito adalah *Mudharabah*.

Catatan:

*) Bila akad yang dipakai adalah *Mudharabah muqayyadah*, maka:

- nasabah meminta Bank untuk menyalurkan dananya kepada proyek atau nasabah tertentu.
- Atas tugas ini bank dapat memperoleh *fee* atau porsi keuntungan.
- Keuntungan yang diperoleh dari penyaluran dana ini dibagi antara nasabah sebagai pemilik modal (*Sahibul Mal*) dan pelaksana proyek sebagai *mudharib* (orang yang memberikan keahlian)
- Pola seperti ini dalam dunia perbankan disebut *chanelling* bukan *executing*

Jenis Produk Bank Syariah bila dilihat dari fungsi penyaluran dana (*financing*) dibagi menjadi 3 kategori besar:

1. Jual-beli
2. Bagi Hasil/Untung
3. Sewa

1. Jual-beli

Produk jual-beli dalam Bank Syariah dibagi menjadi 3, yaitu:

- a. *Murabahah*
- b. *Salam* dan *salam* parallel
- c. *Istishna* dan *istishna* paralel

Penjelasan dari masing-masing produk disajikan berikut ini:

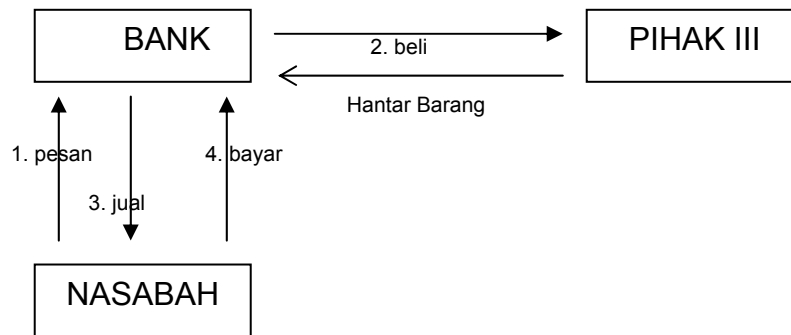
a. *Murabahah*

- adalah pembiayaan berdasarkan jual-beli dimana Bank bertindak selaku penjual dan nasabah selaku pembeli
- Harga beli diketahui bersama dan tingkat keuntungan untuk Bank disepakati dimuka

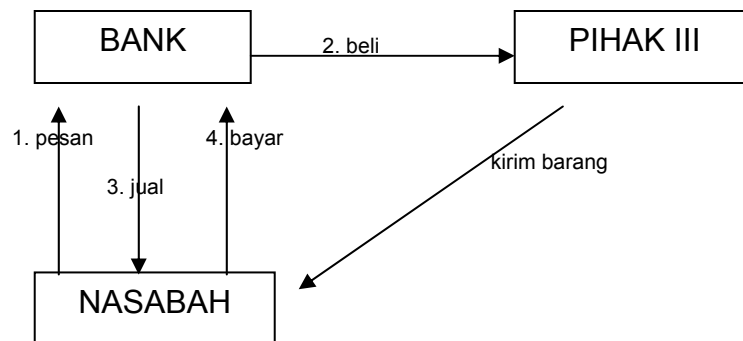
- Dalam fiqih klasik *murabahah* dilakukan secara tunai, dalam praktik perbankan nasabah dapat membayar secara angsuran dan untukantisipasi kemacetan, Bank dapat meminta jaminan
- Dalam fiqih klasik, penjual membeli barang langsung dari penjual pertama. Dalam perbankan syariah barang dapat dikirim langsung kepada nasabah atau nasabah membeli sendiri selaku wakil Bank dalam membeli
- Bank dapat meminta uang muka dari nasabah untuk pembelian barang tersebut secara *murabahah*
- Bila nasabah membayar tepat waktu atau melunasi sebelum jatuh tempo, nasabah dapat meminta keringanan (diskon) bila Bank menyetujui

Bila digambarkan produk *murabahah* menurut fiqih dan menurut Perbankan Syariah nampak di gambar berikut:

Murabahah menurut Fiqih:

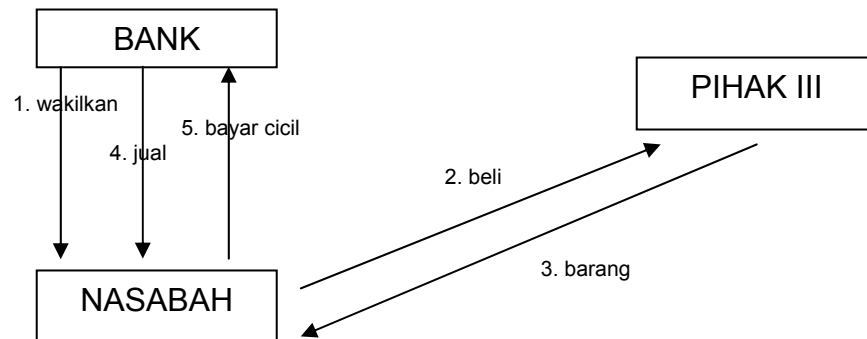


Murabahah dalam Praktik Perbankan Syariah



Alternatif yang ke dua nampak di gambar berikut:

Murabahah dalam Praktik Perbankan Syariah



b. Salam dan salam paralel

- adalah pembiayaan berdasarkan jual-beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran dilakukan dimuka dengan syarat-syarat tertentu
- dalam pembiayaan ini bank bertindak selaku pembeli sedangkan nasabah bertindak selaku penjual. Uang pembelian diberikan dimuka kepada nasabah
- Karena barang akan dikirimkan kemudian, maka nasabah selaku penjual berhutang kepada bank
- Biasanya diterapkan untuk pembiayaan produk pertanian atau produk-produk yang terstandarisasi
- Bank hanya mendapat keuntungan apabila komoditi yang dikirim oleh nasabah dijual dengan harga yang lebih tinggi
- Bank dapat menjual barang tersebut sebelum jatuh tempo kepada pihak lain dengan cara yang sama (*salam*), tapi tidak boleh dikaitkan dengan *salam* yang pertama. Bila hal ini yang terjadi maka salamnya adalah Salam paralel
- Apabila dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dikhawatirkan terkena riba

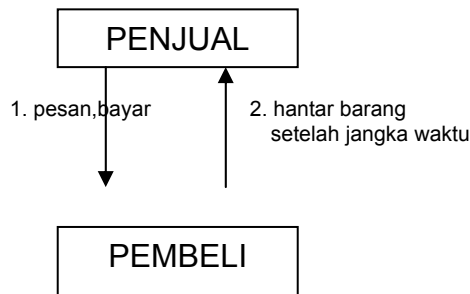
- Apabila nasabah gagal (wan prestasi, *default*) dalam menyerahkan barang yang dipesan, maka kewajiban terhadap bank tidak berubah. Penyerahan barang harus tetap dilakukan walaupun harus ditunda karena kegagalan
- Jika bank setuju, modal bank dikembalikan senilai ketika pertama kali diberikan

c. *Istishna* dan *istishna* parallel

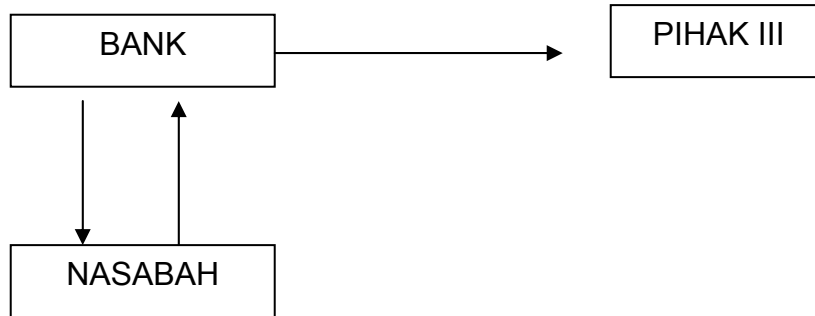
- hampir sama dengan *salam* tetapi berbeda pada objek yang dibiayai dan cara pembayarannya
- Pada *Salam* objek yang dibiayai sudah terstandarisasi, sedangkan pada *istishna* objek yang dibiayai bersifat *customized* (harus dibuat terlebih dahulu)
- Pada *Salam* pembayaran oleh bank dibayar dimuka sekaligus, sedangkan pada *istishna* pembayaran oleh bank dapat dicicil/bertahap

Gambaran *Salam/Istishna* menurut fiqh dan menurut Praktik Perbankan Syariah adalah sebagai berikut:

Salam/Istishna menurut fiqh



Salam/Istishna menurut Praktik perbankan Syariah



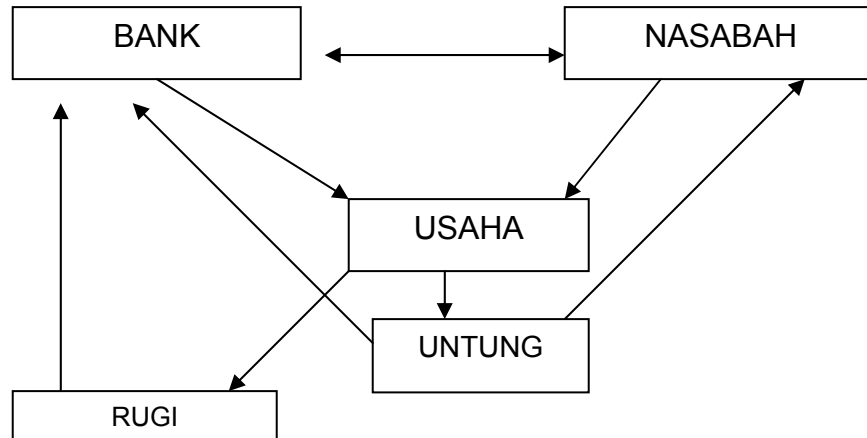
2. Bagi Hasil/Untung

Produk Bagi Hasil/Untung dalam Bank Syariah dibagi menjadi 3, yaitu:

- a) *Mudharabah*
- b) *Musyarakah*
- c) *Rahn*

a) *Mudharabah*

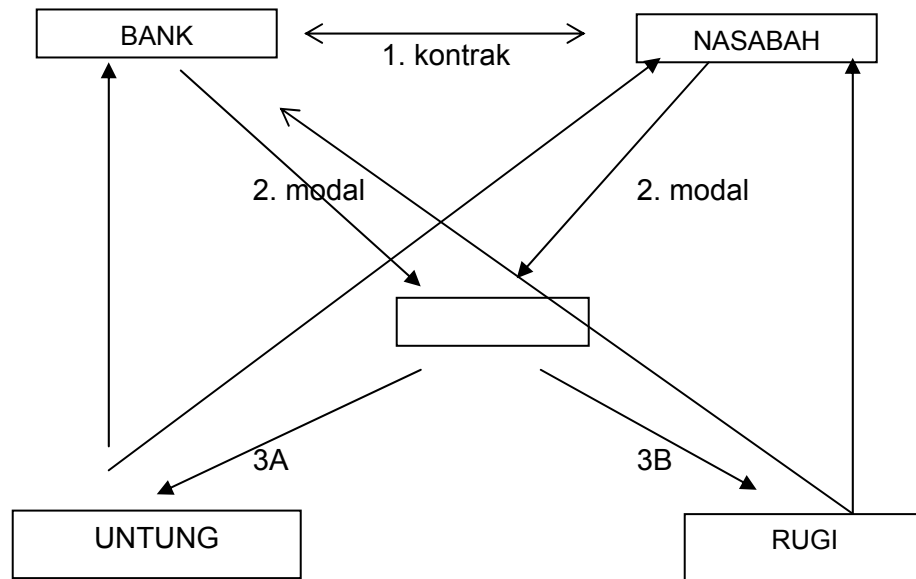
- dalam pembiayaan *Mudharabah*, bank bertindak sebagai pemilik dana (*sahibul mal*) dan nasabah sebagai pengelola usaha (*mudharib*)
- dalam fiqh klasik yang dibagikan adalah keuntungan (pendapatan dikurangi biaya), tetapi dalam praktik yang dibagikan adalah *Revenue* karena sulit untuk menemukan kesepakatan tentang biaya-biaya yang dikeluarkan nasabah
- Nisbah bagi hasil disepakati di muka termasuk bila terjadi kerugian
- dalam fiqh klasik, *Mudharabah* adalah akad yang modal dikembalikan ketika usaha berakhir. Dalam sebagian praktik perbankan syariah, modal yang digunakan nasabah dicicil untuk memudahkan pengembalian ketika *Mudharabah* berakhir
- dalam fiqh klasik, ketika usaha menemui kegagalan semua aset yang tersisa dijual dan dikembalikan kepada *sahibul mal* (Bank). Dalam perbankan syariah nasabah selaku *mudharib* (pengelola usaha) masih diberi kesempatan untuk melanjutkan/memperbaiki usaha dengan penambahan modal dari bank



b) Musyarakah

- dalam *Musyarakah*, bank dan nasabah bertindak selaku *syarik* (*partner*) yang masing-masing memberikan dana untuk usaha
- pembagian keuntungan menurut kesepakatan dan apabila rugi dibagi menurut porsi modal masing-masing (*proporsional*)
- selaku *syarik*, bank berhak ikut serta dalam manajemen sesuai kaidah *musyarakah*

Bila digambarkan nampak sebagai berikut



c) *Rahn* (gadai)

- adalah penyerahan jaminan untuk mendapat pinjaman
- *Rahn* dalam syariah dapat berbentuk:
 - *Fiducia*: penyerahan barang, tetapi hanya dokumen yang ditahan. Barangnya masih dapat digunakan oleh pemilik
 - Gadai : penyerahan barang secara fisik sehingga pemilik tidak dapat menggunakan lagi.

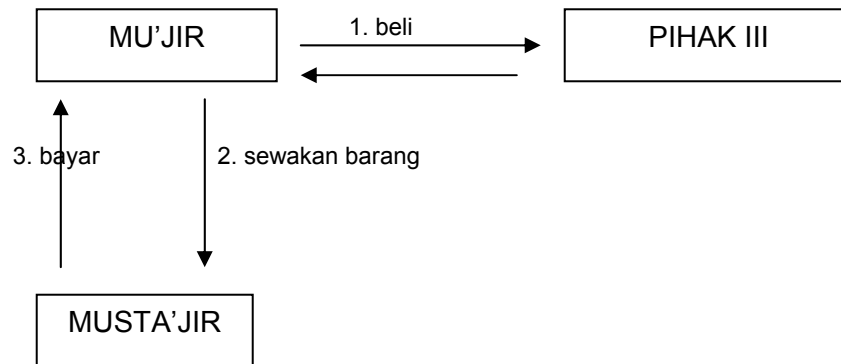
3. Sewa (*Ijarah*)

- Bila pembiayaan berdasarkan akad *Ijarah* maka Bank berlaku sebagai pemberi sewa (*mu'jir*) dan nasabah selaku penyewa (*musta'jir*)
- Pada fiqih klasik, bank (pemberi sewa), bank harus memiliki barang sebelum menyewakan kepada nasabah (penyewa)
- Pada umumnya Bank tidak memiliki barang, tetapi menyewa dari pihak lain, kemudian menyewakan lagi kepada nasabah dengan nilai sewa yang lebih tinggi selama tidak ada kaitan antara akad sewa pertama dengan sewa kedua
- *Ijarah* dalam bank syariah bisa disamakan dengan *operating lease* , bukan *financial lease* atau *capital lease* (lihat bahasan sewa guna usaha/*leasing*). Jadi bank bertanggung jawab atas pemeliharaan aset yang disewa
- Bila bank memiliki objek yang disewakan , maka bank dapat memberi Opsi bagi nasabah untuk memiliki objek yang disewanya. *Ijarah* jenis ini dinamakan *Ijarah al Muntahiyyah Bittamlik* atau *Ijarah wal Iqtina*.

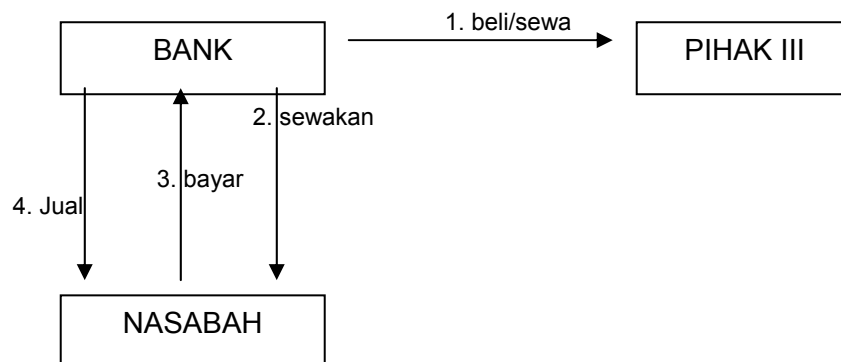
Ijarah al Muntahiyyah Bittamlik memakai 2 akad yaitu akad sewa dan janji (opsi) kepemilikan. Kepemilikan bisa dilakukan kalau masa sewa telah berakhir. Hal ini hampir sama dengan *capital lease*.

Gambaran *Ijarah* menurut fiqih dan praktik perbankan:

Ijarah menurut fiqih



Ijarah menurut Praktik Perbankan



Jasa Perbankan

adalah pelayanan Bank terhadap nasabah dengan tidak menggunakan modal tunai. Atas jasa yang diberikan, bank akan menerima imbalan (*fee*).

Jenis Produk Bank bila dilihat dari fungsi pelayanan jasa (*service*) terdiri dari:

- Transfer* (pengiriman uang)
- Inkaso (pencairan cek)
- Valas (penukaran mata uang asing)
- L/C (Letter of Credit)*
- Letter of Guarantee* dll

Bank syariah menggunakan akad dalam penetapan produknya.

Akad yang dipakai sebagai dasar dalam jasa perbankan syariah:

1. *Wakalah* (Perwakilan)
Produk yang memakai akad ini: *Transfer, Inkaso, Debit Card, L/C*
2. *Kafalah* (Penjaminan)
Produk yang memakai akad ini: *Bank Guarantee, L/C, Charge Card*
3. *Hawalah* (Pengalihan Piutang)
Produk yang memakai akad ini: *Bill Discounting, Post Dated Check* (cek mundur), anjak piutang
4. *Sarf* (Pertukaran mata uang)
Produk yang memakai akad ini: Jual beli Valuta Asing

Dalam perbankan syariah, jasa perbankan menggunakan dana/fasilitas bank sendiri, oleh karena itu pendapatan yang diperoleh dari penjualan jasa ini harus disendirikan atau tidak ikut dibagikan kepada pemilik simpanan.

Untuk mempermudah transaksi antar Bank dan antara Bank dengan Bank Indonesia seperti perbankan konvensional, maka Bank syariah juga menggunakan produk Interbank.

Jenis Produk Interbank

- a. Sertifikat *Mudharabah* antar Bank
adalah instrumen pasar uang antar bank yang hanya dapat dijual satu kali kepada bank lain dengan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan
- b. Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia
adalah instrumen Bank Indonesia untuk menyerap kelebihan likuiditas dalam perbankan
- c. Fasilitas pembiayaan Jangka Pendek (FPJP)
adalah fasilitas Bank Indonesia bagi perbankan syariah untuk menutupi selisih posisi (*mismatch*)

Terminologi (Glosari) dalam Perbankan Syariah

Berikut ini adalah definisi dari istilah-istilah khusus dalam perbankan syariah yang diambil PSAK No. 59 (diurutkan secara alfabetis):

Akad	: adalah pertalian ijab dengan qabul menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap objek
Al-mashnu	: barang pesanan dalam transaksi <i>istishna</i>
Al-muslam fihi	: komoditas yang dikirimkan dalam transaksi <i>salam</i>
Al-muslam ileihi	: penjual dalam transaksi salam
Al-muslam	: pembeli dalam transaksi salam
Al-mushtashni'	: pembeli akhir dalam transaksi <i>ishtisna'</i>
Amil	: petugas pendistribusi zakat
As-shani	: produsen/ <i>supplier</i> dalam transaksi <i>ishtisna'</i>
Fiisabilillah	: orang yang berjuang di jalan Allah
Gharim	: orang yang berutang dan kesulitan untuk melunasinya
Halal	: sesuatu yang diperbolehkan oleh Islam
Haul	: cukup waktu satu tahun bagi pemilikan harta kekayaan seperti perniagaan, emas, ternak, sebagai batas kewajiban membayar zakat
Hiwalah	: pemindahan atau pengalihan hak dan kewajiban, baik dalam pengalihan piutang atau utang, dan jasa pemindahan / pengalihan dana dari satu entitas kepada entitas lain
Ibnusabil	: orang yang dalam perjalanan

Ijarah : perpindahan kepemilikan jasa dengan imbalan yang sudah disepakati menurut para fuqaha'. Ijarah ini memiliki 3 (tiga) unsur:

- ❖ Bentuk yang mencakup penawaran atau persetujuan
- ❖ Dua pihak pemilik aset yang disewakan dan pihak yang memanfaatkan jasa dari aset yang disewakan
- ❖ Objek dari akad ijarah, yang mencakup jumlah sewa dan jasa yang dipindahkan kepada penyewa

Ijarah operasional: Akad ijarah yang tidak berakhir dengan pemindahan kepemilikan dari aset yang disewakan kepada penyewa

Ijarah muntahiyah bittamlik

: Akad ijarah yang berakhir dengan opsi berpindahnya kepemilikan aset yang disewakan kepada penyewa. Ijarah muntahiyah bittamlik dapat berbentuk:

- ❖ Ijarah muntahiyah bittamlik yang memindahkan hak kepemilikan aset yang disewakan kepada penyewa—jika penyewa menginginkan hal tersebut—dengan harga yang diwakili oleh pembayaran sewa yang dilakukan oleh penyewa selama jangka waktu penyewaan. Pada akhir jangka waktu penyewaan dan setelah cicilan terakhir dibayar, maka hak milik sah aset yang disewakan secara otomatis berpindah kepada penyewa atas dasar akad baru.
- ❖ Ijarah muntahiyah bittamlik yang memberikan hak kepemilikan kepada penyewa atas aset yang disewakan pada akhir jangka waktu penyewaan atas dasar akad baru dengan harga tertentu, yang mungkin merupakan harga simbolis
- ❖ Perjanjian ijarah yang memberikan penyewa salah satu dari 3 (tiga) opsi berdasarkan pembayaran sewa yang dilakukan oleh penyewa

- a. Membeli aset yang disewakan dengan harga yang ditentukan berdasarkan pembayaran sewa yang dilakukan oleh penyewa;
- b. Pembaruan ijarah untuk jangka waktu yang baru; atau
- c. Mengembalikan aset yang disewa kepada pemilik objek sewa

- Infak** : pemberian sesuatu yang akan digunakan untuk kemashlahatan umat
- Ishtisna'** : kontrak penjualan antara *al-mustasni* (penjual akhir) dengan *al-shani* (pemasok) dimana *al-shani* berdasarkan suatu pesanan dari *al-mustasni* berusaha membuat sendiri atau meminta pihak lain untuk membuat atau membeli *al-masnu* (pokok) kontrak, menurut spesifikasi yang disyaratkan dan menjualnya kepada *al-mustasni* dengan harga sesuai kesepakatan serta dengan metode penyelesaian di muka melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu di masa depan. Ini merupakan syarat dari kontrak *ishtisna'* sehingga *al-shani* harus menyediakan bahan baku atau tenaga kerja. Kesepakatan akad *ishtisna'* mempunyai ciri-ciri sama dengan *salam* karena dia menentukan penjualan produk tidak tersedia pada saat penjualan, namun ketidaksamaannya terletak pada harga *ishtisna'* yang tidak dibayar ketika diselesaikan. *Ishtisna'* juga memiliki ciri yang sama dengan penjualan biasa karena harga biasa dibayar dengan kredit. Ciri ketiga akad *ishtisna'* sama dengan ijarah karena tenaga kerja digunakan pada keduanya.
- Istishna paralel** : Jika *Al-mustashni* (pembeli akhir) mengizinkan *al-shani* (pemasok) untuk meminta pihak ketiga (sub-kontraktor) untuk membuat *al-mashnu* atau jika pengaturan tersebut bisa diterima oleh kontrak *istishna* itu sendiri, maka *al-shani* bisa melakukan kontrak *istishna* kedua guna memenuhi kewajiban kontraknya kepada kontrak pertama. Kontrak kedua ini disebut *istishna paralel*
- Kafalah** : akad penjaminan yang diberikan oleh *kaafil* (penanggung/bank) kepada pihak ketiga untuk memenuhi

kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung
(*makhful 'anhu, ashil*)

- Kaafil** : pihak yang memberikan jaminan untuk menanggung kewajiban pihak lain dalam akad *kafalah*
- Ma'jur** : objek sewa dalam transaksi *ijarah*
- Makful** : penerima jaminan dalam akad *kafalah*
- Muallaf** : orang yang baru memeluk agama Islam
- Mudharabah** : perjanjian kerjasama untuk mencari keuntungan antara pemilik modal dengan pengusaha (pengelola dana). Perjanjian tersebut bisa saja terjadi antara deposan (*investment account*) sebagai penyedia dan bank syariah sebagai *mudharib*. Bank syariah menjelaskan keinginannya untuk menerima dana investasi dari sejumlah nasabah, pembagian keuntungan disetujui oleh kedua belah pihak sedangkan kerugian ditanggung oleh penyedia dana, asalkan tidak terjadi kesalahan atau pelanggaran syariah yang telah ditetapkan, atau tidak terjadi kelalaian di pihak bank syariah. Kontrak mudharabah dapat juga dilaksanakan antara bank syariah sebagai penyedia dana atas namanya sendiri atau khusus atas nama deposan, pengusaha, atau para pengrajin lainnya termasuk petani, pedagang, dan sebagainya. *Mudharabah* berbeda dengan spekulasi yang berunsur perjudian (*gambling*) dalam pembelian dan transaksi penjualan.
- Mudharabah Mutlaqah** : Investasi tidak terikat.
- Mudharabah Muqayyadah** : Investasi terikat.
- Mudharib** : Pengelola dana (modal) dalam akad *mudharabah*; dalam madzhab syafi'i disebut *amil*
- Muqashah** : potongan pembayaran
- Murabahah** : penjualan barang dengan margin keuntungan yang disepakati dan penjual memberitahukan biaya

perolehan dari barang yang dijual tersebut. Penjualan *murabahah* ada dua jenis. Pertama, bank syariah membeli barang dan menyediakan barang untuk dijual tanpa janji sebelumnya dari pelanggan untuk membelinya. Kedua, bank syariah membeli barang yang sudah dipesan oleh seorang pelanggan dari pihak ketiga lalu kemudian menjual barang ini kepada pelanggan yang sama. Pada kasus terakhir, bank syariah membeli barang hanya setelah seorang pelanggan membuat janji untuk membayarnya kepada bank

- Musta'jir** : penyewa dalam transaksi *ijarah*
- Mustahiq** : penerima zakat, Al-Qur'an mengatur bahwa penerima zakat adalah yang disebut sebagai 8 (delapan) *asnaf* (golongan/ kelompok)
- Musyarakah** : bentuk kemitraan bank syariah dengan nasabahnya dimana masing-masing pihak menyumbangkan pada modal kemitraan dalam jumlah yang sama atau berbeda untuk menyelesaikan suatu proyek atau bagian pada proyek yang sudah ada. Masing-masing pihak menjadi pemegang saham modal dasar tetap atau menurun dan akan memperoleh bagian keuntungan sebagaimana mestinya. Akan tetapi kerugian dibagi bersama sesuai dengan proporsi modal yang disumbangkan. Tidak diperbolehkan menyatakan sebaliknya.
- Musyarakah permanen/tetap** : *musyarakah* di mana bagian mitra dalam modal *musyarakah* tetap sepanjang jangka waktu yang ditetapkan dalam akad tersebut
- Musyarakah menurun** : *musyarakah* dimana bank memberikan kepada pihak lainnya hak untuk membeli bagian sahamnya dalam *musyarakah* sehingga bagian bank menurun dan kepentingan saham mitra meningkat sampai menjadi pemilik tunggal dari keseluruhan modal.
- Muwakil** : pemberi kuasa/nasabah dalam transaksi *wakalah*
- Muzakki** : pembayar zakat

Nisab	: batas ukuran minimal, jika harta dan perniagaan seseorang telah melebihi batas ini maka zakat terhadap harta dan perniagaan wajib dibayarkan
Nisbah	: rasio atau perbandingan pembagian keuntungan (bagi hasil) antara <i>shahibul maal</i> dengan <i>mudharib</i>
Qardh (pinjaman)	: penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dengan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan dipersyaratkan dalam perjanjian
Qardhul hasan	: pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian yang bukan merupakan kelalaiannya, maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman
Riba	: pengambilan tambahan, baik dalam transaksi maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan ajaran Islam
Riqab	: hamba sahaya
Salam	: <i>bai' as-salam</i> ; jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran di muka dengan syarat-syarat tertentu
Salam paralel	: dua transaksi <i>bai' as-salam</i> antara bank dengan nasabah dan antara bank dengan pemasok atau pihak ketiga lainnya secara simultan
Shadaqah	: pemberian sesuatu kepada orang lain dengan mengharap ridho Allah semata
Shahibul maal	: pemilik dana
Sharf	: akad jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi valuta asing pada bank syariah hanya

dapat dilakukan untuk tujuan lindung nilai dan tidak diperkenankan untuk tujuan spekulatif

Taukil	: tugas
Ta'zir	: denda yang harus dibayar akibat penundaan pengembalian piutang, dana dari denda ini akan dikumpulkan sebagai dana sosial
Ujrah	: imbalan
Urbun	: jumlah yang dibayar oleh nasabah (pemesan) kepada penjual (yaitu pembeli mula-mula) pada saat pemesan membeli sebuah barang dari penjual. Jika nasabah atau pelanggan meneruskan penjualan dan pengambilan barang, maka <i>urbun</i> akan menjadi bagian dari harga.
Wadiah	: titipan nasabah yang harus dijaga dan harus dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian barang tersebut
Wadiah yad-dhamanah	: titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan
Wadiah yad-amanah	: titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan sampai barang titipan tersebut diambil oleh penitip
Wakalah	: akad pemberian kuasa dari <i>muwakil</i> (pemberi kuasa/nasabah) kepada <i>wakil</i> (penerima kuasa/bank) untuk melaksanakan suatu <i>taukil</i> (tugas) atas nama pemberi kuasa
Wakil	: penerima kuasa/bank
Zakat	: secara harfiah, zakat berarti keberkahan, penyucian, peningkatan, dan suburnya perbuatan baik. Disebut

zakat karena dia memberkahi kekayaan yang dizakatkan dan melindunginya. Di dalam syariah, zakat merupakan suatu kewajiban mengenai dana yang dibayarkan untuk tujuan khusus dan untuk kategori tertentu. Zakat merupakan jumlah tertentu yang telah ditentukan oleh Allah Yang Maha Kuasa untuk mereka yang berhak terhadap zakat sebagaimana telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Kata zakat juga digunakan untuk menunjukkan jumlah yang dibayarkan dari dana-dana yang terkena kewajiban zakat.

Perlakuan Akuntansi dalam Perbankan Syariah

Sistem Perbankan syariah berbeda dengan sistem perbankan konvensional. Oleh karena itu akan menimbulkan perbedaan dalam pencatatan atau perlakuan akuntansinya. Di samping diatur dalam PSAK no. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, secara rinci Akuntansi Perbankan Syariah diatur dalam PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia) .

Akuntansi Aktiva

Aktiva disusun berdasarkan urutan likuiditasnya. Rekening-rekening Aktiva Bank Syariah terdiri dari:

- | | |
|--|--|
| a. Kas | b. Penempatan pada Bank Indonesia |
| c. Giro pada Bank Lain | d. Penempatan pada Bank Lain |
| e. Efek (surat berharga) | f. Piutang: |
| | Piutang <i>murabahah</i> |
| | Piutang <i>Salam</i> |
| | Piutang <i>Istishna</i> |
| | Piutang pendapatan <i>Ijarah</i> |
| g. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> | h. Pembiayaan <i>musyarakah</i> |
| i. Pinjaman <i>Qardh</i> | j. Persediaan |
| k. Aset yg diperoleh untuk <i>Istishna</i> | l. Aset <i>Istishna</i> dlm penyelesaian |
| m. Penyertaan | n. Investasi lain |
| o. Aset tetap dan ak. penyusutan | p. Aktiva Lain-lain |

Perlakuan akuntansi untuk masing-masing akun aktiva adalah sebagai berikut:

a. Kas

Perlakuan akuntansi Kas pada Bank syariah sama dengan bank konvensional. Kas adalah mata uang kertas dan logam baik rupiah maupun mata uang asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

Transaksi kas diakui sebesar nilai nominal.

Perubahan-perubahan kas di Bank pada umumnya disebabkan oleh:

- a. Penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah
- b. Penyetoran dan penarikan dari rekening Bank yang bersangkutan di BI (Bank Indonesia)
- c. Penggunaan transaksi intern bank

Pencatatan/jurnal-jurnal yang diperlukan:

- Penerimaan setoran:

Contoh:

Diterima setoran Tuan Ali pada rekening tabungannya sebesar Rp45.000.000,00

Kas	Rp 45.000.000,00
Tabungan Tuan Aris	Rp 45.000.000,00

- Penarikan setoran:

Contoh:

Tuan Ali menarik Rp 5.000.000,00 dari rekening tabungannya

Tabungan Tuan Ali	Rp 5.000.000,00
Kas	Rp 5.000.000,00

Bank Syariah juga menggunakan *Petty Cash* (Kas Kecil) untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Perlakuan akuntansinya sama dengan yang diterapkan pada Bank

Konvensional ataupun perusahaan- perusahaan lainnya. Untuk ilustrasi dapat dilihat kembali di bahasan Akuntansi Perbankan Konvensional.

b. Penempatan pada Bank Indonesia

Penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari:

- 1) Giro *Wadiah* pada Bank Indonesia adalah saldo rekening giro bank syariah baik dalam rupiah maupun mata uang asing di Bank Indonesia.
 - merupakan salah satu alat likuid dan tidak dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan
 - yang wajib dipelihara adalah Giro Wajib Minimum (GWM)
 - termasuk didalamnya saldo *escrow account* (saldo untuk tujuan tertentu)
- 2) Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek berdasarkan prinsip *Wadiah* dan dilakukan oleh Bank syariah di saat mengalami kelebihan likuiditas

Transaksi **giro pada Bank Indonesia** diakui sebesar nilai nominal. Bila mendapat bonus atas penempatan pada Bank Indonesia, diakui pada saat diterima sebesar jumlah kas yang diterima

Jurnalnya:

Setoran pada Bank Indonesia:

Contoh:

Bank Syariah “Artha Unggul” menyetorkan Rp 5.000.000.000,00 tunai pada rekening gironya di Bank Indonesia

Giro pada Bank Indonesia	Rp 5.000.000.000,00
Kas/kliring	Rp 5.000.000.000,00

Bila penyetorannya pada sertifikat *Wadiah*, maka jurnalnya:

Sertifikat <i>Wadiah</i> pada Bank Indonesia	Rp 5.000.000.000,00
Giro pada Bank Indonesia	Rp 5.000.000.000,00

Bila dari sertifikat *Wadiah* mendapat bonus Rp 50.000.000,00, maka dibuat jurnal:

Giro pada Bank Indonesia	Rp 50.000.000,00
Pendapatan Operasi lainnya-bonus SWBI	Rp 50.000.000,00

Penarikan setoran:

Contoh:

Bank Syariah "Makmur Sekali" menarik Rp 3.000.000.000,00 tunai dari rekening gironya di Bank Indonesia

Kas/kliring	Rp 3.000.000.000,00
Giro pada Bank Indonesia	Rp 3.000.000.000,00

Selain menarik gironya pada bank Indonesia, sertifikat *Wadiah* senilai Rp 10.000.000.000,00 sudah jatuh tempo, maka dibuat jurnal berikut:

Giro pada Bank Indonesia	Rp 10.000.000.000,00
Sertifikat <i>Wadiah</i> pada Bank Indonesia	Rp 10.000.000.000,00

c. Giro pada bank lain

Adalah rekening giro bank syariah pada bank lain di dalam dan di luar negeri baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing dengan tujuan untuk menunjang transaksi antar bank.

Perbedaan perlakuan Giro pada bank lain di bank syariah adalah:

- Pendapatan jasa giro dari Bank Umum Konvensional digunakan untuk dana kebajikan (*Qardhul Hasan*)
- Bonus yang diterima dari Bank Umum Syariah diperlakukan sebagai pendapatan operasi lainnya

Transaksi giro pada Bank lain diakui sebesar nilai nominal.

Jurnalnya:

Setoran ke bank lain:

Contoh:

Bank Syariah "Amat Mulia" menempatkan giro pada Bank Artha sebesar Rp 250.000.000,00.

Giro pada Bank Artha	Rp 250.000.000,00
Kas/ kliring	Rp 100.000.000,00

Penarikan dari bank lain:

Contoh:

Bank "Amat Mulia" menarik Rp 100.000.000,00 dari rekening gironya di Bank Kita.

Kas/ kliring	Rp 100.000.000,00
Giro pada Bank Kita	Rp 100.000.000,00

Bila bank memiliki giro di bank lain, maka bank akan mendapatkan jasa. Perlakuan akuntansinya akan tergantung pada di Bank mana Giro tersebut ditempatkan:

- Pengakuan pendapatan bila ditempatkan pada bank konvensional

Contoh:

Bank Syariah "Sejahtera" memiliki rekening giro di Bank Umum "Mulia" sebesar Rp 100.000.000,00. Bank Mulia memberikan bunga tahunan sebesar 10%.

Giro pada bank lain	Rp 10.000.000,00
Rekening Dana Kebajikan	Rp 10.000.000,00

• Pengakuan pendapatan bila ditempatkan pada bank syariah

Giro pada bank lain	Rp 10.000.000,00
Pendapatan Bonus Giro	Rp 10.000.000,00

*) Dalam praktik kemungkinan dapat terjadi saldo negatif Bank syariah yang ditempatkan pada Bank lain. Apabila hal ini yang terjadi, maka perlakuan akuntansinya:

1. Pada saat terjadi saldo negatif

- Apabila giro ditempatkan di bank konvensional

Pada bulan April 2007 terjadi saldo negatif rekening giro Bank Syariah "Sejahtera" sebesar Rp 7.000.000,00 di Bank Umum "Mulia"

Jurnal yang harus dibuat:

Giro pada Bank lain	Rp 7.000.000,00
Pinjaman yang diterima-pinjaman lain	Rp 7.000.000,00

- Apabila giro ditempatkan di bank syariah lain

Giro pada Bank lain	Rp 7.000.000,00
Pinjaman yang diterima-pinjaman <i>Qardh</i>	Rp 7.000.000,00

2. Pada saat pelunasan saldo negatif

- Apabila giro ditempatkan di bank konvensional

Pada bulan Mei Bank Syariah "Sejahtera" melunasi gironya dan dikenai beban administrasi senilai Rp 5.000,00

Jurnalnya:

Pinjaman yang diterima-pinjaman lain	Rp 7.000.000,00
Beban non operasional	Rp 10.000,00
Giro pada Bank lain	Rp 7.010.000,00

- Apabila giro ditempatkan di bank syariah lain

Jurnalnya:

Pinjaman yang diterima-pinjaman <i>Qardh</i>	Rp 7.000.000,00
Beban non operasional	Rp 10.000,00
Giro pada Bank lain	Rp 7.010.000,00

d. Penempatan pada bank lain

Penempatan pada bank lain adalah penempatan dana bank pada bank lain baik dalam negeri maupun luar negeri dalam bentuk antara lain Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank, deposito *Mudharabah*, tabungan *Mudharabah*, giro *Wadiah* dan tabungan *Wadiah* yang dimaksudkan untuk optimalisasi pengelolaan dana. Penempatan pada bank lain diakui pada saat dilakukan penyerahan sebesar jumlah yang diserahkan.

Contoh:

Bank Syariah "Amanah" menempatkan dana dalam bentuk sertifikat deposito pada Bank Syariah "Aminah" sebanyak 200 lembar dengan nominal masing-masing Rp 1.000.000,00. Bagi hasil/bonus yang disetujui sebesar Rp 5.000.000,00 untuk jangka waktu 3 bulan.

Saat penempatan:

Penempatan pada bank syariah "Aminah"	Rp 200.000.000,00
Kas/kliring	Rp 200.000.000,00

Saat pengakuan pendapatan bagi hasil/bonus

Kas/giro pada bank syariah lain/kliring	Rp 5.000.000,00
Pendapatan bagi hasil/bonus	Rp 5.000.000,00

Saat jatuh tempo:

Kas/rekening/kliring	Rp 200.000.000,00
Penempatan pada bank syariah lain	Rp 200.000.000,00

e. Investasi pada Efek/Surat Berharga

Adalah investasi yang dilakukan pada surat berharga komersial antara lain: wesel ekspor, saham, obligasi, dan unit penyertaan atau reksadana yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Investasi pada surat berharga diperbolehkan sepanjang ada fatwa dari DSN (Dewan Syariah Nasional) dan perlakuan akuntansinya

sama mengikuti ketentuan umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu:

- a) PSAK no 31 tentang Akuntansi Perbankan
- b) PSAK no 50 tentang Akuntansi Investasi Efek tertentu
- c) PSAK no 13 tentang Akuntansi Investasi
- d) PAPI (Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia) tahun 2001
- e) Fatwa DSN No 32/DSN-MUI/IX/2002 dan No 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi syariah dan Obligasi syariah *Mudharabah*
- f) Fatwa DSN No 20/DSN-MUI/IX/2002 tentang Reksadana syariah

Contoh:

Pada tanggal 5 Mei 2007 Bank Syariah “Amin” membeli 1000 lembar saham PT A dengan nilai nominal Rp 20.000,00 kurs 110 dan komisi pialang 5% dan bagi hasil untuk periode ini sebesar Rp 3.000.000,00

❖ Pembelian investasi sementara secara tunai

Surat Berharga – saham PT A	Rp 23.100.000,00
Kas	Rp 23.100.000,00

❖ Pada saat pengakuan Bagi Hasil

Pendp. bagi hasil efek/SB yg akan diterima	Rp 3.000.000,00
Pendp. bagi hasil efek/Surat Berharga	Rp 3.000.000,00

❖ Pada saat penerimaan Bagi Hasil

Kas/kliring	Rp 3.000.000,00
Pendp. bagi hasil efek/ SB yg akan diterima	Rp 3.000.000,00

❖ Pada saat jatuh tempo/menjual

Kas/kliring	Rp 23.100.000,00
Efek/Surat berharga	Rp 23.100.000,00

f. Piutang

Jenis piutang yang disajikan di Neraca Bank syariah adalah:

i. Piutang *murabahah*

- ii. Piutang *Salam*
- iii. Piutang *Istishna*
- iv. Piutang pendapatan *Ijarah*

1) Piutang *murabahah*

Pengertian dari *murabahah* sudah dijelaskan pada pokok bahasan produk perbankan syariah. Di bagian ini akan dibahas perlakuan akuntansinya bila Bank bertindak selaku penjual .

Beberapa perlakuan akuntansi yang perlu diterapkan:

Contoh:

Bank Syariah "Amanah" membeli sepeda motor yang dipesan oleh Tuan Sumarno senilai Rp 12.000.000,00 pada tanggal 5 Pebruari 2006. Bank menetapkan uang muka sebesar Rp 2.000.000,00 dan cara mengangsur sisa pembayarannya diberikan pilihan sebagai berikut:

- a. diangsur selama 10 bulan dengan menambah margin 15%
- b. diangsur selama 20 bulan dengan menambah margin 35%

1. pada saat perolehan aktiva yang akan dijual

Aktiva <i>murabahah</i>	Rp 12.000.000,00
Kas/rekening <i>supplier</i>	Rp 12.000.000,00

Seandainya sebelum diserahkan ke nasabah terjadi penurunan nilai aktiva karena usang, rusak atau sebab yang lain, maka dibuat jurnal:

Kerugian penurunan nilai	Rp xxx
Aktiva <i>murabahah</i>	Rp xxx

Kerugian ini akan dibebankan sebagai beban lain-lain.

2. pada saat penyerahan uang muka (*urbun*)

Kas	Rp 2.000.000,00
Kewajiban lain-uang muka <i>murabahah</i>	Rp 2.000.000,00

Bila barang jadi dibeli dengan akad *murabahah*, dibuat jurnal

Kewajiban lain-uang muka <i>murabahah</i>	Rp 2.000.000,00
Piutang <i>murabahah</i>	Rp 2.000.000,00

3. pada saat terjadi akad piutang *murabahah*

Perlakuan akuntansinya tergantung pada periode pelunasan piutang dan pengakuan margin piutang *murabahah*. Piutang *murabahah* diakui sebesar harga perolehan ditambah margin (keuntungan) yang disepakati

- a. bila pelunasan piutang terjadi dalam satu periode akuntansi, jurnal pada saat akad (tanpa *urbun*) :

Piutang <i>murabahah</i>	Rp 13.800.000,00
Aktiva <i>murabahah</i>	Rp 12.000.000,00
Pendapatan Margin <i>murabahah</i>	Rp 1.800.000,00

- b. bila pelunasan piutang lebih dari satu periode akuntansi, maka pendapatan margin diakui secara proporsional selama periode piutang *murabahah*.

Jurnal dari contoh kasus di atas:

1. pada saat akad piutang *murabahah* (tanpa *urbun*)

Piutang <i>murabahah</i>	Rp 16.200.000,00
Aktiva <i>murabahah</i>	Rp 12.000.000,00
Margin <i>murabahah</i> yg ditangguhkan	Rp 4.200.000,00

Perhitungan margin yang diakui selama periode 2007 dari contoh kasus diatas adalah:

Margin selama 20 bulan = 35 % x Rp 12.000.000,00
= Rp 4.200.000,00

Margin Maret'06 - Desember'06 = 10/20x 4.200.000,00
= Rp 2.100.000,00

2. Jurnal pengakuan pendapatan :

Margin <i>murabahah</i> yg ditangguhkan	Rp 2.100.000,00
Pendapatan Margin <i>murabahah</i>	Rp 2.100.000,00

Seperti piutang lainnya, semakin lama jangka waktu pelunasannya, maka semakin besar resiko tidak tertagihnya. Oleh karena itu Bank Syariah harus membuat cadangan kerugian piutang ini.

Jurnalnya:

Kerugian Piutang <i>murabahah</i>	Rp xxx
Penyisihan Kerugian Piutang <i>murabahah</i>	Rp xxx

Penyajian di Neraca sama seperti penyajian piutang di perusahaan yang lain, yaitu:

Piutang <i>murabahah</i>	Rp xxx
Penyisihan Kerugian Piutang <i>murabahah</i>	<u>Rp xxx</u>
Piutang bersih	

3. Pada saat menerima pelunasan

Pelunasan Piutang *murabahah* biasanya dilakukan dengan cara mengangsur. Perhitungan dan perlakuan akuntansi bila pelunasan lebih dari satu periode akuntansi dan nasabah membayar angsuran tiap bulan. (mulai bulan Maret 2006 – Oktober 2007)

Perhitungan angsuran:

Aktiva <i>murabahah</i>	Rp 12.000.000,00
Margin <i>murabahah</i>	<u>Rp 4.200.000,00</u>
Sisa	Rp 16.200.000,00
Uang muka	<u>Rp 2.000.000,00</u>
Piutang <i>murabahah</i>	Rp 14.200.000,00

akan diangsur selama 20 bulan.

Angsuran tiap bulan = $14.200.000/20$ = Rp 710.000,00,

Angsuran tersebut terdiri dari

Angsuran pokok = $Rp 10.000.000,00/20$ = Rp 500.000,00

Margin Rp 210.000,00

Jurnalnya tiap kali nasabah mengangsur:

Kas	Rp 710.000,00	
Piutang <i>murabahah</i>		Rp 710.000,00

Margin <i>murabahah</i> yg ditangguhkan	Rp 210.000,00
Pendapatan Margin <i>murabahah</i>	Rp 210.000,00

Pada tiap akhir periode dibuat jurnal untuk mengetahui berapa jumlah Piutang *murabahah* yang sudah terkumpul (masuk dalam kategori lancar) dan berapa pendapatan margin *murabahah*

a) Piutang <i>murabahah</i> jatuh tempo	Rp xxx
Piutang <i>murabahah</i>	Rp xxx
b) Margin <i>murabahah</i> yg ditangguhkan	Rp xxx
Pendapatan Margin <i>murabahah</i>	Rp xxx

Dalam praktik sering terjadi pelunasan Piutang *murabahah* sebelum jatuh tempo . Bila digunakan contoh seperti diatas dan pelunasan dilakukan pada bulan Mei 2007 dan Tuan Sumarno mendapat potongan sebesar Rp 400.000,00, maka perhitungan dan perlakuan akuntansinya :

Perhitungan:

Piutang <i>murabahah</i>	Rp	14.200.000,00
Angsuran Piutang <i>murabahah</i> Maret '06- Mei '07= 15 x Rp 710.000,00		<u>10.650.000,00</u>
Sisa angsuran yang seharusnya diterima		3.550.000,00
Sisa angsuran pokok = 5 x Rp 500.000,00		<u>2.500.000,00</u>
Sisa margin		950.000,00
Potongan(Pengurang margin piutang <i>murabahah</i>)		<u>400.000,00</u>
Sisa margin yang diterima		550.000,00
Sisa angsuran pokok = 5 x Rp 500.000,00		<u>2.500.000,00</u>
Kas yang diterima saat pelunasan		3.050.000,00

a) potongan yang diberikan langsung dikurangkan pada keuntungan/ margin

Kas	Rp 3.050.000,00
Piutang <i>murabahah</i>	Rp 3.050.000,00
Margin <i>murabahah</i> yg ditangguhkan	Rp 550.000,00
Pendapatan Margin <i>murabahah</i>	Rp 550.000,00

- b) nasabah melunasi kewajibannya dahulu, kemudian Bank akan memberikan potongan

Kas	Rp 3.050.000,00
Piutang <i>murabahah</i>	Rp 3.050.000,00
Margin <i>murabahah</i> yg ditangguhkan	Rp 950.000,00
Pendapatan Margin <i>murabahah</i>	Rp 950.000,00
Beban operasional- pot. pelunasan <i>murabahah</i>	Rp 400.000,00
Kas/rekening.....	Rp 400.000,00

Bila ada denda, maka pada penerimaan denda dibuat jurnal:

Kas/Rekening.....	Rp xxx
Rekening simpanan <i>wadiah</i>	Rp xxx

2) Piutang *Salam*

Dalam hal ini Bank bertindak selaku pembeli

- a. Piutang *salam* diakui pada saat modal usaha *salam* dibayarkan atau dikeluarkan kepada penjual
- b. modal usaha *salam* dapat berupa kas maupun non-kas
 - bila berupa kas diukur sejumlah kas yang dibayarkan
 - bila berbentuk non-kas diukur sebesar nilai wajar atau nilai yang disepakati antara Bank dengan supplier

Contoh:

Bapak Zaenal adalah seorang petani kentang di daerah Pujon Kabupaten Malang, sedang mengajukan pembiayaan saprodi (sarana produksi) kepada BPRS “Bhakti Haji” Malang senilai Rp60.000.000,00 . Ladang yang dimiliki seluas 5 hektar dan diperkirakan akan menghasilkan kentang sebanyak 25 ton kentang yang bila dijual laku

Rp 3000,00/kg. Pak Zaenal akan menyerahkan 3 bulan yang akan datang.

Perhitungannya :

Harga jual kentang= 25 ton x Rp 3.000.000,00=	Rp 75.000.000,00
Pembiayaan	<u>Rp 60.000.000,00</u>
	Rp 15.000.000,00

Harga/kg kentang yang akan diterima:
$$\text{Rp } 60.000.000,00 / 25.000 = \text{Rp } 2.400,00$$

Perlakuan akuntansinya:

a. Pada saat penyerahan uang ke pak Zaenal

Piutang <i>salam</i>	Rp 60.000.000,00
Kas	Rp 60.000.000,00

b. Pada saat menerima barang dari pak Zaenal

1. hasil panen yang diserahkan sesuai akad

Persediaan – aktiva <i>salam</i>	Rp 60.000.000,00
Piutang <i>salam</i>	Rp 60.000.000,00

2. harga per kg kentang di pasar hanya Rp 2.200,00

Persediaan – aktiva <i>salam</i>	Rp 60.000.000,00
Kerugian <i>salam</i>	Rp 5.000.000,00
Piutang <i>salam</i>	Rp 55.000.000,00

c. bila bank hanya menerima hasil panen sebanyak 20 ton saja,

Persediaan – aktiva <i>salam</i>	Rp 48.000.000,00
Piutang <i>salam</i>	Rp 48.000.000,00

d. Bila Bank membatalkan pesanan dan penjual belum mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan Bank

Aktiva lain-lain-piutang <i>salam</i> kpd penjual	Rp 60.000.000,00
Piutang <i>salam</i>	Rp 60.000.000,00

- e. Bila Bank membatalkan pesanan dan penjual menyerahkan jaminan sebagai pengganti kas yang diterimanya

Dengan menggunakan contoh di atas dan bank membatalkan pesanan kentangnya. Sebagai gantinya pak Zaenal menyerahkan mobil Pick-up bekas

1. harga jaminan lebih rendah daripada nilai piutang *salam*
misal harga mobil pick-up Rp 50.000.000,00

Kas	Rp 50.000.000,00
Aktiva lain-lain-piut. <i>salam</i> kpd penjual	Rp 10.000.000,00
Piutang <i>salam</i>	Rp 60.000.000,00

2. harga jaminan lebih tinggi daripada nilai piutang *salam*
misal pick-up yang diserahkan dalam kondisi yg masih bagus dan laku dijual Rp 75.000.000,00. Selisih harga dikembalikan ke suplier

Kas	Rp 75.000.000,00
Rekening p Zaenal	Rp 15.000.000,00
Piutang <i>salam</i>	Rp 60.000.000,00

3) Piutang Istishna

Seperti telah dijelaskan pada bagian Produk Perbankan Syariah, *Istishna* hampir sama dengan *salam*, hanya saja produk yang dipesan harus dibuat terlebih dahulu.

Contoh:

Tuan Ma'ruf ingin membangun ruko di rumah tinggalnya yang hanya mempunyai luas 100 m², tetapi letaknya sangat strategis untuk usaha. Untuk keperluan tersebut, pada bulan April 2006 Tuan Ma'ruf mengajukan pembiayaan kepada Bank Syariah "Amanah" senilai Rp 500.000.000,00. Dana yang dimiliki sebagai pembayaran uang muka sebesar Rp 300.000.000,00. Bank memesan kepada kontraktor rekanan untuk memenuhi pesanan ini. Kontraktor sanggup membangun ruko tersebut selama 7 bulan. Biaya yang dikeluarkan Bank sebelum akad

ditanda tangani sebesar Rp 2.500.000,00. Pada akhir April 2006 akad ditanda tangani antara Bank dengan Tuan Ma'ruf dan Bank juga menanda tangani akad dengan kontraktor rekanan dengan harga yang disepakati senilai Rp 650.000.000,00.

Perlakuan akuntansinya:

1. pengakuan biaya pra akad

a. dikeluarkan biaya akad

Beban pra-akad yang ditangguhkan	Rp 2.500.000,00
Kas	Rp 2.500.000,00

b. pada saat ada kepastian transaksi *istishna*

- akad *istishna* ditanda tangani → beban dikapitalisasi ke aktiva

Aktiva <i>istishna</i> dalam penyelesaian	Rp 2.500.000,00
Beban pra-akad yang ditangguhkan	Rp 2.500.000,00

- bila akad *istishna* tidak jadi ditanda tangani (pesanan batal)

Beban pra akad	Rp 2.500.000,00
Beban pra-akad yang ditangguhkan	Rp 2.500.000,00

2. pada saat nasabah/Tuan Ma'ruf menyerahkan uang muka

Kas	Rp 300.000.000,00
Uang muka <i>istishna</i>	Rp 300.000.000,00

3. pada saat pengeluaran biaya untuk memproduksi/membangun

Bank menerima tagihan dari kontraktor rekanan senilai Rp200.000.000,00

Aktiva <i>istishna</i> dalam penyelesaian	Rp 200.000.000,00
Hutang	Rp 200.000.000,00

4. pada saat pembayaran utang

Hutang	Rp 200.000.000,00
--------	-------------------

Kas/rekening kontraktor	Rp 200.000.000,00
-------------------------	-------------------

Jurnal yang sama akan dibuat setiap kontraktor melakukan penagihan atas pekerjaan yang telah disepakati akadnya.

5. pada saat menagih ke pemesan

Bank menagih ke Tuan Ma'ruf atas pesanan rukonya yang sudah selesai 50 % sebesar Rp 300.000.000,00

Piutang <i>Istishna</i>	Rp 300.000.000,00
Termin <i>Istishna</i>	Rp 300.000.000,00

6. pada saat penerimaan pembayaran dari pemesan

Kas	Rp 300.000.000,00
Piutang <i>Istishna</i>	Rp 300.000.000,00

7. pada saat kontraktor rekanan menyerahkan ruko yang sudah jadi

Bila digunakan metode kontrak selesai/akad selesai

a. saat menerima barang dari kontraktor

Persediaan Barang <i>istishna</i>	Rp 802.500.000,00
Aktiva <i>istishna</i> dalam penyelesaian	Rp 802.500.000,00

b. saat penyelesaian akad dan penyerahan barang pesanan ke pesanan

Piutang <i>istishna</i>	Rp 500.000.000,00
Uang muka <i>istishna</i>	Rp 300.000.000,00
Persediaan brg <i>istishna</i>	Rp 652.500.000,00
Pendapatan <i>istishna</i>	Rp 147.500.000,00

4) **Piutang pendapatan *Ijarah***

Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas sebuah aset. Dalam hal ini Bank berlaku sebagai pihak yang menyewakan.

Contoh:

Bank menyewakan mobil Panther yang baru dibeli pada tanggal 1 Desember 2007 dengan harga sewa Rp 10.000.000,00/bulan. Sewa akan diterima setiap tanggal 7 di bulan berikutnya.

Jurnal tanggal 31 Desember 2007

Piutang pendapatan <i>Ijarah</i>	Rp 10.000.000,00
Pendapatan <i>Ijarah</i>	Rp 10.000.000,00

g. Pembiayaan *Mudharabah*

Salah satu produk bagi hasil dari Bank Syariah adalah *Mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka dan jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung pemilik dana kecuali indikasi kecurangan yang dilakukan pengelola dana (penyelewengan, penyalahgunaan dll).

Dalam hal ini Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*)

Perlakuan akuntansinya meliputi:

a. saat pembayaran pembiayaan *Mudharabah* dalam bentuk kas

Contoh:

Pada tanggal 5 Januari 2007, Bapak Hanif mengajukan pembiayaan untuk pembelian mesin *packaging* ke BPRS "Sejahtera". Mesin yang dibeli sebanyak 10 unit dengan harga Rp 3.500.000,00/buah. Akad disetujui pada tanggal 10 Januari 2007 dan bagi hasil disepakati 70 % untuk Bapak Hanif sebagai pengelola dana dan 30 % untuk Bank. Bapak Hanif akan mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu 9 bulan.

Jurnal saat penyerahan uang tunai

Piutang <i>mudharabah</i>	Rp 35.000.000,00
Kas	Rp 35.000.000,00

b. saat penyerahan pembiayaan *Mudharabah* berbentuk non kas

misalkan mesin tersebut disediakan oleh pihak bank

Piutang <i>mudharabah</i>	Rp 35.000.000,00
Mesin <i>packaging</i>	Rp 35.000.000,00

c. saat pengeluaran biaya dalam rangka akad *Mudharabah*

Biaya yang dikeluarkan untuk akad *Mudharabah* sebesar Rp750.000,00.

Uang Muka dlm rangka akad <i>Mudharabah</i>	Rp 750.000,00
Kas	Rp 750.000,00

d. pengakuan biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemberian pembiayaan *Mudharabah*

1. berdasarkan kesepakatan diakui sebagai biaya

Biaya akad <i>mudharabah</i>	Rp 750.000,00
Uang muka dlm rangka akad <i>Mudharabah</i>	Rp 750.000,00

2. berdasarkan kesepakatan diakui sebagai pembiayaan

Pembiayaan <i>mudharabah</i>	Rp 750.000,00
Uang muka dlm rangka akad <i>Mudharabah</i>	Rp 750.000,00

e. bila sebagian pembiayaan *mudharib* hilang sebelum mulai usaha yang bukan disebabkan oleh kelalaian *mudharib*

Sebuah mesin yang disediakan Bank ternyata rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi .

Kerugian Pembiayaan <i>mudharabah</i>	Rp 3.500.000,00
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	Rp 3.500.000,00

f. bila sebagian pembiayaan *mudharib* hilang setelah mulai usaha yang disebabkan oleh kelalaian *mudharib*

1. tidak dibuat jurnal dan
2. akan dikompensasi dengan pembagian bagi hasil pada waktu akad diakhiri

g. bila akad telah jatuh tempo dan *mudharib* belum membayar

Setelah jangka waktu 9 bulan, Bapak Hanif belum mengembalikan piutangnya

Pembiayaan <i>mudharabah</i> jatuh tempo	Rp 35.000.000,00
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	Rp 35.000.000,00

h. saat penerimaan keuntungan *mudharabah*

Pada tanggal 30 September, *Mudharib* melaporkan adanya keuntungan bersih sebesar Rp 15.000.000,00

Piutang pendapatan bagi hasil	Rp 4.500.000,00
Pendapatan bagi hasil	Rp 4.500.000,00

Perhitungan:

Keuntungan bersih <i>Mudharib</i>	Rp 15.000.000,00
Bagi hasil bagian Bank	
30 % x Rp 15.000.000,00 =	Rp 4.500.000,00

Pada saat menerima bagi hasil secara tunai

Kas	Rp 4.500.000,00
Piutang pendapatan bagi hasil	Rp 4.500.000,00

i. pelunasan pembiayaan *mudharabah*

Pada tanggal 5 Oktober Bapak Hanif melunasi pembiayaan *mudharabah*

Kas	Rp 35.000.000,00
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	Rp 35.000.000,00

h. Pembiayaan *musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* hampir sama dengan pembiayaan *mudharabah*. Perbedaannya adalah dalam pembiayaan *mudharabah* keseluruhan dana berasal dari Bank, sedangkan kalau pembiayaan *musyarakah* baik Bank maupun nasabah sama-sama menyediakan dana untuk menjalankan usaha (patungan) baik usaha yang sudah berjalan maupun usaha yang baru.

Cara pengembalian pembiayaan *musyarakah* oleh mitra:

- a. dikembalikan secara bertahap baik pokok pinjaman maupun bagi hasilnya
- b. dikembalikan sekaligus baik pokok pinjaman maupun bagi hasilnya pada akhir masa akad (jatuh tempo)

Bentuk pembiayaan *musyarakah*:

- a. kas atau setara kas
- b. aktiva non kas berwujud
- c. aktiva non kas tidak berwujud (lisensi, paten dll)

Jenis pembiayaan *musyarakah*:

- a. pembiayaan *musyarakah* permanen terjadi jika bagian modal dari setiap mitra (bank dan nasabah) ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap
- b. pembiayaan *musyarakah* menurun terjadi bila bagian modal dari Bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra (nasabah), sehingga makin lama dana(modal) dari Bank Bank makin lama makin menurun dan pada akhir masa akad, maka nasabah sudah mampu membiayai sendiri usahanya tanpa bergantung pada Bank.

Pembagian Laba/Rugi

- a. Bila dalam usaha mendapat laba:
 1. laba dibagi secara proporsional sesuai dengan prosentase modal
 2. laba dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati
- b. Bila dalam usaha timbul rugi → Rugi ditanggung secara proporsional sesuai dengan prosentase modal

Contoh

Bank syariah "Barokah" di Malang pada tanggal 1 Juli telah menandatangani akad *musyarakah* dengan PT " Sahabat" untuk melakukan usaha pembuatan oleh-oleh khas Malang. Dalam usaha tersebut Bank menyetor :

- a. kas senilai Rp 300.000.000,00
- b. mesin *oven* sebanyak 7 unit dengan nilai pasar Rp 5.000.000,00
- c. mesin *vacuum* sebanyak 3 unit dengan nilai pasar Rp15.000.000,00
- d. mesin *packaging* 5 unit dengan harga wajar Rp 4.000.000,00

PT " Sahabat" menyetor kas senilai Rp 200.000.000,00 dan keahlian para karyawannya. Pembagian Keuntungan dan rugi yang timbul disepakati dibagi/ditanggung secara proporsional sesuai dengan perbandingan modal.

Jurnalnya:

- a. saat penyerahan uang tunai dan aktiva non kas

Pembiayaan <i>musyarakah</i>	Rp 400.000.000,00
Kas	Rp 300.000.000,00
Aktiva non-kas	Rp 100.000.000,00

- b. saat pengeluaran biaya dalam rangka akad *musyarakah*

Biaya yang dikeluarkan untuk akad *musyarakah* sebesar Rp2.500.000,00.

UM dlm rangka akad <i>musyarakah</i>	Rp 2.500.000,00
Kas	Rp 2.500.000,00

- c. pengakuan biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemberian pembiayaan *musyarakah*

1. berdasarkan kesepakatan diakui sebagai biaya

Biaya akad <i>musyarakah</i>	Rp 2.500.000,00
UM dalam rangka akad <i>musyarakah</i>	Rp 2.500.000,00

2. berdasarkan kesepakatan diakui sebagai pembiayaan

Pembiayaan <i>musyarakah</i>	Rp 2.500.000,00
UM dlm rangka akad <i>musyarakah</i>	Rp 2.500.000,00

d. saat penerimaan keuntungan *musyarakah*

Pada tanggal 30 September, mitra (nasabah) menyerahkan bagian keuntungan Bank Rp 10.000.000,00

Kas	Rp 10.000.000,00
Keuntungan <i>musyarakah</i>	Rp 10.000.000,00

e. pengakuan kerugian *musyarakah*

Bila dalam usaha tersebut timbul kerugian sebesar Rp7.500.000,00, kerugian tersebut akan ditanggung oleh Bank dengan perbandingan modal yang disetorkan, yaitu:

Modal Bank	Rp 400.000.000,00
Modal nasabah (mitra)	Rp 200.000.000,00

Perbandingannya adalah 4:2 atau 2:1

Jurnalnya:

Kerugian <i>Musyarakah</i>	Rp 5.000.000,00
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	Rp 5.000.000,00

f. pelunasan modal *musyarakah* dengan mengalihkan pembiayaan kepada mitra *musyarakah* lainnya

Pada tanggal 30 Desember 2007, mitra *musyarakah* melunasi sebesar Rp 200.000.000,00

Kas	Rp 200.000.000,00
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	Rp 200.000.000,00

- g. Bila yang dikembalikan adalah aktiva non kas dan ternyata ada penurunan nilai wajar aktiva tersebut

Misalkan yang dikembalikan adalah aset berupa:

- a. mesin *oven* nilai pasar menjadi Rp 4.000.000,00
- b. mesin *vacuum* nilai pasar sekarang Rp 14.000.000,00
- c. mesin *packaging* harga wajarnya Rp 3.500.000,00

Jurnalnya:

Aktiva non kas	Rp 77.500000,00
Kerug. penyelesaian pembiy. <i>musyarakah</i>	Rp 22.500.000,00
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	Rp 100.000.000,00

Bila aktiva non kas ternyata harga wajarnya lebih tinggi, yaitu:

- a. mesin *oven* nilai pasar menjadi Rp 5.500.000,00
- b. mesin *vacuum* nilai pasar sekarang Rp 16.000.000,00
- c. mesin *packaging* harga wajarnya Rp 5.000.000,00

Jurnalnya:

Aktiva non kas	Rp 110.500000,00
Keuntungan penyel. Pembiy. <i>musyarakah</i>	Rp 10.500.000,00
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	Rp 100.000.000,00

Untuk pelunasan modal berikutnya baik berupa kas maupun non kas jurnalnya sama dengan jurnal f dan g.

i. **Pinjaman *Qardh***

Pinjaman *Qardh* merupakan pinjaman yang tidak mensyaratkan adanya imbalan , tetapi peminjam diperkenankan untuk memberi imbalan. Bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi. Jika pada akhir periode peminjam dana *Qardh* tidak dapat mengembalikan dana, maka pinjaman *Qardh* dapat diperpanjang atau dihapus bukukan.

Contoh:

Ibu Aminah adalah penjual bubur dan nasi lalapan, mengajukan pinjaman *Qardh* ke BPRS “Bhakti Nusa” Malang sebesar Rp 2.500.000,00 untuk

modal kerjanya. Biaya administrasi yang dibebankan Rp 100.000,00 dan akan dikembalikan 3 bulan lagi.

Perlakuan akuntansinya:

- a. pada saat realisasi Pinjaman *Qardh*

Pinjaman <i>Qardh</i>	Rp 2.500.000,00
Kas	Rp 2.500.000,00

- b. pada saat penerimaan biaya administrasi

Kas	Rp 100.000,00
Pendpt. Operasional lain- pendpt adm.pinjaman <i>Qardh</i>	Rp 100.000,00

- c. pada saat penerimaan bonus/imbalan

Karena dagangannya laris, Ibu Aminah memberi imbalan sebesar Rp 150.000,00

Kas	Rp 150.000,00
Pendpt. Operasional lain- pendpt adm.pinjaman <i>Qardh</i>	Rp 150.000,00

- d. pada saat pelunasan pinjaman/cicilan

Setelah 3 bulan Pinjaman *Qardh* dilunasi

Kas	Rp 2.500.000,00
Pinjaman <i>Qardh</i>	Rp 2.500.000,00

- e. pada saat menghapus Pinjaman *Qardh*

Misalkan sebelum dilunasi, ibu Aminah sakit dan menyatakan tidak sanggup membayar pinjamannya

Cad. Penyisihan kerugian pinjaman <i>Qardh</i>	Rp 2.500.000,00
Pinjaman <i>Qardh</i>	Rp 2.500.000,00

Seperti pada bank konvensional, Bank syariah juga diwajibkan membuat Penyisihan atas Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Penyisihan ini dibuat untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana ke dalam aktiva produktif.

Aktiva produktif di atas adalah aktiva yang paling besar memberikan sumbangan pendapatan bagi Bank, tetapi juga merupakan aset yang paling berisiko. Risiko dari kredit yang disalurkan dapat dilihat dari posisi tingkatan kolektibilitasnya yang terbagi menjadi:

1. Kolektibilitas Lancar
2. Kolektibilitas kurang Lancar
3. Diragukan dan
4. Macet

Untuk mengantisipasi resiko, maka Bank Syariah diwajibkan membentuk cadangan/ penyisihan terhadap aktiva produktif sesuai dengan klasifikasinya. Untuk memperbaiki Kualitas Aktiva Produktif yang pada akhirnya memperbaiki kinerja, maka Bank dapat menghapus bukukan kredit yang kolektibilitasnya tergolong Macet dari Neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah.

Nasabah dalam pengertian ini adalah:

- a. Pembeli pada transaksi *murabahah*
- b. Penjual/produsen pada transaksi *salam*
- c. *Mudharib* pada transaksi *mudharabah*
- d. Mitra pada transaksi *musyarakah*
- e. Penyewa pada transaksi *Ijarah*
- f. Peminjam pada transaksi *Qardh*

Pada akhir periode, Bank akan membuat jurnal penyesuaian untuk tiap-tiap jenis aktiva produktif.

a. Piutang *murabahah*

1. Pada saat pembentukan penyisihan kerugian aktiva produktif

Beban penyisihan kerug. aktiva produktif- piutang <i>murabahah</i>	Rp xxx
Penyisihan kerugian aktiva produktif	Rp xxx

2. Bila piutang dianggap *non-performing*

pembatalan pengakuan pendapatan *margin*

- Pendapatan margin	Rp xxx
Margin <i>murabahah</i> ditangguhkan jatuh tempo	Rp xxx
- Tagihan kontinjensi-pendpt dlm penyelesaian	Rp xxx
Rekening lawan	Rp xxx

Bank harus menambah pembentukan penyisihan piutang karena penurunan kualitas aktiva produktifnya

Jurnal yang dibuat sama dengan jurnal 1 yaitu:

Beban penyisihan kerug. aktiva produktif- piutang <i>murabahah</i>	Rp xxx
Penyisihan kerugian aktiva produktif	Rp xxx

3. penerimaan ganti rugi perusahaan asuransi/lembaga penjamin

Kas	Rp xxx
Pendpt.op.utama- ganti rugi perusahaan asuransi/lembaga penjamin	Rp xxx

4. pada saat penghapusan aktiva produktif

Perusahaan asuransi bila mengganti biasanya tidak 100%, oleh karena itu Bank tetap menanggung kerugian bila ada piutang yang *non performing*, sehingga bila ada piutang yang dihapus buku tetap mengurangi penyisihan kerugian aktiva produktif

Penyisihan kerugian aktiva produktif	Rp xxx
Margin yg ditangguhkan	Rp xxx
Pendpt.op.utama- ganti rugi perusahaan asuransi/lembaga penjamin	Rp xxx
Agunan yg diambil-alih	Rp xxx
Piutang <i>murabahah</i>	Rp xxx
Memorial piutang <i>murabahah</i> yang dihapus-buku	Rp xxx
Rek.lawan Memorial piutang <i>murabahah</i> yang dihapus-bukukan	Rp xxx

5. Pada saat menerima setoran dari nasabah yang telah dihapus-bukukan

- Penerimaan setoran

Kas	Rp xxx
Penyisihan kerugian aktiva produktif	Rp xxx

- pengakuan pendapatan marjin (bila setoran dari nasabah melebihi saldo pokok

Kas	Rp xxx
Pendapatan marjin	Rp xxx

Jika piutang *murabahah* yang dihapusbukukan sudah diganti oleh perusahaan asuransi/lembaga penjamin

Kas	Rp xxx
Penyisihan kerugian aktiva produktif	Rp xxx *)
Kas	Rp xxx**)

*) sebesar bagian Bank

**) sebesar bagian perusahaan asuransi

Rek.lawan Memorial piutang <i>murabahah</i>	Rp xxx
yang dihapus-bukukan	
Memorial piutang <i>murabahah</i> yang dihapus-buku	Rp xxx

b. Piutang *Salam*

pembentukan penyisihan tambahan karena penurunan kualitas aktiva produktifnya

Beban penyisihan kerug. aktiva produktif-	Rp xxx
Piutang <i>Salam</i>	
Penyisihan kerugian aktiva produktif	Rp xxx

c. Piutang *Istishna*

Perlakuan akuntansinya hampir sama dengan piutang *murabahah*

1. Pembatalan pengakuan pendapatan bersih *Istishna*

Pendapatan bersih <i>Istishna</i>	Rp xxx
Marjin <i>Istishna</i> ditangguhkan	Rp xxx
Tagihan kontinjensi-pendpt dlm penyelesaian	Rp xxx
Rekening lawan	Rp xxx

- Bank harus menambah pembentukan penyisihan piutang karena penurunan kualitas aktiva produktifnya

Beban penyisihan kerug. aktiva produktif- Piutang <i>Istishna</i>	Rp xxx
Penyisihan kerugian aktiva produktif	Rp xxx

2. pada saat penghapusan aktiva produktif

Penyisihan kerugian aktiva produktif	Rp xxx
Marjin yg ditangguhkan	Rp xxx
Pendpt.op.utama- ganti rugi perusahaan asuransi/lembaga penjamin	Rp xxx
Agunan yg diambil-alih	Rp xxx
Piutang <i>Istishna</i>	Rp xxx
Memorial piutang <i>murabahah</i> yang dihapus-buku	Rp xxx
Rek.lawan Memorial piutang <i>murabahah</i> yang dihapus-buku	Rp xxx

3. Pada saat menerima setoran dari nasabah yang telah dihapus-buku

- Penerimaan setoran

Kas	Rp xxx
Penyisihan kerugian aktiva produktif	Rp xxx

- pengakuan pendapatan marjin (bila setoran dari nasabah melebihi saldo pokok)

Kas	Rp xxx
Pendapatan marjin	Rp xxx

Jika piutang *Istishna* yang dihapusbukukan sudah diganti oleh perusahaan asuransi/lembaga penjamin

Kas	Rp xxx
Penyisihan kerugian aktiva produktif	Rp xxx *)
Kas	Rp xxx**)

*) sebesar bagian Bank

**) sebesar bagian perusahaan asuransi

Rek.lawan Memorial piutang <i>murabahah</i>	Rp xxx
yang dihapus-bukukan	
Memorial piutang <i>murabahah</i> yang dihapus-buku	Rp xxx

d. Piutang *Mudharabah/musyarakah*

Perlakuan akuntansinya hampir sama dengan piutang *murabahah* dan Piutang *Istishna* yang terdiri dari :

1. pembatalan pengakuan pendapatan bagi hasil yang telah diakui

Pendapatan Bagi Hasil	Rp xxx
Piutang Bagi Hasil	Rp xxx
Tagihan kontinjensi-pendpt dlm penyelesaian	Rp xxx
Rekening lawan	Rp xxx

- Bank harus menambah pembentukan penyisihan piutang karena penurunan kualitas aktiva produktifnya

Beban penyisihan kerug. aktiva produktif- piutang <i>mudharabah/musyarakah</i>	Rp xxx
Penyisihan kerugian aktiva produktif	Rp xxx

2. pada saat penghapusan aktiva produktif

Penyisihan kerugian aktiva produktif	Rp xxx
Ganti rugi aktiva produktif yg diterima	Rp xxx
Perusahaan asuransi/lembaga penjamin	
Agunan yg diambil-alih	Rp xxx
Piutang <i>mudharabah/musyarakah</i>	Rp xxx

3. Pada saat menerima setoran dari nasabah yang telah dihapusbukkan

- Penerimaan setoran

Kas	Rp xxx
Penyisihan kerugian aktiva produktif	Rp xxx

- pengakuan pendapatan marjin (bila setoran dari nasabah melebihi saldo pokok

Kas	Rp xxx
Pendapatan bagi hasil	Rp xxx

Jika piutang *murabahah/musyarakah* yang dihapusbukkan sudah diganti oleh perusahaan asuransi/lembaga penjamin

Kas	Rp xxx
Penyisihan kerugian aktiva produktif	Rp xxx *)
Kas	Rp xxx**)

*) sebesar bagian Bank

***) sebesar bagian perusahaan asuransi

Rek.lawan Memorial piutang <i>murabahah</i>	Rp xxx
yang dihapusbukkan	
Memorial piutang <i>murabahah</i> yang dihapus-buku	Rp xxx

j. **Persediaan**

Pada bank Syariah pengertian persediaan adalah aktiva non-kas yang tersedia untuk:

- dijual dengan akad *murabahah*
- diserahkan sebagai bagian modal bank dalam akad pembiayaan *mudharabah/musyarakah*
- disalurkan dalam akad *Salam* atau *Salam Paralel*
- aktiva *istishna* yang telah selesai tetapi belum diserahkan bank kepada pembeli akhir

Yang tidak termasuk dalam pengertian persediaan di bank Syariah adalah:

1. aktiva *istishna* dalam penyelesaian
2. aktiva tetap yang digunakan oleh Bank
3. aktiva *ijarah*

Perlakuan Akuntansinya

1. Aktiva *murabahah*

Dalam praktik perbankan syariah, pembelian barang dengan akad *murabahah* dilakukan sendiri oleh nasabah. Oleh karena itu pada waktu penanda tangan akad harus ada surat pernyataan dari Bank untuk mewakili pembelian barang. Bila barang dibeli sendiri oleh Bank, maka perlakuan akuntansinya dicontohkan di bawah ini.

Contoh:

Bank Syariah "*Ghoniya*" membeli sepeda motor sebanyak 10 unit @ Rp 11.000.000,00 yang akan dijual dengan akad *murabahah*. Uang muka sebesar 20%. Selama belum terjual, sepeda motor tersebut masih berada/dititipkan di *dealer*.

Jurnalnya:

a. saat pembayaran ke dealer

Persediaan-aktiva <i>murabahah</i>	Rp 110.000.000,00
Kas	Rp 110.000.000,00

b. saat penjualan

Pada bulan September terjual 3 unit dgn harga @ Rp12.500.000,00

Piutang <i>murabahah</i>	Rp 37.500.000,00
Persediaan-aktiva <i>murabahah</i>	Rp 33.000.000,00
Margin <i>murabahah</i> yg ditangguhkan	Rp 4.500.000,00

c. Bila terjadi penurunan nilai

Pada bulan Desember, sepeda motor yang tersisa tinggal 2 unit. Karena ada model baru, maka harga pokok sepeda motor ini turun menjadi Rp 10.250.000,00

Beban selisih penilaian akt. *murabahah* Rp 1.500.000,00
 Selisih penilaian persediaan akt. *Murabahah* Rp 1.500.000,00

2. Persediaan dalam transaksi *mudharabah/musyarakah*

Pada saat aktiva non kas diserahkan dalam pembiayaan *mudharabah/ musyarakah*

Dalam akad *musyarakah* yang telah ditanda tangani dengan Ibu Zulaikha seorang pengusaha garmen, Bank menyerahkan 2 buah mesin Singer model terbaru yang mempunyai harga pasar @ Rp12.000.000,00

Piutang <i>mudharabah/musyarakah</i>	Rp 24.000.000,00
Persediaan –aktiva non kas <i>mudharabah/musyarakah</i>	Rp 24.000.000,00

3. Barang pesanan *salam*

Pada saat Bank menerima barang dari penjual sesuai akad

Bank Syariah menerima beras organik dari nasabah binaannya setelah akad *salam* berakhir. Beras yang diterima sebanyak 10 ton dengan harga kesepakatan Rp 4.900,00/kg dan bila dijual harga pasarnya Rp 6.200,00/kg

Persediaan-barang pesanan <i>salam</i>	Rp 49.000.000,00
Piutang <i>salam</i>	Rp 49.000.000,00

Pada saat penjualan persediaan dalam transaksi salam paralel

Hutang <i>Salam</i>	Rp 62.000.000,00
Persediaan barang pesanan <i>Salam</i>	Rp 49.000.000,00
Pendapatan bersih <i>Salam</i> paralel	Rp 13.000.000,00

4. Persediaan dalam transaksi *Istishna*

Pada saat penerimaan aktiva *Istishna* yang telah selesai dikerjakan kontraktor rekanan

Ruko yang dipesan Tuan Ali senilai Rp 800.000.000,00 telah selesai dikerjakan kontraktor rekanan. Akad yang disepakati bernilai Rp700.000.000,00.

Persediaan-aktiva <i>Istishna</i>	Rp 700.000.000,00
Aktiva <i>Istishna</i> dlm penyelesaian	Rp 700.000.000,00

Pada saat penyerahan aktiva *Istishna* kepada pembeli akhir (nasabah Bank).

Pencatatannya tergantung pada perlakuan pembayarannya.

a. Jika sistem pembayaran secara tangguh (sekali saat penyerahan aktiva *Istishna*)

Piutang <i>Istishna</i>	Rp 800.000.000,00
Persediaan-aktiva <i>Istishna</i>	Rp 700.000.000,00
Margin <i>Istishna</i> yg ditangguhkan	Rp 100.000.000,00

b. Sistem pembayaran dengan menggunakan metode prosentase penyelesaian .

Termin <i>Istishna</i>	Rp xxx
Persediaan-aktiva <i>Istishna</i>	Rp xxx
Pendapatan bersih <i>Istishna</i>	Rp xxx

c. Sistem pembayaran dengan menggunakan metode pembayaran di muka

Hutang <i>Istishna</i>	Rp xxx
Persediaan-aktiva <i>Istishna</i>	Rp xxx
Pendapatan bersih <i>Istishna</i>	Rp xxx

k. **Aset *Istishna* dlm penyelesaian**

Aktiva *Istishna* dalam penyelesaian adalah Aktiva *Istishna* yang masih dalam proses pembuatan

a. pengakuan biaya pra-akad

Aktiva <i>Istishna</i> dalam penyelesaian	Rp xxx
---	--------

Beban pra akad yang ditangguhkan Rp xxx

b. pengeluaran biaya untuk memproduksi

Aktiva <i>Istishna</i> dalam penyelesaian	Rp xxx
Hutang <i>Istishna</i>	Rp xxx

c. Penyerahan barang *Istishna* dari kontraktor rekanan
(menggunakan metode akad selesai)

Persediaan	Rp xxx
Aktiva <i>Istishna</i> dalam penyelesaian	Rp xxx

I. Penyertaan Pada Entitas Lain

Adalah penanaman dana bank syariah dalam bentuk kepemilikan saham pada lembaga keuangan syariah yang lain untuk tujuan investasi jangka panjang baik dalam rangka pendirian maupun ikut serta dalam operasi lembaga keuangan lain dalam rangka restrukturisasi pembiayaan atau lainnya. Perlakuan akuntansinya sama penyertaan saham di Bank konvensional.

Metode Akuntansi untuk mencatat penyertaan adalah:

- Metode Biaya digunakan bila jumlah penyertaan kurang dari 20 %
- Metode Ekuitas digunakan bila jumlah penyertaan sama atau lebih dari 20 %

Pencatatan yang dibutuhkan:

saat melakukan penyertaan

Bank “Harmoni” membeli 20 % saham berhak suara (100.000 lembar) Asuransi Takaful”X” seharga Rp 2.000.000.000,00.

Penyertaan pada entitas lain	Rp 2.000.000.000,00
Kas	Rp 2.000.000.000,00

saat perusahaan/investee mengumumkan laba/rugi

Pencatatan yang dilakukan tergantung metode yang dipakai.

Contoh:

Asuransi Takaful "X" mengumumkan laba periode 2007 sebesar Rp300.000.000,00

Metode Biaya

Tidak ada jurnal

Metode Ekuitas

Penyertaan pada entitas lain	Rp 60.000.000,00
Pendapatan dividen	Rp 60.000.000,00

Bila perusahaan rugi Rp 50.000.000,00

Rugi dividen	Rp 10.000.000,00
Penyertaan pada entitas lain	Rp 10.000.000,00

saat penerimaan dividen

Dividen yang dibagikan dari laba periode 2007 sebesar Rp 400,00 per lembar

Metode Biaya

Kas	Rp 40.000.000,00
Pendapatan Dividen	Rp 40.000.000,00

Metode Ekuitas

Kas	Rp 40.000.000,00
Penyertaan pada entitas lain	Rp 40.000.000,00

saat pelepasan sebagian/seluruh saham

Bank menjual 20.000 lembar saham Asuransi Takaful "X" pada nilai nominal

Kas	Rp 400.000.000,00
Investasi pada entitas lain	Rp 400.000.000,00

Dalam pelepasan Penyertaan pada entitas lain sering terjadi terjual tidak pada nilai nominal, tetapi lebih besar atau lebih kecil. Cara pencatatannya sama dengan pelepasan saham biasa dengan mengakui adanya laba atau rugi yang timbul.

m. Aset Tetap dan akumulasi penyusutan

Pengertian Aktiva Tetap yaitu aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi dan tidak akan dijual dalam jangka pendek dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. . Aktiva Tetap dicatat sebesar Harga Perolehan. Dalam industri Perbankan kelompok Aktiva Tetap dijadikan satu dengan Inventaris (ATI) yang menurut aturan Bank Indonesia maksimum sebesar 5 % dari Total Asset.

Cara perolehan Aktiva Tetap bermacam-macam

- *Pembelian Tunai*

Contoh:

Bank Syariah “Artha Sentosa” Cabang Malang membeli tanah seluas 500 meter seharga Rp 1.500.000,00 /m². Biaya yang dikeluarkan agar tanah siap dibangun sebesar Rp 2.500.000,00, komisi makelar 5 % dari harga tanah, sedangkan biaya notaris untuk pengurusan surat-surat tanah Rp 10.000.000,00

Harga Perolehan Tanah yang harus dicatat terdiri dari:

Harga Tanah	Rp 750.000.000,00
Komisi makelar (5%)	Rp 37.500.000,00
Biaya perataan tanah	Rp 2.500.000,00
Biaya notaris	<u>Rp 10.000.000,00</u>
	Rp 800.000.000,00

Jurnalnya:

Aktiva Tetap & Inventaris- Tanah	Rp 800.000.000,00
Kas	Rp 800.000.000,00

Bila aktiva tetap berasal dari sumbangan:

BPRS "X" menerima sumbangan dari Dinas Koperasi berupa sepeda motor yang mempunyai harga wajar Rp 8.000.000,00 sebagai sarana untuk operasi dari dana program Dinkop untuk KOPONTREN yang dipercayakan kepada BPRS untuk mengelolanya.

Aktiva tetap	Rp xxx
Modal Sumbangan	Rp xxx

Perlakuan untuk pertukaran aktiva, pembebanan penyusutan termasuk metodenya, perbaikan/reparasi total, penghentian, penjualan dll perlakuannya sama dengan aktiva yang dimiliki Bank Konvensional ataupun perusahaan pada umumnya.

n. Aktiva Lain-lain

adalah aktiva yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam pos-pos sebelumnya dan tidak cukup material disajikan sebagai pos tersendiri.

Komponen Aktiva lain-lain antara lain:

1. Aktiva tetap yang tidak digunakan
2. Beban dibayar dimuka
3. Beban yang ditangguhkan
4. Agunan yang diambil-alih
5. Emas batangan
6. *Commemorative coin*
7. Uang muka pajak

Contoh perlakuan Akuntansi dari Aktiva tetap yang tidak digunakan.

1. Sebuah kendaraan Kijang milik Bank Syariah "Amanah" sudah tidak digunakan lagi karena dianggap boros bahan bakar. Harga perolehan mobil ini Rp 100.000.000,00 dan sudah disusutkan sebesar Rp55.000.000,00. Harga pasar mobil ini hanya Rp 35.000.000,00.

Jurnalnya:

Aktiva lain-lain	Rp 35.000.000,00
Akumulasi penyusutan	Rp 55.000.000,00
Beban penurunan nilai aktiva	Rp 10.000.000,00
Aktiva Tetap (kendaraan)	Rp 100.000.000,00

Satu bulan kemudian bank memutuskan untuk menjual mobil tersebut dan ternyata laku senilai Rp 30.000.000,00.

Kas	Rp 30.000.000,00
Rugi penjualan aktiva	Rp 5.000.000,00
Aktiva lain-lain	Rp 35.000.000,00

2. Bank telah menyita rumah dan bangunan yang berharga wajar Rp 200.000.000,00 milik seorang nasabah dengan akad pembiayaan *murabahah* yang sudah jatuh tempo 3 tahun lalu. Piutang nasabah yang tersisa masih sebesar Rp 350.000.000,00 dan marjinnnya Rp75.000.000,00

(kolektibilitas macet)

Jurnalnya:

Agunan yang diambil-alih	Rp 200.000.000,00
Marjin <i>murabahah</i> yang ditangguhkan	Rp 75.000.000,00
Penyisihan kerugian piutang <i>murabahah</i>	Rp 75.000.000,00
Piutang <i>murabahah</i>	Rp 350.000.000,00

Bila aktiva tetap ini dijual dan laku hanya Rp 190.000.000,00

Jurnalnya:

Kas	Rp 190.000.000,00
Rugi penjualan agunan yg diambil alih	Rp 10.000.000,00
Aktiva lain-lain- agunan yg diambil alih	Rp 200.000.000,00

Akuntansi Kewajiban

Kewajiban Bank terdiri dari:

a. Kewajiban segera	b. Simpanan:
	- giro <i>wadiah</i>
	- tabungan <i>wadiah</i>
c. Simpanan dari bank lain:	d. Kewajiban lain:
- giro <i>wadiah</i>	i. utang <i>salam</i>
- tabungan <i>wadiah</i>	ii. utang <i>isthisna</i>
e. Kewajiban kepada Bank lain	f. Pembiayaan yang diterima
g. Keuntungan yg sdh diumumkan tetapi blm diberikan	h. Utang Pajak
i. Utang lainnya	j. Pinjaman subordinasi

Kewajiban segera

Adalah kewajiban bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat atau perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Kewajiban segera disajikan sebesar jumlah kewajiban Bank

Contohnya :

- a. Dana transfer/kiriman uang masuk/keluar,
- b. penerimaan pajak melalui Bank yg masih harus disetor,
- c. saldo rekening tabungan atau giro yang sudah jatuh tempo tetapi belum diambil oleh pemilik rekening,
- d. kewajiban yang sudah jatuh tempo tetapi belum diambil oleh nasabah seperti deposito *mudharabah*, setoran jaminan, bagi hasil yang belum diambil *shahibul maal* (pemilik dana).

Transfer uang

Contoh:

Tuan Amat mentransfer uang lewat Bank Syariah "Amanah" ke saudaranya yang mempunyai rekening di Bank Syariah "Aminah" sebesar Rp 15.000.000,00

- Pada saat menerima dana untuk transfer uang

Kas/ rekening	kliring	Rp 15.000.000,00
	Kewajiban segera-kiriman uang	Rp 15.000.000,00

- Pada saat dilakukan pembayaran kiriman uang

Kewajiban segera-kiriman uang	Rp 15.000.000,00	
Kas/ rekening	kliring	Rp 15.000.000,00

Titipan Pajak Nasabah

CV "Barokah" menyetorkan uang senilai Rp 20.000.000,00 untuk membayar pajak tahun 2007 melalui Bank Syariah "Ghoniya".

Pada saat diterima dana untuk penyetoran pajak:

Kas/ rekening/kliring	Rp 20.000.000,00
Kewajiban segera-pajak nasabah	Rp 20.000.000,00

Pada saat kewajiban pajak disetor

Kewajiban segera- pajak nasabah	Rp 20.000.000,00
Kas/ rekening/kliring	Rp 20.000.000,00

Bagi hasil deposito yang belum diambil oleh *shahibul maal*

Deposito *mudharabah* Tuan Santosa senilai Rp 100.000.000,00 jangka waktu 3 bulan yang sudah jatuh tempo. Bagi hasil yang belum diambil senilai Rp 3.000.000,00

Jurnalnya:

Pada saat pengakuan bagi hasil:

Beban bagi hasil deposito	Rp 3.000.000,00
Kewajiban segera - bagi hasil deposito	Rp 3.000.000,00
<i>Mudharabah</i> jatuh tempo	

Pada saat bagi hasil deposito *Mudharabah* jatuh tempo diambil *shahibul maal*

Kewajiban segera- bagi hasil deposito	Rp 3.600.000,00
<i>Mudharabah</i> jatuh tempo	
Kas/ rekening/kliring	Rp 3.000.000,00
Kewajiban segera-pajak nasabah (20%)	Rp 600.000,00

Penutupan Rekening giro *wadiah* /tabungan *Mudharabah*

Tuan Avatar menutup tabungannya yang bernilai Rp 25.000.000,00.

Saat penutupan rekening giro *wadiah* /tabungan *Mudharabah* oleh nasabah atau Bank lain

Tabungan Avatar	Rp 25.000.000,00
Kewajiban segera-penutupan rekening	Rp 25.000.000,00

Saat penyelesaian rekening yang ditutup

Kewajiban segera-penutupan rekening	Rp 25.000.000,00
Kas/ rekening/kliring	Rp 25.000.000,00

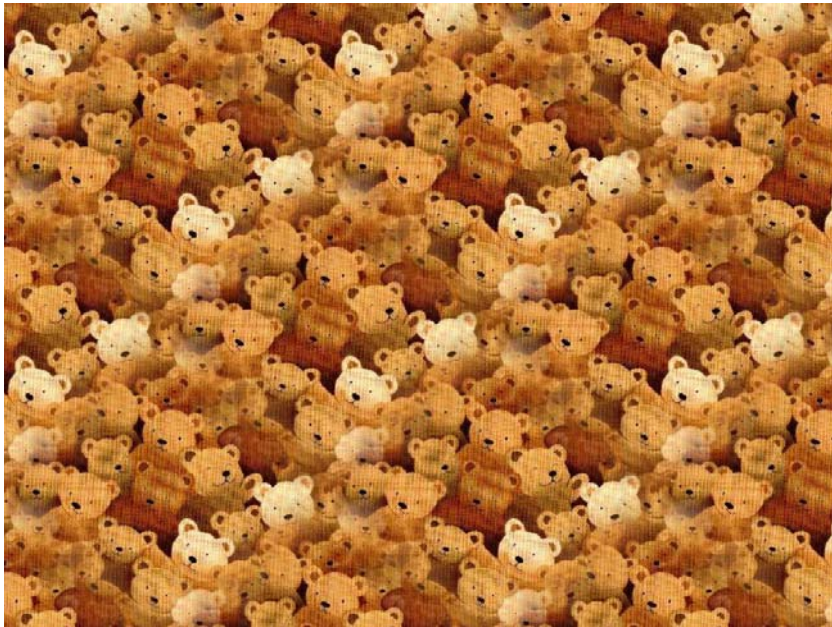
BAB 6



AKUNTANSI untuk KONSINYASI

- ☺ Pengertian Penjualan Konsinyasi
 - ☺ Metode Terpisah
 - ☺ Metode Tidak Terpisah
- ☺ Akuntansi oleh Pengamanat (*Consignor*)
- ☺ Akuntansi oleh Komisioner (*Consignee*)
- ☺ Akuntansi Jika Ada Barang yang Tersisa
 - ☺ Contoh Transaksi

AKUNTANSI UNTUK KONSINYASI



Setiap perusahaan selalu berusaha mencapai laba yang optimal. Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu cara untuk menaikkan volume penjualan adalah melalui penjualan konsinyasi.

PENGERTIAN PENJUALAN KONSINYASI

Konsinyasi adalah penjualan dengan cara pemilik menitipkan barang kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang telah diatur dalam perjanjian. Perjanjian konsinyasi berisi mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Pihak-pihak yang terlibat dalam konsinyasi adalah:

1. pengamanat (*consignor*) adalah pihak yang menitipkan barang atau pemilik barang. Pengamanat akan tetap mencatat barang yang dititipkannya sebagai persediaan selama barang yang dititipkan belum terjual atau menunggu laporan dari komisioner.
2. komisioner (*consignee*) adalah pihak yang menerima titipan barang

Baik pengamanat (*consignor*) maupun komisioner (*consignee*) mendapat keuntungan dengan adanya konsinyasi ini. Bagi pengamanat (*consignor*) melalui konsinyasi secara tidak langsung dapat dijadikan sebagai sarana promosi produknya dan menaikkan omzet penjualan serta memperluas daerah pemasaran. Bagi komisioner (*consignee*) akan mendapat komisi bila berhasil menjualkan barang konsinyasi. Selain itu komisioner (*consignee*) tidak perlu menambah modal kerja untuk membeli persediaan barang dagangan dan tidak menanggung resiko kerugian bila barang yang dititipkan tidak laku karena dapat dikembalikan kepada pengamanat (*consignor*).

AKUNTANSI PENJUALAN KONSINYASI

Metode pencatatan yang dapat dipakai baik oleh pengamanat (*consignor*) maupun komisioner (*consignee*) ada dua, yaitu:

1. Metode Terpisah
2. Metode Tidak Terpisah

1. Metode Terpisah

Dalam metode terpisah laba atau rugi dari penjualan konsinyasi disajikan secara terpisah dengan laba atau rugi penjualan biasa atau penjualan lainnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pada akhir periode dapat diketahui berapa laba atau rugi yang diperoleh dari penjualan konsinyasi dan berapa laba atau rugi yang diperoleh dari penjualan lainnya.

2. Metode Tidak Terpisah

Dalam metode tidak terpisah laba atau rugi dari penjualan konsinyasi tidak dipisahkan dengan laba atau rugi dari penjualan biasa atau penjualan lainnya. Hal ini akan mengakibatkan pada akhir periode perusahaan tidak dapat mengetahui berapa laba atau rugi yang diperoleh dari penjualan konsinyasi dan berapa laba yang diperoleh dari penjualan

biasa atau penjualan lainnya. Untuk tujuan pengendalian intern sebaiknya perusahaan tidak menggunakan metode ini.

Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi terhadap barang konsinyasi baik yang diselenggarakan oleh pihak pengamanat (*consignor*) maupun pihak komisioner (*consignee*), maka berikut ini dijelaskan Akuntansi yang diselenggarakan oleh masing-masing pihak.

Pembahasan dimulai dengan penerapan pencatatan dengan:

1. metode terpisah oleh:
 - a. pengamanat (*consignor*) maupun
 - b. komisioner (*consignee*)
2. metode tidak terpisah oleh:
 - a. pengamanat (*consignor*) maupun
 - b. komisioner (*consignee*)

a. Akuntansi oleh Pengamanat (*Consignor*)

Setiap transaksi yang berhubungan dengan penjualan konsinyasi baik menyangkut pendapatan maupun biaya dicatat dalam rekening barang konsinyasi atau *consignment out*.

Pengamanat (*consignor*) mencatat/menjurnal pada saat:

1. menitipkan barang ke komisioner (*consignee*) dan
2. menerima laporan konsinyasi serta uang dari komisioner (*consignee*).

Transaksi yang berhubungan dengan pengiriman barang konsinyasi dan biaya-biaya penjualan konsinyasi akan didebit, misalnya:

- Saat mengirimkan barang ke komisioner (rekening barang konsinyasi)
- Biaya pengiriman barang ke komisioner
- Biaya komisi
- Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh komisioner tetapi diganti oleh pengamanat.

Transaksi yang berhubungan dengan hasil penjualan barang konsinyasi dan pendapatan konsinyasi akan di kredit, yaitu:

- Saat mencatat pendapatan konsinyasi
- laba konsinyasi.
- Saat menerima laporan tentang hasil penjualan barang konsinyasi (rekening barang konsinyasi)

Jadi rekening barang konsinyasi (*consignment out*) dicatat baik didebit maupun dikredit. Di debit saat Barang dikirim ke pengamanat dan dikredit saat barang yang dititipkan tersebut benar-benar sudah terjual berdasarkan laporan dari pihak *consignee* (komisioner)

b. Akuntansi oleh Komisioner (*Consignee*)

Bagi *Consignee* setiap transaksi pendapatan yang berhubungan dengan penjualan konsinyasi dimasukkan ke dalam rekening barang komisi atau *consignment in*.

Komisioner hanya membuat jurnal saat:

- a. menjual barang konsinyasi,
- b. mengeluarkan biaya-biaya yang berhubungan dengan konsinyasi
- c. mencatat pendapatan komisi dan
- d. pengiriman uang ke pengamanat (*consignor*)

Sesaat sebelum melaporkan ke pengamanat (*consignor*), komisioner terlebih dahulu menghitung pendapatan komisi.

Kemungkinan- kemungkinan yang berhubungan Laporan Konsinyasi:

- a. Komisioner dapat hanya mengirim laporan konsinyasi saja ke pengamanat, sedangkan uangnya dikirim beberapa waktu kemudian. Jadi saat mengirim laporan pada komisioner timbul utang pengamanat.
- b. Komisioner bisa langsung mengirim laporan konsinyasi beserta uang ke pengamanat.

Transaksi yang berhubungan dengan biaya-biaya penjualan konsinyasi, akan didebit, misalnya:

- Biaya-biaya yang dikeluarkan komisioner tetapi akan diganti oleh pengamanat.
- Pendapatan komisi yang belum diterima
- Melaporkan penjualan konsinyasi kepada pengamanat
- Membayar uang kepada pengamanat

Transaksi yang berhubungan dengan pendapatan konsinyasi akan dikredit yaitu mencatat hasil penjualan barang komisi.

Jadi rekening barang komisi (*consignment in*) dicatat baik didebit maupun dikredit. Di debit saat barang komisi diterima dari pengamanat dan dikredit saat barang komisi terjual kepada pihak lain.

Contoh :

Pada tanggal 1 Juli 2007 Karoseri "Maju Sekali" yang baru beberapa bulan beroperasi menitipkan 5 buah bak truk ke karoseri "Mapan Sekali" untuk dijualkan dengan harga pokok bak truk senilai Rp 10.000.000,00 per buah. Dalam perjanjian karoseri "Mapan Sekali" memperoleh komisi 20% dari penjualan dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh karoseri "Mapan Sekali" akan diganti oleh Karoseri "Maju Sekali".

1. Metode Terpisah

Pencatatan/jurnal yang harus dibuat baik oleh Karoseri "Maju Sekali" sebagai pihak Pengamanat maupun karoseri "Mapan Sekali" sebagai Komisioner diringkas dalam tabel berikut:

Keterangan	Pengamanat/Maju Sekali (dalam ribuan rupiah)		Komisioner/ Mapan Sekali (dalam ribuan rupiah)	
1 Juli 2007			Memo	
Pengiriman 5 buah bak truk ke komisioner dengan harga pokok Rp 10.000.000,00/buah	Barang konsinyasi	50.000	(Menerima titipan 5 buah bak truk dengan harga pokok Rp 10.000.000,00 perbuah, komisi 20% dari hasil penjualan)	
	Persediaan	50.000		
Biaya pengiriman ke komisioner Rp 1.000.000,00	Barang Konsinyasi	1.000		
	Kas	1.000		
1 Juli - 20 Desember				
Penjualan 5 bh bak truk dengan harga jual Rp 14.000.000,00 per buah			Kas	70.000
			Barang Komisi	70.000
Ongkos angkut ke pembeli akhir sebesar Rp 2.500.000,00			Barang Komisi	2.500
			Kas	2.500
21 Desember 2007				
Komisioner melaporkan hasil penjualan barang komisi ke pengamanat			Brg Komisi	14.000
Pendapatan Komisi: 20% x Rp 70.000.000,00 = Rp 14.000.000,00			Pendptn Komisi	14.000
Mengirim laporan hasil penjualan	Piutang Mapan Sekali	53.500	Brg Komisi	53.500
	Brg Konsinyasi	16.500	Utang Maju Sekali	53.500
Nilai Brg Komisi = 70.000—	Barang Konsinyasi	70.000		

2.500–14.000 = 53.500	Barang Konsinyasi 19.000	
	Laba Konsinyasi 19.000	
Mengirim uang yg menjadi hak Karoseri Maju Sekali	Kas 53.500	Utang Maju Sekali 53.500
	Piut. Mapan Sekali 53.500	Kas 53.500

Bentuk laporan yang dikirim oleh komisioner kepada pengamanat tidak ada standar yang pasti. Pada prinsipnya laporan tersebut berisi pertanggung jawaban pihak komisioner terhadap barang yang sudah dititipkan oleh pihak pengamanat.

Di bawah ini diberikan laporan yang disesuaikan dengan contoh kasus

Karoseri Bak Truk " Mapan Sekali" Jl Bali Km 5 Malang			No. 007
Kepada Yth: Karoseri "Maju Sekali" Jl. Lombok Km 7 Malang			
Tanggal	Keterangan	Jumlah (dlm ribuan rp)	
1 Juli – 20 Desember 2007	Penjualan 5 bh Bak Truk	70.000	
	Biaya-biaya:		
	- Biaya-biaya:		
	Bi. Angkut	2.500	
	Biaya Komisi	<u>14.000</u>	
	Jumlah	<u>(16.500)</u>	
		53.500	
	Dibayar	<u>53.500</u>	
	Sisa	0	
Tertanda			
(Ir Supriyono) Direktur Pemasaran			

2. Metode Tidak Terpisah

Akuntansi yang diselenggarakan oleh masing-masing pihak sebagai berikut:

a. Akuntansi Oleh Pengamanat

Karena pencatatannya tidak dipisahkan dengan penjualan biasa atau penjualan lainnya maka tidak ada perbedaan dalam membuat jurnalnya. Dengan demikian pendapatan dan biaya dari penjualan

konsinyasi dicatat seperti halnya pendapatan dan biaya yang diperoleh dari penjualan biasa atau penjualan lainnya.

Pengamanat membuat jurnal saat:

- mengeluarkan biaya pengiriman ke komisioner,
- menerima laporan konsinyasi dan
- menerima uang dari komisioner.

b. Akuntansi Oleh Komisioner

Seperti halnya pencatatan yang dilakukan oleh Pengamanat, pada buku komisioner bila penjualan barang komisi tidak dipisahkan dengan penjualan biasa dan penjualan lainnya, jurnal yang dibuat juga sama caranya sehingga tidak ada keistimewaan.

Pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan kegiatan komisioner dicatat seperti halnya pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan penjualan biasa atau penjualan lainnya.

Komisioner membuat jurnal:

- saat mengeluarkan biaya yang berhubungan dengan kegiatan komisioner,
- saat penjualan barang komisi dan
- saat mengirimkan laporan konsinyasi ke pengamanat serta
- saat mengirimkan uang kepada pengamanat.

Contoh:

Pada tanggal 1 Juli 2007 Karoseri "Maju Sekali" yang baru beberapa bulan beroperasi menitipkan 5 buah bak truk ke karoseri "Mapan Sekali" untuk dijual dengan harga pokok bak truk senilai Rp 10.000.000,00 per buah. Dalam perjanjian karoseri "Mapan Sekali" memperoleh komisi 20% dari penjualan dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh karoseri "Mapan Sekali" akan diganti oleh Karoseri "Maju Sekali"

Keterangan	Pengamanat/Maju Sekali (dalam ribuan rupiah)	Komisioner/ Mapan Sekali (dalam ribuan rupiah)
<u>1 Juli 2007</u>		Memo
Pengiriman 5 buah bak truk ke komisioner dengan harga pokok Rp 10.000.000,00/buah	(Menitipkan 5 buah bak truk dengan harga pokok Rp 10.000.000,00 per buah komisi 20% dari hasil penjualan)	(Menerima titipan 5 buah bak truk dengan harga pokok Rp10.000.000,00 perbuah, komisi 20% dari hasil penjualan)

Biaya pengiriman ke komisioner Rp 1.000.000,00	Ongkos kirim 1.000 Kas 1.000	-
<u>1 Juli - 20 Desember</u>		
Penjualan 5 bh bak truk dengan harga jual Rp 14.000.000,00 per buah		Kas 70.000 Barang Komisi 70.000 Pembelian 56.000 Utg Maju Sekali 56.000
Ongkos angkut ke pembeli akhir sebesar Rp2.500.000,00		Utg Maju Sekali 2.500 Kas 2.500
<u>21 Desember 2007</u>		
Mengirim laporan hasil penjualan	Piutang Mapan Sekali 53.500 Bi. Komisi 14.000 Bi. Kirim 2.500 Penjualan 70.000	-
Mengirim uang yang menjadi hak Karoseri Maju Sekali	Kas 53.500 Piutang Mapan Sekali 53.500	Utang Maju Sekali 53.500 Kas 53.500

Bentuk laporan transaksi barang konsinyasi yang dikirimkan komisioner kepada pengamanat baik menggunakan metode terpisah maupun metode tidak terpisah adalah sama.

Bagaimana kalau barang yang dititipkan (barang konsinyasi) masih tersisa?

Contoh yang diberikan di bagian sebelumnya adalah apabila komisioner berhasil menjual semua barang konsinyasi. Dalam praktek, hal ini jarang terjadi. Pada akhir periode tertentu, seringkali masih terdapat barang konsinyasi yang tersisa. Bila hal ini terjadi maka hal-hal yang perlu diperhatikan:

- hanya barang yang terjual saja yang dilaporkan oleh komisioner ke pihak pengamanat. Selama barang konsinyasi tetap berada di pihak komisioner, maka tidak ada pencatatan yang perlu dibuat, baik oleh pengamanat maupun komisioner. Bila barang konsinyasi ditarik, maka pengamanat akan menambah nilai persediaannya sebesar harga pokok barang konsinyasi yang ditarik tersebut dan dilain pihak komisioner akan membuat memo atas barang yang ditarik tersebut.
- Ongkos angkut dibebankan secara proporsional ke barang konsinyasi

- c. Pengamanat harus mencatat berapa harga pokok yang melekat pada barang konsinyasi yang belum terjual

Berikut ini adalah contoh apabila barang konsinyasi tidak semuanya laku terjual.

Toko elektronik "CC" di Surabaya pada tanggal 15 Maret 2006i menitipkan 5 buah kulkas dan 10 buah *Tape Compo* ke toko elektronik "DD" di Malang untuk dijualkan. Harga pokok Kulkas Rp 4.000.000,00/buah sedangkan *Tape Compo* berharga pokok Rp 2.000.000,00/buah. Komisi penjualan sesuai kesepakatan sebesar 10 % dan barang konsinyasi dijual dengan harga masing-masing Rp 5.000.000,00 untuk kulkas dan Rp 2.500.000,00 untuk *Tape Compo*.

Jurnal yang dibuat komisioner (Toko "DD") dan Pengamanat (Toko "CC") adalah sebagai berikut:

Metode Terpisah

Keterangan	Pengamanat (Toko "CC") (dml ribuan rupiah)	Komisioner (Toko "DD") (dml ribuan rupiah)
15 Maret 2006		
Pengiriman ke komisioner 5 buah kulkas dan 10 buah <i>Tape Compo</i> dengan harga pokok Rp 4.000.000,00 dan Rp 2.000.000,00	Brg konsinyasi 40.000 Persediaan 40.000	
Biaya pengiriman ke komisioner Rp 450.000,00	Brg konsinyasi 500 Kas 500	
15 Maret- 30 Nopember		
Penjualan 3 bh kulkas dan 8 buah <i>tape compo</i> dengan komisi 10%		Kas 35.000 Barang Komisi 35.000
Ongkos angkut ke pembeli berjumlah Rp 1.100.000,00		Brg Komisi 1.000 Kas 1.000
1 Desember 2006		
Komisioner melaporkan hasil penjualan barang komisi ke pengamanat beserta uang.	Kas 30.400 Brg Konsinyasi 4.600 Barang Konsinyasi 35.000	Barang Komisi 3.500 Pendptn Komisi 3.500
Perhitungan komisi: $10\% \times \text{Rp } 35.000.000,00 = \text{Rp } 3.500.000,00$	Brg Konsinyasi 2.290 Laba Konsinyasi 2.290	Barang Komisi 30.500 Kas 30.500

Perhitungan:

		(dlm Rp 000,00)	(dlm Rp000,00)	(dlm Rp 000,00)
Penjualan:	Kulkas	3 x 5.000 =	15.000	
	<i>Tape Compo</i>	8 x 2.500 =	<u>20.000</u>	35.000
Harga Pokok Pen- jualan	Kulkas	3 x 4.000 =	12.000	
	<i>Tape Compo</i>	8 x 2.000 =	<u>16.000</u>	(28.000)
Biaya-biaya				
Ongkos angkut	dr pengamanat ke komisioner	11/15 x 450 =	330	
	dr komisioner ke pembeli		<u>1.100</u>	
			1.430	
Biaya komisi		10 %x35.000	<u>3.500</u>	(4.830)
				<u>2.170</u>
		Laba		2.170

Kas yang diterima/dikirim= Rp 35.000.000 - Rp1.100.000 - Rp3.500.000 =
Rp 30.400.000

Metode Tidak Terpisah

Keterangan	Pengamanat (Toko "CC") (dlm ribuan rupiah)	Komisioner (Toko"DD") (dlm ribuan rupiah)
<u>15 Maret 2006</u> Pengiriman ke komisioner 5 buah kulkas dan 10 buah <i>Tape Compo</i> dengan harga pokok Rp 4.000.000,00 dan Rp 2.000.000,00 Biaya pengiriman ke komisioner Rp 450.000,00	Memo	Memo
<u>15 Maret- 30 Nopember</u> Penjualan 3 bh kulkas dan 8 buah <i>tape compo</i> dengan komisi 10%	Memo	Memo
Ongkos angkut ke pembeli berjumlah Rp 1.100.000,00		Kas 35.000 Penjualan 35.000 BPP 28.000 Utg toko "CC " 28.000 Utg toko "CC " 1.100 Kas 1.100

<u>1 Desember 2006</u> Komisioner melaporkan hasil penjualan barang komisi ke pengamanat beserta uang. Perhitungan komisi: $10\% \times \text{Rp } 35.000.000,00 = \text{Rp } 3.500.000,00$	Kas 30.400 Bi. Angkut 330 Bi. Komisi 3.500 Persediaan Brg Kms 770 Penjualan 35.000	Utg toko "CC " 30.400 Kas 30.400
--	--	-------------------------------------

Berikut ini adalah alokasi Beban pokok penjualan dan biaya-biaya lainnya ke barang yang terjual dan barang yang masih berada di komisioner.

Keterangan	Total Biaya (dlm ribuan rupiah)	Biaya yg Melekat pd Brg yg Terjual (dlm Rp 000,00)	Harga Pokok yg melekat pada brg yg blm terjual (dlm Rp 000,00)
Biaya-2 yg dikirimkan oleh pengamanat			
- BPP	50.000	35.000	15.000
- Bi. Kirim	450	330	120
Biaya-2 yg dikeluarkan oleh komisioner			
- Bi. Angkut	1.100	1.100	
- Bi. Komisi	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	-
Total	55.050	39.930	15.120

Saldo rekening barang konsinyasi pada tanggal 1 Agustus 2007, 31 Oktober 2007 dan 1 November 2007 adalah sebagai berikut:

Barang Konsinyasi Toko Mekar

1 Agustus 2007	(dlm Rp000,00)	30 Oktober 2007	(dlm Rp000,00)
Pengiriman 5 bh almari Harga Pokok @ Rp 500.000,00	2.500	Penjualan 3 bh	2.400
1 Agustus 2007		30 Oktober 2001	
Biaya Kirim	100	- Harga Pokok 2 bh @ Rp 500.000,00	1.000
31 Oktober 2007		- Biy. Kirim 2/5x100.000	40
Dikeluarkan oleh komisioner:		- Biy. Angkut 2/5x 200.000	80
- Bi Angkut Rp 200.000,00		Saldo	<u>1.120</u>
- Bi Komisi Rp 480.000,00	680	Jumlah	<u>3.620</u>
30 Oktober 2007			
Laba penjualan 3 buah almari	<u>240</u>		
Jumlah	3.520		
1 November 2007			
Biaya 2 buah almari			

Bentuk laporan yang dikirim oleh komisioner kepada pengamanat adalah sebagai berikut:

Toko Jaya
Jl. Dr. Sutomo No. 14 Yogyakarta
Tanggal 1 November 2007

Kepada Yth: Toko Mekar
Jl. Gadjah Mada No. 5
Yogyakarta

No. 53746

Tanggal	Keterangan	Jumlah (dalam ribuan rupiah)
1 Agustus-31 Oktober	Penjualan: 3 bh almari@ Rp 800.000,00	2.400
	Sisa 2 bh almari	
	Biaya-biaya:	
	- Bi Angkut	200
	- Bi Komisi	<u>480</u>
		<u>(680)</u>
	Jumlah	1.720
	Dibayar	<u>1.720</u>
	Sisa	0

Tanda tangan

(Usman SE)
Direktur Pemasaran

SOAL DAN PENYELESAIAN

Soal

Berikut ini adalah laporan dari komisioner kepada pengamanat:

Toko Mekar Electronic
Jl. Pemuda No. 40 Yogyakarta
Kepada Yth: Toko Maju
Jl. Sukarno Hatta No. 11
Jakarta

Tanggal	Keterangan	Jumlah (dlm ribuan rupiah)
15-9-2007 s/d 31-12-2007	Penjualan: 7 bh televisi@ Rp 2.000.000,00	14.000
	Sisa 3 bh televisi	
	Biaya-biaya:	
	- Bi Angkut	1.000
	- Bi Komisi 10% dari penjualan	<u>1.400</u>
		<u>(2.400)</u>
	Jumlah	11.600
	Dibayar	<u>(11.600)</u>
	Sisa	0

Yogyakarta, 21-12-2007
Tanda tangan

(Usman SE)
Direktur Pemasaran

Harga pokok televisi per buah adalah Rp. 1.100.000,00

Diminta:

Buat jurnal yang ada di komisioner dan pengamanat, apabila menggunakan metode: a) Terpisah; dan b) Tidak terpisah

Penyelesaian

Di halaman berikutnya

a. Metode terpisah

Keterangan	Pengamanat (dlm ribuan rupiah)	Komisioner (dlm ribuan rupiah)
Pengiriman barang dagangan ke komisioner 10 bh x Rp 1.100.000,00=Rp 11.000.000,00	Barang konsinyasi 11.000 Peng. Brg Kom 11.000	Memo
Penjualan oleh komisioner 7 bh x Rp 2.000.000,00 = Rp 14.000.000,00		Kas 14.000 Brg. Komisi 14.000
Biaya yang dikeluarkan oleh komisioner		Brg. Komisi 1.000 Kas 1.000
Pengiriman laporan dan uang dari komisioner ke pengamanat	Kas 11.600 Brg. Konsinyasi 2.400 Barang konsinyasi 14.000	Brg. Komisi 1.400 Pndptn Komisi 1.400 Brg. Komisi 11.600 Kas 11.600

b. Metode tidak terpisah

Keterangan	Pengamanat (dlm ribuan rupiah)	Komisioner (dlm ribuan rupiah)
Pengiriman barang dagangan ke komisioner 10 bh x Rp 1.100.000,00=Rp 11.000.000,00	Memo	Memo
Penjualan oleh komisioner 7 bh x Rp 2.000.000,00 = Rp 14.000.000,00		Kas 14.000 Penjualan 14.000 Pembelian 12.600 Utang Tk Maju 14.600
Biaya yang dikeluarkan oleh komisioner		Utang Tk Maju 1.000 Kas 1.000
Pengiriman laporan dan uang dari komisioner ke pengamanat	Kas 11.600 Biaya Angkut 1.000 Biaya komisi 1.400 Penjualan 14.000	Utang Tk. Maju 11.600 Kas 11.600

BAB 7



AKUNTANSI untuk PENJUALAN ANGSURAN

- ☺ Pengertian Penjualan Angsuran
- ☺ Perhitungan Bunga dan Pencatatannya
 - ☺ Perlakuan Akuntansi Lainnya
- ☺ Pembatalan Penjualan Angsuran
- ☺ Penjualan Angsuran untuk Barang Bergerak dan Barang Tidak Bergerak
- ☺ Contoh Transaksi dan Laporan Keuangannya

AKUNTANSI untuk PENJUALAN ANGSURAN (*Installment Sales*)



1. PENGERTIAN PENJUALAN ANGSURAN

Penjualan menurut akuntansi, dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu penjualan biasa dan penjualan angsuran. Penjualan biasa terdiri dari penjualan tunai dan penjualan kredit. Penjualan tunai adalah penjualan yang pembayarannya langsung lunas (diterima sekaligus). Penjualan kredit adalah penjualan yang pembayarannya tidak diterima sekaligus (tidak langsung lunas) pembayarannya bisa diterima melalui 2 (dua) tahap atau lebih. Penjualan angsuran adalah penjualan yang pembayarannya tidak diterima sekaligus (tidak langsung lunas), tetapi pembayarannya diterima melalui lebih dari 2 (dua) tahap. Istilah penjualan angsuran dengan penjualan kredit hampir sama, tetapi penjualan kredit yang dibayar hanya 2 X pembayaran bukan merupakan penjualan angsuran.

Untuk menghindari resiko karena pembeli tidak membayar dan supaya penjual tidak mengalami kerugian, maka biasanya saat membeli ada beberapa perjanjian, antara lain:

1. Pada saat membeli disertai dengan meninggalkan jaminan ke penjual.
2. Hak kepemilikan barang berpindah ke pembeli, kalau pembayarannya sudah lunas.

2. PERHITUNGAN BUNGA (*Interest*) pada PENJUALAN ANGSURAN dan PENCATATANNYA

Dalam setiap penjualan angsuran ada bunga yang ditanggung oleh pembeli. Dengan demikian setiap angsuran yang dibayarkan pembeli terdiri dari angsuran pokok pinjaman dan bunga yang diperhitungkan. Macam-macam perhitungan bunga yang dapat dipakai dalam penjualan angsuran yaitu:

1. Bunga dihitung dari pokok pinjaman
2. Bunga dihitung dari sisa pinjaman
3. Sistem anuitas (bunga semakin menurun dan angsuran pokok pinjaman meningkat)

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Bunga dihitung dari pokok pinjaman/sistem bunga tetap dan angsuran pokok tetap.

Dalam metode ini besarnya bunga dihitung dari pokok pinjaman sehingga besarnya bunga adalah tetap.

2. Bunga dihitung dari sisa pinjaman/Sistem bunga menurun dan angsuran pokok pinjaman tetap.

Besarnya bunga dihitung dari saldo pinjaman awal periode, tergantung periodenya bulanan atau tahunan. Kalau angsuran bulanan, bunga didasarkan pada saldo awal bulan. Kalau angsuran tahunan, maka bunga didasarkan pada saldo awal tahun. Jumlah bunga semakin lama semakin turun.

3. Sistem anuitas

Besarnya bunga dihitung menggunakan rumus anuitas. Dengan menggunakan rumus anuitas jumlah angsuran tetap tetapi jumlah bunga semakin menurun, sedangkan angsuran pokok semakin meningkat.

Contoh serta perlakuan akuntansinya

Pada tanggal 5 April 2007, dealer “Dwijaya” menjual sebuah sepeda motor Suzuki dengan harga Rp 15.000.000 dan cara pembayaran adalah:

- Uang muka Rp 7.000.000,00.
- Sisanya sebesar Rp 8.000.000,00 diangsur sebanyak 4 kali setiap bulan yaitu setiap tanggal 5. Angsuran pertama dimulai pada tanggal 5 Mei 2007.
- Bunga yang dibebankan sebesar 5% per bulan.

Bunga Dihitung dari Pokok Pinjaman

Besarnya bunga, pokok pinjaman, dan jumlah kas yang diterima dalam setiap angsuran adalah sebagai berikut:

Tanggal	Angsuran Pokok Pinjaman (Rp) (1) = 8.000.000 : 4	Bunga (Rp) (2)=5 % x 8.000.000	Kas yg Diterima/ Dibayar (Rp) (3)= (1) + (2)	Sisa Pinjaman (4) = (4) awal – (1)
5-4-07	-		7.000.000	8.000.000
5-5-07	2.000.000	400.000	2.400.000	6.000.000
5-6-07	2.000.000	400.000	2.400.000	4.000.000
5-7-07	2.000.000	400.000	2.400.000	2.000.000
5-8-07	2.000.000	400.000	2.400.000	
Jumlah	8.000.000	1.600.000	16.600.000	

Jurnal yang harus dibuat Pembeli dan Penjual adalah:

Keterangan	Jurnal Yang Dibuat Pembeli	Jurnal Yang Dibuat Penjual
5 April 2007 Saat Jual-Beli	Pembelian 15.000.000 Utg Pembelian 8.000.000 Angsuran Kas 7.000.000	Kas 7.000.000 Piut. Penj. Angs 8.000.000 Penj. Angs 15.000.000
5 Mei 2007 Angsuran 1	Utg Pembelian Angs 2.000.000 Biaya bunga 400.000 Kas 2.400.000	Kas 2.400.000 Piut Penj Angs 2.000.000 Pendapatan bunga 400.000
5 Juni 2007 Angs. Kedua	Utg Pembelian Angs 2.000.000 Biaya bunga 400.000 Kas 2.400.000	Kas 2.000.000 Piut Penj Angs 2.000.000 Pendapatan bunga 400.000

Untuk angsuran ke 3 dan ke 4 cara membuat jurnal adalah sama.

Bunga dihitung dari sisa pinjaman

Pada tanggal 5 April 2007, dealer "Dwijaya" menjual sebuah sepeda motor Suzuki dengan harga Rp 15.000.000 dan cara pembayaran adalah:

- Uang muka Rp 7.000.000,00
- Sisanya sebesar Rp 8.000.000,00 diangsur sebanyak 4 kali setiap bulan yaitu setiap tanggal 5. Angsuran pertama dimulai pada tanggal 5 Mei 2007
- Bunga yang dibebankan sebesar 5% per bulan

Besarnya bunga, pokok pinjaman, jumlah kas yang diterima/dibayar setiap angsuran adalah sebagai berikut:

Tanggal	Angsuran Pokok Pinjaman (Rp) (1) = 8.000.000 : 4	Bunga (Rp) (2)=5 % x (4) awal	Kas yg Diterima/Dibayar (Rp) (3)= (1) + (2)	Sisa Pinjaman (4) = (4) awal – (1)
5-4-2007	-		7.000.000	8.000.000
5-5-2007	2.000.000	400.000	2.400.000	6.000.000
5-6-2007	2.000.000	300.000	2.300.000	4.000.000
5-7-2007	2.000.000	200.000	2.200.000	2.000.000
5-8-2007	2.000.000	100.000	2.100.000	-
Jumlah	8.000.000	800.000	16.000.000	

Jurnal yang harus dibuat adalah:

Keterangan	Jurnal Yang Dibuat Pembeli (dlm Rp,00)		Jurnal Yang Dibuat Penjual (dlm Rp,00)	
5 April 2007	Pembelian	15.000.000	Kas	7.000.000
Saat Jual-Beli	Utg Pembelian Angs	8.000.000	Piut. Penj. Angs	8.000.000
	Kas	7.000.000	Penj. Angs	15.000.000
5 Mei 2007	Utg Pemb Angs	2.000.000	Kas	2.400.000
Angsuran I	Biaya bunga	400.000	Piut Penj Angs	2.000.000
	Kas	2.400.000	Pendapatan bunga	400.000
5 Juni 2007	Utg Pemb. Angs	2.000.000	Kas	2.300.000
Angsuran II	Biaya bunga	300.000	Piut Penj Angs	2.000.000
	Kas	2.300.000	Pendapatan bagi	300.000

Sistem Anuitas

Bila menggunakan sistem anuitas, maka jumlah kas yang diterima/ dibayar setiap bulan dicari dengan rumus sebagai berikut:

$$NA = \frac{SP}{an > P}$$

Keterangan:

NA = Nilai angsuran per periode

SP = Sisa penjualan semula

an>P = Nilai tunai dari Rp 1,00 yang akan diterima setiap periode selama 'n' periode yang akan datang dengan tingkat bunga 'p%' per periode. Nilai ini dapat dilihat pada tabel bunga atau dihitung sendiri dengan memakai rumus deret ukur menurun.

Pada tanggal 5 April 2007, dealer "Dwijaya" menjual sebuah sepeda motor Suzuki dengan harga Rp 15.000.000 dan cara pembayaran adalah:

- Uang muka Rp 7.000.000,00
- Sisanya sebesar Rp 8.000.000,00 diangsur sebanyak 4 kali setiap bulan yaitu setiap tanggal 5. Angsuran pertama dimulai pada tanggal 5 Mei 2007
- Bunga yang dibebankan sebesar 4% per bulan

Besarnya bunga, pokok pinjaman, dan jumlah kas yang diterima/dibayar setiap angsuran adalah sebagai berikut:

Tanggal	Kas yang diterima/dibayar	Bunga	Angsuran pokok pinjaman	Sisa Pinjaman
5-4-2007	2.000.000	-	-	8.000.000
5-5-2007	2.203.860	320.000	1.883.860	6.116.140
5-6-2007	2.203.860	244.650	1.959.210	4.156.930
5-7-2007	2.203.860	166.280	2.037.580	119.350
5-8-2007	2.203.860	84.770	2.119.090	-
Jumlah	16.815.440	815.700	8.000.000	-

Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jurnal Yang Dibuat Pembeli (dlm Rp,00)		Jurnal Yang Dibuat Penjual	
5 April 2007 Saat Penjualan	Pembelian	15.000.000	Kas	7.000.000
	Utg Pemb. Angs	- 8.000.000	Piut. Penj. Angs	8.000.000
	Kas	- 7.000.000	Penj. Angs	15.000.000
5 Mei 2007 Angsrn ke 1	Utg Pemb Angs	2.000.000	Kas	1.103.860
	Biaya bunga	320.000	Piut Penj Angs	1.883.860
	Kas	2.203.860	Pendapatan bunga	320.000
5 Juni 2007 Angsrn ke 2	Utg Pemb. Angs	1.959.210	Kas	2.203.860
	Biaya bunga	244.650	Piut Penj Angs	1.959.210
	Kas	- 2.203.860	Pendapatan bunga	244.650

Jurnal untuk angsuran ke 3 dan ke 4 dicatat dengan cara yang sama

3. PERLAKUAN AKUNTANSI LAINNYA

Perlakuan Akuntansi Penjualan Angsuran yang lain kecuali masalah penentuan bunga adalah:

- a. Pengakuan Laba Kotor
- b. Tukar- tambah (*trade in*)
- c. Pembatalan Penjualan Angsuran

a. Pengakuan Laba Kotor

Dasar pengakuan laba yang dapat dipakai dalam penjualan angsuran adalah:

1. Dasar Penjualan (*Accrual Basis*)
2. Dasar tunai (*Cash Basis*)

Penjelasannya adalah sebagai berikut

1. Dasar Penjualan (*Accrual Basis*)

Bila menggunakan dasar ini, laba kotor diakui pada saat penjualan angsuran terjadi tanpa memperhatikan apakah pembayarannya sudah diterima atau belum. Cara ini sama dengan pencatatan penjualan kredit biasa. Metode ini dapat digunakan bila memenuhi 3 kondisi:

- Jangka waktu pembayaran relatif pendek
- Kemungkinan terjadinya pembatalan sangat kecil
- Biaya-biaya yang berhubungan dengan penjualan angsuran bisa ditaksir dengan teliti

Contoh :

Pada tanggal 7 januari 2007 terjadi transaksi penjualan angsuran di PT “Anugerah” senilai Rp 70.000.000,00 dengan syarat pembayaran sebagai berikut:

- Uang muka Rp 20.000.000 dibayar pada saat transaksi penjualan

- Sisanya dibayar sebanyak 5 kali angsuran tahunan, setiap akhir tahun.
- Beban pokok penjualan Rp 50.000.000,00

Laba kotor yang sudah diakui dari penjualan angsuran tersebut dan dicatat pada tahun 2007 oleh PT"Anugerah" sebesar Rp 20.000.000,00 (Rp70.000.000,00 - Rp 50.000.000,00).

Tabel penerimaan pembayaran dari penjualan angsuran ini adalah sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Jumlah
7-1-2007	Uang muka	Rp 20.000.000,00
31-12-2007	Angsuran ke 1	Rp 10.000.000,00
31-12-2008	Angsuran ke 2	Rp 10.000.000,00
31-12-2009	Angsuran ke 3	Rp 10.000.000,00
31-12-2010	Angsuran ke 4	Rp 10.000.000,00
31-12-2011	Angsuran ke 5	Rp 10.000.000,00
Jumlah		Rp 70.000.000,00

2. Dasar tunai (*Cash Basis*)

Dalam metode ini laba kotor diakui saat pengumpulan kas. Setiap pengumpulan kas terdiri dari:

- pembayaran atas beban pokok penjualan dan
- pembayaran atas laba kotor

Ada 3 metode untuk memperlakukan penerimaan piutang penjualan angsuran, yaitu:

1. Harga pokok kemudian laba kotor (*cost recovery method*)

Dalam metode ini penerimaan kas pertama dianggap sebagai penutup beban pokok penjualan dahulu, setelah beban pokok penjualan tertutup, baru penerimaan kas berikutnya diakui sebagai laba kotor.

2. Laba kotor kemudian harga pokok

Dalam metode ini penerimaan kas pertama dianggap sebagai perolehan laba kotor dahulu, setelah laba kotor tercapai baru sisa penerimaan kas berikutnya diakui sebagai penutup harga pokok.

3. beban pokok penjualan dan laba kotor diakui secara proporsional (metode penjualan angsuran)

Perbandingan pemakaian ketiga metode di atas dapat dilihat pada contoh berikut:

Pada tanggal 7 Januari 2007 terjadi transaksi penjualan angsuran di PT "Anugerah" senilai Rp 70.000.000,00 dengan syarat pembayaran sebagai berikut:

- Uang muka Rp 20.000.000 dibayar pada saat transaksi penjualan.
- Sisanya dibayar sebanyak 5 kali angsuran tahunan, setiap akhir tahun.
- Beban pokok penjualan Rp 50.000.000,00

Tabel penerimaan pembayaran dari penjualan angsuran ini adalah sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Jumlah
7-1-2007	Uang muka	Rp 20.000.000,00
31-12-2007	Angsuran ke 1	Rp 10.000.000,00
31-12-2008	Angsuran ke 2	Rp 10.000.000,00
31-12-2009	Angsuran ke 3	Rp 10.000.000,00
31-12-2010	Angsuran ke 4	Rp 10.000.000,00
31-12-2011	Angsuran ke 5	Rp 10.000.000,00
Jumlah		Rp 70.000.000,00

Penjelasan penggunaan masing-masing metode di atas adalah sebagai berikut:

Metode 1:

Perusahaan akan mencatat penerimaan tanggal 7 Januari 2007 sampai 31 Desember 2009 sebagai pembayaran beban pokok penjualan (totalnya Rp 50.000.000,00), sedangkan penerimaan tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2011 dicatat sebagai laba atas penjualan angsuran (Rp 20.000.000,00).

Metode 2:

Perusahaan akan mencatat penerimaan tanggal 7 Januari 2007 (Rp 20.000.000,00) sebagai laba atas penjualan angsuran, sedangkan penerimaan 31 Desember 2007 sampai 31 Desember 2011 diakui sebagai pembayaran beban pokok penjualan angsuran (totalnya Rp 50.000.000,00)

Metode 3:

Dalam metode ini setiap penerimaan kas dari piutang penjualan angsuran terdiri dari pembayaran beban pokok penjualan dan laba kotor yang diakui secara proporsional sesuai dengan perbandingan beban pokok penjualan dan laba kotor. Dari contoh di atas dapat dihitung perbandingan beban pokok penjualan dengan laba kotor yaitu:

$$\begin{aligned} \text{BPP} : \text{Laba Kotor} &= 50.000.000 : 20.000.000 \\ \text{BPP} : \text{Laba Kotor} &= 5 : 2 \end{aligned}$$

Dari contoh di atas dapat dibuat tabel besarnya beban pokok penjualan dan laba kotor yang diakui dari setiap penerimaan pembayaran penjualan angsuran

Tanggal	Keterangan	Pembayaran (Rp,00)	Harga Pokok Penjualan (Rp,00)	Laba Kotor (Rp,00)
7-1-2007	Uang muka	20.000.000	14.285.719,29	5.714.285,71
31-12-2007	Angsuran ke 1	10.000.000	7.142.859,64	2.857.140,35
31-12-2008	Angsuran ke 2	10.000.000	7.142.859,64	2.857.140,35
31-12-2009	Angsuran ke 3	10.000.000	7.142.859,64	2.857.140,35
31-12-2010	Angsuran ke 4	10.000.000	7.142.859,64	2.857.140,35
31-12-2011	Angsuran ke 5	10.000.000	7.142.842,15	2.857.140,35
Jumlah		70.000.000	50.000.000,00	20.000.000,00

Dalam metode ini setiap periode penerimaan kas diakui adanya pembayaran beban pokok penjualan dan realisasi laba kotor.

Dari ketiga metode di atas, yang paling banyak dipakai adalah perlakuan yang ketiga, yaitu beban pokok penjualan dan laba kotor diakui secara proporsional setiap menerima kas.

Tukar Tambah atau *Trade In*

Tukar tambah adalah penjualan dimana pembeli menyerahkan barangnya sebagai uang muka (*down payment/DP*) kekurangannya dibayar secara angsuran. Dalam penjualan angsuran sering terjadi cara tukar tambah untuk menarik pembeli.

Dalam tukar tambah, barang yang diserahkan sebagai uang muka dicatat berdasar realisasi bersihnya dengan syarat: nilai realisasi bersih tidak boleh melebihi nilai pokok pengganti (*current replacement cost*). Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga jual barang dikurangi biaya perbaikan, biaya pemasaran, dan biaya-biaya lain serta taksiran laba yang diharapkan. Selisih antara harga yang disepakati dengan nilai realisasi bersih dimasukkan ke rekening **cadangan kelebihan harga**. Pada akhir periode rekening **cadangan kelebihan harga** mengurangi rekening penjualan angsuran. Jadi harga penjualan angsuran sebenarnya adalah sebesar rekening penjualan dikurangi cadangan kelebihan harga.

Contoh:

Pada awal tahun 2007 toko elektronik "Metrika" menjual mesin cuci "Electrolux" secara angsuran sebesar Rp 7.500.000. Cara pembayarannya adalah sebagai berikut:

- Sebagai uang muka diterima sebuah mesin cuci merk "Yamoto" dengan nilai yang disepakati sebesar Rp 2.000.000,00
- Sisanya diangsur sebanyak 10 kali angsuran bulanan, masing-masing Rp 550.000,00. Mesin cuci yang diterima diperkirakan membutuhkan biaya perbaikan sebesar Rp 500.000,00. Setelah diperbaiki diperkirakan dapat dijual dengan harga Rp 2.400.000,00. Dalam penjualan mesin cuci "Electrolux" perusahaan memperhitungkan laba normal sebesar 10% dari harga jual. Harga perolehan mesin cuci "Electrolux" sebesar Rp 5.600.000,00

Perhitungan:

Harga yang disepakati		Rp 2.000.000,00
Harga jual mesin cuci "Yamoto"	Rp2.400.000,00	
Biaya perbaikan	Rp 500.000,00	
Laba normal		
10% x Rp 46.000.000,00	Rp 240.000,00	
	<u>(Rp 740.000,00)</u>	
Taksiran nilai realisasi bersih		(Rp1.660.000,00)
Kelebihan harga		<u>Rp 340.000,00</u>

Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

Untuk mencatat penjualan

Piutang penjualan angsuran	Rp5.500.000,00	
Persediaan Barang Dagangan (mesin cuci "Yamoto")	Rp1.660.000,00	
Cadangan kelebihan harga	Rp 340.000,00	
Penjualan angsuran		Rp 7.500.000,00

Untuk mencatat beban pokok penjualan angsuran

Beban pokok penjualan angsuran	Rp5.600.0000,00	
Persediaan Barang Dagangan		Rp 5.600.0000,00

Pembatalan Penjualan Angsuran

Dalam penjualan angsuran kadangkala pembeli tidak dapat melunasi angsurannya sehingga terjadi pembatalan penjualan angsuran. Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh penjual adalah:

1. Barang yang sudah dijual dimiliki kembali
Penjual harus menilai kembali barang tersebut. Dalam penilaian kembali harus dipertimbangkan cadangan untuk perbaikan dan laba normal yang diharapkan apabila barang tersebut dijual lagi (nilai realisasi bersih).
2. Piutang penjualan angsuran yang belum dibayar dibatalkan.

3. Mencatat laba atau rugi pembatalan penjualan angsuran
Tergantung metode pengakuan laba kotor yang digunakan (laba kotor diakui saat penjualan atau laba kotor diakui secara proporsional dengan penerimaan kas).

Laba Kotor Diakui Saat Penjualan

Pada metode ini laba kotor diakui saat penjualan sehingga saldo piutang penjualan angsuran merupakan beban pokok penjualan yang belum diterima pembayarannya. Jadi selisih antara nilai realisasi bersih atas barang yang diterima kembali dengan saldo piutang penjualan angsuran merupakan laba atau rugi pembatalan penjualan angsuran.

Laba Kotor Diakui Secara Proporsional dengan Penerimaan Kas

Pada metode ini laba kotor diakui secara proporsional dengan penerimaan kas, sehingga saldo piutang penjualan angsuran terdiri dari laba kotor yang belum direalisasi dan beban pokok penjualan angsuran. Jadi selisih antara nilai realisasi bersih atas barang yang diterima kembali dengan saldo piutang penjualan angsuran dan laba kotor belum direalisasi merupakan laba atau rugi pembatalan penjualan angsuran.

Contoh :

PT Mawar menjual barang dagangannya secara angsuran. Pada tahun 2006 terjadi pembatalan atas penjualan angsuran yang terjadi pada akhir periode sebelumnya. Informasi penjualan angsuran yang dibatalkan adalah sebagai berikut:

- Penjualan semula Rp 30.000.000,00
- Beban pokok penjualan angsuran Rp 22.500.000,00
- Tingkat laba kotor 25% dari harga jual
- Piutang penjualan angsuran yang sudah terkumpul Rp 15.000.000,00
- Taksiran nilai realisasi bersih atas harga yang diterima kembali Rp 14.000.000,00

Laba kotor diakui saat penjualan

Perhitungan:

	(dlm ribuan Rp)	(dlm ribuan Rp)
Harga jual	30.000	
Piutang yang sudah ditagih	<u>15.000</u>	
Piutang yang belum ditagih	15.000	
Taksiran nilai realisasi bersih	<u>12.000</u>	
Rugi pembatalan penjualan angsuran	3.000	
Jurnal:		
Persediaan barang dagangan	14.000	
Rugi pembatalan angsuran	1.000	
Piutang penjualan angsuran		15.000

Laba kotor diakui secara proporsional dengan penerimaan kas

Perhitungan:	(dlm ribuan rupiah)	(dlm ribuan rupiah)
Harga jual	30.000	
Piutang yang sudah ditagih	<u>15.000</u>	
Piutang yang belum ditagih	15.000	
Laba kotor belum direalisasi		
25% x Rp 15.000.000,00 =	<u>3.750</u>	
Beban pokok penjualan yang belum dibayar	11.250	
Taksiran nilai realisasi bersih	<u>14.000</u>	
Laba pembatalan penjualan angsuran	2.750	

Jurnal:

Persediaan barang dagangan	14.000	
Laba kotor belum direalisasi	3.750	
Piutang penjualan angsuran		15.000
Laba pembatalan angsuran		2.750

Laporan Keuangan

Perusahaan yang menjual barangnya secara angsuran Laporan Keuangannya sama seperti pada perusahaan umumnya, yaitu:

- Neraca
- Laporan Laba-rugi dan
- Laporan perubahan modal/saldo laba

Di antara ketiga jenis laporan tersebut, hanya Neraca dan Laporan Laba Rugi yang berbeda, sedangkan Laporan perubahan modal/saldo laba sama. Seperti pada perusahaan yang tidak menjual secara angsuran.

Perbedaan tersebut disebabkan karena di Neraca dan Laporan Laba Rugi terdapat rekening yang berhubungan dengan penjualan angsuran. Di Neraca rekening yang berhubungan dengan penjualan angsuran adalah:

- Piutang penjualan angsuran
Piutang penjualan angsuran disajikan dalam Neraca sebagai elemen Aktiva Lancar setelah Piutang Usaha
- Laba kotor yang belum direalisasi
Laba kotor yang belum direalisasi perlakuannya sama dengan pendapatan yang ditangguhkan. Cara penyajian yang lazim adalah:
 - a. Disajikan di kelompok Aktiva sebagai pengurang Piutang Penjualan Angsuran
 - b. Disajikan di kelompok Pasiva sebagai Pendapatan Yang Ditangguhkan

Sebelum diberikan ulasan lebih detil dan contoh tentang penyusunan Laporan Keuangan, maka terlebih dahulu akan diberikan ulasan tentang Penjualan angsuran untuk barang bergerak dan barang tidak bergerak.

Penjualan Angsuran Untuk Barang Tidak Bergerak dan Barang Bergerak

Dalam praktek penjualan angsuran dapat dipakai baik untuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Dalam penjualan angsuran pada umumnya laba kotor diakui secara proporsional dengan penerimaan kas. Hal ini disebabkan ada kemungkinan terjadi pembatalan penjualan angsuran. Dengan metode ini bila terjadi pembatalan penjualan angsuran di catatan perusahaan tidak timbul rugi, tetapi mencatat keuntungan. Tetapi untuk penjualan angsuran barang-barang tidak bergerak tetap ada yang mengakui laba kotor pada periode penjualan.

Metode pencatatan untuk penjualan barang tidak bergerak berbeda dengan metode pencatatan untuk penjualan barang bergerak. Pada penjualan barang tidak bergerak, saat penjualan, nama barang yang bersangkutan langsung dikredit sebesar beban pokok penjualan. Selisih antara harga jual dan beban pokok penjualan langsung diakui sebagai laba kotor belum direalisasi.

Pada penjualan barang bergerak, laba kotor yang belum direalisasi belum diakui pada saat terjadi transaksi penjualan. Laba kotor yang belum direalisasi baru dihitung pada akhir periode. Hal ini disebabkan

Berikut ini adalah contoh penjualan angsuran untuk barang tidak bergerak dan penjualan angsuran untuk barang bergerak. Untuk penjualan angsuran barang tidak bergerak diberi contoh 2 metode pencatatan, yaitu laba diakui dalam periode penjualan dan laba diakui secara proporsional dengan penerimaan kas. Untuk penjualan barang bergerak hanya diberi contoh 1 metode pencatatan yaitu laba diakui secara proporsional dengan penerimaan kas. Karena pada umumnya untuk penjualan angsuran barang bergerak, laba diakui secara proporsional dengan penerimaan kas.

Penjualan Barang Tidak Bergerak

Contoh :

PT. Graha Sentosa adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jual beli barang tidak bergerak. Pada tanggal 29 September 2006. PT. Graha Sentosa menjual rumah kepada Bapak Irfan. Harga pokok rumah saat dijual adalah Rp 140.000.000,00 sedangkan harga jualnya adalah Rp 200.000.000,00.

Beberapa ketentuan yang diatur didalam kontrak penjualan antara lain:

- Pembayaran pertama (*down payment*) sebesar Rp 40.000.000,00
- Untuk menjamin keamanan kepemilikan rumah tersebut PT. Graha Sentosa dan Bapak Irfan setuju untuk menghipotikkan rumah tersebut dari Bapak Irfan kepada PT. Graha Sentosa sebesar Rp 160.000.000,00. Akte hipotik ditandatangani pada tanggal 1 November 2006 dibayar 10 kali angsuran dengan pembayaran tiap kuartal @ Rp 16.000.000,00. Bunga hipotik sebesar 15% per tahun yang dihitung dari sisa pinjaman hipotik yang belum dibayar.
- Komisi dan biaya-biaya lainnya guna menyelesaikan akte hipotik sejumlah Rp 7.000.000,00 telah dibayar tunai oleh PT. Graha Sentosa. Angsuran pokok dan bunga hipotik untuk pertama kali dimulai pada tanggal 5 Januari 2007

Berikut ini adalah jurnal yang dibuat oleh PT Graha Sentosa

Keterangan	Laba diakui dalam periode penjualan (dalam ribuan rupiah)			Laba diakui secara proporsional dengan pembayaran yang diterima (dalam ribuan rupiah)		
29-9-2006 Dijual sebuah rumah dengan harga Rp 200 juta harga pokok rumah Rp 160.000.000,00	Piutang Rumah Laba penj. rmh	200.000 140.000 60.000		Piutang Rumah Laba penj. Rmh	200.000 160.000 40.000	
Penerimaan pembayaran pertama Rp 40 juta dan hipotik untuk saldo yang belum dibayar Rp 160 juta	Kas Hipotik Piutang	40.000 160.000 200.000		Kas Hipotik Piutang	75.000 125.000 200.000	
Biaya yang dikeluarkan	Biaya penj. Kas	7.000 7.000		Biaya penj. Kas	7.000 7.000	
31-12-2006 Bunga yang masih harus diterima atas hipotik 15% untuk jangka waktu 3 bulan Rp 160jt \times 15% \times 3/12=Rp4.000.000,00	Piutang bunga Pend. Bunga	6.000 6.000		Piutang Bunga Pendp. Bunga	6.000 6.000	
%LK ase = Rp 60 jt/ Rp200jt \times 100%= 30 %. Penerimaan kas tahun 2006 Rp 40jt. Jadi LKD 30% \times Rp 40jt=Rp 12jt				LKBD LKD	12.000 12.000	
Menutup rekening nominal	Laba Pendp Bunga Bi Penj. Laba/Rugi	12.000 6.000 7.000 11.000		LKD Pendp Bunga Bi penj. Laba/Rugi	12.000 6.000 7.000 11.000	
1-1-2007 (Penyesuaian kembali)	Pendp. Bunga Piut. Bunga	6.000 6.000		Pendp bunga Piut. Bunga	6.000 6.000	
5-1-2007 Diterima pembayaran angsuran hipotik sebesar Rp 16 jt & bunga hipotik sebesar 160 juta \times 15% \times 4/12 = Rp4.000.000,00	Kas Hipotik Pendp bunga	24.000 16.000 8.000		Kas Hipotik Pendp bunga	24.000 16.000 8.000	
5-5-2007 Diterima pembayaran angsuran hipotik sebesar Rp 16 jt & bunga hipotik sebesar 144 jt \times 15% \times 4/12 = Rp7.200.000,00	Kas Hipotik Pendp bunga	23.200 16.000 7.200		Kas Hipotik Pendp bunga	23.200 16.000 7.200	
5-9-2007 Diterima pembayaran angsuran hipotik sebesar Rp 16 jt & bunga hipotik sebesar Rp 128 jutax15% \times 4/12 =Rp 6.400.000,00	Kas Hipotik Pendp bunga	22.400 16.000 6.400		Kas Hipotik Pendp bunga	22.400 16.000 6.400	
31-12-2007 Bunga yang masih harus diteirma atas hipotik 15% untuk jangka waktu 4 bulan Rp112 jutax15% \times 4/12=Rp 5.600.000	Piut. Bunga Pend. Bunga	5.600 5.600		Piut. Bunga Pend. Bunga	5.600 5.600	
menutup rekening nominal ke laba atau rugi . Penerimaan kas tahun 2007 Rp 69,6juta. Jadi LKD 40% \times Rp 69,6juta= Rp 9.600.000,00	Pendpt. Bunga Laba/rugi	27.200 27.200		LKD Piut. Bunga Laba/rugi	9.600 27.200 36.800	
1-1-2008 (Penyesuaian kembali)	Pdp. Bunga Piut. Bunga	5.600 5.600		Pdp bunga Piut. Bunga	5.600 5.600	
5-1-2008 Diterima pembayaran angsuran hipotik sebesar Rp 16 jt & Rp112 jutax15% \times 4/12=Rp 5.600.000	Kas Hipotik Pendp bunga	23.600 16.000 5.600		Kas Hipotik Pendp bunga	23.600 16.000 5.600	

Keterangan:

LKD : Laba Kotor Direalisasi

LKBD :Laba Kotor Belum Direalisasi

Dalam praktek, kemungkinan dapat terjadi pembatalan penjualan angsuran baik untuk barang tidak bergerak maupun barang bergerak. Apabila dalam contoh di kasus ini terjadi pembatalan piutang penjualan angsuran pada tanggal 5 Mei 2008 karena pembeli tidak dapat mengangsur lagi, maka rumah tersebut dikembalikan kepada PT Graha Sentosa. Seandainya harga rumah saat dikembalikan adalah Rp 100.000.000,00. Besarnya Laba/Rugi yang timbul karena pembatalan ini akan tergantung pada metode yang digunakan:

Keterangan	Laba diakui dlm periode penjualan (dlm Rp 000,00)	Laba diakui proporsional dgn pembayaran yg diterima (dalam Rp 000,00)
Total pembayaran UM dan Hipotik yg telah diterima {40.000 + (4 x 16.000)}	104.000	104.000
Kerugian penurunan nilai rumah		
Harga pokok rumah saat dijual 140.000		
Harga pasar rumah saat dimiliki Kembali (86.000)		
	(54.000)	(40.000)
Laba bersih	50.000	64.000
Laba yang telah diakui sebelum pemilikan kembali rumah	(60.000)	31.200
Laba (rugi) pemilikan kembali rumah	(10.000)	32.800

Jurnal yang dibuat saat pembatalan dan pemilikan kembali rumah adalah sebagai berikut:

Laba Diakui Dalam Periode Penjualan (dalam Rp 000,00)		Laba Diakui Proporsional dg Pembayaran yg Diterima (dlm Rp 000,00)	
Rumah	86.000	Rumah	100.000
Rugi pemilik kembalikan	10.000	LKBD	28.800
Piut. Penj. Angs	96.000	Piut. Penj. Angs	96.000
		Lb pemilikan kembali	32.800

Nilai Laba Kotor yg belum Direalisasi (LKBD) adalah (dlm Rp 000,00)

Harga Jual Rumah		200.000
Uang Muka	40.000	
Hipotik = 4 x 16.000	<u>64.000</u>	<u>104.000</u>
		96.000
Laba Kotor yg Blm Direalisasi : 30 % x 96.000		28.800

Laba yang telah diakui sebelum terjadi pembatalan penjualan angsuran:

Laba kotor dari uang muka = 30% x Rp 40.000.000,00 = Rp 12.000.000

Laba kotor angsuran Hipotik = 30% x Rp 64.000.000,00 = Rp 19.200.000

Rp 31.200.000

Penjualan Barang Bergerak

Dalam praktek, selain penjualan biasa (reguler) perusahaan juga melakukan penjualan angsuran. Tujuan perusahaan juga menjual secara angsuran adalah untuk menaikkan omzet penjualan. Bila hal ini yang terjadi dalam perusahaan, maka dalam menyusun Laporan Keuangan harus dipisahkan antara piutang penjualan reguler dan piutang penjualan angsuran.

Contoh :

Berikut ini adalah neraca PT "Sari" 1 Januari 2008:

PT Sari Neraca Per 1-1-2008 (dalam ribuan rupiah)			
Kas	96.500	Utang dagang	45.500
Persediaan barang dagangan	300.000	LKBD th 2006	15.000
Piutang dagang	100.000	LKBD th 2005	8.500
Piutang Penjualan Th 2006	60.000	Modal saham	350.000
Piutang Penjualan angs. Th 2005	42.500	Laba yang ditahan	180.000
Total Aktiva	599.000	Total Aktiva	599.000

Sedangkan transaksi-transaksi yang terjadi selama tahun 2007 di PT Sari adalah sebagai berikut:

(dlm Rp 000,00)

Penjualan tunai sebesar	Rp	70.000
Penjualan kredit sebesar		230.000
BPP		130.000
Penjualan angsuran sebesar		500.000
BPP angsuran		350.000
Pembelian barang dagangan secara kredit		550.000
Penerimaan kas diperoleh dari:		
Piutang dagang		120.000
Piutang penjualan angsuran 2007		300.000
Piutang penjualan angsuran 2006		50.000
Piutang penjualan angsuran 2005		40.000
Pengeluaran kas untuk:		
Pembayaran utang dagang		300.000
Biaya operasi		75.000

Berdasar data di atas, Jurnal yang harus dibuat adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	Jurnal		
Saat penjualan	Kas	70.000	
	Piut dagang	230.000	
	Penjualan		300.000
	Piut Penj. Angs'07	500.000	
Saat pembelian barang dagangan	Penj. Angs		500.000
	Pembelian	550.000	
Penerimaan kas	Utang dagang		550.000
	Kas	510.000	
	Piutang dagang		120.000
	Piut. Penj. Angs'05		300.000
	Piut. Penj. Angs'04		50.000
Pengeluaran kas	Piut. Penj. Angs'03		40.000
	Utang dagang	300.000	
	Biaya operasi	75.000	
	Kas		375.000
31 Desember 2005 Penyesuaian penjualan angsuran	BPP angsuran	350.000	
	Peng.penj. Angs		350.000
Menutup penjualan angsuran	Penj. Angs	500.000	
	BPP angsuran		350.000
	LKBD		150.000
Mencatat laba kotor direalisasi LKD 07 = 30% x 300.000 = 90.000 LKD 06 = 25% x 50.000 = 12.500 LKD 05 = 20% x 40.000 = 8.000	LKBD tahun 2007	90.000	
	LKBD tahun 2006	12.500	
	LKBD tahun 2005	8.000	
	LKD 2005-2007		110.500

Menutup persediaan awal, pembelian dan penjualan angsuran ke laba/rugi	Laba/rugi Penj. Angs Pembelian Persediaan awal	500.000 350.000 550.000 300.000
Menutup pesediaan akhir Rp 24 juta ke Laba/rugi	Persediaan akhir Laba/rugi	470.000 470.000
Menutup penjualan reguler ke Laba/rugi	Penjualan Laba/rugi	300.000 300.000
Menutup LKD Laba/rugi	LKD Laba/rugi	110.500 110.500
Menutup biaya operasi ke Laba/rugi	Laba/rugi Biaya operasional	75.000 75.000
Mencatat biaya pajak penghasilan 15%	Biaya Pjk Penghasilan Utang PPh	45.825 45.825
Menutup PPh ke Laba/rugi	Laba/rugi Biaya PPh	45.825 45.825
Menutup Laba/rugi ke laba yang ditahan	Laba/rugi Saldo laba	259.675 259.675

Perhitungan persentase Laba Kotor masing-masing tahun dihitung sebagai berikut:

Tahun 2005 =	8.500/42.500	x	100 % =	20 %
Tahun 2006 =	15.000/ 60.000	x	100 % =	25 %
Tahun 2007 =	150.000/500.000	x	100 % =	30 %

Perhitungan Persediaan akhir:

Persediaan awal	300.000	
Pembelian	<u>550.000</u>	
Barang siap dijual		850.000
Persediaan Akhir		(x)
Beban pokok penjualan		
BPP Penjualan reguler	130.000	
BPP Penjualan Angsuran	<u>350.000</u>	
		380.000

Persamaan:

$$\begin{aligned}
 850.000 - x &= 380.000 \\
 850.000 - 380.000 &= x \\
 x &= \mathbf{470.000}
 \end{aligned}$$

LAPORAN KEUANGAN

Jika Perusahaan Melakukan Penjualan Reguler dan Penjualan Angsuran

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa disamping menjual secara reguler, perusahaan menjual secara angsuran dengan tujuan untuk meningkatkan omzet penjualan. Apabila hal ini terjadi, maka dalam neraca harus dijelaskan secara rinci :

- a. saldo piutang penjualan angsuran dari masing-masing periode penjualan angsuran
- b. saldo dari laba kotor belum direalisasi dari masing-masing periode penjualan angsuran

Dalam laporan laba atau rugi harus dipisahkan antara penjualan, biaya dan laba atau rugi dari penjualan reguler dan dari penjualan angsuran. Sedangkan laba atau rugi yang dicantumkan dalam laporan laba atau rugi adalah laba/rugi yang direalisasi selama satu periode tersebut (termasuk laba yang direalisasi dari penjualan angsuran periode-periode sebelumnya).

Di bawah ini diberikan ilustrasi Laporan Keuangan apabila perusahaan disamping menjual secara reguler juga menjual secara angsuran.

PT "Siliwangi"			
Neraca			
Per 31 Desember 2007		(dalam ribuan rupiah)	
Aktiva		Pasiva	
Kas	167.000		
Piutang dagang	70.000		
Piutang penjualan angsr:		Utang dagang	350.000
Th. 2007	300.000	Utang PPh	9.500
Th.2006	35.000		
Th. 2005	<u>10.000</u>	Pendapatan ditangguhkan	
	345.000	LKBD	
Pers. Barang Dagangan	600.000	Th. 2007	175.000
		Th.2006	26.000
Aktiva Tetap (bersih)	1.000.000	Th.2005	<u>5.000</u>
		Total Utang Lancar	206.000
		Hutang Obligasi	400.000
		Total Hutang	965.500
		Modal saham	1.000.000
		Agio saham	150.000
		Saldo laba	166.500
Total aktiva	2.182.000	Total modal	<u>1.316.500</u>
		Total pasiva	<u>2.182.000</u>

PT" Brawijaya" Laporan Laba Rugi Untuk Periode yg Berakhir 31 Desember 2007			
	Penjln angs. (dlm Rp000,00)	Penjln reguler (dlm Rp 000,00)	Total (dlm Rp000,00)
Penjualan	200.000	190.000	390.000
Beban pokok penjualan:			
Pers 1-1-2005 120.000			
Pembelian <u>400.000</u>			
Tersedia untuk dijual 520.000			
Persd 31 Des 2005 <u>(240.000)</u>			
	<u>(150.000)</u>	<u>(130.000)</u>	<u>(280.000)</u>
Laba kotor	50.000	60.000	110.000
LKBD dari penjualan th. 2007	<u>30.000</u>		<u>30.000</u>
LKD dari penjualan th. 2007	20.000	60.000	80.000
LKD dari 2005-2007			<u>16.150</u>
Total LKD			96.150
Biaya operasi			<u>50.000</u>
Laba sebelum pajak			46.150
Pajak penghasilan			<u>4.615</u>
Laba setelah pajak			41.535

Pajak penghasilan:
 $10\% \times \text{Rp } 46.150.000,00 = \text{Rp } 4.615.000,00$

PT Brawijaya Laporan Perubahan Laba Yang Ditahan Untuk Periode yang Berakhir Tahun 2007 (dalam ribuan rupiah)	
Saldo laba per 1 Januari 2005	60.000
Laba bersih setelah pajak penghasilan	<u>41.535</u>
	101.535
Pembagian dividen	<u>0</u>
Saldo laba per 31 Desember 2005	<u>101.535</u>

SOAL DAN PENYELESAIAN

Soal

Berikut ini adalah informasi dari PT. Arjuna:

Tahun	Persentase Laba	Saldo Piut. Penj. Angs. 1-1-2007 (dlm 000,00)	Pengumpulan Piut Selama th. 2007 (dlm 000,00)	Saldo Piut. Penj. Angs. 31-12-2007 (dlm 000,00)
2005	35%	750.000	750.000	0
2006	40%	1.250.000	850.000	400.000
2007	45%		150.000	1.250.000

Diminta:

1. Hitung saldo laba kotor belum direalisasi tanggal 1 Januari 2007
2. Hitung saldo laba kotor belum direalisasi tanggal 31 Desember 2007
3. Hitung saldo laba kotor direalisasi tanggal 31 Desember 2007
4. Buat jurnal untuk menyesuaikan laba kotor belum direalisasi ke laba kotor direalisasi pada tanggal 31 Desember 2007

Penyelesaian

1. Saldo laba kotor belum direalisasi tanggal 1 Januari 2007 adalah sebagai berikut:

Dari penjualan tahun

$$\begin{array}{lcl} 2005: & 35\% \times \text{Rp } 750.000.000,00 & = \text{Rp } 262.500.000,00 \\ 2006: & 40\% \times \text{Rp } 1.250.000.000,00 & = \text{Rp } 500.000.000,00 \\ \text{Jumlah} & & \text{Rp } 762.500.000,00 \end{array}$$

2. Saldo laba kotor belum direalisasi tanggal 31 Desember 2007 adalah sebagai berikut:

Dari penjualan tahun

$$\begin{array}{lcl} 2005: & 35\% \times \text{Rp } 400.000.000,00 & = \text{Rp } 140.000.000,00 \\ 2006: & 40\% \times \text{Rp } 1.250.000.000,00 & = \text{Rp } 500.000.000,00 \\ \text{Jumlah} & & \text{Rp } 640.000.000,00 \end{array}$$

3. Saldo laba kotor belum direalisasi tanggal 31 Desember 2007 adalah sebagai berikut:

Dari penjualan tahun

2005:	35% x Rp 750.000.000,00	=	Rp 262.500.000,00
2006:	40% x Rp 850.000.000,00	=	Rp 340.000.000,00
2007:	45% x Rp 150.000.000,00	=	<u>Rp 67.500.000,00</u>
Jumlah			Rp 670.000.000,00

4. Jurnal untuk mencatat penyesuaian laba kotor belum direalisasikan ke laba kotor direalisasikan pada tanggal 31 Desember 2007 adalah sebagai berikut:

LKBD tahun 2005	Rp 262.500.000,00
LKBD tahun 2006	Rp 340.000.000,00
LKBD tahun 2007	Rp 67.500.000 ,00
LKD tahun 2005-2007	Rp 670.000.000,00

Keterangan:

LKBD = laba kotor belum direalisasi

LKD = laba kotor direalisasi

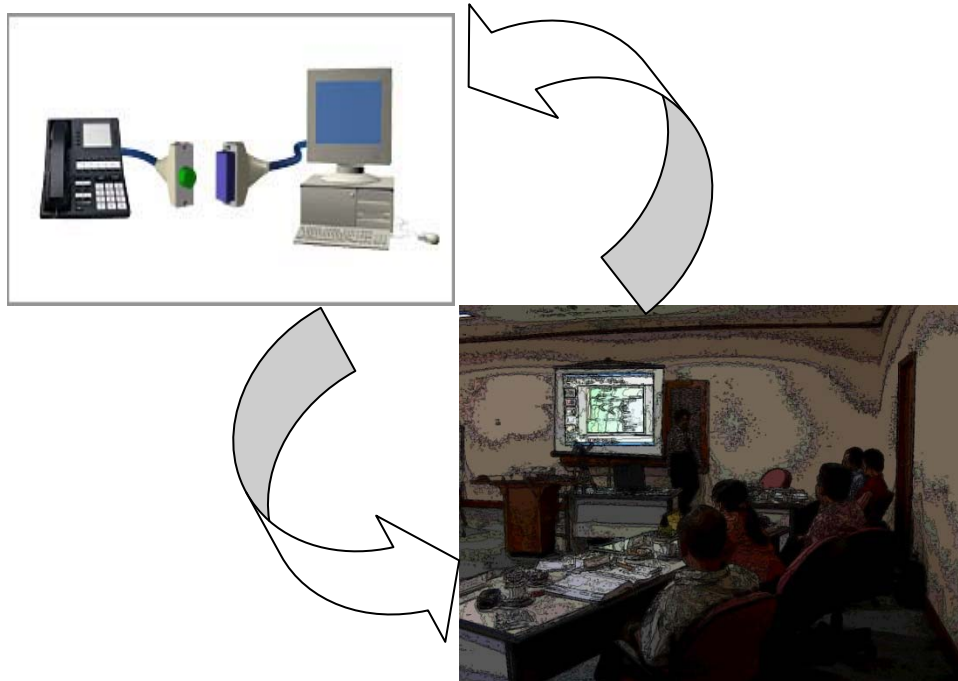
BAB 8



AKUNTANSI untuk KANTOR PUSAT dan KANTOR CABANG

- ☺ Akuntansi Kantor Agen
- ☺ Akuntansi Kantor Cabang
- ☺ Metode Pencatatan Persediaan
- ☺ Laporan Keuangan Konsolidasi
- ☺ Contoh Transaksi

AKUNTANSI untuk KANTOR PUSAT dan KANTOR CABANG



Perusahaan-perusahaan besar atau yang sedang berkembang, selalu berusaha meningkatkan volume penjualannya. Aspek pemasaran merupakan aspek penting dalam usaha pencapaian tujuan ini. Oleh karena itu bagian pemasaran merupakan ujung tombak keberhasilan suatu perusahaan.

Dalam rangka memperluas daerah pemasaran, perusahaan melakukan pemetaan wilayah sehingga dapat diketahui pasar potensial

bagi produk atau jasa yang dihasilkan/ditawarkan. Dengan cara ini dapat diketahui *market share* (bagian pasar yang dapat dimasuki) dari produk atau jasa yang dihasilkan/ditawarkan perusahaan. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk menangkap peluang dari *market share* yang sudah diketahui ini antara lain dengan cara membuka kantor agen atau bahkan membuka kantor cabang.

Pada dasarnya kantor agen berbeda dengan kantor cabang. Kantor agen hanya berfungsi mencari pembeli atau memperoleh order. Penjualan kepada konsumen dilakukan langsung oleh kantor pusat. Pembayaran juga diterima langsung dari konsumen ke kantor pusat. Kantor cabang mempunyai wewenang yang lebih luas dibandingkan kantor agen, karena selain berfungsi mencari pembeli kantor cabang dapat melakukan transaksi penjualan secara langsung kepada konsumen. Wewenang yang lebih besar lagi adalah kantor cabang dapat membeli barang dagangan dari luar.

AKUNTANSI KANTOR AGEN

Perbedaan paling mendasar pencatatan yang dilakukan Kantor Cabang dan Kantor Agen berhubungan dengan kewenangan masing-masing dalam menangani konsumen akhir. Kantor Cabang mempunyai kewenangan penuh sehubungan dengan transaksi penjualan termasuk menerima pembayaran secara langsung dari konsumen akhir, sedangkan Kantor Agen tidak mempunyai kewenangan melakukan transaksi penjualan. Pencatatan akuntansi hanya dilakukan oleh Kantor Pusat. Kantor Cabang melaksanakan pembukuan tersendiri karena Kantor Cabang mempunyai kewenangan dalam melakukan transaksi penjualan.

Kantor Agen dalam melakukan kegiatannya memperoleh fasilitas dari Kantor Pusat. Salah satu fasilitas tersebut adalah berupa uang yang merupakan modal kerja bagi Kantor Agen. Oleh karena itu pencatatan yang dilakukan oleh Kantor Agen hanya sebatas pertanggung jawaban atas modal kerja dari Kantor Pusat. Karena modal kerja dari Kantor Pusat diterima dalam bentuk uang tunai, maka dalam pengelolaannya seperti mengelola kas kecil dengan sistem imprest. Bukti-bukti pemakaian modal kerja harus dikumpulkan oleh Kantor Agen karena laporan ke Kantor Pusat dibuat berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan tersebut.

Metode yang dapat dipakai oleh Kantor Pusat dalam melakukan pencatatan sehubungan dengan kegiatan di Kantor Agen, yaitu:

1. Laba atau rugi Kantor Agen tidak dipisahkan dengan laba atau rugi Kantor Pusat.
2. Laba atau rugi kantor agen dipisahkan dengan laba atau rugi kantor pusat.

Untuk tujuan pengendalian intern dan penilaian kinerja Kantor Pusat , sebaiknya digunakan metode yang kedua yaitu Laba atau Rugi Kantor Agen dipisahkan dengan Laba atau Rugi yang diperoleh Kantor Pusat sendiri. Apalagi bila kantor Agennya lebih dari satu. Dalam praktik yang sering digunakan adalah metode yang pertama atau laba /rugi kantor agen tidak dipisahkan dengan laba atau rugi Kantor Pusat. Penjelasan dari ke dua metode adalah sebagai berikut:

1. Laba atau rugi kantor agen tidak dipisahkan dengan laba atau rugi kantor pusat

Dalam metode ini pendapatan dan biaya kantor agen tidak dipisahkan dengan pendapatan dan biaya kantor pusat. Sehingga tidak bisa diketahui laba atau rugi kantor agen secara tersendiri. Bila metode ini yang digunakan, Kantor Pusat hanya dapat mengetahui laba atau rugi secara total/keseluruhan.

2. Laba atau rugi Kantor Agen dipisahkan dengan laba atau rugi Kantor Pusat

Dalam metode ini pendapatan dan biaya kantor agen dipisahkan dari pendapatan dan biaya kantor pusat. Sehingga laba atau rugi kantor agen bisa diketahui secara individual. Apabila metode ini yang dipakai maka diperlukan rekening tersendiri. Rekening-rekening yang dibutuhkan bila digunakan metode ini antara lain:

- a. Modal kerja kantor agen
- b. Penjualan kantor agen
- c. BPP kantor agen
- d. Biaya pemasaran kantor agen
- e. Biaya administrasi dan umum kantor agen

Apabila Kantor Pusat mempunyai Kantor Agen lebih dari satu, maka dapat digunakan salah satu dari cara berikut:

- a. rekening masing-masing Kantor Agen disendirikan atau diberikan kode berbeda

- b. Kantor Pusat hanya memakai satu rekening buku besar untuk seluruh Kantor Agen, sedangkan untuk masing-masing Kantor Agen hanya dibuatkan rekening pembantu

Contoh:

PT. Singgasana berkedudukan di Malang bergerak dalam bidang alat-alat kesehatan Pada awal tahun 2007 membuka Kantor Agen di Kediri. Ikhtisar transaksi keuangan selama tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pusat mengirim kas senilai Rp 10.000.000,00 sebagai modal kerja awal di Kantor Agen.
2. Kantor Pusat mengirim barang dagangan sebagai sampel dengan harga pokok Rp 2.500.000,.
3. Kantor Pusat membeli barang dagangan untuk mengisi persediaan seharga Rp 400.000.000,00 secara kredit.
4. Transaksi penjualan selama tahun 2007 terdiri dari :
 - Penjualan langsung ke Kantor Pusat Rp 500.000.000,00 sedangkan beban pokok penjualan Rp 300.000.000,00
 - Penjualan melalui Kantor Agen Rp 200.000.000,00 dengan beban pokok penjualan Rp 160.000.000,00
5. Piutang yang berhasil ditagih Rp 350.000.000,00
6. Pelunasan utang dagang Rp 200.000.000,00
7. Biaya-biaya yang dikeluarkan adalah sebagai berikut:
 - Biaya pemasaran kantor pusat Rp 40.000.000,00
 - Biaya pemasaran kantor agen Rp 12.000.000,00
 - Biaya administrasi dan umum kantor pusat Rp 16.000.000,00
 - Biaya administrasi dan umum kantor agen Rp 3.000.000,00
8. Depresiasi gedung yang menjadi beban tahun ini adalah:
 - Kantor pusat Rp 7.500.000,00
 - Kantor agen Rp 3.000.000,00
9. Persediaan sampel tinggal Rp 30.00.000,00

Jurnal yang dibuat oleh kantor pusat dalam satu periode untuk masing-masing metode disajikan dalam tabel pada halaman berikut (asumsi pencatatan persediaan dengan metode perpetual).

Keterangan	L/R Kantor Agen Tidak Dipisahkan (dlm ribuan rupiah)			L/R Kantor Agen Dipisahkan (dlm ribuan rupiah)		
1. Mencatat pembentukan modal kerja	Modal kerja K. Agen Kas	10.000	10.000	Modal Kerja K. Agen Kas	10.000	10.000
2. Mencatat pengiriman barang sampel	Persed sampel K. Agen Persed. Brg. Dg	2.500	2.500	Persed sampel K. Agen Persed Brg Dgg	2.500	2.500
3. Mencatat Pembelian	Persed Brg Dg Utang Dagang	400.000	400.000	Persed Brg Dgg Utang Dg	400.000	400.000
4. Mencatat penjualan	Piutang Dagang Penjualan	700.000	700.000	Piutang Dagang Penjualan K. Pusat Penjualan K. Agen	700.000	500.000 200.000
5. Mencatat BPP	BPP Persed Brg	460.000	460.000	BPP K. Pusat BPP K. Agen Persediaan Barang Dg	300.000 160.000	460.000
6. Mencatat pelunasan piutang	Kas Piutang Dagang	350.000	350.000	Kas Piutang Dagang	350.000	350.000
7. Mencatat pelunasan utang dagang	Utang Dagang Kas	200.000	200.000	Utang Dagang Kas	200.000	200.000
8. Mencatat pembebanan biaya operasional	Bi. Pemasaran Bi. Adm & Umum Kas	52.000 19.000	71.000	Bi. Pemasaran K. Pusat Bi. Pemasaran K. Agen Bi. Adm & Umum K. Pusat Bi. Adm & Umum K. Agen Kas	40.000 12.000 16.000 3.000	71.000
9. Mencatat Penyusutan depresiasi gedung	Bi. Depresiasi Gd. Akum. Depresiasi Gd.	10.500	10.500	Bi. Depre Gd. K. Pusat Bi. Depre Gd. K. Agen Akum Depre	7.500 3.000	10.500
10. Mencatat pserdiaan sampel yang sudah dipakai	Bi. Pemasaran Persed. Sampel K. Agen	2.500	2.500	Bi. Pemasaran K. Agen Persed sampel K. Agen	2.500	2.500
11. Mengakui L/R K. Agen (Jurnal Penutup)				Penjualan K. Agen BPP K. Agen Bi. Pemasaran K. Agen Bi. Adm & Umum K. Agen L/R K. Agen	200.000	160.000 12.000 3.000 25.000
12. Mengakui L/R Perusahaan Secara Keseluruhan	Penjualan BPP Bi. Pemasaran Bi. Adm & Umum L/R	700.000	460.000 52.000 19.000 169.000	Penjualan L/R K. Agen BPP Bi. Pemasaran Bi. Adm & Umum L/R	500.000 25.000	300.000 40.000 16.000 169.000

AKUNTANSI KANTOR CABANG

Seperti dijelaskan di bagian sebelumnya bahwa Kantor Cabang mempunyai kewenangan dalam melakukan transaksi penjualan. Oleh karena itu Kantor Cabang melaksanakan pembukuan tersendiri. Jadi baik Kantor Pusat maupun Kantor Cabang menyelenggarakan pencatatan akuntansi sendiri-sendiri. Pencatatan ini hanya berguna untuk pihak intern Kantor Pusat maupun Kantor Cabang. Untuk kepentingan pihak ekstern Kantor Pusat menyiapkan laporan konsolidasi yaitu laporan keuangan yang berisi Kinerja Keuangan Gabungan dari Kantor Pusat dan Kantor Cabang.

Berbeda dengan investasi kantor Pusat di kantor Agen yang hanya berupa modal kerja awal saja, investasi yang ditanamkan oleh Kantor Pusat ke Kantor Cabang meliputi semua kebutuhan awal kantor Cabang. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kantor Pusat bertindak sebagai *Investor* (pihak penyandang dana) dan Kantor Cabang sebagai *Investee* (pihak penerima dana). Oleh karena itu diperlukan rekening yang bersifat Resiprokal (timbang balik) antara Kantor Pusat dan Kantor Cabang untuk menampung transaksi yang bersifat resiprokal ini, Kantor Pusat menggunakan nama rekening Kantor Cabang, sebaliknya Kantor Cabang menggunakan rekening Kantor Pusat. Rekening kantor cabang merupakan hak kantor pusat sedangkan rekening kantor pusat merupakan kewajiban kantor cabang. Dalam membuat laporan konsolidasi rekening resiprokal harus dieleminasi

Contoh transaksi yang mengakibatkan timbulnya rekening timbal balik/resiprokal ditampilkan pada contoh jurnal di bawah ini.

Keterangan	Kantor Pusat (KP)	Kantor Cabang (KC)
1. Pengiriman kas atau aktiva selain barang dengan dari KP ke KC, pengiriman kas atau aktiva selain barang dengan dari KC ke KP	KC laba atau rugi xxx Kas (akv) xxx Kas (akv)laba atau rugi KClaba atau rugi	Kas (aktiva) xxx KP xxx KP xxx Kas (aktiva) xxx
2. Pengiriman barang dagang dari KP ke KC	<u>Sistem Fisik</u> KC xxx Pengiriman brg ke KC xxx <u>Sistem Perpetual</u> KC xxx Persed Brg Dg xxx	<u>Sistem Fisik</u> Pengiriman brg ke KP xxx KP xxx <u>Sistem Perpetual</u> Persed Brg Dg xxx KP xxx
Pengembalian Brg Dgg dari KC ke KP	<u>Sistem Fisik</u> Pengiriman brg ke KCxxx KC xxx <u>Sistem Perpetual</u> Persed Brg Dg xxx KP xxx	<u>Sistem Fisik</u> KP xxx Pengiriman Brg dari KP xxx <u>Sistem Perpetual</u> KP xxx Persediaan Brg dr KP xxx

3. Pengakuan Laba KC	KC	xxx		L/R	xxx	
	L/R KC		xxx	KP		xxx
Pengakuan Rugi KC	L/R KC	xxx		KP	xxx	
	KC		xxx	L/R		xxx

Contoh :

Berikut ini adalah contoh transaksi-transaksi yang ada di kantor cabang dari PT. "Dewi Ratih" berkedudukan di Malang dan bergerak dalam bidang alat-alat kesehatan, pada awal tahun 2007 membuka Kantor Cabang di Jember. Ikhtisar transaksi keuangan selama tahun 2007 diringkas sebagai berikut:

1. Kantor Cabang menerima uang Rp 150.000.000,00 dari kantor pusat
2. Kantor Cabang membeli peralatan secara tunai senilai Rp 75.000.000,00. Peralatan ini mempunyai umur ekonomis 5 tahun
3. Menerima barang dagangan senilai Rp 115.000.000,00 dari kantor pusat
4. Membeli barang dagangan dari supplier luar Rp 30.000.000,00 secara tunai
5. Menjual barang dagang seharga Rp 200.000.000,00 secara tunai
6. Mengembalikan barang dagang yang diterima dari kantor pusat seharga Rp 7.500.000,00 karena barang tersebut rusak.
7. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh kantor cabang sebagai berikut:
 - Gaji Rp 30.000.000,00
 - Bunga Rp 25.000.000,00
 - Lain-lain Rp 15.000.000,00
8. Mengirim uang Rp 100.000.000,00 ke kantor pusat
9. Pada akhir tahun diketahui utang gaji sebesar Rp 7.000.000,00 dan biaya depresiasi Rp 15.000.000,00
10. Persediaan barang dagangan yang diterima dari kantor pusat pada akhir tahun Rp 6.000.000,00. Persediaan barang dagangan yang dibeli dari supplier luar pada akhir tahun Rp 35.000.000,00

Metode pencatatan persediaan secara fisik

Dari data di atas, berikut ini adalah jurnal yang dibuat kantor pusat dan kantor cabang:

Keterangan	Kantor Pusat (dml ribuan rupiah)	Kantor Cabang (dml ribuan rupiah)
1. Menerima uang dari KP Rp 150.000.000	KC 150.000 Kas 150.000	Kas 150.000 KP 150.000
2. Membeli Peralatan seharga Rp 75.000.000,00		Peralatan 75.000 Kas 75.000
3. Menerima barang dagang dari KP seharga Rp 115.000.000,00	KC 115.000 Pengir. Brg ke KC 115.000	Pengiriman Brg dr KP 115.000 KP 115.000
4. Membeli barang dagang dari Supplier luar Rp 30.000.000,00 secara tunai		Pembelian 30.000 Kas 30.000
5. Mengembalikan barang dagang KP Rp 7.500.000,00 secara tunai	Pengir. Brg ke KC 7.500 KC 7.500	KP 7.500 Pengir. brg dr KP 7.500
6. Menjual barang dagang seharga Rp 200.000.000,00 secara tunai		Kas 200.000 Penjualan 200.000
7. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh KC - Gaji Rp 30.000.000,00 - Bunga Rp 25.000.000,00 - Lain-lain Rp 15.000.000,00	-	Bi. Gaji 30.000 Bi. Bunga 25.000 Bi. Lain-lain 15.000 Kas 70.000
8. Mengirim uang ke KP Rp 100.000.000,00	Kas 100.000 KC 100.000	KP 100.000 Kas 100.000
9. Membuat jurnal penyesuaian - Utang gaji Rp 7.000.000,00 - Depresiasi Rp 15.000.000,00		Bi. Gaji 7.000 Utang Gaji 7.000 Bi. Depresiasi 15.000 Akum Depresiasi 15.000
10. Jurnal Penutup		Penjualan 200.000 Persediaan akhir 6.000 Pengiriman dr KP 107.500 Pembelian 30.000 Bi. Gaji 30.000 Bi Bunga 25.000 Bi Lain-lain 15.000 Bi. Depresiasi 15.000 KP 16.500
11. Jurnal Penyesuaian	KC 16.500 Laba KC 16.500	

Laporan Keuangan Konsolidasi

Dipandang dari segi ekonomi Kantor Pusat dan Kantor Cabang adalah satu kesatuan ekonomi. Disamping itu bagi pihak eksternal menganggap bahwa Kantor Pusat dan Kantor-kantor Cabangnya hanya merupakan satu perusahaan. Oleh karena itu sesuai dengan konsep *enterprise* (satu kesatuan ekonomi) Kantor Pusat harus menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi (*Consolidated Income Statement*) yang

merupakan Laporan Keuangan Gabungan antara Kantor Pusat dan Kantor Cabang.

Prosedur penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi:

- a. Membuat jurnal Eliminasi
- b. Membuat Kertas Kerja (*Worksheet*)
- c. Menyusun Laporan keuangan Konsolidasi

Masing-masing tahapan dalam penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi dijelaskan pada bagian berikut ini:

a. Membuat Jurnal Eliminasi

Laporan Keuangan Konsolidasi merupakan Laporan Keuangan yang menggabungkan Laporan Keuangan Kantor Pusat dan Kantor Cabang. Jadi jurnal eliminasi yang dibuat tidak akan mempengaruhi Laporan Keuangan individual, baik Kantor Pusat maupun Kantor Cabang. Jurnal Eliminasi hanya diposting pada kertas kerja yang dibuat dalam rangka penyusunan Laporan Konsolidasi. Tujuan pembuatan Jurnal Eliminasi adalah menghilangkan (mengeliminir) semua saldo rekening resiprokal. Caranya dengan mendebet rekening yang dikredit dan mengkredit rekening yang didebet dari transaksi yang bersifat resiprokal.

Contoh:

- ✓ Mengeliminasi rekening Pengiriman Barang dari Kantor Pusat ke Kantor Cabang.

Jurnal di Kantor Pusat		Jurnal di Kantor Cabang	
KC	115.000	Pengiriman Brg dr KP	115.000
Pengir. Brg ke KC	115.000	KP	115.000

Jurnal Eliminasinya

- Pengiriman Brg ke KC 115.000
Pengiriman Brg dr KP 115.000
- Kantor Pusat 115.000
Kantor Cabang 115.000

b. Membuat Kertas Kerja (*Worksheet*)

Pada dasarnya pembuatan Kertas Kerja (*Work Sheet*) adalah untuk mempermudah dan mempercepat penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi. Prosedur untuk penyusunan Kertas Kerja Konsolidasi :

1. masukkan angka-angka yang terdapat di Laporan Keuangan Individual ke kolom yang tersedia.
2. masukkan angka-angka dari jurnal eliminasi ke kolom Jurnal eliminasi sesuai debit dan kreditnya di buku besar.
3. Menghitung angka-angka yang akan disajikan di Laporan keuangan Konsolidasi dengan cara mengkompilasi dari langkah 1(satu) dan langkah 2 (dua)

c. Menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi

Setelah kertas kerja selesai disusun, langkah selanjutnya adalah membuat Laporan Keuangan Konsolidasi yang sumbernya berasal dari kolom terakhir kertas kerja sesuai dengan format yang sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 1.

Contoh kertas kerja yang digunakan dalam rangka penyusunan laporan Keuangan konsolidasi Kantor Pusat dan Kantor Cabang disajikan pada tabel berikut: Dengan membuat kertas kerja terlebih dahulu , Kantor Pusat dengan mudah dapat menyusun Laporan keuangan Konsolidasi.

Laporan Keuangannya disajikan di bawah ini:

PT "X"		
Laporan Laba-Rugi		
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2007		
(dlm Rp 000,00)		
Penjualan		259.000
Beban pokok penjualan		<u>153.000</u>
Laba Kotor		106.000
<u>Biaya Operasional:</u>		
Biaya gaji	50.000	
Biaya depresiasi gedung	5.000	
Biaya depresiasi peralatan	10.000	
Biaya administrasi	7.000	
Biaya bunga	3.000	
Biaya lain-lain	<u>10.000</u>	<u>85.000</u>
Laba Bersih		<u>21.000</u>

PT "X"
Laporan Laba Yang Ditahan
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2007
(dlm Rp 000,00)

Laba yang ditahan 1 Januari	110.000
Laba bersih	<u>21.000</u>
	89.000
Dividen	<u>(10.000)</u>
Saldo laba 31 Desember	<u>121.000</u>

PT "X"
Neraca
Per 31 Desember 2007
(dlm Rp 000,00)

Aktiva Lancar		Hutang Lancar	
Kas	50.000	Utang dagang	50.000
Piutang dagang (netto)	60.000	Utang gaji	<u>5.000</u>
Persediaan	<u>86.000</u>		55.000
Total Aktiva Lancar	196.000	Ekuitas	
Aktiva Tetap		Modal saham	200.000
Tanah	20.000	Laba yang ditahan	<u>121.000</u>
Gedung	100.000		<u>321.000</u>
Peralatan	<u>60.000</u>		
Total Aktiva Tetap	<u>180.000</u>		
Total Aktiva	<u>376.000</u>	Total Pasiva	<u>376.000</u>

Kertas Kerja Kantor pusat dan Kantor Cabang 31-12-2007

Keterangan	K P (dlm Rp 000,00)	K C (dlm Rp 000,00)	Jurnal Eliminasi (dlm Rp 000,00)		Laporan Keu. PT. "X"
			Debet	Kredit	
Laporan Laba atau rugi					
Penjualan	229.000	30.000			259.000
Kantor cabang	2.000		2.000		
Beban pokok penjualan	140.000	13.000			153.000
Biaya gaji	43.000	7.000			50.000
Biaya depresiasi gedung	5.000				5.000
Biaya depresiasi peralatan	8.000	2.000			10.000
Biaya administrasi	6.000	1.000			7.000
Biaya bunga		3.000			3.000
Biaya lain-lain	8.000	2.000			10.000
Laba bersih	21.000	2.000			21.000
Laporan laba yang ditahan					
Laba yang ditahan 1 Januari	110.000				110.000
Kantor cabang		20.000	20.000		
Laba bersih	21.000	2.000			21.000
Dividen	10.000				10.000
Saldo laba 31 Desember	121.000	22.000			121.000
Neraca					
Kas	41.000	9.000			50.000
Piutang dagang (netto)	60.000				60.000
Persediaan	80.000	6.000			86.000
Tanah	20.000				20.000
Gedung	100.000				100.000
Peralatan	52.000	8.000			60.000
Kantor cabang	22.000			20.000 2.000	
Total aktiva	375.000	23.000			376.000
Utang dagang	50.000				50.000
Utang gaji	4.000	1.000			5.000
Modal saham	200.000				200.000
Laba yang ditahan	121.000				121.000
Kantor cabang		22.000			
Total pasiva	375.000	23.000			376.000

SOAL DAN PENYELESAIAN

Soal

Berikut ini neraca saldo 31 Desember 2007, dari PT. Lumintu di Surabaya dan kantor cabangnya di Malang:

Keterangan	Kantor Pusat (dlm ribuan Rp)	Kntr Cabang (dml ribuan Rp)
Debit		
Kas	168.000	34.400
Piutang dagang	509.000	149.200
Persediaan barang 1 Januari 2007	362.000	
Aktiva tetap (neto)	192.400	
Kantor cabang	230.800	
Pembelian	1.263.000	
Biaya operasi	278.000	87.600
Pengiriman barang dari pusat		440.000
Jumlah	3.104.000	711.000
Kredit		
Utang dagang	164.000	
Penjualan	1.600.000	380.000
Pengiriman barang ke kantor cabang	440.000	
Kantor pusat		330.000
Modal saham	800.000	
Laba yang ditahan	100.000	
Jumlah	3.104.000	711.200

Persediaan barang dagangan 31 Desember 2007 masing-masing sebesar Rp 383.200.000,00 untuk kantor pusat dan Rp 96.800.000,00 untuk kantor cabang.

Diminta:

1. Berapa besarnya laba atau rugi operasi kantor pusat Bandung?
2. Berapa besarnya laba atau rugi operasi kantor cabang Surakarta?
3. Bagaimana mencatat penutupan rekening laba atau rugi kantor pusat Bandung?
4. Bagaimana mencatat penutupan rekening laba atau rugi kantor cabang Surakarta?
5. Bagaimana jurnal pemindahan laba atau rugi kantor cabang ke laba atau rugi kantor pusat?

6. Bagaimana mencatat pemindahan saldo laba atau rugi tahun berjalan ke laba yang ditahan?
7. Berapa besarnya yang tersedia dijual baik di kantor pusat maupun di kantor cabang selama periode 2007?
8. Sebutkan pos-pos reciprocal (timbang balik) yang harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan gabungan kantor pusat dan kantor cabang tersebut?
9. Berapa jumlah beban pokok penjualan gabungan antara kantor pusat dan kantor cabang?
10. Berapa jumlah saldo laba yang ditahan tanggal 31 Desember 2007?

Penyelesaian:

1. Laba atau rugi kantor pusat Surabaya adalah sebagai berikut:

Penjualan		Rp 1.600.000.000,00
Persediaan 1 Januari 2007	Rp 362.000.000,00	
Pembelian	<u>Rp 1.263.200.000,00</u>	
Barang tersedia dijual	Rp 1.265.200.000,00	
Pengiriman barang ke kantor cabang	<u>(Rp 440.000.000,00)</u>	
Barang tersedia dijual di kantor pusat	Rp 1.185.200.000,00	
Persediaan akhir	<u>(Rp 383.200.000,00)</u>	
Beban pokok penjualan		<u>(Rp 802.000.000,00)</u>
Laba kotor		Rp 798.000.000,00
Biaya operasi		<u>(Rp 278.000.000,00)</u>
Laba kantor pusat		Rp 520.000.000,00

2. Laba atau rugi operasi Kantor Cabang Malang adalah sebagai berikut:

Penjualan		Rp 380.000.000,00
Pengiriman barang ke Kantor Pusat	Rp 440.000.000,00	
Persediaan akhir	<u>(Rp 96.000.000,00)</u>	
Beban pokok penjualan		<u>(Rp 343.000.000,00)</u>
Laba kotor		Rp 36.800.000,00
Biaya operasi		<u>Rp 87.600.000,00</u>
Rugi Kantor cabang		<u>(Rp 50.800.000,00)</u>

3. Jurnal penutup yang berasal dari laba atau rugi kantor pusat Surabaya adalah sebagai berikut:

Penjualan	Rp	1.600.000.000,00	-
Beban pokok penjualan		-	Rp 802.000.000,00
Biaya operasi		-	Rp 278.000.000,00
Laba atau rugi		-	Rp 520.000.000,00

4. Jurnal penutup yang berasal dari laba atau rugi kantor cabang Bandung adalah sebagai berikut:

Penjualan	Rp	380.000.000,00	-
Laba atau rugi			Rp 50.800.000,00
Beban pokok penjualan		-	Rp 343.200.000,00
Biaya operasi		-	Rp 87.600.000,00

5. Jurnal untuk memindahkan laba atau rugi kantor cabang Malang ke kantor pusat Surabaya adalah sebagai berikut:

Laba atau rugi	Rp	50.800.000,00	-
Kantor cabang		-	Rp 50.800.000,00

6. Jurnal untuk mencatat pemindahan saldo laba atau rugi tahun berjalan ke laba yang ditahan adalah sebagai berikut:

Laba atau rugi	Rp	469.200.000,00	-
Laba yang ditahan -			Rp 469.200.000,00

7. Barang yang tersedia dijual tahun 2007 baik di kantor pusat Surabaya maupun di kantor cabang Malang adalah sebagai berikut:

Persediaan 1 Januari 2007	Rp	362.000.000,00
Pembelian	Rp	1.263.200.000,00
Barang tersedia dijual	Rp	1.625.200.000,00

8. Pos-pos timbal balik (*reciprocal*) yang harus dieleminasi dalam penyusunan laporan keuangan gabungan adalah sebagai berikut:

- Kantor cabang
- Kantor pusat
- Pengiriman barang ke kantor cabang
- Pengiriman barang dari kantor pusat

9. Beban pokok penjualan gabungan antara kantor pusat Surabaya dan kantor cabang Malang adalah sebagai berikut:

Beban pokok penjualan kantor pusat Surabaya	Rp	802.000.000,00
Beban pokok penjualan Kantor cabang Malang	Rp	<u>343.200.000,00</u>
Beban pokok penjualan gabungan	Rp	1.145.200.000,00

10. Jumlah saldo laba yang ditahan pada tanggal 31 Desember 2007 adalah sebagai berikut:

Laba yang ditahan 1 Januari 2007	Rp	100.000.000,00
Laba yang diperoleh selama tahun 2007	Rp	<u>496.200.000,00</u>
Laba yang ditahan 31 Desember 2007	Rp	596.200.000,00

BAB 9



MASALAH-MASALAH KHUSUS antara KANTOR PUSAT dan KANTOR CABANG

- ☺ Akuntansi Kantor Agen
- ☺ Akuntansi Kantor Cabang
- ☺ Metode Pencatatan Persediaan
- ☺ Laporan Keuangan Konsolidasi
 - ☺ Contoh Transaksi

MASALAH-MASALAH KHUSUS ANTARA KANTOR PUSAT DAN KANTOR CABANG



Masalah-masalah khusus antara kantor pusat dan kantor cabang yaitu:

1. Pengiriman barang dagangan ke kantor cabang di nota di atas harga pokok
2. Pengiriman uang atau barang dagangan antar cabang.

PENGIRIMAN BARANG DAGANGAN KE KANTOR CABANG DENGAN NOTA DI ATAS HARGA POKOK

Kantor pusat dalam mengirim barang dagangan ke kantor cabang sering terjadi harga yang tertera di nota lebih besar dari harga pokok. Dalam hal ini kantor cabang tidak mengetahui kalau harga di nota adalah lebih besar dari harga pokok. Jadi saat kantor cabang menerima barang dagangan di kantor pusat, kantor cabang mencatat penerimaan barang

dagangan kantor cabang sebesar harga nota. Sedangkan kantor pusat mencatat pengiriman barang ke kantor cabang sebesar harga pokoknya. Selisih harga nota dengan harga pokok dicatat sebagai cadangan kelebihan harga. Sehingga kantor cabang kalau menjual barang dagangan yang dari kantor pusat pasti dengan harga jual di atas harga yang tertera di nota. Tujuan kantor pusat membuat harga di nota lebih besar dari harga pokok adalah untuk mengantisipasi supaya laba yang diperoleh tidak terlalu rendah.

Contoh 1:

Kantor pusat mengirim barang dagangan yang harga pokoknya Rp1.000.000,00 ke kantor cabang. Kantor pusat mencatat harga nota 25% di atas harga pokok. Jurnal yang dibuat oleh kantor pusat dan kantor cabang adalah sebagai berikut:

Kantor pusat		Kantor cabang	
KC	Rp1.250.000,00	Pengiriman brg dr KP	Rp1.250.000,00
Pengiriman barang ke KC	Rp 1.000.000	KP	Rp 1.250.000,00
Cadangan kelebihan harga	Rp 250.000		

Contoh 2:

Kantor pusat mengirim barang dagang ke Kantor Cabang dengan harga pokok Rp 1.000.000,00 di nota 30% di atas harga pokok. Pada akhir tahun diperoleh data dari kantor cabang sebagai berikut:

- o Penjualan Rp 1.400.000,00
- o Biaya Rp 50.000,00
- o Persediaan akhir Rp 130.000,00

Jurnal yang dibuat kantor cabang dan kantor pusat sebagai berikut:

Keterangan	Kantor Pusat (dlm Rp000,00)	Kantor Cabang (dml Rp000,00)
Saat pengiriman barang ke KC	KC 1.300 Peng brg ke KC 1.000 Cad kelebihan harga 300	Pengiriman dr KP 1.000 KP 1.000
31 Desember 200x (Jurnal Penutup)	KC 180 Laba KC 180	Penjualan 1.400 Persed akhir 130 Pengiriman dr KP 1.300 Biaya-biaya 50 KP 180
Cadangan kelebihan harga yg melekat di persd Akhir: $\frac{30}{30} \times \text{Rp } 130.000$ = Rp 30.000,00 Barang dagang yg terjual Rp 300.000 - Rp30.000= Rp 270.000	Cad kelebihan hrg 270 Laba KC 270 Laba KC 450 L/R 450	

Apabila dibuat perhitungan laba/rugi oleh kantor pusat adalah sebagai berikut:

Penjualan		Rp 1.400.000,00
Pengiriman brg dg ke KC	Rp 1.000.000,00	
Persediaan akhir	<u>(Rp 1.000.000,00)</u>	
		<u>(Rp 900.000,00)</u>
Laba kotor		Rp 500.000,00
Biaya		<u>(Rp 50.000,00)</u>
Laba KC		Rp 450.000,00

Contoh 3:

Pada tanggal 1 Juni 2007 kantor pusat mengirim barang dagangan dengan harga pokok Rp 1.000.000,00 ke kantor cabang. Harga nota 25% di atas harga pokok. Biaya pengiriman ke kantor cabang Rp 50.000,00. 1 November 2007 kantor cabang mengembalikan 30% barang dagang yang diterima dari kantor pusat. Dalam pengembalian ini kantor cabang mengeluarkan biaya pengiriman ke kantor pusat Rp 30.000,00.

Jurnal yang harus dibuat oleh kantor pusat dan kantor cabang adalah sebagai berikut:

Keterangan	Kantor Pusat (dlm Rp000,00)	Kantor Cabang (dlm Rp000,00)
1 Juni 2007 Pengiriman dari KP ke KC	KC 1.300 Peng brg ke KC 1.000 Cad kelebihan harga 250 Kas 50	Pengiriman dr KP 1.250 Bi. Pengir dr KP 1.000 KP 1.300
1 November 2007 Pengembalian barang dg dr KC ke KP 30% \times Rp1.000.000,00=Rp300.000,00 30% \times Rp250.000,00=Rp75.000,00 30% \times Rp1.250.000,00=Rp375.000 30% \times Rp50.000,00=Rp15.000,00	Pengiriman ke KC 300 Cad kelebihan hrg 75 Rugi kelebihan hrg 45 KC 420	KP 420 Pengiriman dr KP 375 Bi. Pengiriman 15 Kas 30

Keterangan:

Rugi kelebihan biaya kirim Rp 45.000,000 sebenarnya adalah biaya kirim barang seharga 30% \times Rp 1.000.000,00 = Rp 300.000,00 yang dikirim dari KP ke KC dan dikembalikan lagi dari KC ke KP. Biaya kirim ke KC 30% \times Rp 50.000,00 – Rp 15.000,00 ditambah biaya kirim ke KP Rp 30.000,00.

PENGIRIMAN UANG ATAU BARANG DAGANGAN ANTAR KANTOR CABANG

Apabila kantor pusat mempunyai beberapa kantor cabang ada kemungkinan terjadi transfer uang atau barang dagang antar kantor cabang. Transfer antar kantor cabang terjadi mungkin kantor cabang yang satu mempunyai kelebihan uang transfer antar kantor cabang tersebut harus atas perintah atau sepengetahuan kantor pusat. Sehingga bila ada transfer antar kantor cabang baik kantor pusat maupun kantor cabang pengirim dan kantor cabang penerima harus membuat catatan. Jadi dalam catatan kantor cabang pusat bisa terlihat bahwa uang atau barangnya telah berpindah dari kantor cabang yang satu ke kantor cabang yang lain.

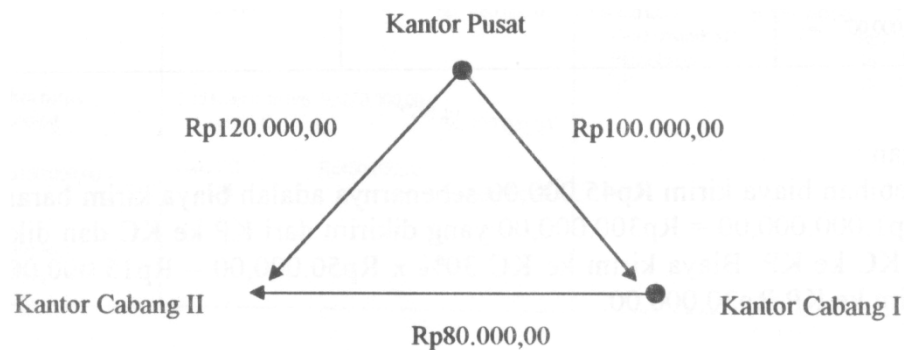
Apabila uang transfer uang atau barang dagangan antar cabang memerlukan ongkos angkut, biasanya terjaga rugi akibat kelebihan biaya kirim.

Misal:

Kantor pusat memiliki 2 (dua) kantor cabang. Kantor pusat mengkritik barang dagangan ke kantor cabang I dengan biaya kirim ke kantor

cabang I Rp 100.000,00. Kemudian ternyata barang dagangan yang ada di kantor cabang I harus ditransfer ke kantor cabang II. Dalam pengiriman ini kantor cabang I mengeluarkan biaya kirim ke kantor cabang II Rp 80.000,00. Sebenarnya apabila barang dagangan tersebut dikirim langsung dari kantor pusat ke kantor cabang II biaya kirim yang diperlukan hanya Rp 120.000,00.

Dari contoh tersebut terlihat bahwa total biaya kirim barang dagangan dari kantor pusat ke kantor cabang II adalah sebesar Rp 100.000,00 + Rp 80.000,00 = Rp 180.000,00. Apabila barang dagangan tersebut dikirim langsung dari kantor pusat ke kantor cabang II hanya memerlukan biaya kirim Rp 120.000,00. Sehingga terdapat selisih biaya kirim Rp 180.000,00-Rp 120.000,00=Rp 60.000,00. Apabila digambarkan sebagai berikut:



Contoh 4:

Pada tanggal 1 Februari 2007 kantor pusat mengirim uang sebesar Rp 50.000.000,00 ke kantor cabang I. 1 Juli 2007 kantor pusat memerintahkan kantor cabang I agar mentransfer uang sebesar Rp 20.000.000,00 ke kantor cabang II. Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

Tgl	KP (dlm Rp000,00)	KC I (dlm Rp000,00)	KC II (dlm Rp000,00)
1 Feb	KC I 50.000	Kas 50.000	
	Kas 50.000	KP 50.000	
1 Juli	KC II 20.000	KP 20.000	Kas 20.000
	KC I 20.000	Kas 20.000	KP 20.000

Contoh 5:

1 Februari 2007 kantor pusat mengirim barang dagang seharga Rp 30.000.000,00 ke kantor cabang I. Biaya kirim barang dagangan dari kantor pusat ke kantor cabang I Rp 400.000,00.

1 Juli 2007 kantor pusat memerintahkan kantor cabang I agar mengirimkan barang dagangan yang diterima dari kantor pusat seharga Rp 10.000.000,00 ke kantor cabang II. Kantor cabang I mengeluarkan biaya kirim ke kantor cabang II sebesar Rp 150.000,00. Apabila kantor pusat mengirim langsung barang dagangan tersebut ke kantor cabang II kantor pusat memerlukan biaya kirim Rp 250.000,00.

Jurnal yang dibuat sebagai berikut:

Tgl	KP (dlm Rp000,00)	KC I (dlm Rp000,00)	KC II (dlm Rp000,00)
1 Feb	KC I 30.400 Peng brg ke KCI 30.000 Kas 400	Peng brg dr KP 30.000 Bi. Kirim 400 KP 30.400	
1 Juli	Peng brg ke KCI 10.000 Peng brg ke KCII 20.000		
	KC II 10.250 Selisih Bi kirim 33,33 KC I 10.283,33	KP 10.283,33 Peng. Brg dr KP 10.000 Bi. Kirim 133,33 Kas 150.000	Peng. dr. KP 10.000 Bi.Kirim 250 KP 10.250

Keterangan:

- $\frac{Rp10.000.000}{Rp30.000.000} \times Rp 400.000,00 = Rp 133.333,00$
- Biaya kirim apabila dikirim langsung dari KP ke KC II
- $(\text{Biaya kirim dari KP ke KC I} + \text{dari KC I ke KC II}) - \text{dari KP ke KC II}$
 $(Rp 133.333,00 + Rp150.000,00) - Rp250.000,00 = Rp33.333,00$

SOAL DAN PENYELESAIAN**Soal**

PT Abadi mempunyai 2 (dua) kantor cabang, yang diberi namun kantor cabang I dan kantor cabang II. Berikut ini adalah transaksi-transaksi baik yang terdapat di kantor pusat, kantor cabang I maupun di kantor cabang II:

- a. Pengiriman barang dagangan ke ktnc I dengan harga pokok Rp 540.000,00 dan ke kantor cabang II dengan harga pokok Rp 650.000.000,00. PT Abadi menetapkan kebijakan bahwa harga nota 110% dari harga pokok.
- b. Biaya pengiriman barang dagangan ke kantor cabang I ditetapkan sebesar 7,5% dari harga nota. Sedangkan biaya pengiriman barang dagangan ke kantor cabang II ditetapkan sebesar 7% dari harga nota.
- c. Kantor pusat memerintahkan kantor cabang I untuk mengirimkan uang sebesar Rp 750. 000,00 kepada kantor cabang II
- d. Kantor pusat memerintahkan kantor cabang II untuk mengirim barang dagangan ke kantor cabang I sebesar Rp 6.820.000,00. Kantor cabang II mengeluarkan biaya kirim ke kantor cabang I sebesar Rp 35.000,00.

Diminta:

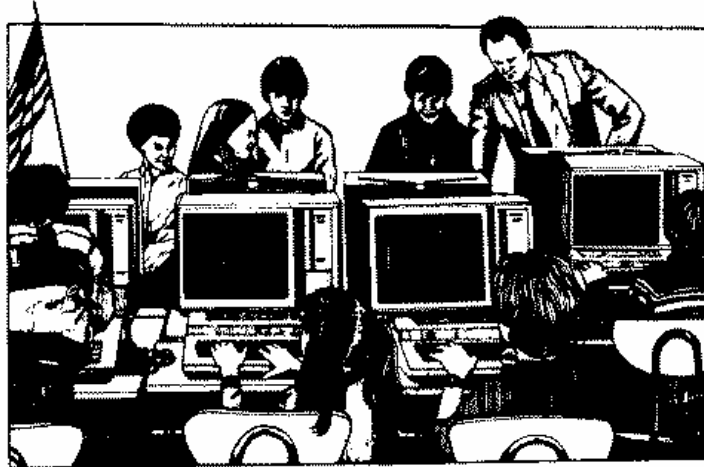
Buat jurnal yang diperlukan baik di kantor pusat, kantor cabang I maupun di kantor cabang II.

Jawab:

Jurnal yang dibuat baik di kantor pusat, kantor cabang I maupun kantor cabang II adalah sebagai berikut:

Keterangan	Kantor Pusat		Kantor Cabang		Kantor Cabang II	
Pengiriman brg dagangan dari Kantor Pusat	KC I	Rp594.000.000,00 -	Peng. Brg dr KP	Rp 594.000.000,00 -	Peng brg dr KP	Rp 715.000.000,00 -
	KC II	Rp715.000.000,00 -	KP	- Rp594.000.000,00	KP	- Rp715.000.000,00
	Cad. Kenaikan	- Rp119.000.000,00				
	Peng. Brg ke KC I	- Rp540.000.000,00				
	Peng. Brg ke KC II	- Rp650.000.000,00				
Biaya pengiriman ke Kantor Kantor Cabang	KC I	Rp 4.455.000,00 -	Biaya kirim	Rp 4.455.000,00 -	Biaya kirim	Rp 505.000,00 -
	KC II	Rp 5.005.000,00 -	KP	- Rp4.455.000,00	KP	- Rp 505.000,00
	Kas	- Rp 9.960.000,00				
KP memerintahkan KC I untuk mengirimkan uang sebesar Rp 750 juta ke KC II	KC II	Rp 750.000,00 -	KP	Rp 750.000,00 -	Kas	Rp 750.000,00 -
	KC I	- Rp 750.000,00	Kas	- Rp	KP	- Rp 750.000,00
KP memerintahkan KC II untuk mengirimkan barang dagangan ke KC I sebesar Rp 6.820.000,00. Biaya kirim dari KC II ke KC I sebesar Rp 35.000,00	KC I	Rp6.871.150,00 -	Pen. Brg dr KP	Rp 6.820.000,00	KP	Rp6.902.740,00 -
	Klbn bi. Kir.	Rp 31.590,00	Bi. kirim	Rp 51.150,00	Pen. brg dr KP	- Rp 6.820.000,00
	KC II	- Rp 6.902.740,00	KP	- Rp 6	Kas	- Rp 35.000,00
	Peng brg ke KC II	Rp 6.200.000,00 -			Bi kirim	- Rp 47.740,00
	Peng. Brg ke KC I	- Rp 6.200.000,00				

BAB 10



HUBUNGAN KANTOR PUSAT dan KANTOR CABANG di LUAR NEGERI

- ☺ Pengertian
- ☺ Penjabaran ke Dalam Mata Uang yang Dipakai Kantor Pusat
 - ☺ Penyusunan Laporan Keuangan Gabungan
 - ☺ Contoh Transaksi

HUBUNGAN KANTOR PUSAT DAN KANTOR CABANG DI LUAR NEGERI



PENGERTIAN

Perusahaan yang sudah maju ada yang mempunyai kantor cabang diluar negeri. Dalam hal ini laporan konsolidasi harus berdasarkan mata uang negara tempat kantor pusat berada. Jadi laporan keuangan kantor cabang terlebih dahulu harus dijabarkan ke dalam mata uang yang dipakai kantor pusat.

Ketentuan-ketentuan umum untuk menjabarkan rekening-rekening mata uang asing ke dalam rupiah di Indonesia telah diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK), seperti tertera pada PSAK No. 11 Penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing, yang isinya sebagai berikut: “.....untuk memasukkan kegiatan luar negeri pada laporan keuangan suatu perusahaan, laporan keuangan kegiatan usaha luar negeri harus dijabarkan kedalam mata uang pelaporan perusahaan.”

PENJABARAN KE DALAM MATA UANG YANG DIPAKAI KANTOR PUSAT

Penjelasan lebih lanjut dari PSAK. No. 11 di atas terdapat dalam paragraf no. 09 yang isinya sebagai berikut, pada setiap tanggal neraca:

1. Pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan kedalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tanggal neraca. Apabila terdapat kesulitan dalam menentukan kurs tanggal neraca, maka dapat digunakan kurs yang ditetapkan Bank Indonesia sebagai indicator yang objektif.
2. Pos non moneter tidak boleh dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal neraca tetapi tetap harus dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal transaksi.
3. Pos non meneter yang dinilai dengan wajar dalam mata uang asing harus dilaporkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat ini tersebut ditentukan.

TAHAP-TAHAP DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN GABUNGAN

Tahap-tahap dalam menyusun laporan keuangan gabungan antara kantor pusat dan kantor cabang di luar negeri adalah sebagai berikut:

1. Atas dasar laporan keuangan kantor cabang terlebih dahulu harus diadakan penjabaran terhadap saldo rekening-rekening pembukuan kantor cabang menjadi saldo-saldo yang dinyatakan dalam mata uang dalam negeri yang dipakai kantor pusat
2. Proses penjabaran terhadap saldo rekening kantor cabang sebaiknya dimulai dengan mengambil dari angka yang terdapat pada neraca saldo (*trial balance*) yang dipakai sebagai dasar penyusunan neraca lajur (*worksheet kantor cabang*)
3. Apabila hasil penjabaran terhadap saldo rekening secara keseluruhan tidak seimbang (antar jumlah debit dan kredit sama) maka selisihnya ditampung dalam rekening penyesuaian kurs (*exchange adjustment*). Saldo selisih penyesuaian kurs, tersebut diperhitungkan sebagai laba atau rugi penyesuaian kurs

4. Sesudah proses penjabaran terhadap saldo rekening pembukuan kantor cabang selesai kemudian menyusun daftar lajur gabungan (*working papers*)
5. Berdasar *working paper* tersebut baru disusun neraca dan laporan laba rugi gabungan antar kantor pusat dan kantor cabang

Contoh 1:

Berikut ini adalah 'Neraca Saldo, per 31 Desember 2007 dari Brilliant LTD yang berkantor pusat di Jakarta dan cabangnya di New York.

Rekening-Rekening	KP (Dalam Rupiah)		KC (Dalam Dollar)	
	Debit	Kredit	Debit	Kredit
Kas	10.000.000	-	2.000	-
Piutang Dagang	150.000.000	-	4.000	-
Kantor Cabang New York	120.000.000	-	-	-
Persediaan 31-12-2006	110.000.000	-	-	-
Biaya yang dibayar dimuka	1.000.000	-	500	-
Perlengkapan kantor	10.000.000	-	3.000	-
Ak. Penyusutan perlengkapan	-	5.000.000	-	2.000
Gudang	435.000.000	-	11.000	-
Ak. Penyusutan Gedung	-	100.000.000	-	3.000
Utang dagang	-	193.000.000	-	10.500
Modal saham	-	500.000.000	-	-
Laba yang ditahan	-	130.000.000	-	-
Kantor Pusat Jakarta	-	-	-	12.000
Penjualan	-	335.000.000	-	10.500
Pengiriman barang-barang ke KC	-	140.000.000	-	-
Pembelian	450.000.000	-	-	-
Pengiriman barang-barang dari KP	-	-	10.000	-
Biaya penjualan	12.000.000	-	3.000	-
Biaya administrasi & umum	15.000.000	-	4.000	-
	1.403.000.000	1.403.000.000	37.500	37.500
Persediaan 31-12-2001	170.000.000	-	1.670	

Tingkat kurs dollar yang berlaku selama tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- 31-12-2007 atau tanggal neraca Rp 9.800,00 (C)
- Rata-rata tahunan Rp 9.700,00 (A)
- *Historical* Rp 9.700,00 (H)

Berdasar daftar kurs di atas, maka neraca saldo Kantor Cabang New York dapat dijabarkan dalam rupiah sebagaimana ditampilkan pada halaman berikut:

Brilliant LTD
CABANG NEW YORK, USA
Neraca Saldo yang Dijabarkan Dalam Rupiah
Per 31 Desember 2007

Rekening-Rekening	Neraca Saldo (\$)		Kurs Penjabaran	Neraca Saldo (Rp)	
	Debit	Kredit		Debit	Kredit
Kas	2.000		9.800 (C)	19.600.000	
Piutang Dagang	4.000		9.800 (C)	39.200.000	
Biaya dibayar dimuka	500		9.800 (C)	4.900.000	
Peralatan kantor	3.000		9.700 (H)	29.100.000	
Ak. Penystn perlt n ktr		2.000	9.700 (H)		19.400.000
Gudang	11.000		9.700 (H)	106.700.000	
Ak. Penystn Gedung		3.000	9.700 (H)		29.100.000
Utang dagang		10.500	9.800 (C)		102.900.000
Kantor Pusat Jakarta		12.000	120.000.000(R)		120.000.000
Penjualan		10.000	9.700 (A)		97.000.000
Pengiriman brg-2 dari KP	10.000		140.000.000(R)	140.000.000	
Biaya penjualan	3.000		9.700 (A)	29.100.000	
Biaya adm. & umum	4.000		9.700 (A)	38.800.000	
Sls h penyesuain kurs			9.700 (H)		
Persd. 31-12-2007					
	37.500	37.500		407.400.000	368.400.000
Selisih penyesuaian kurs					39.000.000
				407.400.000	407.400.000
Persediaan 31-12-2007	1.670	1.670	9.700 (H)	16.199.000	16.199.000

Keterangan:

(C) = *Current rate* atau kurs pada saat tanggal neraca

(H) = *Historical cost* atau kurs pada saat terjadinya transaksi

(R) = *Reciprocal account* atau jumlah (nilai) rekening timbal balik, harus sesuai dengan saldo rekening-rekening reciprocal di kantor pusat

(A) = *Average rate* atau kurs rata-rata selama satu periode

Setelah neraca saldo Kantor Cabang New York dijabarkan ke dalam rupiah, maka dapat disusun neraca lajur untuk menyusun laporan keuangan gabungan sebagai berikut:

Brilliant LTD.
DAFTAR LAJUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN GABUNGAN
KANTOR PUSAT JAKARTA DAN CABANG NEW YORK

Rekening	Kantor Pst (dlm Rp000,00)	Kantor Cbg (dlm Rp000,00)	Eliminasi (dlm Rp000,00)		Laba/Rugi (dlm Rp000,00)		Saldo laba (dlm Rp000,00)		N e r a c a (dlm Rp000,00)	
			Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit
Debit										
Kas	100.000	19.600							119.600	
Piutang dagang	150.000	39.200							189.200	
Kantor cabang New York	120.000			120.000						
Persediaan barang 31-12-2006	110.000				110.000					
Biaya dibayar dimuka	1.000	4.900							5.900	
Perlengkapan kantor	10.000	29.100							39.100	
Gedung	435.000	106.700							541.700.	
Pembelian	450.000				450.000					
Pembelian barang-barang dari KP		140.000		140.000						
Biaya penjualan	12.000	29.100			41.100					
Biaya administrasi dan umum	15.000	38.800			53.800					
	1.403.000	407.400								
Persediaan barang 31-12-2007 (Neraca)	170.000	16.199							186.199	
Kredit										
Akumulasi penyusutan perlengkapan kantor	5.000	19.400								24.400
Akumulasi penyusutan gedung	100.000	29.100								129.100
Utang dagang	193.000	102.900								295.900
Modal saham	500.000		120.000							
Laba yang ditahan	130.000							130.000		
Kantor Pusat Jakarta		120.000	140.000							
Penjualan	335.000	97.000				432.000				
Pengiriman barang-barang ke KC	140.000									
Selisih penyesuaian kurs		39.000				39.000				
	1.403.000	407.400								
Persediaan barang 31-12-2007 (Lap. L/R)	170.000	16.199				166.199				
			260.000	260.000						
					2.299			2.299		
Laba bersih ke laba yang ditahan					657.199	657.199				
Saldo laba yang ditahan ke Neraca							132.299			132.299
							132.299	132.299	1.081.699	1.081.699

Setelah dibuat neraca lajur, maka dapat disusun laporan keuangan gabungan sebagai berikut:

Brilliant Ltd Perhitungan Laba/Rugi Gabungan Kantor Pusat dan Cabang Per 31 Desember 2007 (dalam ribuan rupiah)			
Penjualan			432.000
Beban pokok penjualan			
Persediaan barang 1 Januari 2007	110.000		
Pembelian	450.000		
	<u>550.000</u>		
Persediaan barang 31 Desember 2007	186.199		
			<u>(94.900)</u>
			68.199
Biaya penjualan	41.100		
Biaya administrasi dan umum	53.800		
	<u></u>		<u>94.900</u>
Laba (rugi) bersih			(26.701)
Selisih penyesuaian kurs			<u>39.000</u>
Laba bersih			<u>12.299</u>

Brilliant Ltd Perhitungan Laba/Rugi Gabungan Kantor Pusat dan Cabang Per 31 Desember 2007 (dln Rp 000,00)			
Kas	119.600	Utang dagang	295.900
Piutang dagang	189.200	Modal saham	500.000
Persediaan barang	186.199	Laba yang Ditahan	132.299
Biaya dibayar di muka	5.900		
Perlengkapan kantor	39.100		
Ak. Penyusutan	<u>24.400</u>		
	14.700		
Gedung	541.700		
Ak. Penyusutan	<u>129.100</u>		
	412.600		
	<u>928.199</u>		<u>928.199</u>

Aspek Perpajakan

Berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh dari cabang di luar negeri, maka jenis pajak yang terkait dengannya adalah PPh pasal 24. Yaitu sebuah “fasilitas” dari pemerintah agar setiap wajib pajak yang penghasilannya telah dikenakan pajak di luar negeri, ketika penghasilan tersebut dibawa pulang ke Indonesia, dapat mengkreditkan (mengurangkan kepada pajak yang terutang di akhir tahun) pajak yang telah dipotong di luar negeri tersebut.

Pengkreditan PPh yang dibayar di Luar Negeri (PPh Pasal 24) dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia. Jumlah PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan maksimum sebesar jumlah yang **lebih rendah** (*Ordinary Credit Method*) di antara **PPh yang dibayar atau terutang di Luar Negeri** dan jumlah yang dihitung menurut **perbandingan antara penghasilan dari luar negeri dengan seluruh Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan PPh yang terutang pada tahun berjalan**, atau maksimum sebesar PPh yang terutang atas seluruh Penghasilan Kena Pajak dalam hal di dalam negeri mengalami kerugian (Penghasilan dari LN lebih besar dari jumlah Penghasilan Kena Pajak). *Penghasilan Kena Pajak tersebut tidak termasuk penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final.*

Dengan demikian, perhitungan PPh pasal 24 dilakukan dengan membandingkan dua angka berikut ini (membandingkan antara angka di huruf a dengan angka dari huruf b). Mana yang lebih kecil, itulah yang menjadi kredit pajak atau PPh pasal 24.

a. Pajak yang telah dipotong di LN

b. $\frac{\text{Penghasilan LN}}{\text{Total Penghasilan}} \times \text{Jumlah PPh Terutang}$
(Tarif PPh pasal 17)

Apabila penghasilan dari luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan PPh Pasal 24 dilakukan untuk masing-masing Negara (*Per Country Limitation*). Dalam hal jumlah PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri melebihi PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan, kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan di tahun

berikutnya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan tidak dapat direstitusi. Untuk lebih detilnya perlakuan perpajakan ini sebaiknya Anda merujuk pada buku “Perpajakan untuk SMK” yang ditulis oleh Drs. Agus Sambodo, SH, MSA, BKP. Berikut ini disajikan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan kredit pajak luar negeri.

Jurnal saat terkena pajak di luar negeri:

Uang Muka PPh pasal 24	xxxxx	
Kas ^{*)}		xxxxx

**) Untuk penyederhanaan diasumsikan bahwa pajak di luar negeri dibayar dari kas kantor pusat di Indonesia. Jika pajak dibayar dari kas di kantor cabang luar negeri dan dilakukan pelaporan konsolidasi antara laporan keuangan kantor pusat dan kantor cabang di luar negeri, maka yang dikredit adalah perkiraan eliminasinya seperti contoh di atas.*

Jurnal saat membayar/dipotong/dipungut pajak di dalam negeri:

Uang Muka PPh ps 22	xxxxx	
Uang Muka PPh ps 23	xxxxx	
Uang Muka PPh ps 25	xxxxx	
Kas		xxxxx

Jurnal di akhir tahun untuk mengakui pajak terutang yang dihitung dari laba fiskal :

Beban Pajak Kini ^{*)}	xxxxx	
Utang PPh Badan		xxxxx

**) Beban Pajak Kini adalah perkiraan untuk mencatat/menyajikan besarnya pajak terutang yang dilaporkan dalam SPT tahunan tahun berjalan, untuk membedakan dengan Beban (Penghasilan) Pajak Tangguhan; sesuai dengan penerapan yang diwajibkan berdasarkan standar akuntansi (PSAK) No. 46 tentang akuntansi pajak penghasilan yang wajib diterapkan bagi semua perusahaan sejak tahun 2001.*

Jurnal offset kredit pajak di dalam negeri dan luar negeri:

Utang PPh Badan	xxxxx
Kerugian Pajak LN	xxxxx *)
Uang Muka PPh ps 22	xxxxx
Uang Muka PPh ps 23	xxxxx
Uang Muka PPh ps 24	xxxxx
Uang Muka PPh ps 25	xxxxx
Utang PPh 29	xxxxx

*) *Kerugian Pajak Luar Negeri adalah perkiraan yang dibentuk untuk mencatat/menyajikan besarnya Uang Muka PPh pasal 24 (pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri) yang lebih besar dan berdasarkan perhitungan tidak dapat dikreditkan di Indonesia karena melebihi batas maksimum yang boleh dikreditkan. Selisih pajak yang tidak dapat dikreditkan ini menurut akuntansi disajikan di Laporan Laba Rugi pada tahun berjalan sebagai beban, namun beban ini tidak diakui menurut fiskal sehingga harus dilakukan koreksi fiskal ketika menghitung penghasilan kena pajak di akhir tahun.*

Soal dan Penyelesaian

Soal

PT. Angkasa yang berkantor pusat di Yogyakarta mempunyai cabang di Las Vegas USA. Berikut ini adalah neraca saldo kantor cabang di Las Vegas per 31 Desember 2007:

Kas	\$ 10,000,000
Persediaan	\$ 40,000,000
Aktiva tetap	\$ 50,000,000
Utang lancar	\$ 10,000,000
Pendapatan	\$ 60,000,000
Biaya	\$ 60,000,000
Utang jangka panjang	\$ 40,000,000

Diketahui informasi sebagai berikut:

Kurs per 31 Desember 2007 \$ 1 = Rp 10,00
Kurs rata-rata tahun 2007 \$ 1 = Rp 9,00

Kurs historis:

Persediaan = Rp 9,00
 Aktiva tetap = Rp 7,00
 Utang jangka panjang = Rp 6,00
 Modal = Rp 7,00

Diminta:

Buat neraca saldo di atas ke dalam mata uang Rupiah

Penyelesaian

Penjabaran ke dalam mata uang rupiah sebagai berikut:

Keterangan	Debit	Kredit	Kurs	Debit	Kredit
	(\$)	(\$)	Penjabaran	(Rp)	(Rp)
Kas	10,000,000		Rp 10,00	100.000.000	
Persediaan	40,000,000		Rp 10,00	400.000.000	
Aktiva tetap	50,000,000		Rp 7,00	350.000.000	
Utang Incr		10,000,000	Rp 10,00		100.000.000
Utang jk Pjg		40,000,000	Rp 6,00		240.000.000
Modal		30,000,000	Rp 7,00		210.000.000
Pendapatan		60,000,000	Rp 9,00		540.000.000
Biaya	40,000,000		Rp 9,00	360.000.000	
				1.210.000.000	1.090.00.000
Selisih peny. Kurs					120.000.000
					1.210.000.000

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

Penutup

Berdasarkan pembahasan di depan, juga dari pengalaman praktik penulis pada DU/DI, salah satu simpulan yang dapat diambil adalah bahwa, pada dasarnya antara perpajakan dan akuntansi saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sayangnya, pada umumnya, pembelajaran perpajakan dan akuntansi di SMK masing-masing berjalan sendiri. Seharusnya antara guru pajak dan guru akuntansi harus memahami kedua ilmu tersebut. Namun harus jujur diakui memang, bahwa problem tersebut tidak hanya ditemui dalam proses pembelajaran di SMK saja. Pada banyak perguruan tinggi problem serupa pun ditemui. Pengajar matakuliah akuntansi tidak atau kurang memahami perpajakan dan sebaliknya pengajar matakuliah perpajakan tidak atau kurang memahami akuntansi karena mungkin mereka berlatar belakang praktisi perpajakan dari Direktorat Jendral Pajak yang sedikit berinteraksi dengan akuntansi.

Sebagai sebuah institusi pendidikan yang tujuannya menghasilkan lulusan yang siap kerja, maka guru dan staf pengajar akuntansi hendaknya memahami dan dapat saling mengaitkan kedua matapelajaran tersebut. Karena kondisi itulah yang akan ditemui ketika lulusan SMK memasuki dunia kerja nyata di bidang akuntansi pada DU/DI, misalnya sebagai pemegang buku pada suatu perusahaan, atau ketika memiliki usaha sendiri dan harus membuat laporan keuangan.

Buku ini mungkin tidak membahas secara lengkap aspek perpajakan yang dikaitkan dengan akuntansinya di setiap bab di depan. Oleh karena itu amat disarankan bagi pengguna buku ini untuk juga merujuk pada buku "Perpajakan untuk SMK" karena dalam buku tersebut, sebaliknya, pembahasan perpajakan dilengkapi dengan perlakuan akuntansi dan pengaruh pajak dalam Laporan Keuangan beserta contoh pengisian SPT Tahunannya.

Bidang akuntansi, sebagaimana peraturan perpajakan, senantiasa berubah dan berkembang. Penulis menyadari hal ini akan berpengaruh terhadap isi buku ini secara keseluruhan atau sebagian menjadi kurang *up to date*. Oleh karena itu, sekali lagi, kami mohon para pembaca untuk ikut serta memberikan masukan serta meng-*up date*-nya demi penyempurnaan buku ini, demi kemajuan peserta didik kita bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M Faisal 2005. *Manajemen Perbankan: Teknik Analisis Kinerja Keuangan Bank*. Malang: UMM Press.
- Anonim.1991. *Keputusan Menteri Keuangan* No. 1169/KMK.01/1991.
- Anonim. 2000. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Citra Umbara.
- Anonim. 2000. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Jakarta: Citra Umbara.
- Anwari, Achmad. 1997. *Leasing Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Beams, Floyd A. dan Amir Abadi Jusuf. 2000. *Akuntansi Keuangan Lanjutan di Indonesia*. Jakarta Salemba Empat
- Bank Indonesia, 2001 *Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia 2001* Jakarta, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
- Baridwan, Zaki. 2004. *Intermediate Accounting (Edisi 8)*. Yogyakarta: BPFE.
- Brotowidjojo, D., Mukayat. 1991. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karangan Ilmiah*. Yogyakarta: Liberty.
- Drebin, Allan R 1989. *Advanced Accounting* . Jakarta, diedarkan oleh Binarupa Aksara
- Edwards, James Don, dan Homer A. Black, 1979. *The Managerial and Cost Accountant's Handbook*. Dow Jones Irwin Homewood Illinois.
- Hammer, Lawrence H., William K. Carter dan Milton F. Usry. 1993. *Cost Accounting*, Cincinnati, Ohio: South-Western College Publishing.
- Hansen, Don R. dan Maryanne M. Mowen 1995. *Cost Management: Accounting and Control*, Cincinnati, Ohio: South-Western College Publishing.
- Horngren, Charles T. dan George Foster. 1994. *Cost Accounting: A Managerial Emphasis*. New Jersey : Prentice Hall.
- Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntan Publik. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia* No. KEP-122/MK/IV/2/1974,

No. 32/M/SK/2/1974, dan No. 30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974.

- Kieso, E., Donald, Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warfield. 2004. *International Edition: Intermediate Accounting*. Eleventh Edition. John Wiley & Sons.
- Rayburn, Gale. 1999. *Akuntansi Biaya: dengan menggunakan Pendekatan Manajemen Biaya, Edisi Keenam Jilid 1* Erlangga Jakarta.
- Ropke, Jochen. 2003. *Ekonomi Koperasi: Teori dan Manajemen*. diterjemahkan Sri Djatnika. Jakarta, Salemba Empat
- Soekadi, Eddy P. 1990. *Mekanisme Leasing*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suparwoto.L.1997. *Akuntansi Keuangan Lanjutan*. Yogyakarta BPFE-YOGYAKARTA
- Syarief, Agus. 2003. *Akuntansi Sekolah Menengah Umum* Bandung. CV REGINA
- Taswan. 2005. *Akuntansi Perbankan Transaksi dalam Valuta Rupiah*. Yogyakarta. UPP AMP YKPN
- Thacker, Ronald J. 1987. *Accounting Principles. Second Edition*. New York: Mc. Graw Hill. Inc.
- Weygandt, Jerry J., Donald E. Kieso, dan Walter G. Kell. 1996. *Accounting Principles*. 4th Edition. John Wiley & Sons.
- Widjaya, T., Amin & Djohan, T., Arif. 1997. *Akuntansi Leasing*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Yendrawati, Reni. 2003. *Akuntansi Keuangan Lanjutan I*, Yogyakarta, EKONISIA

ISBN 978-602-8320-08-5
ISBN 978-602-8320-10-8

Buku ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2007 tanggal 5 Desember 2007 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran.

HET (Harga Eceran Tertinggi) Rp. 27,874,00